



# LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI DKI JAKARTA

FEBRUARI 2026



Lokasi: Pelabuhan Tanjung Priok

# LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI DKI JAKARTA

---

Februari 2026

Kantor Perwakilan Bank Indonesia  
Provinsi DKI Jakarta

# Visi, Misi & Nilai Strategis Bank Indonesia

## Visi

“Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara *emerging markets* untuk Indonesia Maju”

## Misi

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang andal, serta peran internasional yang proaktif.

## Nilai-nilai Strategis Organisasi

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah :



Kejujuran dan integritas  
(*trust and integrity*)



Profesionalisme  
(*professionalism*)



Keunggulan  
(*excellence*)



Mengutamakan  
kepentingan umum  
(*public interest*)



Koordinasi dan kerjasama tim  
(*coordination and teamwork*)  
yang belandaskan keluhuran  
nilai-nilai agama (religi).



# Visi & Misi

## Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

### Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dan digital terdepan dengan tata kelola kuat dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional

### Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

# Kata Pengantar

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya buku Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta edisi Februari 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta ini diterbitkan rutin secara triwulanan, dimana pada edisi Februari 2026 ini menganalisis dan mengevaluasi kondisi perekonomian DKI Jakarta, khususnya pada triwulan IV 2025, triwulan I 2026 dan prospek keseluruhan tahun 2026.

Pada triwulan IV 2025, ekonomi Jakarta mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,71% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,96% (yoy). Berdasarkan perkembangan tersebut, perekonomian Jakarta secara keseluruhan tahun 2025 tumbuh 5,21% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya (4,90%; yoy). Pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama ditopang oleh masih kuatnya kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan tingginya pertumbuhan Investasi. Di sisi lain, kinerja Investasi, Ekspor, Impor, dan Konsumsi LNPRT tertahan, meski masih mencatatkan pertumbuhan positif. Dari sisi sektoral atau Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan terutama bersumber dari LU Perdagangan, LU Informasi dan Komunikasi (Infokom), dan LU Jasa Keuangan. LU utama lainnya yaitu LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan juga tetap tumbuh positif. Selain LU utama, LU lainnya seperti LU Jasa Perusahaan, LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud), dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akamamin) tetap tumbuh tinggi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Pada 2026, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan tetap tumbuh kuat pada kisaran 4,9-5,7% (yoy), meskipun terdapat risiko bias bawah seiring dinamika global dan meningkatnya ketidakpastian. Adapun inflasi diperkirakan akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Prakiraan tersebut terutama didukung oleh implementasi berbagai kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, serta penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak, antara lain BPS Provinsi DKI Jakarta, OPD Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, pelaku usaha, narasumber dalam berbagai Focus Group Discussion, dan pihak-pihak lainnya atas perolehan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan buku ini. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi sumber referensi bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi Jakarta, dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Masukan dan saran dari berbagai pihak juga kami harapkan untuk dapat meningkatkan kualitas laporan ini. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridha-Nya dan melindungi kita dalam berkarya.

Jakarta, Februari 2026  
Kepala Perwakilan  
Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

ttd.

**Iwan Setiawan**  
Direktur



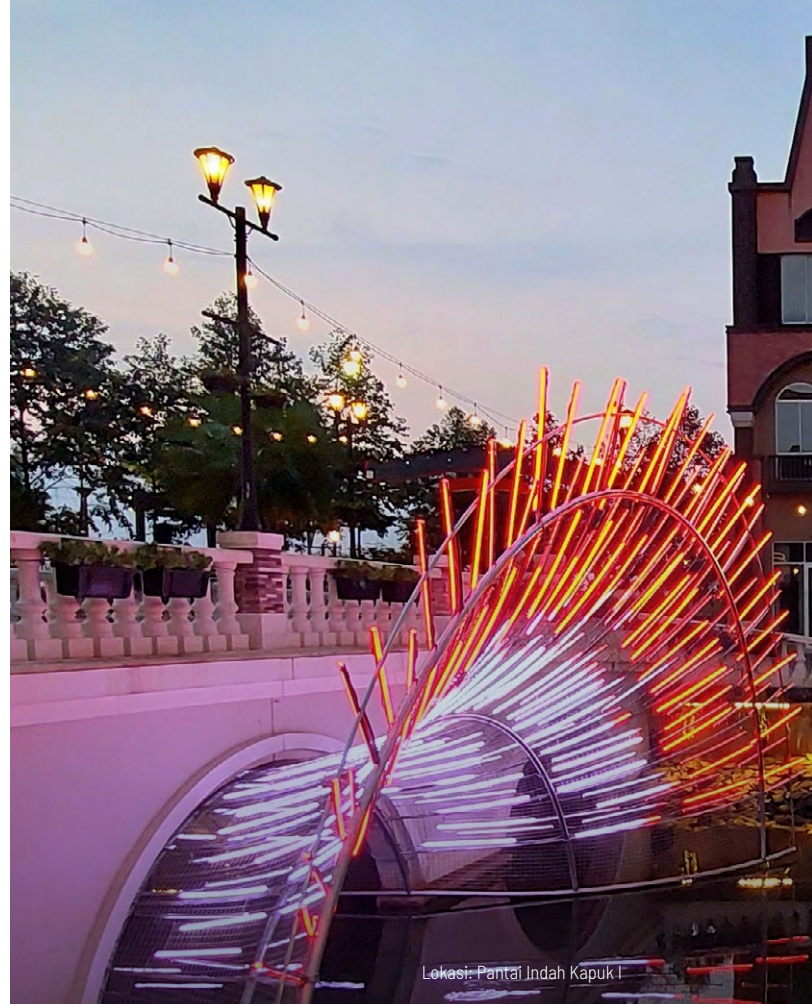
# Daftar Isi

Visi Misi Bank Indonesia	III
Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	VI
Daftar Tabel	VIII
Daftar Gambar	IX
Daftar Grafik	X
Ringkasan Eksekutif	XIV
Tabel Indikator	XVIII
Tim Penyusun	107

<b>Bab I</b>	
<b>Perekonomian Global &amp; Nasional</b>	<b>1</b>
A. Perekonomian Global	3
B. Perekonomian Nasional	3
c. Bauran Kebijakan Bank Indonesia	6

<b>Bab II</b>	
<b>Ekonomi Makro Regional</b>	<b>9</b>
A. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2025	11
B. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025	20
C. <i>Tracking</i> Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2026	23

<b>BOKS 1</b>	
Potensi Ekonomi Kreatif Jakarta Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru	29



Lokasi: Pantai Indah Kapuk I

<b>Bab III</b>	
<b>Keuangan Pemerintah</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi DKI Jakarta 2025	33
B. Realisasi Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	33
C. Belanja Daerah APBD	34
D. Pembiayaan Daerah APBD	34
E. Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN di DKI Jakarta	35

<b>Bab IV</b>	
<b>Inflasi</b>	<b>39</b>
A. Kinerja Inflasi Provinsi Triwulan IV 2025	41
B. <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan I 2026	43
C. Program Pengendalian Inflasi Triwulan IV 2025	47

<b>BOKS 2</b>	
Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Jelang Ramadan dan Idulfitri 2026	49



Lokasi: Pantai Indah Kapuk I

<b>Bab V</b>			
<b>Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM</b>	<b>53</b>		
A. Perkembangan Kinerja Bank Umum	55		
B. Perkembangan Kinerja Sektor Korporasi	60		
C. Perkembangan Kinerja Sektor Rumah Tangga	65		
D. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	68		
<b>Bab VI</b>			
<b>Sistem Pembayaran</b>	<b>73</b>		
A. Kondisi Umum	75		
B. Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai	75		
C. Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran	78		
<b>BOKS 3</b>			
Sinergi Perluasan Ekosistem Digital dan Elektronifikasi Transaksi Pemda Perkuat Daya Saing Digital Jakarta Kota Global	83		
<b>BOKS 4</b>			
Strategi Pengawasan Sistem Pembayaran di DKI Jakarta dalam Menghadapi Kompleksitas Industri Digital	87		
<b>Bab VII</b>			
<b>Ketenagakerjaan &amp; Kesejahteraan</b>	<b>89</b>		
A. Ketenagakerjaan	91		
B. Kemiskinan	93		
C. Upah Tenaga Kerja	96		
D. Upah Tenaga Kerja	96		
<b>Bab VIII</b>			
<b>Prospek Perekonomian</b>	<b>97</b>		
A. Prospek Perekonomian Global dan Nasional	99		
B. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Jakarta	101		

# Daftar Tabel

<b>Tabel 1.1</b>	Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (% , yoy)	<b>3</b>
<b>Tabel 1.2</b>	Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Pengeluaran	<b>4</b>
<b>Tabel 1.3</b>	Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Lapangan Usaha	<b>4</b>
<b>Tabel 3.1</b>	Perkembangan Pagu APBD Provinsi DKI Jakarta 2025	<b>36</b>
<b>Tabel 3.2</b>	Rincian Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV 2025	<b>37</b>
<b>Tabel 3.3</b>	Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta	<b>38</b>
<b>Tabel 3.4</b>	Rincian Realisasi APBN di DKI Jakarta Triwulan IV 2025	<b>38</b>
<b>Tabel B2.1</b>	Komoditas yang mengalami kenaikan harga pada HBKN Ramadan Idulfitri	<b>50</b>
<b>Tabel 5.1</b>	Perkembangan Kinerja Bank Umum di Provinsi DKI Jakarta	<b>55</b>
<b>Tabel 5.2</b>	Tabel Rasio Keuangan Korporasi Nonkeuangan	<b>62</b>
<b>Tabel 5.3</b>	Kredit Korporasi menurut sektor ekonomi	<b>64</b>
<b>Tabel 6.1</b>	Persebaran KUPVA BB	<b>79</b>
<b>Tabel 6.2</b>	Perkembangan Transaksi PJP LR	<b>81</b>
<b>Tabel 7.1</b>	Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan	<b>91</b>
<b>Tabel 7.2</b>	Perkembangan Status Pekerjaan Utama	<b>92</b>
<b>Tabel 7.3</b>	Profil Kemiskinan DKI Jakarta	<b>94</b>
<b>Tabel 8.1</b>	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen (yoy))	<b>99</b>
<b>Tabel 8.2</b>	Proyeksi PDB Nasional	<b>101</b>
<b>Tabel 8.3</b>	Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta 2026	<b>105</b>

# Daftar Gambar

Gambar 1.1	Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan IV 2025 (% yoy)	4
Gambar 1.2	Peta Inflasi Daerah Bulan Desember 2025 (% yoy)	5
Gambar B2.2	Perkembangan cuaca awal tahun 2026 periode Februari-Maret 2026	50
Gambar B2.1	Prognosa produksi cabai merah dan bawang merah tahun 2025 dan prakiraan prognosa TW I 2026	50
Gambar B3.1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	83
Gambar B3.2	<i>Digital Competitiveness Index</i>	83
Gambar B3.3	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	84
Gambar B3.4	IETPD berdasarkan aspek	84
Gambar B3.5	Proporsi Penerimaan Pajak dan Retribusi (PDRD) Jakarta	84
Gambar B3.6	Rasio QRIS terhadap Penerimaan PDRD Jakarta	84
Gambar B3.7	<i>Closing Ceremony</i> Digitalisasi Pasar Tahap 1	84
Gambar B3.8	<i>Closing Ceremony Jakarta Festive Wonders</i>	85
Gambar B3.9	<i>High Level Meeting</i> TP2DD Provinsi DKI Jakarta	85
Gambar B4.1	Kerja Sama antar Kementerian dan Lembaga	88

# Daftar Grafik

Grafik 1.1	Inflasi Global	3	Grafik 2.25	Perkembangan Penyaluran Kredit di Jakarta	16
Grafik 1.2	Aliran Modal ke Negara Berkembang	3	Grafik 2.26	Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja di Jakarta	16
Grafik 1.3	Indeks Keyakinan Konsumen	5	Grafik 2.27	Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor Lapangan Usaha Utama DKI Jakarta	16
Grafik 1.4	<i>Purchasing Manager's Index</i> (PMI) Manufaktur	5	Grafik 2.28	Perkembangan DPK di Jakarta Berdasarkan Kepemilikan	17
Grafik 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta Triwulanan	11	Grafik 2.29	Perkembangan DPK Berdasarkan Rekening di Jakarta	17
Grafik 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan IV 2025 Sisi Pengeluaran	11	Grafik 2.30	Perkembangan Aktivitas Bongkar Muat Tj. Priok	17
Grafik 2.3	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan IV 2025 Sisi Pengeluaran	11	Grafik 2.31	Perkembangan Wisatawan Mancanegara (Wisman) dan TPK Hotel Berbintang Jakarta	17
Grafik 2.4	Perkembangan Indeks Penjualan Eceran	12	Grafik 2.32	Perkembangan DPK di Jakarta Berdasarkan Kepemilikan	17
Grafik 2.5	Perkembangan Penjualan e-commerce Jakarta	12	Grafik 2.33	Pertumbuhan ekspor komoditas industri DKI Jakarta	18
Grafik 2.6	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Jakarta	12	Grafik 2.34	Perkembangan Impor Bahan Baku DKI Jakarta	18
Grafik 2.7	Realisasi Belanja Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (APBD)	12	Grafik 2.35	Pertumbuhan LU Konstruksi dan PDRB DKI Jakarta	18
Grafik 2.8	Perkembangan Nilai Impor Barang Modal Jakarta	12	Grafik 2.36	Perkembangan Penyaluran Kredit Konstruksi di Jakarta	18
Grafik 2.9	Perkembangan Kredit Investasi di Jakarta	13	Grafik 2.37	Perkembangan Realisasi Pengadaan Semen di Jakarta	18
Grafik 2.10	Neraca Perdagangan Luar Negeri DKI Jakarta	13	Grafik 2.38	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tahun 2025 Sisi Pengeluaran	20
Grafik 2.11	Perkembangan Ekspor Komoditas Industri Jakarta	13	Grafik 2.39	Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tahun 2025 Sisi Pengeluaran	20
Grafik 2.12	Perkembangan Nilai Impor Barang Konsumsi, Barang Modal, dan Bahan Baku Jakarta	13	Grafik 2.40	Perkembangan IKK, IKE, IEK Jakarta	20
Grafik 2.13	Perkembangan Nilai Impor HS 84, HS 85, dan HS 87 Jakarta	14	Grafik 2.41	Pertumbuhan Pengadaan Semen di Jakarta	21
Grafik 2.14	Perkembangan Pertumbuhan Lima LU Utama	14	Grafik 2.42	Pertumbuhan Impor Barang Modal	21
Grafik 2.15	Perkembangan Pertumbuhan LU Akmamin, LU Transgud, dan LU Jasa Perusahaan	14	Grafik 2.43	Pertumbuhan Nilai Ekspor Jakarta	21
Grafik 2.16	Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta Triwulan IV 2025	14	Grafik 2.44	Pertumbuhan Ekspor Komoditas Utama Jakarta	21
Grafik 2.17	Kontribusi Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Berdasarkan Lapangan Usaha	14	Grafik 2.45	Pertumbuhan Nilai Impor Jakarta	21
Grafik 2.18	Perkembangan Survei Penjualan Eceran DKI Jakarta	15	Grafik 2.46	Pertumbuhan Impor Komoditas Utama Jakarta	22
Grafik 2.19	Perkembangan Indeks Kondisi Konsumen	15	Grafik 2.47	Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta 2025	22
Grafik 2.20	Perkembangan Kredit Sektor Perdagangan DKI Jakarta	15	Grafik 2.48	Pertumbuhan LU Utama DKI Jakarta 2025	22
Grafik 2.21	Perkembangan Penjualan Mobil di Jakarta	15	Grafik 2.49	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) DKI Jakarta 2025	22
Grafik 2.22	Perkembangan LU Infokom dan PDRB Jakarta	16	Grafik 2.50	Perkembangan Indeks Penjualan Eceran DKI Jakarta 2025	22
Grafik 2.23	Perkembangan Indeks Penjualan Peralatan Komunikasi Jakarta	16	Grafik 2.51	Perkembangan Penjualan Mobil di DKI Jakarta 2025	23
Grafik 2.24	Perkembangan PDRB LU Jasa Keuangan dan PDRB di Jakarta	16	Grafik 2.52	Perkembangan Ekspor Komoditas Industri DKI Jakarta 2025	23

# Daftar Grafik

Grafik 2.53	Produksi Mobil DKI Jakarta 2025	23	Grafik 3.7	Perkembangan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal	34
Grafik 2.54	Pertumbuhan Penyaluran Kredit DKI Jakarta 2025	23	Grafik 3.8	Pertumbuhan Komponen Utama Belanja Daerah	34
Grafik 2.55	Pertumbuhan DPK DKI Jakarta 2025	23	Grafik 3.9	Pertumbuhan Belanja Hibah, Modal, Subsidi dan Bansos	34
Grafik 2.56	Perkembangan Penjualan Eceran Jakarta	24	Grafik 3.10	Realisasi Kumulatif Total Belanja APBN di DKI Jakarta	35
Grafik 2.57	Perkembangan IKK, IEK, IKE Jakarta	24	Grafik 3.11	Realisasi Total Belanja K/L di DKI Jakarta	35
Grafik 2.58	Penjualan Mobil Jakarta	24	Grafik 4.1	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	41
Grafik 2.59	Nilai Impor Barang Modal	25	Grafik 4.2	Sumbangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	41
Grafik 2.60	Nilai Impor Besi dan Baja	25	Grafik 4.3	Perkembangan Harga Emas Global	41
Grafik 2.61	Ekspor Mobil CBU	25	Grafik 4.4	Perkembangan Harga Emas Perhiasan Jakarta	41
Grafik 2.62	Nilai Impor Barang Konsumsi	25	Grafik 4.5	Perkembangan Harga Daging Ayam Ras	42
Grafik 2.63	Nilai Impor Mobil Jakarta	26	Grafik 4.6	Perkembangan Harga Cabai Merah	42
Grafik 2.64	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) DKI Jakarta (Triwulan I 2026)	26	Grafik 4.7	Perkembangan Harga Cabai Rawit	42
Grafik 2.65	Perkembangan Indeks Penjualan Eceran DKI Jakarta (Triwulan I 2026)	26	Grafik 4.8	Perkembangan Harga Bawang Merah	42
Grafik 2.66	Perkembangan Penjualan Mobil Jakarta (Triwulan I 2026)	26	Grafik 4.9	Perkembangan Harga Beras	42
Grafik 2.67	Perkembangan Penyaluran Kredit Jakarta (Triwulan I 2026)	26	Grafik 4.10	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Kondisi Ekonomi (IKE)	43
Grafik 2.68	Penyaluran Kredit Sektor Industri dan Konstruksi Jakarta (Triwulan I 2026)	26	Grafik 4.11	Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Pengeluaran November 2025 - Januari 2026	44
Grafik 2.69	Perkembangan DPK Jakarta (Triwulan I 2026)	27	Grafik 4.12	Perkembangan Harga Cabai Merah	44
Grafik 2.70	Perkembangan Kredit LU Konstruksi DKI Jakarta (Triwulan I 2026)	27	Grafik 4.13	Perkembangan Harga Bawang Merah	44
Grafik 2.71	Perkiraan SKDU LU Industri Pengolahan DKI Jakarta (Triwulan I 2026)	27	Grafik 4.14	Perkembangan Harga Cabai Rawit	44
Grafik 2.72	Perkembangan Indeks Penjualan Peralatan Komunikasi di Jakarta (Triwulan I 2026)	27	Grafik 4.15	Perkembangan Stok Cabai Merah	44
Grafik B1.1	Pangsa Sektor Industri dan Jasa DKI Jakarta 2019 s.d 2025	29	Grafik 4.16	Perkembangan Stok Bawang Merah	44
Grafik B1.2	Perkembangan Nilai Investasi dan Jumlah Pelaku Usaha Sektor Ekonomi Kreatif DKI Jakarta	30	Grafik 4.17	Perkembangan Stok Cabai Rawit	45
Grafik 3.1	Realisasi Kumulatif Pendapatan Daerah	33	Grafik 4.18	Perkembangan Harga Daging Ayam Ras	45
Grafik 3.2	Perkembangan Capaian PAD dan Transfer DKI Jakarta Tw IV 2025	33	Grafik 4.19	Perkembangan Stok Daging Ayam Ras	45
Grafik 3.3	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah	33	Grafik 4.20	Perkembangan Harga Telur Ayam Ras	45
Grafik 3.4	Pertumbuhan Komponen PAD	33	Grafik 4.21	Perkembangan Harga Emas Perhiasan DKI Jakarta (%; mtm)	46
Grafik 3.5	Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Transfer	34	Grafik 4.22	Perkembangan Harga Emas Global	46
Grafik 3.6	Realisasi Kumulatif Belanja Daerah	34	Grafik 4.24	Inflasi Tahunan Kelompok Pengeluaran November 2025 - Januari 2026	46
			Grafik 4.23	Inflasi Jakarta dan Nasional	46
			Grafik B2.1	Perkembangan Inflasi Bulanan Provinsi DKI Jakarta 2026	49

# Daftar Grafik

Grafik B2.2	Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi DKI Jakarta 2026	49	Grafik 5.25	Likuiditas Korporasi DKI Jakarta	63
Grafik B2.3	Rata-rata inflasi bulanan Ramadan dan Idulfitri dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir	50	Grafik 5.26	Produktivitas Korporasi DKI Jakarta	63
Grafik 5.1	Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank	55	Grafik 5.27	Kemampuan Membayar Korporasi DKI Jakarta	63
Grafik 5.2	Pertumbuhan DPK Jakarta	56	Grafik 5.28	Pertumbuhan kredit Korporasi	63
Grafik 5.3	Komposisi DPK Jakarta	56	Grafik 5.29	Penyaluran Kredit pada Sektor Utama Korporasi	64
Grafik 5.4	Komposisi Pemilik DPK Jakarta	56	Grafik 5.30	NPL pada Sektor Korporasi	64
Grafik 5.5	Perkembangan DPK Spasial Jakarta	56	Grafik 5.31	Perkembangan DPK Korporasi	64
Grafik 5.6	Kontribusi DPK Jakarta terhadap DPK Nasional	57	Grafik 5.32	Pertumbuhan Komponen DPK Korporasi	65
Grafik 5.7	Pertumbuhan DPK Jakarta dan Nasional	57	Grafik 5.33	Komposisi DPK Korporasi	65
Grafik 5.8	Pertumbuhan Kredit Jakarta	57	Grafik 5.34	Indeks Harga Saham Gabungan BEI	65
Grafik 5.9	Komposisi Kredit Jakarta Berdasarkan Penggunaan	57	Grafik 5.35	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen dan Konsumsi RT	65
Grafik 5.10	Komposisi Kredit Berdasarkan Kepemilikan	58	Grafik 5.36	Perkembangan Indeks Ketersediaan Lap.Kerja, Penghasilan Konsumen, dan Konsumsi Barang Tahan Lama	66
Grafik 5.11	Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kepemilikan	58	Grafik 5.37	Perkembangan Kredit Rumah Tangga	66
Grafik 5.12	Pertumbuhan Kredit Sektoral	58	Grafik 5.38	Perkembangan Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga	66
Grafik 5.13	Sebaran Kredit di Provinsi DKI Jakarta	58	Grafik 5.39	Komposisi Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga	66
Grafik 5.14	Perkembangan LDR Berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek	59	Grafik 5.40	Komposisi Kredit RT dan Non-RT	67
Grafik 5.15	Perkembangan NPL DKI Jakarta	59	Grafik 5.41	NPL Kredit Rumah Tangga	67
Grafik 5.16	Perkembangan LaR DKI Jakarta	59	Grafik 5.42	Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga	67
Grafik 5.17	NPL di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan	59	Grafik 5.43	Komposisi Kredit Konsumsi Rumah Tangga	67
Grafik 5.18	Perbandingan NPL di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional	59	Grafik 5.44	NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga	68
Grafik 5.19	Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama	60	Grafik 5.45	Pertumbuhan DPK Rumah Tangga	68
Grafik 5.20	Pertumbuhan Volume Ekspor ke Negara Tujuan Utama DKI Jakarta	60	Grafik 5.46	Pertumbuhan DPK per jenis Simpanan	68
Grafik 5.21	Pertumbuhan Volume Ekspor Industri DKI Jakarta	61	Grafik 5.47	Komposisi DPK	68
Grafik 5.22	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Unggulan DKI Jakarta	61	Grafik 5.48	Komposisi DPK Rumah Tangga	68
Grafik 5.23	Penjualan Korporasi DKI Jakarta	62	Grafik 5.49	Pertumbuhan Kredit UMKM di Jakarta	69
Grafik 5.24	Profitabilitas Korporasi DKI Jakarta	62	Grafik 5.50	Porsi Kredit UMKM di Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan	69
Grafik 5.25	Likuiditas Korporasi DKI Jakarta	62	Grafik 5.50	Porsi Kredit UMKM di Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan	69
Grafik 5.26	Produktivitas Korporasi DKI Jakarta	63	Grafik 5.51	UMKM Berdasarkan Skala Usaha	69
			Grafik 5.52	Porsi Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi	69

# Daftar Grafik

Grafik 5.53	Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Utama	70	Grafik 7.4	Proporsi dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan	92
Grafik 5.54	NPL Kredit UMKM	70	Grafik 7.5	Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	92
Grafik 5.55	NPL Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha	70	Grafik 7.6	Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan	92
Grafik 6.1	Perkembangan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i> Uang Kartal	75	Grafik 7.7	Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta (Juta Rupiah)	93
Grafik 6.2	Perkembangan Temuan Uang yang Diragukan Keasliannya	75	Grafik 7.8	Produktivitas TK menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2024 (Juta Rupiah)	93
Grafik 6.3	Perkembangan Nilai Transaksi BI-RTGS	75	Grafik 7.9	Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha	93
Grafik 6.4	Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS	76	Grafik 7.10	Indeks Kondisi Ekonomi, Penghasilan, dan Ketersediaan Lapangan Kerja	93
Grafik 6.5	Perkembangan Nilai Transaksi SKNBI	76	Grafik 7.11	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta	93
Grafik 6.6	Perkembangan Volume Transaksi SKNBI	76	Grafik 7.12	Tingkat Kemiskinan Jakarta dan Nasional	94
Grafik 6.7	Perkembangan Nilai Transaksi Kartu Kredit dan Debet	77	Grafik 7.13	Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta	94
Grafik 6.8	Perkembangan Jumlah Kartu Kredit, Debet, ATM dan Mesin ATM	77	Grafik 7.14	Garis Kemiskinan DKI Jakarta	94
Grafik 6.9	Pangsa Volume Transaksi Kartu Kredit Berdasarkan Jenis Transaksi	77	Grafik 7.15	Pertumbuhan Garis Kemiskinan, Garis Kemiskinan Makanan, dan Garis Kemiskinan Non Makanan	94
Grafik 6.10	Pangsa Volume Transaksi Kartu ATM/ Debit Berdasarkan Jenis Transaksi	77	Grafik 7.16	Porsi Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan	95
Grafik 6.11	Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	77	Grafik 7.17	Tingkat Kemiskinan Provinsi di Jawa	95
Grafik 6.12	Perkembangan Instrumen dan Mesin Reader Uang Elektronik	77	Grafik 7.18	Garis Kemiskinan Provinsi di Jawa	95
Grafik 6.13	Perkembangan Volume transaksi QRIS di DKI Jakarta	78	Grafik 7.19	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	95
Grafik 6.14	Perkembangan Pengguna QRIS di DKI Jakarta	78	Grafik 7.20	Rasio Gini Jakarta dan Nasional	96
Grafik 6.15	Perkembangan <i>Merchant</i> QRIS di DKI Jakarta	78	Grafik 7.21	Distribusi Pendapatan DKI Jakarta	96
Grafik 6.16	Pangsa <i>Merchant</i> QRIS per Wilayah	78	Grafik 7.23	UMP Provinsi di Indonesia	96
Grafik 6.17	Pangsa <i>Merchant</i> QRIS per Jenis Usaha	78	Grafik 7.22	Perkembangan UMP DKI Jakarta	96
Grafik 6.18	Perkembangan Transaksi KUPVA BB	79	Grafik 7.24	Perkembangan UMP DKI Jakarta	96
Grafik 6.19	<i>Market Share</i> Valuta Asing	79	Grafik 8.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2026	102
Grafik 6.20	Perkembangan Transaksi PJP LR	80	Grafik 8.2	Perkembangan Pagu APBD DKI Jakarta 2026	102
Grafik B4.1	Pertumbuhan Ekonomi dan Konsumsi RT di Jakarta	87	Grafik 8.3	Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta 2026	103
Grafik B4.2	Jumlah Tenaga Kerja Ter-PHK di Jakarta	87	Grafik 8.4	Proyeksi Inflasi DKI Jakarta 2026	103
Grafik 7.1	Pertumbuhan Jumlah Orang Bekerja dan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta	91			
Grafik 7.2	Persentase Penyerapan Suplai Tenaga Kerja	91			
Grafik 7.3	Proporsi Penduduk Bekerja Berdasarkan Jam Kerja	91			

# Ringkasan Eksekutif

Prospek perekonomian global dalam tren melambat dengan ketidakpastian yang tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diperkirakan melambat dan dibarengi dengan divergensi pertumbuhan antarnegara. Prospek pertumbuhan ekonomi global yang melambat terutama dipengaruhi oleh dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan berlanjutnya tensi geopolitik, kecuali AS yang diperkirakan meningkat dipengaruhi oleh besarnya stimulus fiskal dan tingginya investasi, termasuk investasi terkait *artificial intelligence* (AI). Ekonomi Eropa dan Jepang diperkirakan melambat dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang turun sejalan dengan perlambatan ekonomi global serta permintaan domestik yang belum kuat di tengah pengaruh investasi AI yang meningkat. Ekonomi Tiongkok tetap dalam tren melambat akibat konsumsi rumah tangga yang belum kuat, sementara ekonomi India juga belum kuat dengan menurunnya permintaan domestik dan kinerja sektor eksternal. Dari pasar keuangan global, ruang penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) tetap terbuka seiring pasar tenaga kerja yang masih lemah. Yield UST terutama tenor panjang tetap tinggi sejalan dengan peningkatan risiko fiskal AS. Perkembangan ini mendorong aliran modal ke negara berkembang terjadi secara selektif, terutama ke saham dan obligasi jangka pendek. Indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) melemah di tengah kenaikan permintaan terhadap *safe haven assets* yang mendorong kenaikan harga emas.

Ditengah kondisi ketidakpastian situasi global, ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi didukung berbagai kebijakan *pro growth* yang ditempuh Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,39% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Peningkatan ini terutama ditopang oleh permintaan domestik dari konsumsi rumah tangga dan investasi sejalan dengan dampak positif berbagai stimulus kebijakan Pemerintah dan didukung bauran kebijakan Bank Indonesia. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2025 sebesar 5,11% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2024 sebesar 5,03% (yoy) dan diikuti dengan perbaikan kualitas ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diperkirakan berlanjut pada triwulan I 2026. Konsumsi rumah tangga meningkat ditopang berbagai program stimulus Pemerintah, pelonggaran kebijakan moneter, ekspektasi konsumen yang terus membaik serta peningkatan kegiatan ekonomi pada berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di triwulan I 2026 seperti Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi, dan Idulfitri 1447 H. Investasi juga diperkirakan tumbuh lebih tinggi didorong oleh investasi Pemerintah, termasuk hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), serta perbaikan keyakinan pelaku usaha yang masih berlanjut.

Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 mencatat akselerasi pertumbuhan sebesar 5,71% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (4,96%, yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan terutama ditopang oleh masih kuatnya kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan tingginya pertumbuhan Investasi. Di sisi lain, kinerja Investasi, Ekspor, Impor, dan Konsumsi LNPRT tertahan, meski masih mencatatkan pertumbuhan positif. Dari sisi sektoral atau lapangan usaha, pertumbuhan terutama bersumber dari LU Perdagangan, LU Informasi dan Komunikasi (Infokom), dan LU Jasa Keuangan. LU utama lainnya yaitu LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan juga tetap tumbuh positif. Selain LU utama, LU lainnya seperti LU Jasa Perusahaan, Transportasi dan Pergudangan (Transgud), dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akamamin) tetap tumbuh tinggi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Memasuki triwulan I 2026, perekonomian Jakarta diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan triwulan IV 2025, didorong oleh prakiraan meningkatnya Konsumsi RT seiring momentum HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026, meningkatnya kinerja Investasi seiring prakiraan akselerasi penanaman modal guna perluasan program strategis ketahanan pangan

# Ringkasan Eksekutif

dan ekonomi kerakyatan pemerintah, serta kinerja konsumsi pemerintah akibat akselerasi realisasi belanja pegawai seiring pemberian THR dan belanja Bansos. Dari sisi LU utama, sejalan dengan sisi pengeluaran, pertumbuhan LU Perdagangan juga diperkirakan meningkat dari triwulan sebelumnya, sejalan dengan kinerja Konsumsi RT yang diperkirakan tumbuh meningkat.

Dari sisi keuangan daerah, kinerja Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 mencapai 94,65% dari pagu, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 98,28% dari pagu. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi seluruh komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain PAD yang masing-masing tercatat sebesar 94,33%, 95,53%, dan 42,94% dari pagu APBD-P 2025, lebih rendah dari kinerja tahun sebelumnya. Dari sisi Belanja Daerah, realisasi pada tahun 2025 tercatat sebesar 88,45% dari pagu, lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 89,45% dari pagu. Capaian yang lebih rendah disebabkan oleh realisasi Belanja Modal dan Belanja Transfer yang masing-masing 86,23% dan 102,44% dari pagu, lebih rendah dari kinerja tahun sebelumnya sebesar 90,02% dan 120,64%.

Sementara itu, berdasarkan rilis data oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, kinerja Pendapatan APBN regional DKI Jakarta sampai dengan triwulan IV 2025 mencapai Rp1.816,88 triliun atau 93,89% dari target. Capaian tersebut terutama didukung oleh realisasi kinerja pajak yang meningkat ditopang oleh penerimaan Pajak Dalam Negeri. Dari sisi belanja K/L di Jakarta, secara kumulatif hingga triwulan IV 2025 tercatat realisasi sebesar Rp1.283,92 triliun atau sebesar 92,81% dari pagu.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,63% (yoy) dan tetap berada dalam rentang sasaran, meskipun meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,40% (yoy). Capaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional. Terkendalnya inflasi Jakarta mencerminkan sinergi dan kolaborasi pengendalian inflasi dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan IV 2025 antara lain emas perhiasan, tarif air minum PAM, daging ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit. Memasuki triwulan I 2026, inflasi Jakarta pada Januari 2026 meningkat menjadi 3,96% (yoy). Kenaikan ini terutama dipengaruhi faktor *base effect* dari rendahnya inflasi Januari 2025 seiring pemberlakuan diskon tarif listrik sebesar 50%. Ke depan, inflasi IHK Jakarta diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% pada tahun 2026.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 yang meningkat, laju intermediasi perbankan di DKI Jakarta turut menguat dengan profil risiko yang tetap terjaga rendah. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit didukung oleh kondisi likuiditas perbankan yang memadai, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang solid serta permodalan bank yang kuat. Ruang ekspansi kredit juga didorong oleh kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang tetap akomodatif guna mendukung pembiayaan sektor riil dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ketahanan perbankan tetap terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah yang rendah dan berada jauh di bawah *threshold* 5%, serta rasio permodalan yang tetap kuat.

# Ringkasan Eksekutif

Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit pada triwulan laporan terutama ditopang oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan sektor korporasi seiring ekspansi usaha dan perbaikan kinerja penjualan. Profitabilitas korporasi non-keuangan meningkat sejalan dengan penguatan aktivitas ekonomi, sehingga mendorong peningkatan permintaan kredit investasi dan modal kerja. Kemampuan bayar korporasi juga tetap kuat, tercermin dari rasio likuiditas yang terjaga dan tingkat *Non-Performing Loans* (NPL) korporasi yang rendah.

Sejalan dengan penguatan sektor korporasi, kinerja sektor rumah tangga juga menunjukkan perbaikan yang lebih kuat. Hal ini tercermin dari meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen yang berada pada level optimis serta pertumbuhan kredit rumah tangga yang semakin solid. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan kredit konsumsi, termasuk kredit Multiguna, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), seiring meningkatnya daya beli dan mobilitas masyarakat. Risiko kredit rumah tangga tetap terjaga di bawah 3% meskipun perlu terus dimonitor seiring akselerasi pertumbuhan kredit. Kredit sektor UMKM juga tetap tumbuh positif di tengah kuatnya penyaluran kredit bank umum, didukung oleh peningkatan aktivitas usaha dan berbagai program penguatan kapasitas yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong produktivitas dan daya saing UMKM.

Pada triwulan IV 2025, peredaran uang kartal di DKI Jakarta tercatat mengalami *net outflow*, sementara transaksi pembayaran nontunai tetap tumbuh kuat, sejalan dengan akselerasi perekonomian DKI Jakarta. Dari sisi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), nilai transaksi jual dan beli valuta asing (dalam Rupiah) mengalami pertumbuhan sebesar 26,61% (yoy) pada triwulan IV 2025, melanjutkan tren pertumbuhan positif triwulan sebelumnya sebesar 13,19% (yoy). Dari sisi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR), tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 21,40% (yoy) meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 42,20% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan pertumbuhan nilai transaksi *incoming* (dari luar ke dalam negeri) yang mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara, transaksi *outgoing* (dari dalam ke luar negeri) dan domestik (di dalam negeri) tercatat tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sejalan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja di DKI Jakarta periode November 2025 relatif stabil pada level 93,69% meskipun sedikit menurun dibandingkan Agustus 2025 sebesar 93,95%. Berdasarkan status pekerjaan utama, sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Dari sisi LU, peningkatan serapan tenaga kerja terutama terjadi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran. Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, LU Jasa Lainnya.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga mengalami penurunan menjadi 4,03% pada September 2025, dibandingkan September 2024 yang sebesar 4,14%. Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada September 2025 berada pada level 8,25%. Menurunnya tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial antara lain melalui program pemberian subsidi pangan dan transportasi serta pemberian bantuan sosial bagi warga penerima manfaat.

# Ringkasan Eksekutif

Pada 2026, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan tetap tumbuh kuat pada kisaran 4,9-5,7% (yoy), meskipun terdapat risiko bias bawah seiring dinamika global dan meningkatnya ketidakpastian. Dari sisi pengeluaran, penguatan ekonomi Jakarta terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan menguat seiring membaiknya daya beli masyarakat, antara lain didukung kenaikan UMP, serta keberlanjutan dukungan kebijakan Pemerintah melalui berbagai stimulus dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli, khususnya pada kelompok rentan. Selain itu, momentum musiman dan meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode tertentu juga berpotensi mendorong konsumsi jasa perkotaan seperti perdagangan, transportasi, serta akomodasi dan makan minum. Meningkatnya investasi sejalan dengan berlanjutnya realisasi proyek strategis pemerintah yang bersifat multitaluh seperti MRT Fase 2A, LRT Fase 1B, dan dimulainya pembebasan lahan MRT East West Line. Di samping itu, komitmen realisasi investasi swasta tetap terjaga, khususnya pada sektor properti, transportasi, dan jasa perkotaan, meskipun pelaku usaha masih mencermati dinamika ekonomi global. Konsumsi Pemerintah pada 2026 juga diperkirakan tetap tumbuh positif dan cenderung meningkat, didukung oleh keberlanjutan belanja APBD yang difokuskan pada layanan publik/pembangunan meski disertai efisiensi belanja rutin. Selain itu, belanja APBN di DKI diperkirakan lebih akseleratif dan periodisasinya lebih merata sepanjang tahun, sehingga turut memperkuat konsumsi pemerintah. Ekspor diperkirakan tetap tumbuh positif meski diperkirakan tidak setinggi tahun sebelumnya seiring moderasi permintaan global, perlambatan mitra dagang utama, meningkatnya tensi dan perang di kawasan Timur Tengah, serta ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional (termasuk dinamika tarif resiprokal AS).

Dari sisi lapangan usaha (LU) perekonomian DKI Jakarta pada 2026 masih akan ditopang oleh pertumbuhan positif 5 (lima) sektor ekonomi utama yaitu perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, jasa perusahaan, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Namun demikian, beberapa risiko yang perlu dicermati yang dapat menahan perbaikan lebih lanjut utamanya yaitu dinamika ekonomi global, berlanjutnya ketegangan tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah, fragmentasi perdagangan serta dinamika kebijakan AS.

Dari sisi harga, inflasi DKI Jakarta pada 2026 diperkirakan akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Prakiraan tersebut terutama didukung oleh implementasi berbagai kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, serta penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

# Tabel Indikator

INDIKATOR	2023					2024					2025				
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
<b>Ekonomi Makro Regional</b>															
<b>Produk Domestik Regional Bruto (% yoy)</b>	<b>4,95</b>	<b>5,13</b>	<b>4,93</b>	<b>4,85</b>	<b>4,96</b>	<b>4,78</b>	<b>4,90</b>	<b>4,93</b>	<b>5,01</b>	<b>4,90</b>	<b>4,95</b>	<b>5,18</b>	<b>4,96</b>	<b>5,71</b>	<b>5,21</b>
Berdasarkan Lapangan Usaha:															
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,07	-10,87	-5,85	1,32	-3,94	9,19	6,98	5,62	-0,43	5,17	0,57	3,19	0,63	7,28	2,97
2 Pertambangan dan Penggalian	-8,16	-23,33	-12,67	-6,63	-12,75	-11,43	4,52	-6,26	-6,35	-5,27	-3,64	-8,60	-8,14	-11,99	-7,74
3 Industri Pengolahan	1,58	1,18	2,13	2,54	1,86	-0,53	2,46	1,33	1,35	1,14	1,61	0,98	1,44	2,53	1,65
4 Pengadaan Listrik dan Gas	-7,69	-6,29	-5,19	-10,34	-7,20	-15,17	-19,04	-16,57	-13,80	-16,32	-15,24	-19,09	-11,73	-3,29	-12,49
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,36	4,37	5,06	8,68	6,33	5,22	0,59	0,28	-3,84	0,48	-4,93	-3,26	-3,09	-3,10	-3,60
6 Konstruksi	0,11	2,36	3,01	4,53	2,50	6,27	6,55	5,65	9,39	6,99	2,61	3,64	3,17	3,15	3,14
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,70	4,67	3,99	3,78	4,52	5,39	6,87	7,99	7,26	6,87	4,35	5,91	5,15	6,55	5,50
8 Transportasi dan Pergudangan	17,43	18,05	13,96	7,76	14,05	6,48	6,15	7,10	8,07	6,96	7,96	9,90	9,06	7,87	8,69
9 Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	8,27	10,49	11,59	8,40	9,69	9,56	7,57	7,31	8,87	8,31	9,64	9,79	9,55	8,40	9,33
10 Informasi dan Komunikasi	7,65	8,26	8,42	5,57	7,45	6,43	4,19	4,27	4,36	4,80	5,93	5,65	6,72	6,58	6,22
11 Jasa keuangan dan Asuransi	6,04	0,61	4,69	10,24	5,39	2,02	10,99	6,09	2,60	5,36	5,84	4,71	-0,15	4,78	3,83
12 Real Estate	0,92	1,01	0,68	0,37	0,74	1,31	1,35	1,64	1,76	1,51	1,97	2,68	3,48	2,96	2,77
13 Jasa Perusahaan	6,77	8,18	6,06	5,03	6,49	6,57	3,57	3,65	5,05	4,71	6,32	7,62	8,58	8,11	7,66
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	0,22	1,72	-1,92	0,02	0,04	14,16	-5,96	0,93	-2,53	1,25	4,64	2,92	5,21	7,71	5,36
15 Jasa Pendidikan	0,33	5,55	-0,79	-0,19	1,20	3,69	0,96	6,97	5,52	4,26	7,19	5,99	7,22	6,94	6,83
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,44	6,07	6,59	9,27	5,85	9,09	6,71	3,36	2,79	5,41	4,37	3,72	6,02	6,39	5,12
17 Jasa Lainnya	13,16	14,20	11,82	7,55	11,60	3,45	3,87	6,09	8,20	5,42	8,98	8,31	8,29	8,32	8,46
Berdasarkan Permintaan:															
1 Konsumsi															
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,18	5,26	5,49	5,23	5,05	5,25	5,28	5,26	5,14	5,23	5,36	5,13	5,01	5,51	5,25
b. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,95	9,53	6,27	15,43	9,84	19,70	9,69	11,99	6,84	11,82	3,45	4,58	2,42	2,03	3,12
c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,79	6,06	-16,18	-5,04	-3,86	30,30	-5,62	10,81	5,20	8,72	9,75	5,16	20,06	8,60	10,56
3 PMTB	1,32	4,22	4,38	5,17	3,89	4,36	4,66	4,27	7,54	5,20	2,89	5,50	3,67	6,81	4,77
4 Perubahan Inventori	-27,79	37,25	209,14	44,75	-8,82	-75,78	-12,18	38,88	38,67	-51,17	90,39	-284,84	-132,41	-145,07	60,45
5 Ekspor	11,89	8,93	5,93	4,46	7,67	3,23	7,06	13,40	14,66	9,64	17,72	17,26	8,57	7,62	12,50
6 Impor	7,01	8,19	2,96	3,16	5,25	6,30	5,32	13,50	14,51	10,09	16,44	16,99	7,92	8,67	12,18
<b>Ekspor</b>															
- Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)	2,799	2,475	2,813	2,899	10,986	2,694	2,856	3,875	4,217	10,786	4,387	3,593	4,570	4,725	12,892
- Volume Ekspor Non Migas (ribu ton)	849	764	809	922	3.344	820	894	1,032	1,119	1,716	1,016	959	1,170	1,118	4,263
<b>Impor</b>															
- Nilai Impor Non Migas (USD Juta)	18,439	17,926	18,703	17,868	72,936	16,409	16,597	20,637	20,431	74,074	17,522	19,331	19,544	21,031	59,924
- Volume Impor Non Migas (ribu ton)	8,345	7,831	8,378	8,925	33,479	8,269	8,047	9,541	9,913	35,770	8,226	8,938	9,157	9,939	28,042
Indeks Harga Konsumen	112,83	113,18	113,76	114,67	114,67	104,81	105,10	104,97	105,69	105,69	105,88	105,48	105,85	106,55	106,55
Laju Inflasi Tahunan (% yoy)	3,69	3,20	2,08	2,28	2,28	2,18	2,23	1,70	1,48	1,48	1,02	2,07	2,40	2,63	2,63

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia

# Tabel Indikator

INDIKATOR	2023					2024					2025				
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
<b>Perbankan</b>															
Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)	4.211	4.234	4.235	4.461	4.461	4.539	4.560	4.505	4.596	4.596	4.742	4.994	5.253	5.602	5.602
Kredit Lokasi Proyek (Rp Triliun)	2.010	2.103	2.193	2.324	2.324	2.401	2.522	2.572	2.690	2.690	2.717	2.817	2.847	3.178	3.178
- Modal Kerja	1.130	1.186	1.236	1.315	1.315	1.353	1.434	1.461	1.486	1.486	1.469	1.526	1.526	1.658	1.658
- Investasi	640	672	703	749	749	783	818	834	915	915	955	995	1.021	1.211	1.211
- Konsumsi	240	244	253	260	260	265	270	277	289	289	291	296	301	310	310
Pertumbuhan Kredit Lokasi Proyek (% yoy)	12,7	8,0	11,6	15,83	15,8	19,41	19,90	17,30	15,76	15,76	13,16	11,69	10,69	18,16	18,16
- Modal Kerja	14,2	6,9	11,9	17,5	17,50	19,6	20,8	18,2	12,9	12,9	8,7	6,4	4,5	11,6	11,6
- Investasi	10,7	9,3	13,2	16,0	16,00	22,3	21,6	18,5	22,1	22,1	22,1	21,6	22,4	32,4	32,4
- Konsumsi	11,0	9,2	6,2	7,8	7,80	10,6	10,6	9,7	11,3	11,3	9,8	9,7	8,4	7,1	7,1
Kredit UMKM Lokasi Proyek (Rp Triliun)	140	144	146	150	150	149	147	150	155	155	150	154	155	159	159
Loan to Deposit Ratio Lokasi Proyek(%)	47,75	50,18	50,46	49,68	49,68	52,90	55,31	57,10	58,52	58,52	57,30	56,41	54,20	56,73	56,73
NPL Gross Lokasi Proyek (%)	1,37	1,41	1,45	1,33	1,33	1,34	1,22	1,20	1,14	1,14	1,14	1,08	1,13	0,98	0,98
<b>Sistem Pembayaran</b>															
- Volume Total Kartu Kredit (juta)	19,07	18,51	19,42	20,88	20,88	20,35	21,20	22,79	25,56	25,56	23,99	24,47	24,25	27,39	27,39
- Nominal Total Kartu Kredit (Rp triliun)	21,10	19,94	19,26	21,20	21,20	19,53	19,50	21,55	23,32	23,32	21,15	21,36	20,79	25,31	25,31
- Nominal Transaksi E-Commerce (Rp Triliun)	21,55	20,59	22,86	24,45	24,45	22,21	19,15	20,71	22,21	22,21	84,28	20,84	17,49	15,84	14,23
- Jumlah Merchant QRIS (Juta)	4,52	4,63	5,03	5,16	5,16	5,28	5,43	5,62	5,78	5,78	6,04	6,17	6,38	5,60	5,60
- Volume Transaksi UE (Juta)	1.631	1.972	2.136	2.311	8.050	2.513	2.811	2.868	3.309	11.501	4.106	4.676	5.171	5.707	19.660
Nominal Transaksi UE (Rp Triliun)	103	127	136	151	518	165	190	207	220	782	250	283	314	349	1.195

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia

## BAB 1

# PEREKONOMIAN GLOBAL & NASIONAL

Prospek perekonomian global dalam tren melambat dengan ketidakpastian yang tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diperkirakan melambat dan dibarengi dengan divergensi pertumbuhan antarnegara. Prospek pertumbuhan ekonomi global yang melambat terutama dipengaruhi oleh dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan berlanjutnya tensi geopolitik, kecuali AS yang diperkirakan meningkat dipengaruhi oleh besarnya stimulus fiskal dan tingginya investasi, termasuk investasi terkait *artificial intelligence* (AI). Ekonomi Eropa dan Jepang diperkirakan melambat dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang turun sejalan dengan perlambatan ekonomi global serta permintaan domestik yang belum kuat di tengah pengaruh investasi AI yang meningkat. Ekonomi Tiongkok tetap dalam tren melambat akibat konsumsi rumah tangga yang belum kuat, sementara ekonomi India juga belum kuat dengan menurunnya permintaan domestik dan kinerja sektor eksternal. Dari pasar keuangan global, ruang penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) tetap terbuka seiring pasar tenaga kerja yang masih lemah. *Yield* UST terutama tenor panjang tetap tinggi sejalan dengan peningkatan risiko fiskal AS. Perkembangan ini mendorong aliran modal ke negara berkembang terjadi secara selektif, terutama ke saham dan obligasi jangka pendek. Indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) melemah di tengah kenaikan permintaan terhadap *safe haven assets* yang mendorong kenaikan harga emas.

Di tengah kondisi ketidakpastian situasi global, ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi didukung berbagai kebijakan *pro growth* yang ditempuh Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,39% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Peningkatan ini terutama ditopang oleh permintaan domestik dari konsumsi rumah tangga dan investasi sejalan dengan dampak positif berbagai stimulus kebijakan Pemerintah dan didukung bauran kebijakan Bank Indonesia. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2025 sebesar 5,11% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2024 sebesar 5,03% (yoy) dan diikuti dengan perbaikan kualitas ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diperkirakan berlanjut pada triwulan I 2026. Konsumsi rumah tangga meningkat ditopang berbagai program stimulus Pemerintah, pelonggaran kebijakan moneter, ekspektasi konsumen yang terus membaik serta peningkatan kegiatan ekonomi pada berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di triwulan I 2026 seperti Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi, dan Idulfitri 1447 H. Investasi juga diperkirakan tumbuh lebih tinggi didorong oleh investasi Pemerintah, termasuk hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), serta perbaikan keyakinan pelaku usaha yang masih berlanjut.



**Pertumbuhan  
Ekonomi Nasional (yoy)**



**5,04%**

Triwulan III 2025

**5,39%**

Triwulan IV 2025

**Inflasi  
IHK Nasional (yoy)**



**2,65%**

Triwulan III 2025

**2,92%**

Triwulan IV 2025

**Capital Adequacy Ratio  
(CAR)**

Perbankan Nasional

**25,89%**

Triwulan IV 2025

**BI 7-Days  
Reverse Repo Rate**

**4,75%**

Januari 2026

## A. PEREKONOMIAN GLOBAL<sup>1</sup>

Pertumbuhan ekonomi global melambat disertai dengan fragmentasi antarnegara yang makin melebar akibat kebijakan tarif sepihak AS dan ketegangan geopolitik. Perekonomian global diperkirakan dalam tren melambat menjadi 3,3% pada 2025 serta 3,2% pada 2026. Divergensi pola pertumbuhan antarnegara berlanjut, dengan ekonomi negara maju tumbuh melambat dari 1,8% pada 2024 menjadi 1,7% pada 2025 dan membaik menjadi 1,8% pada 2026. Kondisi ini sejalan dengan lemahnya daya saing industri AS yang menyebabkan rendahnya investasi serta memperburuk kontribusi permintaan domestik di tengah melemahnya konsumsi karena kondisi ketenagakerjaan dan tingginya inflasi. Kebijakan tarif juga memperlambat penurunan inflasi yang diperkirakan sebesar 2,6% pada 2025 dan 2,9% pada 2026 sehingga penurunan Fed Funds Rate (FFR) dari 4,5% pada 2024 menjadi 3,75% pada akhir tahun 2025. The Fed diperkirakan baru akan kembali melanjutkan penurunan FFR pada pertengahan tahun 2026.

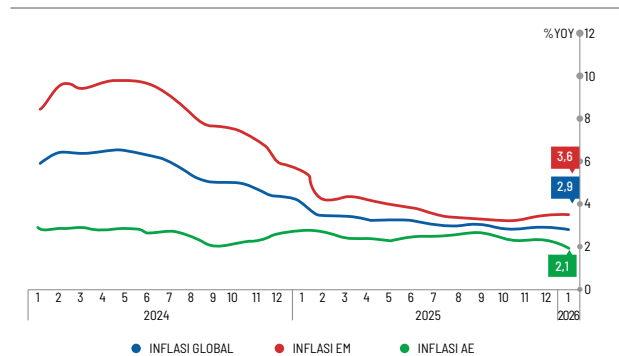
Sementara itu, pertumbuhan *emerging market economies* yang tumbuh 4,3% pada 2025, menurun menjadi 4,1% pada 2026. Kebijakan tarif AS berdampak terhadap perlambatan ekonomi terutama terjadi di Tiongkok dan Amerika Latin, sementara kinerja ekonomi India dan ASEAN+5 cukup berdaya tahan. Tingginya kebijakan tarif AS berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekspor Tiongkok, kecuali komoditas berbasis teknologi informasi sejalan dengan kuatnya adopsi teknologi serta Artificial Intelligence (AI) yang juga didukung oleh stimulus dari Pemerintah. Konsumsi domestik Tiongkok juga masih lemah dan diperkirakan akan berlanjut ke depan di tengah besarnya stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang akomodatif. Di sisi lain, kinerja ekonomi ASEAN-5 (Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina) menunjukkan daya tahan, dengan pertumbuhan diperkirakan sedikit menurun dari 4,6% pada 2024 menjadi 4,4% dan 4,3% pada 2025 dan 2026. Inflasi di ASEAN-5 secara keseluruhan juga terjadi rendah di sekitar 2,7% pada 2025 dan 2,8% pada 2026.

**Tabel 1.1** Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (% yoy)

NEGARA	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Dunia</b>	3,5	3,3	3,3	3,3	3,2
<b>Negara Maju</b>	2,6	1,7	1,8	1,8	1,8
Amerika Serikat	1,9	2,5	1,7	2,2	2,3
Kawasan Euro	3,4	0,5	0,9	1,5	1,3
Jepang	1,0	1,9	0,1	1,1	0,8
<b>Negara Berkembang</b>	4,1	4,4	4,3	4,3	4,1
Tiongkok	3,0	5,2	5,0	5,0	4,4
India (Fiscal Year for CF)	6,8	7,7	6,5	7,4	6,8
ASEAN-5	5,5	4,1	4,6	4,4	4,3
Amerika Latin	4,2	2,3	2,4	2,2	2,2
Negara Berkembang Eropa	1,2	3,2	3,4	2,2	2,4
Timur Tengah & Asia Tengah	5,4	2,0	2,4	3,5	3,8

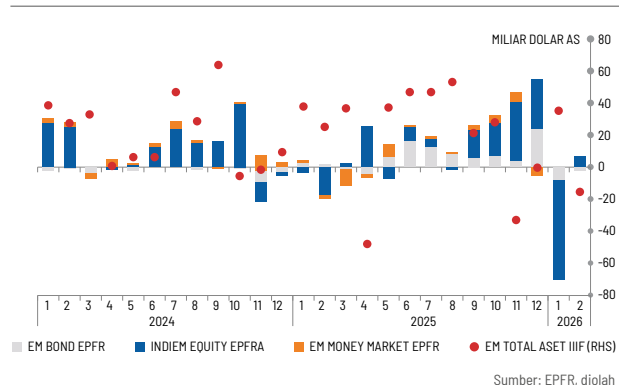
Sumber: IMF WEO.  
\*Proyeksi Bank Indonesia

<sup>1</sup> Asesmen lengkap dapat dilihat pada Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2025 dan Tinjauan Kebijakan Moneter Februari 2026



Sumber: Bloomberg dan IMF, diolah

**Grafik 1.1** Inflasi Global



Sumber: EPFR, diolah

**Grafik 1.2** Aliran Modal ke Negara Berkembang

Ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat juga berdampak pada peningkatan aliran modal keluar dari *emerging economies* dan bergeser ke aset yang dianggap aman (*safe haven assets*), khususnya obligasi AS dan emas. Penurunan suku bunga kebijakan moneter bank-bank sentral, termasuk penurunan FFR seharusnya dapat mendorong stabilitas pasar keuangan global. Akan tetapi, kebijakan tarif AS dan berlanjutnya ketegangan geopolitik dunia meningkatkan premi risiko di pasar keuangan global dan mendorong investor memindahkan portofolio ke aset investasi yang dianggap aman. Hal ini mengakibatkan aliran modal ke negara *emerging market* (EM) masih berfluktuasi seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Sejalan dengan hal tersebut, risiko volatilitas nilai tukar mata uang Asia ke depan cenderung meningkat.

## B. PEREKONOMIAN NASIONAL<sup>2</sup>

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,39% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Peningkatan ini terutama ditopang oleh permintaan domestik dari konsumsi rumah tangga dan investasi sejalan dengan dampak positif berbagai stimulus kebijakan Pemerintah dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), seluruh LU menunjukkan kinerja positif, kecuali LU Pertambangan dan LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. LU Perdagangan Besar

<sup>2</sup> Asesmen lengkap dapat dilihat pada Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2025 dan Tinjauan Kebijakan Moneter Februari 2026

**Tabel 1.2** Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Pengeluaran

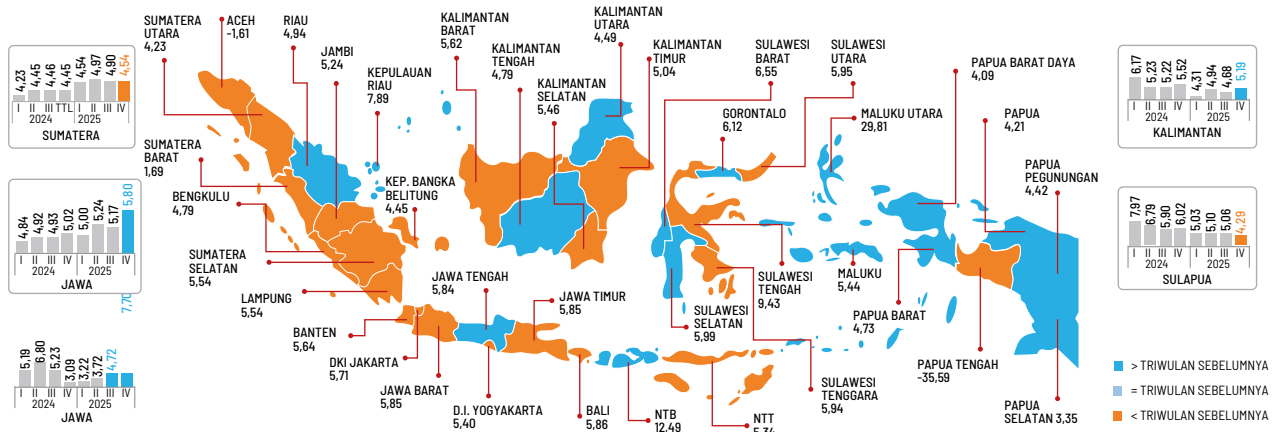
KOMODITAS	2022	2023				2023	2024				2024	2025				2025
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Konsumsi Rumah Tangga	4,94	4,53	5,22	5,05	4,47	4,82	4,91	4,93	4,91	4,98	4,94	4,95	4,97	4,89	5,11	4,98
Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	5,66	6,16	8,59	6,18	18,11	9,83	24,29	9,98	11,69	6,06	12,48	3,07	7,82	4,28	5,90	5,13
Konsumsi Pemerintah	-4,47	3,31	10,47	-3,93	2,81	2,95	19,90	1,42	4,62	4,17	6,61	-1,37	-0,33	5,49	4,55	2,50
Investasi (PMTDB)	3,87	2,11	4,63	5,77	5,02	4,40	3,79	4,43	5,15	5,03	4,61	2,12	6,99	5,04	6,12	5,09
Investasi Bangunan	0,91	0,08	3,32	6,31	6,42	4,04	5,46	5,31	6,02	5,26	5,51	1,35	4,89	3,02	3,74	3,25
Investasi Nonbangunan	12,53	7,93	8,30	4,45	1,60	5,34	-0,64	2,08	2,98	4,40	2,23	4,32	12,93	10,34	12,39	10,12
Ekspor	16,23	11,74	-2,91	-3,91	1,64	1,32	0,50	8,28	9,09	7,63	6,51	6,46	10,67	9,91	3,25	7,03
Impor	15,00	4,15	-3,23	-6,75	-0,15	-1,65	1,77	8,57	11,47	10,36	7,95	4,17	11,65	1,18	3,96	4,77
<b>PDB</b>	<b>5,31</b>	<b>5,04</b>	<b>5,17</b>	<b>4,94</b>	<b>5,04</b>	<b>5,04</b>	<b>5,11</b>	<b>5,05</b>	<b>4,95</b>	<b>5,02</b>	<b>5,03</b>	<b>4,87</b>	<b>5,12</b>	<b>5,04</b>	<b>5,39</b>	<b>5,11</b>

Sumber: BPS, diolah

**Tabel 1.3** Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Lapangan Usaha

KOMODITAS	2022	2023				2023	2024				2024	2025				2025
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,25	0,44	2,03	1,49	1,13	1,31	-3,54	3,25	1,69	0,71	0,67	10,52	1,65	4,93	5,14	5,33
Pertambangan dan Penggalian	4,38	4,92	5,01	6,95	7,46	6,12	9,31	3,17	3,46	3,95	4,90	-1,23	2,03	-1,98	-1,31	-0,66
Industri Pengolahan	4,89	4,43	4,88	5,19	4,07	4,60	4,13	3,95	4,72	4,89	4,43	4,55	5,68	5,54	5,40	5,30
Pengadaan Listrik dan Gas	6,61	2,67	3,15	5,06	8,68	4,91	5,35	5,39	5,02	3,42	4,77	5,11	0,90	2,66	3,55	3,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,23	5,70	4,78	4,49	4,66	4,90	4,44	0,84	0,03	1,06	1,56	0,18	0,82	3,32	-0,51	0,94
Konstruksi	2,01	0,32	5,23	6,39	7,68	4,91	7,59	7,29	7,48	5,81	7,02	2,18	4,98	4,21	3,89	3,81
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,53	4,94	5,30	5,10	4,09	4,85	4,58	4,85	4,82	5,19	4,86	5,03	5,37	5,49	6,07	5,49
Transportasi dan Pergudangan	19,87	15,93	15,28	14,74	10,33	13,96	8,66	9,56	8,64	7,92	8,69	9,01	8,52	8,62	8,98	8,78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,94	11,54	9,91	10,93	7,88	10,00	9,34	10,15	8,32	6,61	8,56	5,75	8,04	8,41	7,15	7,41
Informasi dan Komunikasi	7,73	7,11	8,03	8,51	6,74	7,59	8,41	7,66	6,82	7,45	7,57	7,72	7,92	9,65	8,09	8,35
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,93	4,45	2,86	5,24	6,56	4,77	3,93	7,90	5,49	1,74	4,74	3,98	3,20	0,77	7,92	3,96
Real Estat	1,72	0,37	0,96	2,21	2,18	1,43	2,54	2,16	2,32	2,97	2,50	2,94	3,71	3,95	3,71	3,58
Jasa Perusahaan	8,77	6,37	9,59	9,37	7,62	8,24	9,63	7,96	7,93	8,08	8,38	9,27	9,31	9,94	7,90	9,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,52	2,13	8,18	-6,24	1,63	1,51	18,89	2,81	3,94	1,16	6,40	4,79	4,69	4,33	1,63	3,86
Jasa Pendidikan	0,55	1,02	5,42	-2,09	2,63	1,77	7,43	2,44	2,56	2,95	3,75	5,04	1,40	10,59	3,43	4,99
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,75	4,77	8,27	2,92	3,09	4,67	11,65	8,57	7,65	5,20	8,11	5,78	3,80	6,83	5,95	5,99
Jasa lainnya	9,47	8,90	11,89	11,14	10,15	10,52	8,92	8,85	9,95	11,36	9,80	9,84	11,31	9,92	8,71	9,93
<b>PDB</b>	<b>5,31</b>	<b>5,04</b>	<b>5,17</b>	<b>4,94</b>	<b>5,05</b>	<b>5,11</b>	<b>5,05</b>	<b>4,95</b>	<b>5,02</b>	<b>5,03</b>	<b>4,87</b>	<b>5,12</b>	<b>5,04</b>	<b>5,39</b>	<b>5,11</b>	

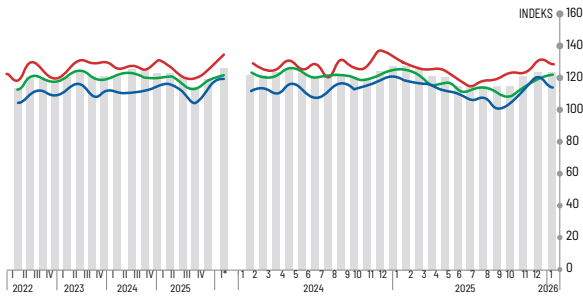
Sumber: BPS, diolah



Sumber: BPS, diolah

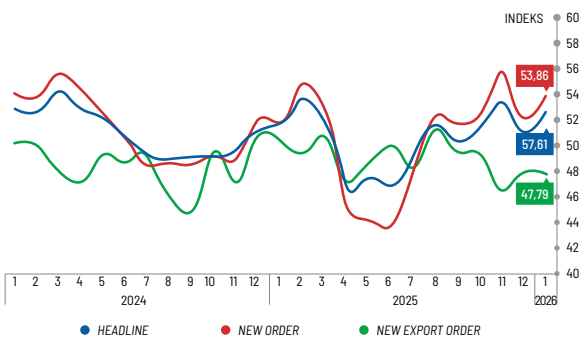
**Gambar 1.1** Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan IV 2025 (% yoy)

dan Eceran, LU Transportasi dan Pergudangan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, didukung oleh tingginya mobilitas masyarakat pada saat HBKN Nataru. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2025 sebesar 5,11% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 5,03% (yoy) seiring perbaikan kualitas ketenagakerjaan.



Sumber: Bank Indonesia. \*Data s.d. Januari 2026

Grafik 1.3 Indeks Keyakinan Konsumen



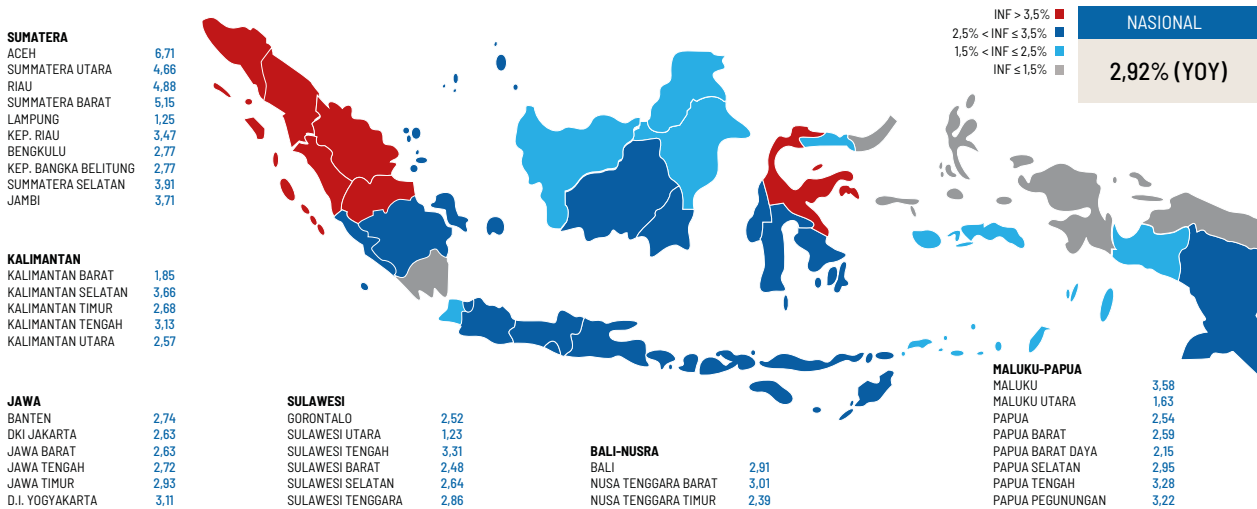
Sumber: Markit Economics

Grafik 1.4 Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 paling tinggi tercatat di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), diikuti Jawa dan Kalimantan, didorong oleh kenaikan permintaan domestik. Sementara, pertumbuhan ekonomi daerah triwulan IV 2025 di wilayah Sumatera dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh dampak bencana banjir di Sumatera pada November-Desember 2025 serta perlambatan konstruksi di wilayah Papua.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Desember 2025 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. IHK pada Desember 2025 mengalami inflasi sebesar 2,92% (yoy) didukung oleh tetap terjaganya berbagai komponen inflasi. Inflasi inti rendah sebesar 2,38% (yoy), seiring konsistensi kebijakan suku bunga, kapasitas ekonomi yang masih besar, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah, serta dampak positif dari digitalisasi. Inflasi *volatile food* (VF) relatif terkendali sebesar 6,21% (yoy), ditopang oleh upaya untuk terus menjaga ketersediaan pasokan pangan serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) serta penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional di berbagai daerah. Sementara itu, inflasi kelompok *administered prices* (AP) tercatat sebesar 1,93% (yoy), sejalan dengan terbatasnya kebijakan penyesuaian harga yang diatur oleh Pemerintah.

Secara spasial, inflasi tahunan IHK Desember 2025 di mayoritas wilayah relatif terjaga, dengan tekanan inflasi terjadi di wilayah Sumatera dan Sulampua. Inflasi tahunan tertinggi tercatat di Provinsi Aceh sebesar 6,71% (yoy), utamanya dipengaruhi oleh ketidakstabilan pasokan dan harga seiring dampak bencana banjir sejak akhir November 2025. Sementara itu, inflasi tahunan terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 1,23% (yoy) seiring pulihnya stok komoditas utama setelah mengalami kelangkaan pada bulan sebelumnya.



Sumber : BPS, diolah

Gambar 1.2 Peta Inflasi Daerah Bulan Desember 2025 (% yoy)

Dari sektor keuangan, ketahanan perbankan tetap kuat didukung oleh likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan pada Desember 2025 tercatat tinggi sebesar 25,89%, tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Adapun rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,05% (bruto) dan 0,79% (neto) pada Desember 2025. Hasil *stress test* Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi global dan domestik yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan IV 2025 tetap tinggi didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 14,26 miliar transaksi atau tumbuh 39,21% (yoy) pada triwulan IV 2025 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi melalui aplikasi *mobile* dan internet masing-masing tumbuh sebesar 12,10% (yoy) dan 15,10% (yoy), termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 139,99% (yoy). Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan *merchant*. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1.358,65 juta transaksi atau tumbuh 30,44% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp3.442,26 triliun pada triwulan IV 2025. Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 2,88 juta transaksi atau tumbuh 3,82% (yoy), dengan nilai sebesar Rp65.069,78 triliun pada triwulan IV 2025. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 12,90% (yoy) menjadi Rp1.359,94 triliun pada triwulan IV 2025.

Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Infrastruktur yang stabil tercermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada triwulan IV 2025. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas. Perluasan adopsi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) mendukung penguatan interkoneksi, tecermin dari transaksi pembayaran berbasis SNAP yang terus meningkat. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur SPBI, baik ritel maupun *wholesale*, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Selain itu, struktur industri sistem pembayaran akan terus diperkuat, khususnya pada aspek manajemen risiko dan keandalan infrastruktur teknologi pelaku industri sejalan dengan implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025

tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran (PBI PISP). Bank Indonesia konsisten menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T) serta untuk pemenuhan kebutuhan uang dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional

## C. BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan jangka pendek pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini dan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut dengan prakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1%, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (*pro-growth*) termasuk dengan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran.

Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk tetap mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut akan diwujudkan melalui langkah-langkah berikut:

1. Penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi baik transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) di pasar domestik. Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
2. Penguatan strategi operasi moneter *pro-market* dalam mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan:
  - a. mengelola struktur suku bunga instrumen moneter;
  - b. mengoptimalkan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI); dan
  - c. memperkuat peningkatan daya tarik imbal hasil SBN melalui transaksi di pasar sekunder secara terukur.

3. Penguatan efektivitas pelonggaran kebijakan makroprudensial dalam mendorong kredit/pembiayaan dan penurunan suku bunga perbankan. Langkah ini diperkuat dengan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM, termasuk respons perubahan SBDK terhadap perubahan suku bunga kebijakan Bank Indonesia;
4. Penguatan strategi akseptasi digital melalui persiapan implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok dan QRIS Antarnegara Indonesia-Korea Selatan sekitar triwulan I 2026;
5. Perluasan kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

Bank Indonesia juga terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.



## BAB 2

# EKONOMI MAKRO REGIONAL

Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 tumbuh positif dengan pertumbuhan sebesar 5,71% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (4,96%, yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan terutama ditopang oleh masih kuatnya kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan tingginya pertumbuhan Investasi. Di sisi lain, kinerja Ekspor, Impor, dan Konsumsi LNPRT tertahan, meski masih mencatatkan pertumbuhan positif. Dari sisi sektoral atau lapangan usaha, pertumbuhan terutama bersumber dari LU Perdagangan, LU Informasi dan Komunikasi (Infokom), dan LU Jasa Keuangan. LU utama lainnya yaitu LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan juga tetap tumbuh positif. Selain LU utama, LU lainnya seperti LU Jasa Perusahaan, Transportasi dan Pergudangan (Transgud), dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akamamin) tetap tumbuh tinggi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta. Berdasarkan perkembangan tersebut, perekonomian Jakarta secara keseluruhan tahun 2025 tumbuh 5,21% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya (4,90%; yoy). Pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11% (yoy).

Memasuki triwulan I 2026, perekonomian Jakarta diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan triwulan IV 2025, didorong oleh prakiraan meningkatnya kinerja Konsumsi RT seiring momentum HBKN Ramadan dan Idulfitri 2026, meningkatnya kinerja Investasi seiring prakiraan akselerasi penanaman modal guna perluasan program strategis ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan pemerintah, serta kinerja konsumsi pemerintah akibat akselerasi realisasi belanja pegawai seiring pemberian THR dan akselerasi belanja Bansos. Dari sisi LU utama, sejalan dengan sisi pengeluaran, pertumbuhan LU Perdagangan juga diperkirakan meningkat dari triwulan sebelumnya, sejalan dengan kinerja Konsumsi RT yang diperkirakan tumbuh meningkat.



### Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta (yoy)



**4,96%**  
Triwulan III 2025

**5,71%**  
Triwulan IV 2025

### Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (yoy)



**5,01%**  
Triwulan III 2025

**5,51%**  
Triwulan IV 2025

### Pertumbuhan Investasi (yoy)



**3,67%**  
Triwulan III 2025

**6,81%**  
Triwulan IV 2025

### Pertumbuhan Ekspor (yoy)

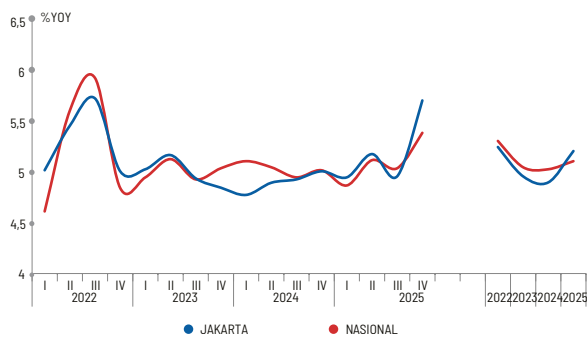


**8,62%**  
Triwulan III 2025

**7,62%**  
Triwulan IV 2025

## A. PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV 2025

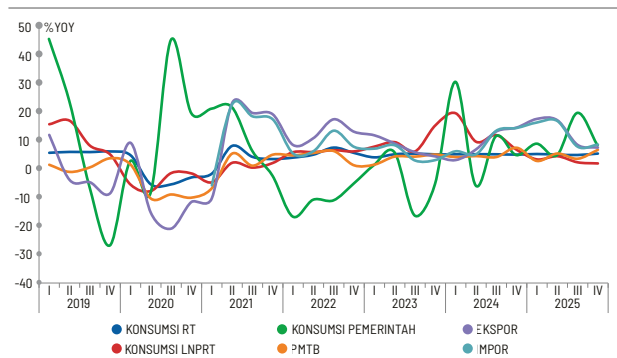
Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 mencatatkan akselerasi pertumbuhan sebesar 5,71% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,96% (yoy). Dari sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhan ekonomi Jakarta ditopang oleh menguatnya kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh LU Perdagangan, LU Infokom, dan LU Jasa Keuangan. Tingginya pertumbuhan ekonomi Jakarta juga sejalan dengan perekonomian nasional yang mencatatkan peningkatan. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,39% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (5,04%; yoy).



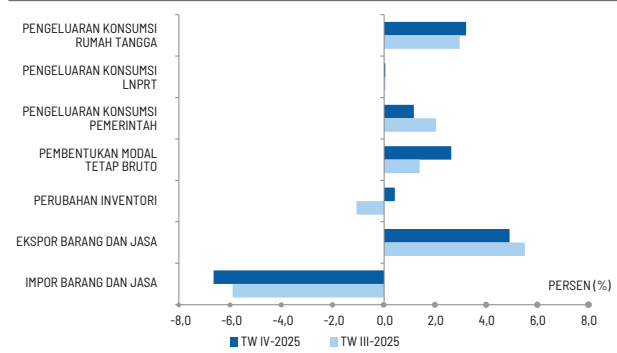
Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta Triwulanan

### Komponen Pengeluaran (Permintaan)

Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan IV 2025 terutama ditopang oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi). Konsumsi RT dengan pangsa 58,18%, tumbuh 5,51% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,01% (yoy) serta memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 3,21% terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta triwulan IV 2025 (grafik 2.3). Sementara Investasi dengan pangsa 39,02%, juga mencatatkan pertumbuhan positif 6,81% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,67% (yoy) dan memberikan kontribusi sebesar 2,63%. Selanjutnya dengan pangsa 13,95%, Konsumsi Pemerintah mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,60% (yoy) pada triwulan IV 2025 dan berkontribusi sebesar 1,17%. Adapun Konsumsi LNPRRT tumbuh 2,03% (yoy) dengan kontribusi 0,05% pada triwulan IV 2025. Dari sisi eksternal, dampak dari perang tarif dagang Amerika Serikat dan ketidakpastian global memengaruhi kinerja ekspor Jakarta yang tumbuh melambat, dari 8,62% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 7,62% (yoy) pada triwulan IV 2025. Di sisi lain, kinerja impor Jakarta pada triwulan IV 2025 tumbuh 8,67% (yoy), meningkat dari triwulan III 2025 yang dipengaruhi oleh peningkatan impor barang konsumsi dan barang modal.



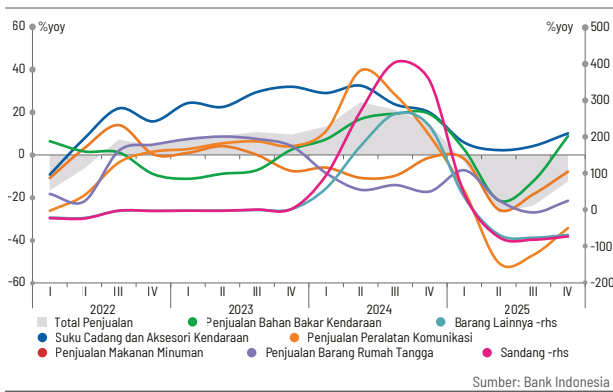
Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan IV 2025 Sisi Pengeluaran



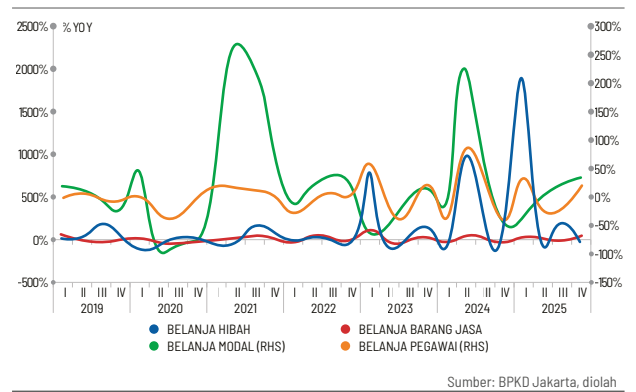
Grafik 2.3 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan IV 2025 Sisi Pengeluaran

### Konsumsi Rumah Tangga (RT)

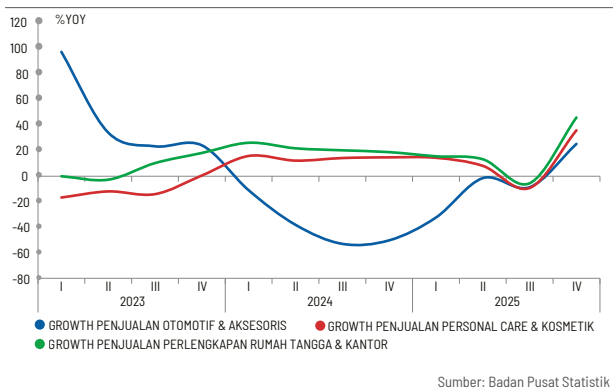
Konsumsi Rumah Tangga menunjukkan kinerja solid dan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan IV 2025. Konsumsi RT pada triwulan IV 2025 tumbuh kuat mencapai 5,51% (yoy) dengan kontribusi sebesar 3,21%, meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (5,01%; yoy) (Grafik 2.2). Relatif kuatnya pertumbuhan konsumsi RT di akhir tahun 2025 didorong oleh momentum HBKN Natal dan Tahun Baru, penyelenggaraan berbagai event dan kegiatan MICE pada akhir tahun, serta didukung oleh perbaikan pendapatan masyarakat seiring implementasi paket insentif pemerintah, seperti bantuan sosial dan diskon pajak. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Eceran Jakarta pada triwulan IV 2025 yang mencatat kontraksi 12,42% (yoy), namun membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 23,67% (yoy). Perbaikan ini didukung oleh peningkatan indeks seluruh komponen, kecuali penjualan bahan bakar kendaraan (Grafik 2.4). Lebih lanjut, penjualan *e-commerce* di Jakarta untuk komponen *personal care*, otomotif dan aksesoris, serta perlengkapan rumah tangga dan kantor juga menunjukkan kinerja positif pada triwulan IV 2025, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 35,80% (yoy), 25,19% (yoy), dan 45,92% (yoy), terakselerasi dari triwulan sebelumnya (Grafik 2.5). Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen Jakarta pada triwulan IV 2025 juga berada pada rentang yang optimis sebesar 142,90, dengan komponen Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini sebesar 1341,37 serta Indeks Ekspektasi Konsumen sebesar 154,50 (Grafik 2.6).



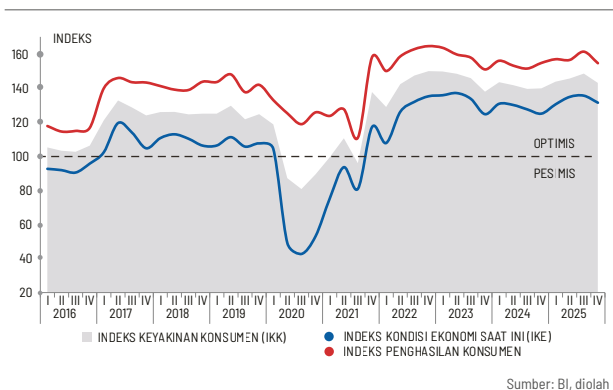
Grafik 2.4 Perkembangan Indeks Penjualan Eceran



Grafik 2.7 Realisasi Belanja Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (APBD)



Grafik 2.5 Perkembangan Penjualan e-commerce Jakarta



Grafik 2.6 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Jakarta

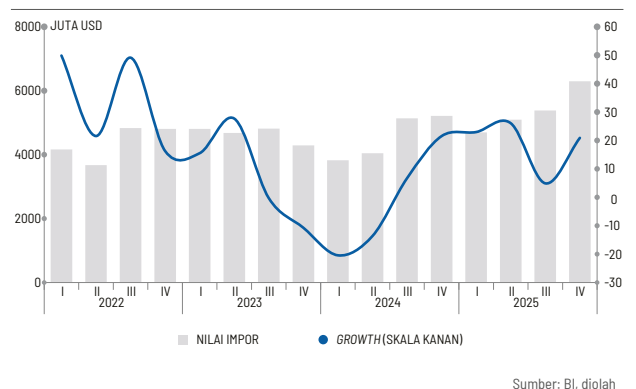
## Konsumsi Pemerintah

**Konsumsi Pemerintah tetap tumbuh pada triwulan IV 2025.** Dengan kontribusi 1,17%, Konsumsi Pemerintah mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,60% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 19,96% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh realisasi Belanja Operasi pada APBD dan Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, serta Belanja Bantuan Sosial pada APBN. Belanja Pegawai APBD tumbuh 20,72% (yoy) pada triwulan IV 2025, meningkat dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 13,05% (yoy). Sejalan dengan itu, Belanja Barang Jasa APBD tumbuh tinggi sebesar 40,10% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,83% (yoy) (Grafik 2.7). Selain itu, Belanja Modal APBD juga tumbuh 33,74% (yoy),

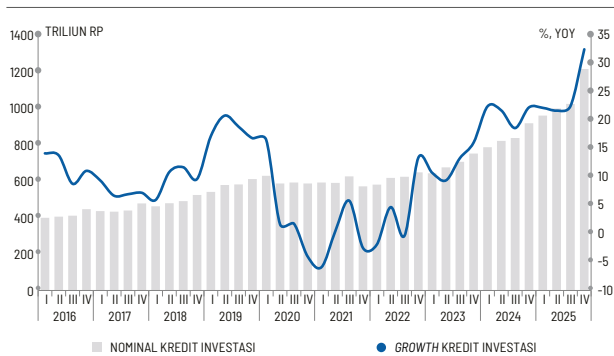
meningkat dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan 20,95% (yoy). Selanjutnya, dari sisi belanja K/L di Jakarta, berdasarkan data dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DKI Jakarta, pada triwulan IV 2025 sudah mencapai Rp1.283,92 triliun atau 92,81% dari pagu, tumbuh 27,62% (yoy).

## Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

**Investasi tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya.** Pada triwulan IV 2025, Investasi tumbuh 6,81% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (3,67%; yoy). Adapun komponen Investasi memberikan kontribusi sebesar 2,63% terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan IV 2025. Peningkatan kinerja investasi didorong oleh tingginya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta akselerasi penyelesaian proyek menjelang tutup buku akhir tahun. Kinerja Investasi yang membaik tercermin dari peningkatan pertumbuhan nilai impor barang modal yang pada triwulan IV 2025 menjadi 20,86% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,87% (yoy) (Grafik 2.8). Sejalan dengan itu, kinerja investasi yang kuat juga didukung oleh berlanjutnya berbagai proyek strategis pemerintah maupun swasta yang bersifat *multiyears* di Jakarta. Hal ini salah satunya tercermin dari perkembangan kredit investasi di Jakarta pada triwulan IV 2025 yang tumbuh tinggi sebesar 32,37% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 22,39% (yoy) (Grafik 2.9).



Grafik 2.8 Perkembangan Nilai Impor Barang Modal Jakarta

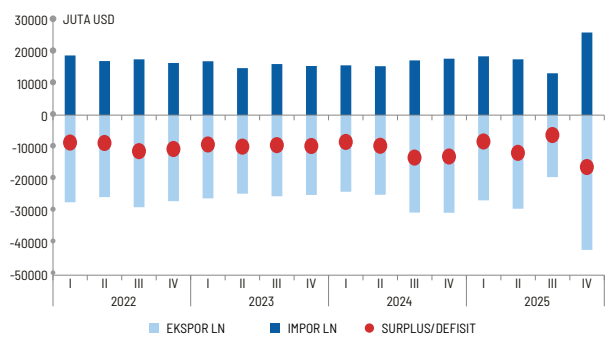


Sumber: BI, diolah

Grafik 2.9 Perkembangan Kredit Investasi di Jakarta

### Net Ekspor

Pada triwulan IV 2025, secara keseluruhan Net Ekspor DKI Jakarta tercatat defisit Rp79,09 triliun, lebih dalam dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya yang sebesar Rp57,84 triliun (Grafik 2.10). Dari sisi neraca perdagangan luar negeri, Jakarta mencatatkan defisit Net Ekspor USD16,25 miliar pada triwulan IV 2025. Defisit tersebut lebih dalam dibandingkan defisit neraca perdagangan pada triwulan sebelumnya yang sebesar USD6,25 miliar. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, ekspor luar negeri melalui Jakarta mengalami pertumbuhan 47,69% (yoy) pada triwulan IV 2025, berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan kontraksi sebesar 23,65% (yoy). Sama halnya dengan kinerja Ekspor, kinerja Impor luar negeri juga tumbuh tinggi sebesar 49,35% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 18,32% (yoy).

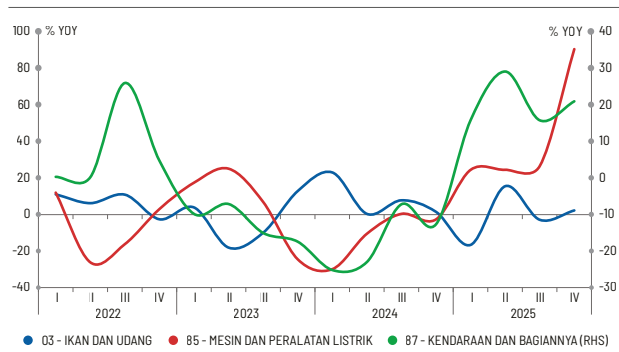


Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.10 Neraca Perdagangan Luar Negeri DKI Jakarta

### Ekspor

Di tengah gejolak perdagangan global sebagai dampak tarif perdagangan AS, ekspor tetap tumbuh meski melambat dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2025, Ekspor tumbuh 7,62% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya (8,62%; yoy). Masih tetap positifnya kinerja Ekspor didukung oleh peningkatan ekspor beberapa komoditas industri Jakarta yakni, Ikan dan Udang, Mesin dan Peralatan Listrik, serta Kendaraan dan Bagiannya. Ekspor ikan dan udang pada

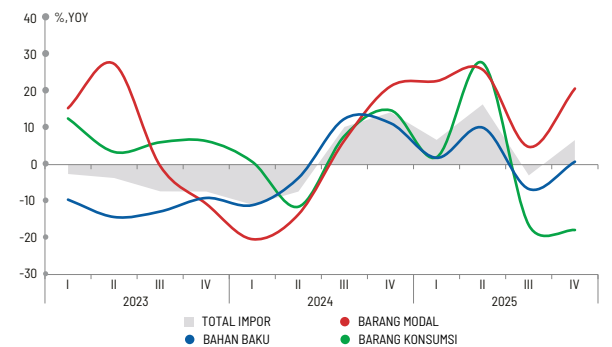


Grafik 2.11 Perkembangan Ekspor Komoditas Industri Jakarta

triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 2,28% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 2,82% (yoy). Selanjutnya, ekspor Mesin dan Peralatan Listrik serta Kendaraan dan Bagiannya tumbuh tinggi masing-masing sebesar 90,52% (yoy) dan 20,99% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (yoy) (Grafik 2.11). Dari sisi negara utama, peningkatan ekspor terdapat pada ekspor ke negara Tiongkok dan Eropa.

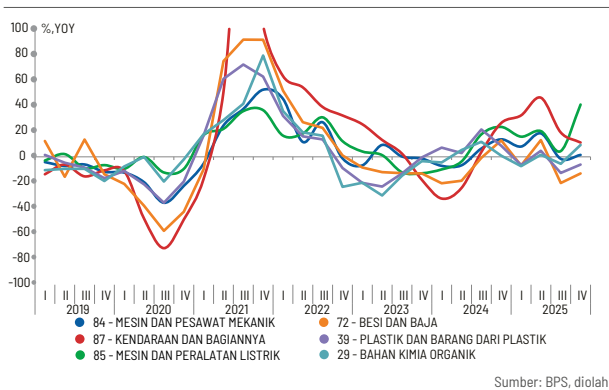
### Impor

**Kinerja Impor pada triwulan IV 2025 tetap tumbuh kuat.** Kinerja Impor Jakarta pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 8,67% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,96% (yoy). Peningkatan kinerja Impor tercermin dari komponen Impor Bahan Baku dan Barang Modal. Impor Bahan Baku dan Barang Modal masing-masing tumbuh positif sebesar 0,80% (yoy) dan 20,86% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar -6,70% (yoy) dan 4,87% (yoy). Di sisi lain, impor Barang Konsumsi mengalami kontraksi sebesar 17,91% (yoy) pada triwulan IV 2025, lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 16,60% (yoy) (Grafik 2.12). Dari sisi komoditasnya, komoditas utama impor Jakarta yakni bahan kimia organik (HS-29) dan mesin dan peralatan listrik (HS-85) mengalami pertumbuhan yang solid, namun kendaraan dan bagiannya (HS-87) tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 2.13).

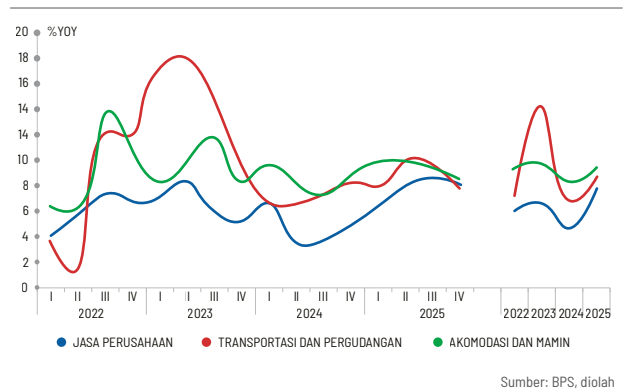


Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.12 Perkembangan Nilai Impor Barang Konsumsi, Barang Modal, dan Bahan Baku Jakarta



Grafik 2.13 Perkembangan Nilai Impor HS 84, HS 85, dan HS 87 Jakarta

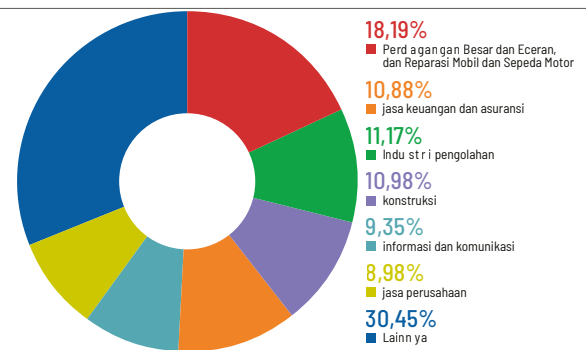


Grafik 2.15 Perkembangan Pertumbuhan LU Akmamin, LU Transgud, dan LU Jasa Perusahaan

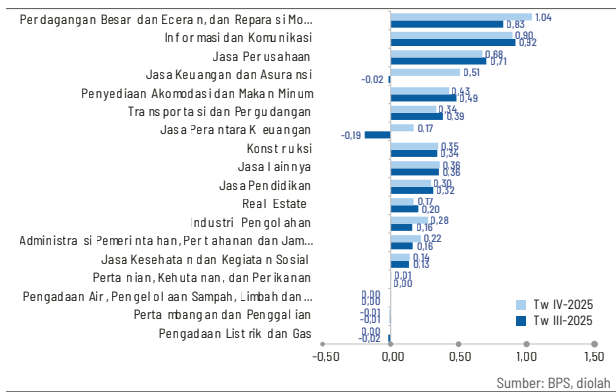
### Komponen Lapangan Usaha (Penawaran)

Dari sisi Lapangan Usaha utama DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2025 terutama bersumber dari LU Perdagangan, LU Informasi dan Komunikasi (Infokom), dan LU Jasa Keuangan. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh LU utama lainnya, yaitu LU Industri yang tetap tumbuh positif. Adapun pada LU Konstruksi, di triwulan laporan mengalami perlambatan pertumbuhan. Selain 5 (lima) LU utama, LU lainnya seperti LU Jasa Perusahaan, LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud) dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) tetap tumbuh tinggi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta (Grafik 2.14 dan 2.15). Pada triwulan IV 2025, LU Perdagangan masih menjadi penopang utama perekonomian Jakarta, disusul oleh LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, LU Jasa Keuangan, dan LU Infokom dengan porsi masing-masing sebesar 18,19%; 11,17%; 10,98%; 10,88%, dan 9,35% (Grafik 2.14).

LU utama tersebut di atas juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan laporan, utamanya LU Perdagangan, LU Infokom, dan LU Jasa Perusahaan yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 1,04% (yoy); 0,90% (yoy); dan 0,68% (yoy) (Grafik 2.16). Masih kuatnya pertumbuhan pada ketiga sektor ekonomi utama tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan wisman dan wisnus tujuan Jakarta, serta peningkatan aktivitas MICE dan event yang diselenggarakan di Jakarta pada triwulan laporan. Selain itu, terdapat rilis beberapa film dan serial dengan rating yang tinggi pada bioskop dan layanan *streaming* juga berdampak pada



Grafik 2.16 Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta Triwulan IV 2025

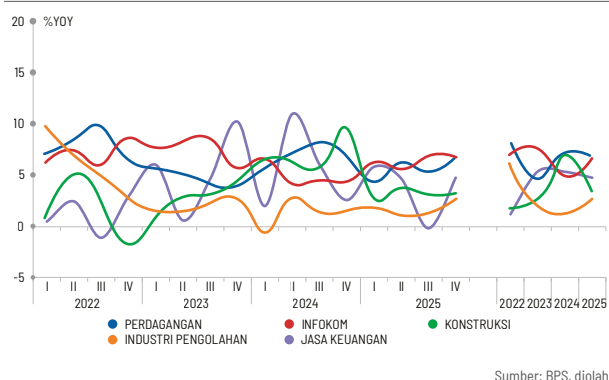


Grafik 2.17 Kontribusi Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Berdasarkan Lapangan Usaha

tingginya pertumbuhan LU Infokom pada triwulan laporan. Selanjutnya pada LU Penyediaan Akmamin dan LU Transportasi & Pergudangan, juga turut memberikan kontribusi sebesar 0,47% (yoy) dan 0,37% (yoy) (Grafik 2.17). Hal ini antara lain terindikasi dari meningkatnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok pada triwulan laporan.

### Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

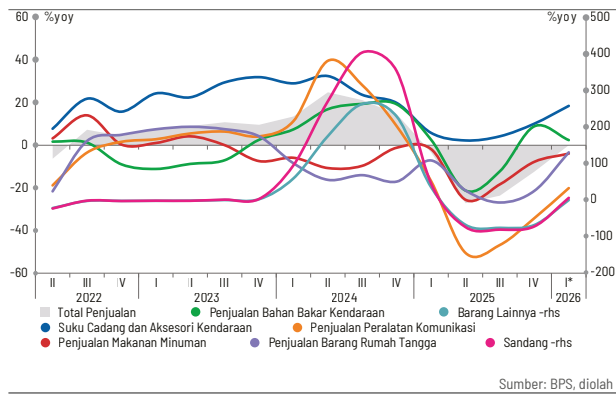
LU Perdagangan dengan kontribusi 1,04% (yoy) menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan IV 2025, dengan laju pertumbuhan sebesar 6,55% (yoy), meningkat dibandingkan laju pertumbuhan triwulan sebelumnya (5,15%; yoy) (Grafik 2.18). Pertumbuhan LU Perdagangan yang meningkat sejalan dengan membaiknya perkembangan indeks penjualan eceran, walaupun



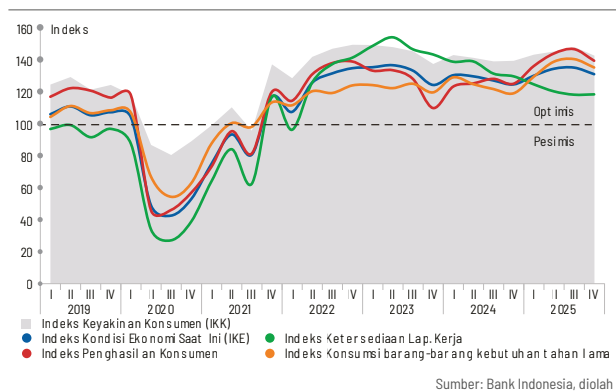
Grafik 2.14 Perkembangan Pertumbuhan Lima LU Utama

masih mengalami kontraksi pada triwulan IV 2025. Nilai pertumbuhan total penjualan eceran mengalami kontraksi 12,42% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang juga berkontraksi 23,67% (yoy) (Grafik 2.18). Selain itu, keyakinan konsumen masih menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan nilai Indeks Kondisi Konsumen dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini pada triwulan IV 2025 masing-masing sebesar 142,90 dan 131,70, meskipun sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya (148,40 dan 135,50) (Grafik 2.19). Peningkatan LU Perdagangan juga dipengaruhi oleh meningkatnya penyaluran kredit sektor perdagangan yang tumbuh sebesar 17,55% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (5,59%; yoy) (Grafik 2.20).

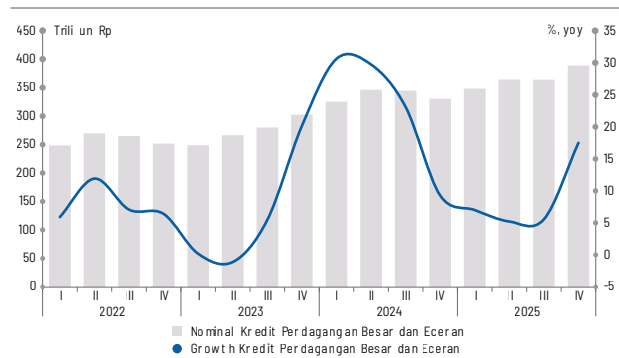
Dari sisi ekspor otomotif, kinerja perdagangan juga didukung oleh membaiknya permintaan global yang tercermin dari membaiknya kinerja penjualan kendaraan di Jakarta yang tumbuh sebesar 4,40% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 17,41% (yoy) (Grafik 2.21). Hal ini seiring dengan normalisasi kinerja ekspor otomotif Jakarta sejak tahun 2024, dimana ekspor ke beberapa negara tujuan utama a.l. Jepang, Meksiko, Uruguay, dan Ekuador kembali berlanjut, serta beberapa masalah perubahan regulasi yang sudah terselesaikan dengan negara Timur Tengah dan Amerika Selatan, ditambah dengan minimalnya dampak daripada tensi geopolitik di Timur Tengah terhadap rute ekspor barang otomotif Jakarta yang saat ini dapat melewati jalur alternatif yakni Jeddah dan Dammam.



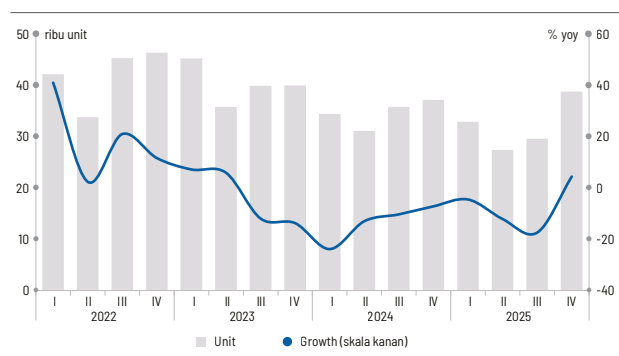
Grafik 2.18 Perkembangan Survei Penjualan Eceran DKI Jakarta



Grafik 2.19 Perkembangan Indeks Kondisi Konsumen



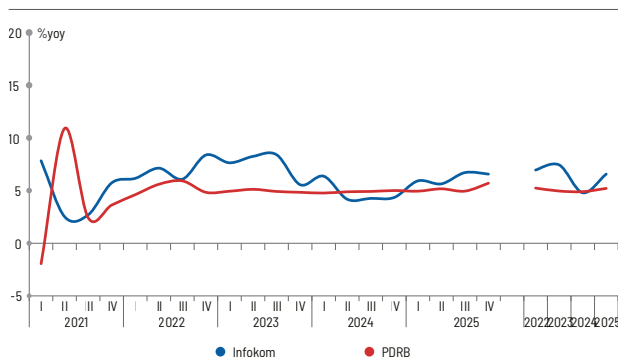
Grafik 2.20 Perkembangan Kredit Sektor Perdagangan DKI Jakarta



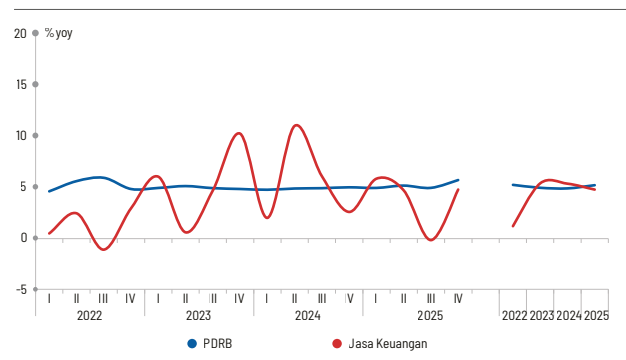
Grafik 2.21 Perkembangan Penjualan Mobil di Jakarta

## Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi

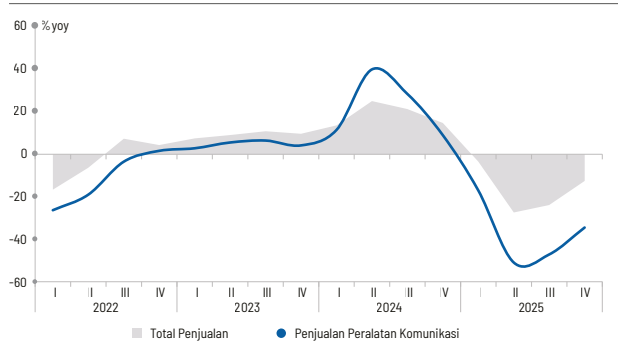
LU Informasi dan Komunikasi (Infokom) dengan kontribusi 0,90% (yoy) menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan IV 2025, mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,58% (yoy), meskipun lebih rendah dari triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 6,72% (yoy) (Grafik 2.22). Pertumbuhan LU Infokom DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 terpantau tetap kuat, ditopang oleh beberapa faktor utama. Dari sisi konektivitas, penetrasi internet nasional meningkat signifikan mencapai 229 juta pengguna atau sekitar 80,66% dari total populasi pada pertengahan 2025, naik dari 212 juta pengguna pada awal tahun. Jakarta tercatat memiliki tingkat penetrasi tertinggi yaitu mencapai 91,35% (Survey APJII, 2025). Kenaikan jumlah pengguna internet tersebut turut didukung oleh Jakarta sebagai pusat teknologi nasional dengan infrastruktur digital yang semakin matang, contohnya pada Mei 2025 Microsoft resmi membuka *region cloud* pertama di Indonesia (Indonesia Central) yang berpusat di Jakarta, sebagai bagian dari rencana investasi sebesar USD1,7 miliar tahun 2024-2028 untuk infrastruktur AI dan cloud di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, sektor infokom merupakan salah satu sektor dengan nilai investasi terbesar di Jakarta sepanjang tahun 2025. Beberapa contoh investasi besar di sektor ini antara lain: ekspansi jaringan oleh operator seluler (Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata) untuk meningkatkan kapasitas 4G/5G; investasi perusahaan *tech giants* global (selain Microsoft, Google dan Amazon) juga telah membuka *region cloud/data center* di sekitar Jakarta; serta maraknya pendanaan startup di ekosistem digital Jakarta (*fintech, e-commerce, ride-hailing, edutech*



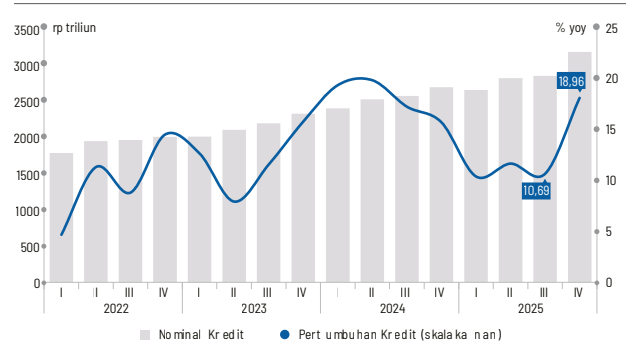
Grafik 2.22 Perkembangan LU Infokom dan PDRB Jakarta



Grafik 2.24 Perkembangan PDRB LU Jasa Keuangan dan PDRB di Jakarta



Grafik 2.23 Perkembangan Indeks Penjualan Peralatan Komunikasi Jakarta

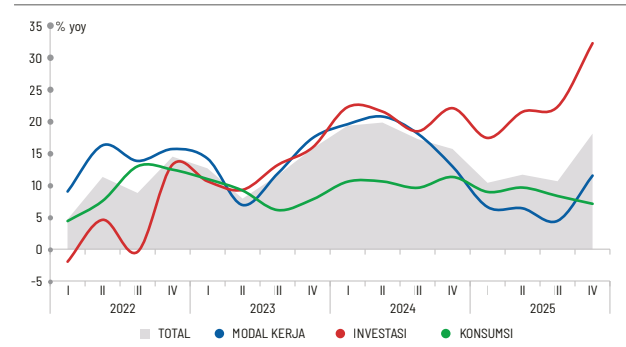


Grafik 2.25 Perkembangan Penyaluran Kredit di Jakarta

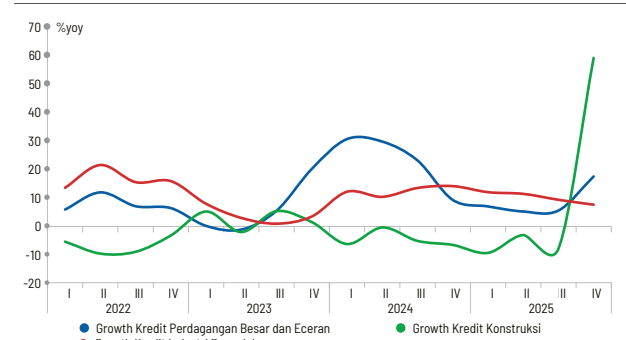
dan lainnya yang berbasis di ibu kota). Momentum ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan sektor Infokom di Jakarta tidak hanya ditopang oleh tren peningkatan konektivitas internet, tetapi juga diperkuat oleh ekosistem infrastruktur digital yang semakin siap, daya beli masyarakat yang terjaga, serta intensitas kegiatan masyarakat yang memacu permintaan terhadap layanan digital, yang salah satunya tercermin dari membaiknya indeks penjualan peralatan komunikasi, dari triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi 46,80% (yoy), pada triwulan IV 2025 mencatat penurunan kontraksi sebesar 34,22% (yoy) (Grafik 2.23).

### Lapangan Usaha Jasa Keuangan

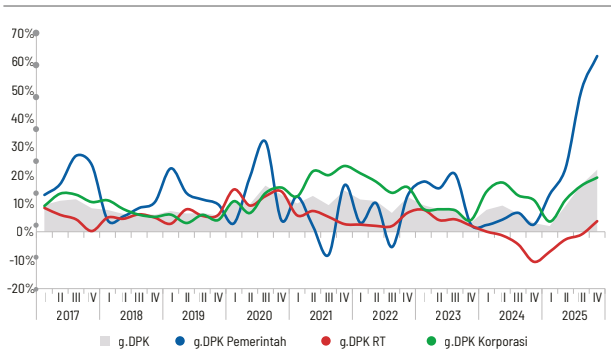
Pada triwulan IV 2025, LU Jasa Keuangan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,78% (yoy) dengan andil sebesar 0,51%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,15% (yoy) (Grafik 2.24). Meningkatnya pertumbuhan LU Jasa Keuangan sejalan dengan peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit dari 10,69% (yoy) di triwulan sebelumnya menjadi 18,16% (yoy) (Grafik 2.25). Lebih lanjut jika dilihat dari jenis penggunaannya, peningkatan kredit utamanya disebabkan oleh meningkatnya kinerja pada kredit modal kerja dan investasi yang tumbuh sebesar 11,56% (yoy) dan 32,37% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (4,46%;yoy dan 22,39%;yoy) (Grafik 2.26). Adapun secara sektoral, meningkatnya kinerja kredit terutama dipengaruhi peningkatan kredit ke sektor Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran di triwulan IV 2025 yang masing-masing tumbuh di triwulan laporan. (Grafik 2.27).



Grafik 2.26 Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja di Jakarta

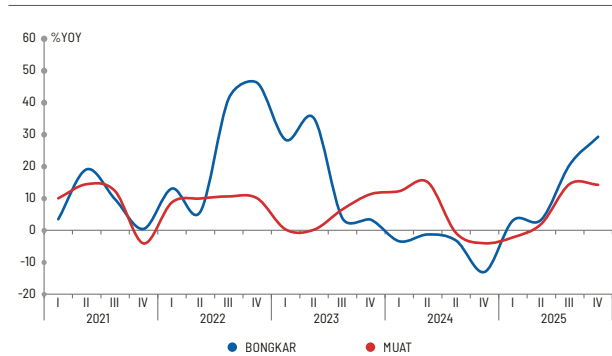


Grafik 2.27 Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor Lapangan Usaha Utama DKI Jakarta

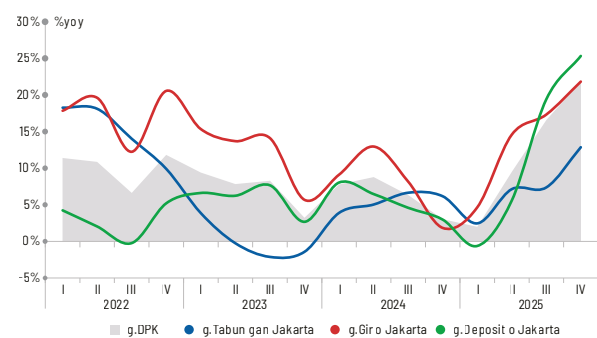


Sumber: BI, diolah

Grafik 2.28 Perkembangan DPK di Jakarta Berdasarkan Kepemilikan

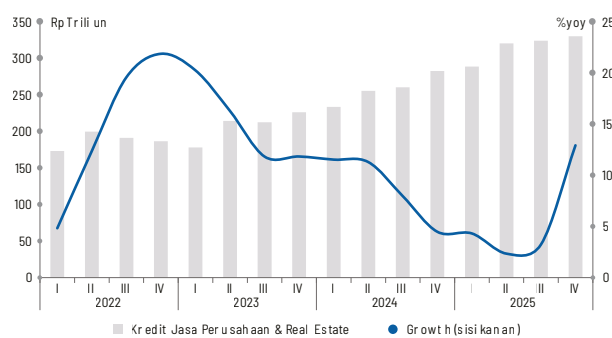


Grafik 2.30 Perkembangan Aktivitas Bongkar Muat Tj. Priok



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.29 Perkembangan DPK Berdasarkan Rekening di Jakarta

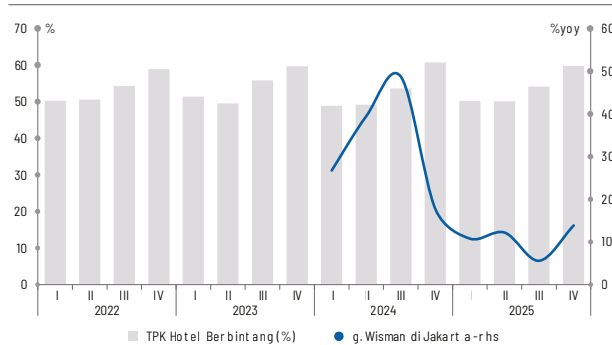


Grafik 2.31 Perkembangan Wisatawan Mancanegara (Wisman) dan TPK Hotel Berbintang Jakarta

Selanjutnya, dari sisi perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Jakarta, pada triwulan IV 2025 tumbuh kuat sebesar 21,90% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,62% (yoy). Hal ini terutama ditopang meningkatnya pertumbuhan DPK Pemerintah, DPK Korporasi dan DPK Rumah Tangga yang masing-masing tumbuh sebesar 61,93% (yoy), 19,10% (yoy), dan 3,72% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh sebesar 49,78% (yoy), 16,26% (yoy), dan -1,00% (yoy) (Grafik 2.28). Dari sisi kepemilikan rekening, meningkatnya perkembangan DPK di Jakarta ditopang oleh pertumbuhan pada rekening deposito, giro, maupun tabungan rumah tangga dan non-rumah tangga di Jakarta yang tumbuh pada triwulan IV 2025 sebesar 25,39% (yoy), 21,86% (yoy), dan 12,90% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh 19,45% (yoy), 17,35% (yoy), dan 7,39% (yoy) (Grafik 2.29).

### Lapangan Usaha Jasa Perusahaan, Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin), serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan (Transgud)

LU Lainnya dengan kontribusi tinggi yang mencakup: LU Jasa Perusahaan, LU Akmamin, dan LU Transgud dengan andil masing-masing sebesar 0,68%, 0,43%, dan 0,34%, pada triwulan IV 2025 mencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar 8,11% (yoy); 8,40% (yoy); dan 7,87% (yoy), nilai ini melambat jika dibandingkan triwulan III 2025 (8,58% yoy; 9,79% yoy; dan 9,90% yoy). Kendati demikian, pertumbuhan ketiga sektor tersebut tetap kuat sejalan

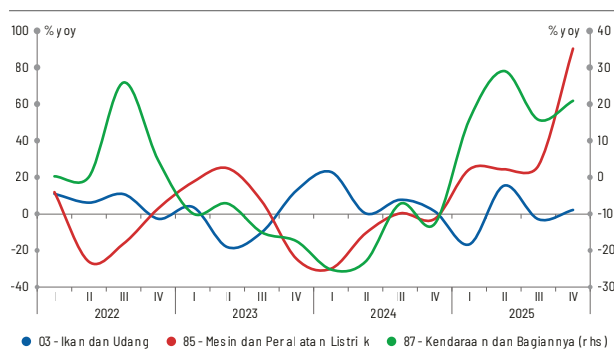


Grafik 2.32 Perkembangan DPK di Jakarta Berdasarkan Kepemilikan

dengan peningkatan wisman dan wisnus tujuan Jakarta, banyaknya pelaksanaan MICE dan event, serta meningkatnya aktivitas pemerintahan sejalan dengan akselerasi realisasi belanja APBN dan APBD menjelang akhir tahun anggaran. Sejalan dengan itu, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang meningkat juga mencerminkan peningkatan aktivitas transportasi pergudangan. Peningkatan pada LU Transportasi dan Pergudangan juga tercermin dari meningkatnya penyaluran kredit kepada sektor tersebut di triwulan III 2025 dengan pertumbuhan yang tetap kuat sebesar 24,51% (yoy). Selanjutnya, peningkatan LU Akmamin juga sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara di Jakarta yang tumbuh 58,37% (yoy) di triwulan laporan.

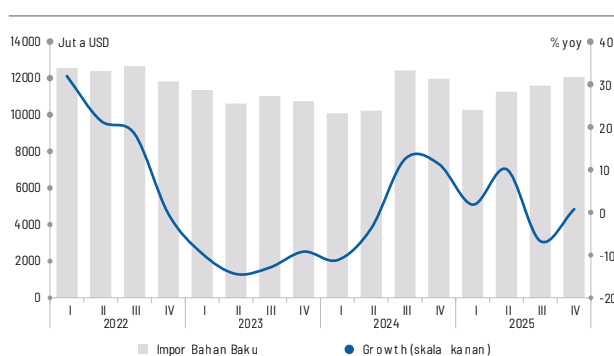
## Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Sebagai salah satu LU utama, LU Industri Pengolahan mengalami peningkatan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 walaupun tidak setinggi LU Utama lainnya. Dengan andil terhadap pertumbuhan triwulan III 2025 sebesar 0,28%, LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 2,53% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (1,44%; yoy). Peningkatan ini terutama ditopang oleh meningkatnya kinerja industri alat angkut, industri elektronik, serta industri makanan dan minuman (mamin). Hal tersebut tercermin dari ekspor komoditas kendaraan dan bagiannya, mesin dan peralatan listrik, serta ikan dan udang yang meningkat pada akhir triwulan IV 2025 masing-masing sebesar 20,99% (yoy); 90,52% (yoy); dan 2,28% (yoy) lebih tinggi dari awal triwulan III 2025 (15,80%yoy; 26,53%yoy; -2,82%yoy) (Grafik 2.33). Peningkatan juga diikuti oleh membaiknya impor bahan baku, walaupun masih berkontraksi namun lebih rendah yaitu sebesar 2,60% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 13,08% (yoy) (Grafik 2.34).



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 2.33 Pertumbuhan ekspor komoditas industri DKI Jakarta



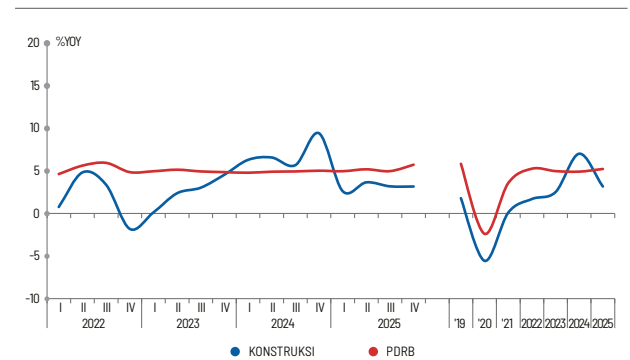
Sumber: Kubus Impor, DSta

Grafik 2.34 Perkembangan Impor Bahan Baku DKI Jakarta

## Lapangan Usaha Konstruksi

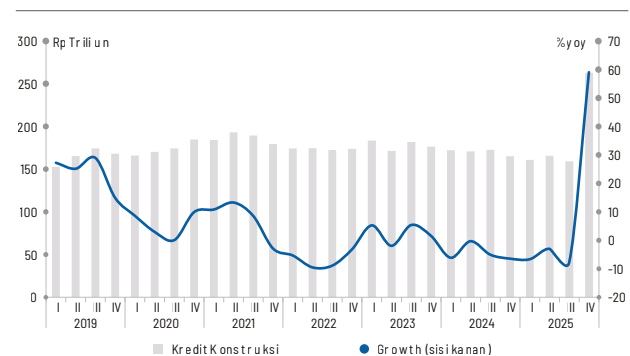
Dengan pertumbuhan sebesar 3,15% (yoy), LU Konstruksi sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,17% (yoy) (Grafik 2.35). Perlambatan tersebut tercermin dari perkembangan realisasi pengadaan semen di DKI Jakarta yang menurun hingga berkontraksi sebesar 15,03% (yoy) (Grafik 2.37).

Kendati demikian, perlambatan lebih lanjut tertahan oleh realisasi penyaluran kredit ke sektor konstruksi pada triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 59,12% (yoy), meningkat cukup signifikan dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 7,78% (yoy) (Grafik 2.36).



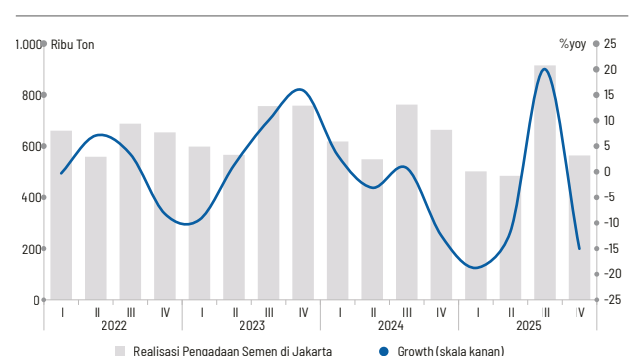
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.35 Pertumbuhan LU Konstruksi dan PDRB DKI Jakarta



Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.36 Perkembangan Penyaluran Kredit Konstruksi di Jakarta



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 2.37 Perkembangan Realisasi Pengadaan Semen di Jakarta

Selanjutnya, masih kuatnya kinerja LU Konstruksi di Jakarta diiringi dengan beberapa proyek strategis pemerintah maupun swasta yang masih berlanjut pada triwulan II 2025, diantaranya: Proyek Jakarta Sewerage Development Project (Zone 1) yang berlokasi di Pluit, Jakarta Utara masih dalam proses konstruksi. Jakarta Sewerage Development Project (Zone 1) dikerjakan oleh 4 (empat) penyedia jasa yang disebut

OWJJ (Obayashi, Wijaya Karya, Jaya Konstruksi, JFE Engineering Joint Venture) dengan nilai pekerjaan Rp3,23 triliun. Pekerjaan ini mempunyai masa pelaksanaan 1.634 hari dimulai sejak 18 April 2023 dan direncanakan akan selesai pada 16 Oktober 2027, progres pekerjaan saat ini *package 1 : construction of WWTP* 33,63% (fisik) & 40,03% (keuangan), *package 2 : construction of sewers area 1-1* 39,39% (fisik) & 39,11% (keuangan), *package 3 : construction of sewers 1-2* 39,67% (fisik) & 37,56% (keuangan), *package 4 : construction of pilot area* 59,15% (fisik) & 57,41% (keuangan).

Selain itu, pengerjaan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta (Tahap I Seksi B & C, Tahap II, dan Tahap III) masih berjalan dan sebagian besar masih dalam proses pembebasan lahan. Jalan tol ini terdiri dari 6(enam) ruas dan secara keseluruhan memiliki panjang 69,77 kilometer yang terbagi dalam 3(tiga) tahap pembangunan, tahap I sepanjang 29,67 kilometer, tahap II sepanjang 22,25 kilometer, dan tahap III sepanjang 17,86 kilometer. Sesi A ruas Kelapa Gading – Pulo Gebang telah 100% selesai dan sudah beroperasi sejak 2021, sesi B ruas Semanan – Grogol sepanjang 9,51 kilometer saat ini sedang dalam proses konstruksi dengan realisasi progress fisik sebesar 0,77% dan progress tanah bebas sebesar 16,73%, sesi C ruas Grogol –Kelapa Gading dengan progress fisik sebesar 0,55 % dan progress tanah bebas sebesar 10,53%. Sesi B (Semanan–Grogol) dan Sesi C (Grogol–Kelapa Gading) masih belum masuk fase konstruksi dan masih berada pada tahap pembebasan lahan hingga akhir 2023, dengan progres rendah. Lambatnya progres disebabkan penerbitan Penetapan Lokasi (Penlok) yang belum terbit meski telah diajukan sejak 14 Maret 2025. Selain itu, ada permasalahan aset Kementerian: Hak Pengelolaan (HPL) tanah milik Kementerian Setneg seluas 4 ha yang akan dilintasi jalan tol, belum selesai kompensasinya karena usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) ditolak Kemenkeu, dan aset Kodam Jaya yang juga berstatus BMN telah dikuasai ±400 KK bersertifikat, namun usulan penghapusannya juga ditolak Kemenkeu. Kondisi ini membuat konstruksi baru dapat berjalan setelah progres pembebasan lahan minimal mencapai 70%.

Progres konstruksi proyek tanggul pantai/laut/ NCICD diperkirakan akan selesai akhir tahun 2025 dan akan mulai beroperasi pada 2027. Pekerjaan pembangunan pengaman pantai di pesisir Teluk Jakarta tahap 7 terbagi dalam tiga paket dengan progres fisik dan keuangan sekitar 28,07%. Paket 1 meliputi pembangunan 100 meter tanggul dan saluran drainase dengan kontrak dimulai Juli 2025, sementara paket 2 dan 3 fokus pada pembangunan tanggul 850 meter dan satu unit polder dengan pembiayaan SBSN dan rencana anggaran 2026-2027. Hambatan utama pada paket 1 adalah adanya bangunan warga di trase drainase dan kapal nelayan yang bersandar di trase timbunan batu boulder, yang ditindaklanjuti dengan strategi komunikasi efektif, penyesuaian desain teknis, serta penyediaan jalur relokasi kapal nelayan agar pekerjaan berjalan lancar tanpa konflik sosial.

Proyek LRT Jakarta Fase 1B dengan rute Velodrome–Manggarai, per 4 November 2025 menunjukkan perkembangan positif yaitu telah mencapai 77,90% yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur, dan *trackwork*. Secara umum, progres pembangunan telah memasuki perkembangan suplai material pembangunan juga terus berjalan. Pengadaan beton precast dan readymix dilakukan dengan cepat dan terjamin kualitasnya. Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome–Manggarai ditargetkan selesai Juni 2026. Waskita Karya terlibat dalam pembangunan LRT Jakarta melalui KSO Waskita–Nindya LRS sebagai kontraktor utama pembangunan. KSO ini ditunjuk oleh PT Jakarta Propertindo selaku pemilik proyek melalui proses tender. Total anggaran pembangunan sebesar Rp4,1 triliun. Dana ini berasal dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang bersumber dari APBD DKI Jakarta. Keberadaan tambahan jalur ke Manggarai, akan menambah panjang jaringan LRT Jakarta Fase 1A yang sudah beroperasi dengan enam stasiun yaitu Stasiun Pegangsaan Dua, Stasiun Boulevard Utara, Stasiun Boulevard Selatan, Stasiun Pulomas, Stasiun Equestrian dan Stasiun Velodrome. Secara keseluruhan total panjang jalur LRT Jakarta dari Stasiun Pegangsaan Dua (Kelapa Gading) hingga Stasiun Manggarai mencapai 12,2 km dengan waktu tempuh sekitar 26 menit.

Proses konstruksi proyek MRT Fase II CP 201 (Stasiun Bundaran HI–Monas) per Oktober 2025 menunjukkan perkembangan yang positif yaitu telah mencapai 90,20% dengan sejumlah pekerjaan utama di Stasiun Thamrin meliputi *test pit* utilitas dan pemasangan *traffic decking* pada entre 1, pemasangan *boredpile* pada entre 3, pemasangan *waterproofing* dan *rebar base slab* & pekerjaan arsitektural pemasangan dinding pada *combine building* entre 4 CTVT, pemasangan *rebar* untuk dinding entre 5, 7, dan 8, serta *jet grouting* di entre 6. Selain itu, tim konstruksi juga melanjutkan pekerjaan instalasi *homogeneous tile*, dinding ACP, dinding *drywall* dan rangka *ceiling* pada *level concourse* dan *platform*, serta instalasi pipa, *ducting*, *cable tray*, *fireboard* dan *hydrant box*. Stasiun Thamrin merupakan stasiun dengan *entrance* terbanyak, yaitu sembilan, serta stasiun terpanjang hingga 440 meter. Stasiun ini juga akan menjadi stasiun transit dengan lintasan Timur–Barat. Di Stasiun Monas, pekerjaan utama meliputi *reinstatement* entre 1, pengecoran dinding dan atap entre 2, penyelesaian arsitektural pada koridor entre 1 & 2, instalasi *steel structure elevator* 1 pada level ground, instalasi granit dan handrail tangga, serta shutter pada entre 1, dan instalasi travelator, pipa, *ducting*, serta *partial acceptance test* untuk *station fan*, *socket outlet*, dan *lighting fixtures*. Kedua stasiun ini ditargetkan beroperasi pada 2027 mendatang. Target paket kontrak CP202 pun terlampaui, yakni dari 55,78 persen, per Oktober 2025, perkembangannya mencapai 59,36 persen. Sejumlah pekerjaan utama seperti ekskavasi boks stasiun, pengecoran *base slab* dan *waterproofing canal underpass*, hingga persiapan breakthrough TBM 1 di sisi udara Stasiun Sawah Besar. Sedangkan pada paket kontrak CP203, per Oktober 2025, telah menyelesaikan 79,11 persen pekerjaannya dari target 78,31 persen. Sejumlah pekerjaan utama terus dikerjakan seperti struktur kolom pada entre stasiun, *backfill*, hingga instalasi *hanging wall* pintu tepi peron (*platform screen doors*). Khusus di Stasiun

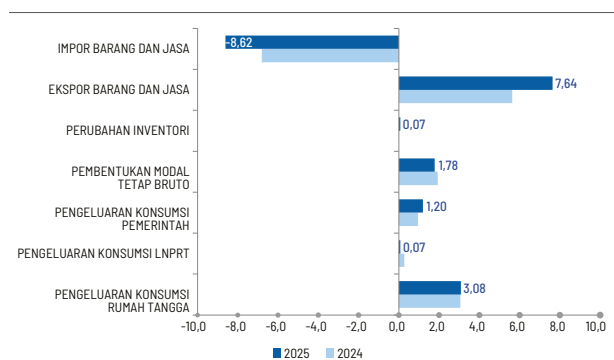
Glodok, tim konstruksi sedang mempersiapkan breakthrough TBM 1 ke Stasiun Mangga Besar.

## B. PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2025

Secara keseluruhan tahun, kinerja ekonomi Jakarta pada tahun 2025 tumbuh meningkat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ekonomi Jakarta pada tahun 2025 tumbuh mencapai 5,71%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,90% (ctc). Pertumbuhan pada tahun 2025 terjadi pada semua komponen pengeluaran dan lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2025 terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,51% (yoy) didorong oleh perbaikan permintaan domestik, kemudian diikuti oleh investasi PMTB yang tumbuh sebesar 6,81% (yoy), seiring meningkatnya realisasi investasi baik oleh swasta maupun pemerintah. Konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 8,60% (yoy), didorong akselerasi realisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa pemerintah. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), ketiga LU utama DKI Jakarta yakni LU Perdagangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Jasa Keuangan mencatatkan peningkatan kinerja pada tahun 2025. Kendati demikian, LU Konstruksi dan LU Infokom mencatatkan perlambatan kinerja pada tahun 2025. Adapun, struktur perekonomian Provinsi DKI Jakarta terutama ditopang oleh LU Perdagangan, LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, LU Jasa Keuangan, dan LU Infokom dengan bobot terhadap PDRB DKI Jakarta pada tahun 2025 masing-masing sebesar 18,19%; 11,17%; 10,98%; 10,88%; dan 9,35%. Kinerja positif ini sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut sama halnya dengan perekonomian nasional. Pada tahun 2025, perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DKI Jakarta.

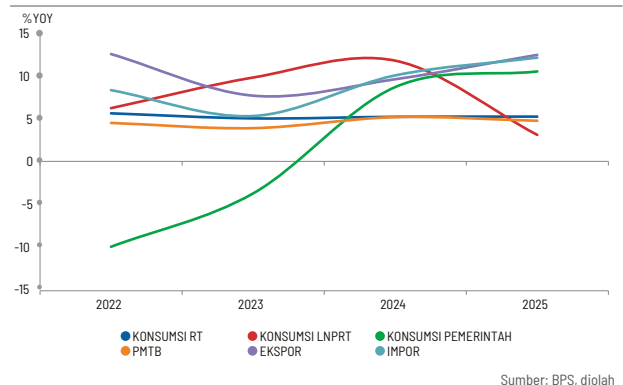
### Komponen Pengeluaran (Permintaan)

Seluruh komponen pengeluaran PDRB Jakarta pada tahun 2025 mencatatkan kinerja positif. Konsumsi Rumah Tangga sebagai kontributor utama perekonomian Jakarta (Grafik 2.38), mencatatkan pertumbuhan 5,25% (yoy). Berdasarkan pertumbuhan, Konsumsi Pemerintah menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 10,56% (yoy), diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi) dan Konsumsi LNPRT dengan pertumbuhan masing-masing 4,77% (yoy) dan 3,12%



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.38 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tahun 2025 Sisi Pengeluaran



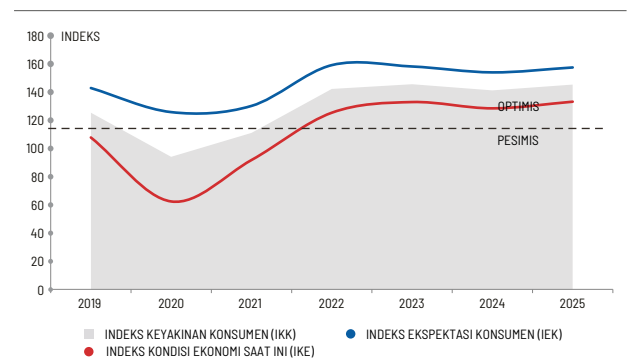
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.39 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tahun 2025 Sisi Pengeluaran

(yoy). Lebih lanjut, komponen Ekspor dan Impor masing-masing tumbuh 12,50% (yoy) dan 12,18% (yoy) (Grafik 2.39).

### Konsumsi Rumah Tangga (RT)

Pada tahun 2025, kinerja Konsumsi RT tumbuh sebesar 5,25% (yoy), meningkat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,23% (yoy). Meningkatnya kinerja Konsumsi RT pada tahun 2025 menunjukkan optimisme dari masyarakat Jakarta, hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari 141,02 pada tahun 2024 menjadi 145,1 pada tahun 2025 (Grafik 2.40). Peningkatan Konsumsi RT juga seiring maraknya penyelenggaraan berbagai event dan kegiatan MICE, baik yang berskala domestik maupun internasional di Jakarta. Selain itu, dari sisi pendapatan masyarakat juga relatif terjaga seiring implementasi berbagai paket insentif pemerintah, seperti bantuan sosial, diskon transportasi dan diskon pajak.



Konsumen BI, diolah

Grafik 2.40 Perkembangan IKK, IKE, IEK Jakarta

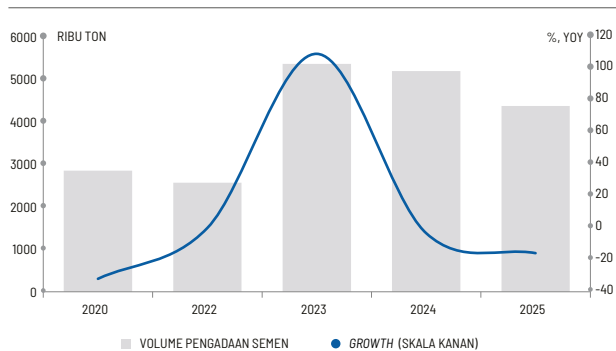
### Konsumsi Pemerintah

Konsumsi Pemerintah secara tahunan tumbuh 10,56% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 8,72% (yoy). Peningkatan konsumsi pemerintah sejalan dengan penajaman prioritas belanja Pemerintah DKI Jakarta (*better spending*) meski menghadapi keterbatasan ruang fiskal sebagai imbas dari program efisiensi. Dari sisi APBD, Belanja Daerah tumbuh 15,22% (yoy) pada tahun 2025 didukung oleh komponen Belanja Modal dan Belanja Operasi yang tumbuh masing-masing 26,45% (yoy) dan 13,23% (yoy), lebih tinggi dari

tahun sebelumnya. Dari sisi APBN, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal menunjukkan kinerja solid dengan pertumbuhan 83,27% (yoy), 36,95% (yoy), dan 29,70% (yoy), berbalik arah dari tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi.

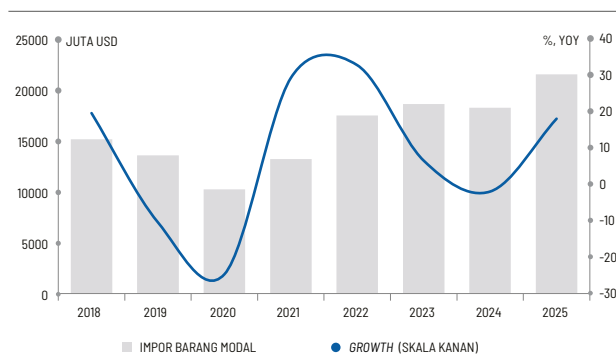
### Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Investasi tahun 2025 tumbuh 4,77% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,20% (yoy). Perlambatan kinerja investasi tercermin dari realisasi pengadaan semen yang terkontraksi 15,8% (yoy), lebih dalam dari tahun 2024 yang terkontraksi 3,2% (yoy) (Grafik 2.41). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perlambatan investasi bangunan di Jakarta tahun 2025. Kendati demikian, investasi non bangunan menunjukkan kinerja positif, tercermin dari pertumbuhan impor barang modal yang mencatat kontraksi 2,3% (yoy) pada tahun 2024 menjadi 17,9% (yoy) pada tahun 2025 (Grafik 2.42).



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 2.41 Pertumbuhan Pengadaan Semen di Jakarta

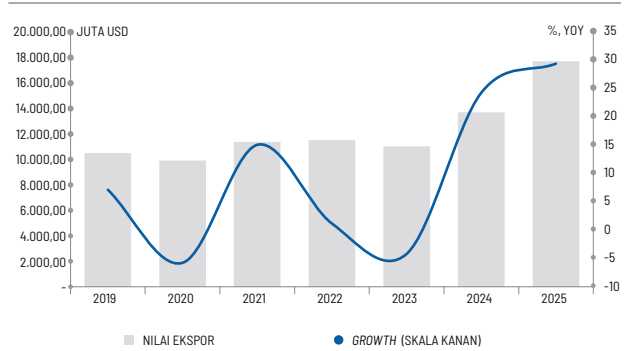


Sumber: BI, diolah

Grafik 2.42 Pertumbuhan Impor Barang Modal

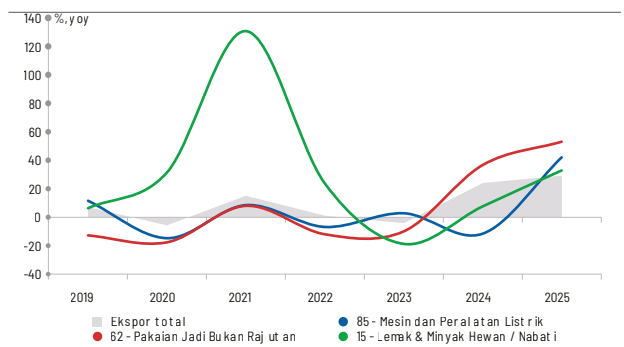
### Ekspor

Kinerja Ekspor Jakarta tahun 2025 tercatat sebesar 12,50% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,64% (yoy). Total nilai ekspor pada tahun 2025 mencapai USD17,63 juta, tumbuh 29,28% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 24,16% (yoy) (Grafik 2.43). Kinerja ekspor utamanya didukung oleh peningkatan ekspor komoditas Mesin dan Peralatan Listrik, Pakaian Jadi Bukan Rajutan, dan Lemak & Minyak Hewan/Nabati yang masing-masing tumbuh 42,20% (yoy), 53,10% (yoy), dan 32,85% (yoy) (Grafik 2.44).



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.43 Pertumbuhan Nilai Ekspor Jakarta

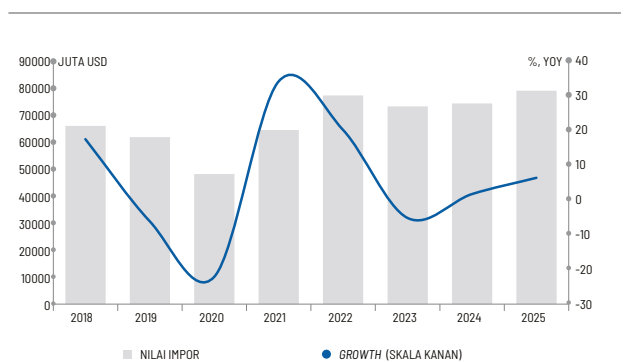


Sumber: BI, diolah

Grafik 2.44 Pertumbuhan Ekspor Komoditas Utama Jakarta

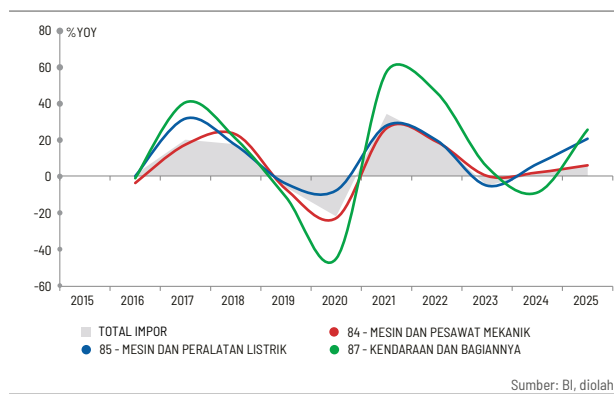
### Impor

Pada tahun 2025, kinerja impor Jakarta mencatatkan pertumbuhan 12,18% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 10,07% (yoy). Total nilai impor pada tahun 2025 mencapai USD74,68 juta, tumbuh 6,2% (yoy) dan meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 1,56% (yoy) (Grafik 2.45). Berdasarkan komoditas, peningkatan kinerja impor utamanya didorong oleh pertumbuhan impor komoditas Mesin dan Pesawat Mekanik, Mesin dan Peralatan Listrik, serta Kendaraan dan Bagian-bagiannya yang masing-masing tumbuh 5,8% (yoy), 20,4% (yoy), serta 25,3% (yoy) (Grafik 2.46).



Sumber: BI, diolah

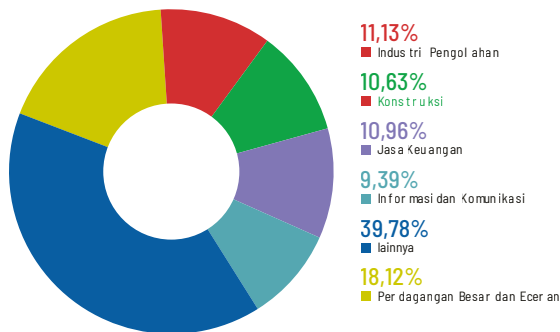
Grafik 2.45 Pertumbuhan Nilai Impor Jakarta



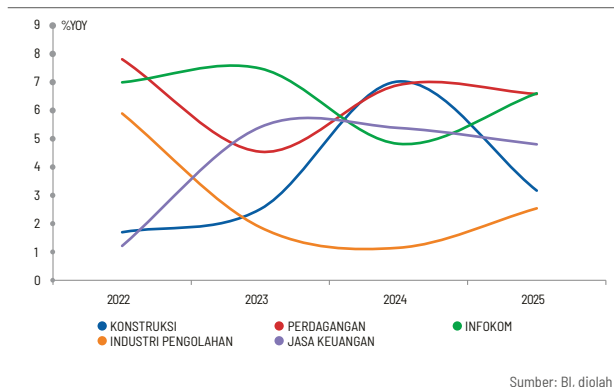
Grafik 2.46 Pertumbuhan Impor Komoditas Utama Jakarta

### Komponen Lapangan Usaha (Penawaran)

Pada tahun 2025, perekonomian DKI Jakarta mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,71% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2024 yang sebesar 4,90% (yoy). Peningkatan ini didukung oleh perbaikan kinerja pada dua LU Utama Jakarta yakni LU Industri Pengolahan dan LU Infokom. Adapun, struktur perekonomian Provinsi DKI Jakarta terutama ditopang oleh LU Perdagangan, LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, LU Jasa Keuangan, dan LU Infokom dengan bobot terhadap PDRB DKI Jakarta pada tahun 2024 masing-masing sebesar 18,19%; 11,17%; 10,98%; 10,88%; dan 9,35% (Grafik 2.47). Pada tahun 2025, terdapat 2 (dua)



Grafik 2.47 Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta 2025

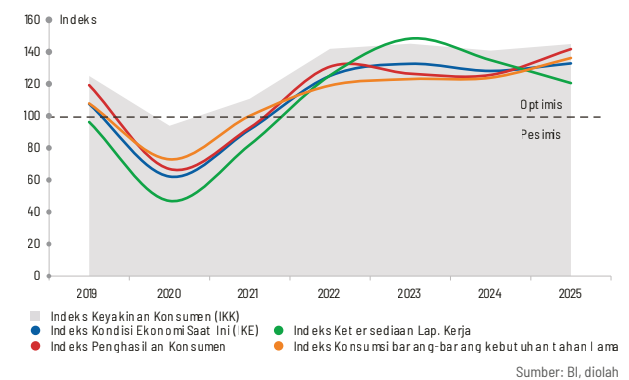


Grafik 2.48 Pertumbuhan LU Utama DKI Jakarta 2025

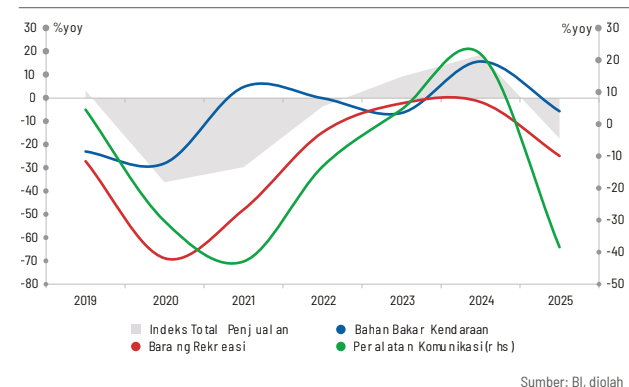
LU utama yang mencatatkan peningkatan kinerja yakni LU Industri Pengolahan dan LU Infokom yang masing-masing tumbuh 1,65% (yoy); 6,22% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2024 yang masing-masing sebesar 1,14% dan 4,80%

### Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

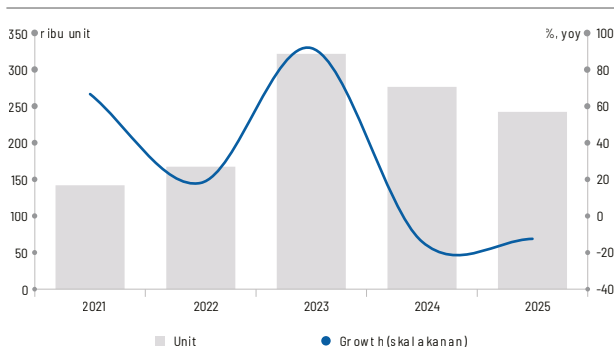
LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor pada tahun 2025 tumbuh 5,50%, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2024 yang sebesar 6,87%. Kendati demikian, pertumbuhan tersebut tetap tinggi, didukung oleh beberapa hasil survei seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Keyakinan Ekonomi (IKE) dengan nilai masing-masing sebesar 145,1 dan 133,0, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yaitu 141,0 dan 128,3. Sedangkan, pertumbuhan lebih lanjut tertahan oleh hasil Survei Penjualan Eceran yang tumbuh terkontraksi sebesar 17,3% (yoy), menurun dari pertumbuhan tahun 2024 yang tumbuh positif sebesar 18,61% (yoy). Lebih lanjut, berdasarkan data dari GAIKINDO, penjualan mobil di DKI Jakarta pada tahun 2025 tercatat sebanyak 242,50 ribu unit atau terkontraksi 12,47% (yoy), membaik walaupun tetap terkontraksi dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 13,93% (yoy).



Grafik 2.49 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) DKI Jakarta 2025



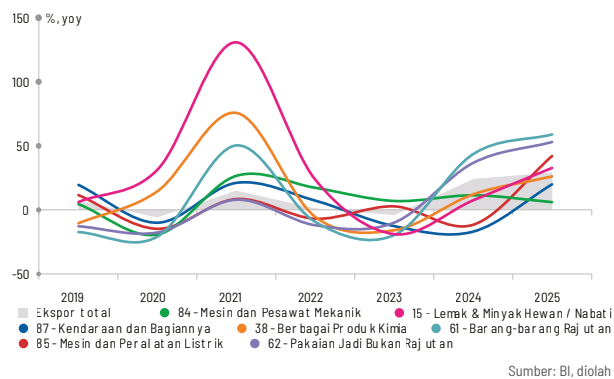
Grafik 2.50 Perkembangan Indeks Penjualan Eceran DKI Jakarta 2025



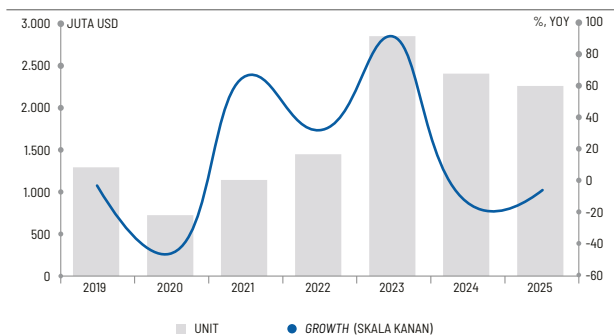
Sumber: BI, diolah  
**Grafik 2.51** Perkembangan Penjualan Mobil di DKI Jakarta 2025

### Lapangan Usaha Industri Pengolahan

LU Industri Pengolahan mencatatkan peningkatan kinerja pada tahun 2025 dengan tumbuh 1,65% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada tahun 2024 yang sebesar 1,14% (yoy). Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan pada tahun 2025 juga sebagai salah satu dampak dari peningkatan permintaan global untuk produk ekspor industri, yang tercermin dari peningkatan ekspor komoditas industri Jakarta (Grafik 2.52). Lebih lanjut, peningkatan kinerja sektor industri juga didukung oleh produksi mobil di DKI Jakarta, walaupun masih berkontraksi sebesar 7,33% (yoy) pada tahun 2025, namun nilai tersebut lebih baik dibandingkan tahun 2024 yang berkontraksi lebih dalam sebesar 14,26% (yoy) (Grafik 2.53).



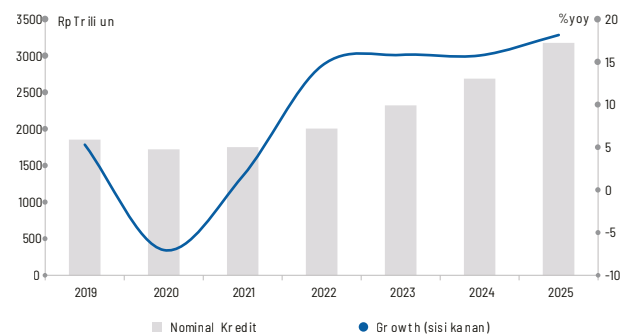
Sumber: BI, diolah  
**Grafik 2.52** Perkembangan Ekspor Komoditas Industri DKI Jakarta 2025



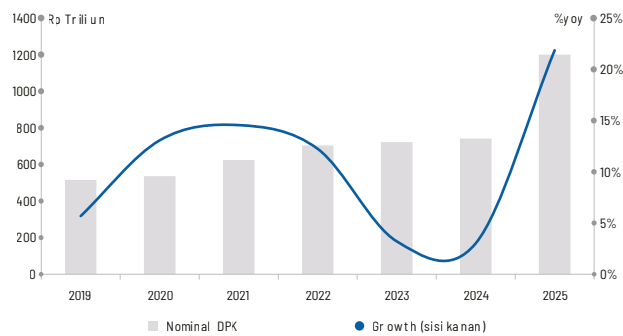
Sumber: BI, diolah  
**Grafik 2.53** Produksi Mobil DKI Jakarta 2025

### Lapangan Usaha Jasa Keuangan

Dengan pangsa sebesar 10,96% terhadap perekonomian DKI Jakarta tahun 2025, LU Jasa Keuangan mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,83% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang sebesar 5,36% (yoy). Perlambatan ini seiring dengan terkontraksinya pertumbuhan LU Jasa Keuangan pada triwulan III 2025 sebesar 0,15% (yoy). Kendati demikian, pertumbuhan LU Jasa Keuangan tetap kuat sepanjang tahun 2025, hal ini didukung oleh kuatnya penyaluran kredit DKI Jakarta secara total yaitu sebanyak Rp3.178,2 triliun dan tumbuh sebesar 18,16% (yoy) lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2024 sebesar 15,76% (yoy) (Grafik 2.54). Selain itu, pertumbuhan ini juga didukung oleh peningkatan DPK Total secara signifikan, berdasarkan jenis kepemilikan maupun berdasarkan jenis rekening. DPK DKI Jakarta pada tahun 2025 mencapai Rp1.202,04 Triliun dan tumbuh sebesar 61,93% (yoy), lebih tinggi dari tahun 2024 yang tumbuh 2,56% (Grafik 2.55).



Sumber: BI, diolah  
**Grafik 2.54** Pertumbuhan Penyaluran Kredit DKI Jakarta 2025



Sumber: BI, diolah  
**Grafik 2.55** Pertumbuhan DPK DKI Jakarta 2025

## C. TRACKING PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I 2026

Perekonomian Jakarta pada triwulan I 2026 diperkirakan meningkat. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh meningkatnya Konsumsi RT, yang didukung meningkatnya Konsumsi Pemerintah dan Investasi pada awal tahun. Dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan perekonomian Jakarta tercermin pada meningkatnya

kinerja LU utama di Jakarta, yaitu LU Perdagangan, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Akomodasi dan Makan Minum, serta LU Konstruksi.

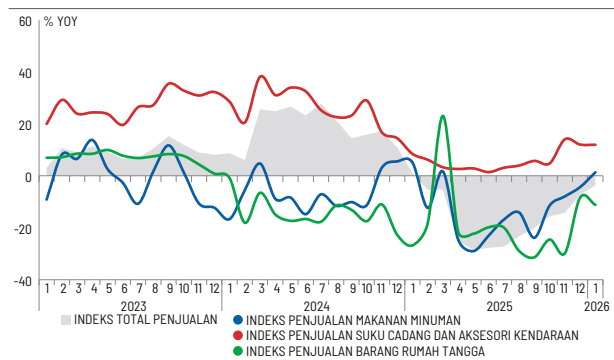
### Komponen Pengeluaran (Permintaan)

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tetap ditopang oleh meningkatnya Konsumsi RT, Konsumsi Pemerintah, dan Investasi. Meningkatnya konsumsi RT didorong oleh tingginya aktivitas masyarakat pada periode libur Tahun Baru dan libur sekolah, serta didukung oleh mulai berlakunya kenaikan UMP sebesar 6,17% yang meningkatkan daya beli pekerja. Selain itu, rangkaian HBKN selama triwulan I 2026, yaitu Imlek, Nyepi, Ramadan dan Idulfitri diprakirakan turut mendorong konsumsi RT, seiring meningkatnya permintaan terhadap bahan makanan, sandang, dan transportasi. Selanjutnya, pertumbuhan Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2026 diprakirakan mengalami peningkatan, seiring berakhirnya kebijakan efisiensi anggaran serta penyaluran berbagai stimulus dan bantuan sosial. Investasi pada triwulan I 2026 juga diprakirakan tetap meningkat, didorong oleh realisasi program-program strategis Pemerintah seperti MBG, KDKMP, dan FLPP Perumahan. Di sisi lain, kinerja ekspor DKI Jakarta diprakirakan tetap positif, didukung oleh tingginya permintaan domestik pada periode HBKN di triwulan I 2026. Sementara itu, permintaan luar negeri terhadap barang manufaktur diprakirakan tetap moderat, sejalan dengan prospek permintaan global dan IHKEI yang meningkat secara terbatas.

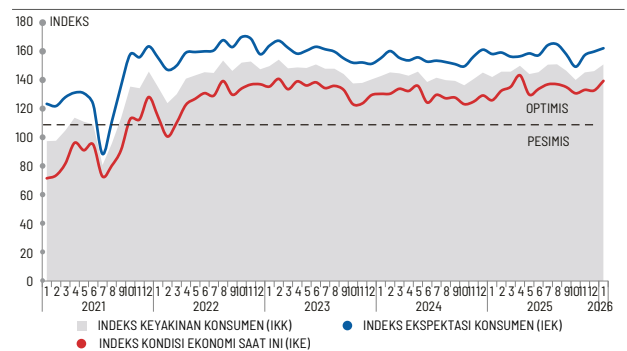
### Konsumsi Rumah Tangga

**Kinerja Konsumsi RT diprakirakan meningkat pada triwulan I 2026.** Peningkatan kinerja Konsumsi RT seiring dengan penetapan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 6,17% pada tahun 2026, peningkatan permintaan pada periode HBKN Imlek, Ramadan, dan Idulfitri, serta penyaluran THR dan berbagai insentif perusahaan/pemerintah atas pencapaian tahun 2025.

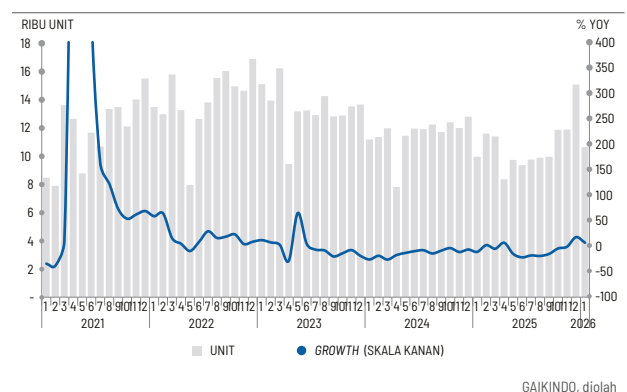
Prakiraan meningkatnya kinerja konsumsi RT pada triwulan I 2026 tercermin dari pertumbuhan Indeks Penjualan Eceran Jakarta pada Januari 2026 yang tercatat sebesar 0% (yoy), membaik dari bulan sebelumnya yang berkontraksi 7,28% (yoy) dan rata-rata triwulan sebelumnya yang berkontraksi 12,39% (yoy) (Grafik 2.56). Kondisi



Grafik 2.56 Perkembangan Penjualan Eceran Jakarta



Grafik 2.57 Perkembangan IKK, IEK, IKE Jakarta



Grafik 2.58 Penjualan Mobil Jakarta

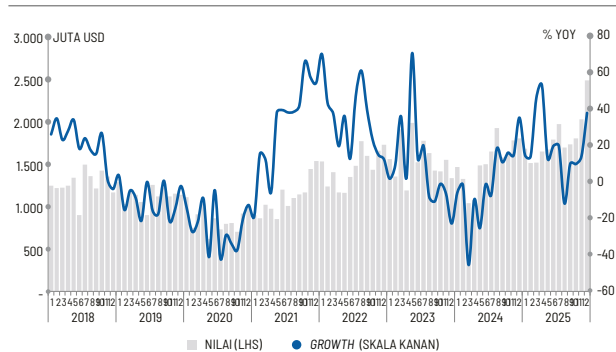
ini didorong oleh perbaikan kinerja penjualan eceran makanan dan minuman, suku cadang dan aksesoris kendaraan, serta barang rumah tangga. Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi RT ini juga terindikasi dari Indeks Keyakinan Konsumen, Indeks Ekspektasi Konsumen, dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini yang meningkat pada Januari 2026 (Grafik 2.57). Selain itu, penjualan mobil di Jakarta tetap menunjukkan kinerja positif pada Januari 2026 (Grafik 2.58), yang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat terjaga pada awal tahun 2026.

### Konsumsi Pemerintah

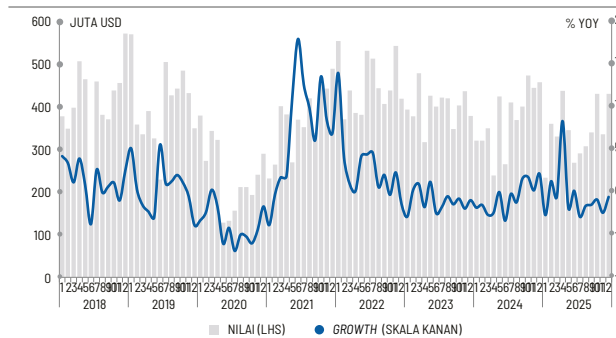
**Konsumsi Pemerintah diprakirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh akselerasi realisasi belanja APBN di DKI Jakarta pada awal tahun seiring berakhirnya Inpres No.1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran, serta upaya periodisasi belanja agar lebih merata hingga akhir tahun. Dari sisi APBD, eksekusi belanja pada awal tahun mulai berjalan dengan dorongan utama pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa (Belanja Operasi), sejalan kebutuhan layanan publik dan kegiatan rutin Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, kinerja Belanja APBN Wilayah DKI Jakarta mencatatkan akselerasi pertumbuhan 56,63% (yoy), lebih tinggi dari realisasi Januari tahun sebelumnya yang berkontraksi 7,66% (yoy). Selain itu, keberlanjutan program layanan dasar dan program prioritas (pendidikan, kesehatan, subsidi layanan publik, dan dukungan sosial) diprakirakan tetap menjaga momentum konsumsi pemerintah pada triwulan I.

## Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

**Kinerja PMTB pada triwulan I 2026 diprakirakan tetap tumbuh kuat.** Prakiraan peningkatan ini terutama didorong oleh berlanjutnya investasi untuk proyek-proyek strategis Pemerintah dan swasta yang bersifat multitanah seperti MRT, LRT, TOD, serta prakiraan perilaku *front loading* akselerasi penyelesaian berbagai proyek multitanah. Prakiraan ini selanjutnya juga didukung oleh peningkatan impor barang modal menjelang triwulan I 2026 yang tumbuh 37,80% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 13,93% (yoy) (Grafik 2.59). Selain itu, nilai impor besi dan baja meski masih terkontraksi 5,92% (yoy), namun membaik dari bulan sebelumnya yang terkontraksi 24,46% (yoy) (Grafik 2.60). Meningkatnya PMTB juga didukung oleh berlanjutnya berbagai proyek strategis swasta yang juga sedang berlangsung di Jakarta yaitu Thamrin Nine - Autograph Tower 1 (Waldorf Astoria) & Luminary Tower 2 (Pan Pacific, Park Royal) & Leparc senilai USD326,96 juta, New Priok Container Terminal (NPTC) 2 & 3 (Phase 1B) senilai USD257,3 juta, Benhil Central - Hotel & Serviced Apartment senilai USD115,38 juta, Mandiri IT Tower - Bumi Sliipi Jakarta Barat senilai USD57,42 juta, jalan Kamal-Teluk Naga-Rajeg Toll Road Development: SS Kosambi-SS Teluk Naga-SS Tanjung Pasir (Section 2) dan Kamal (JC Sedyatmo-SS Kosambi (Section 1) senilai USD109,87 juta serta berbagai proyek *green investment* seperti *waste management*, infrastruktur EV, dan *green commercial/industrial zone*.



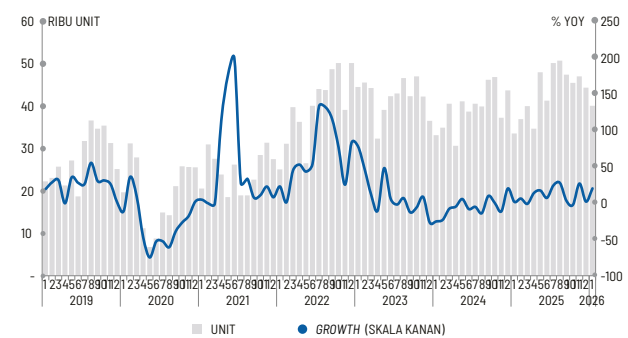
Grafik 2.59 Nilai Impor Barang Modal



Grafik 2.60 Nilai Impor Besi dan Baja

## Ekspor

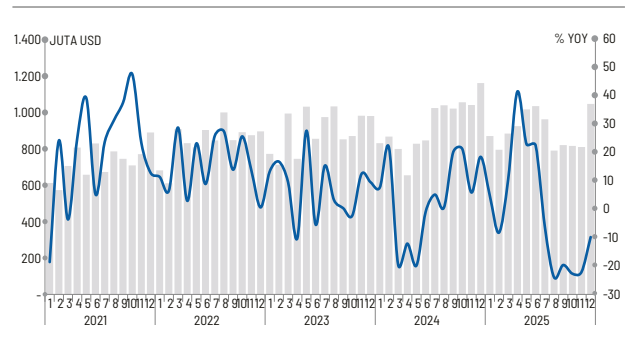
**Kinerja ekspor pada triwulan I 2026 diprakirakan tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan global khususnya untuk komoditas emas perhiasan seiring tren peningkatan harga emas global. Selain itu, diversifikasi ekspor ke negara non-tradisional mulai diterapkan oleh beberapa pelaku usaha untuk mengantisipasi gejolak geopolitik negara-negara tujuan utama. Prakiraan ini salah satunya tercermin dari ekspor mobil CBU Jakarta yang pada Januari 2026 tumbuh 19,69% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 1,58% (yoy) (Grafik 2.61).



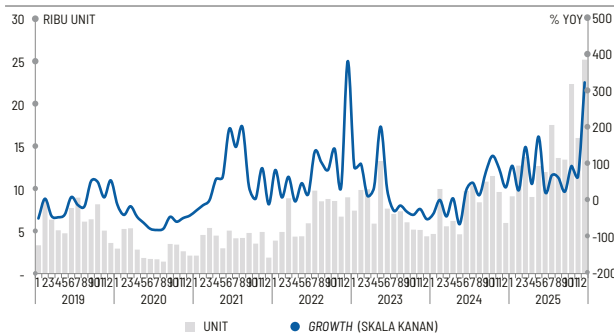
Grafik 2.61 Ekspor Mobil CBU

## Impor

**Kinerja impor pada triwulan I 2026 diprakirakan tumbuh lebih tinggi.** Meningkatnya kinerja impor terutama diprakirakan oleh meningkatnya impor untuk barang modal dan bahan baku sejalan dengan perkiraan meningkatnya investasi dan produksi industri untuk memenuhi permintaan pada momentum HBKN RAFI. Hal ini kemudian tercermin dari impor barang konsumsi di Jakarta meski masih terkontraksi 9,82% (yoy), namun membaik dari bulan sebelumnya yang terkontraksi 22,11% (yoy) (Grafik 2.62). Selain itu, impor mobil CBU pada Desember 2025 tercatat sebesar 25.094 unit atau tumbuh 323,53% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tumbuh 65,99% (yoy) (Grafik 2.63).

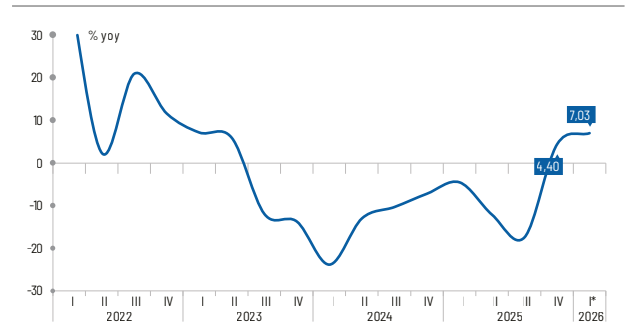


Grafik 2.62 Nilai Impor Barang Konsumsi



GAIKINDO, diolah

Grafik 2.63 Nilai Impor Mobil Jakarta



Sumber: GAIKINDO

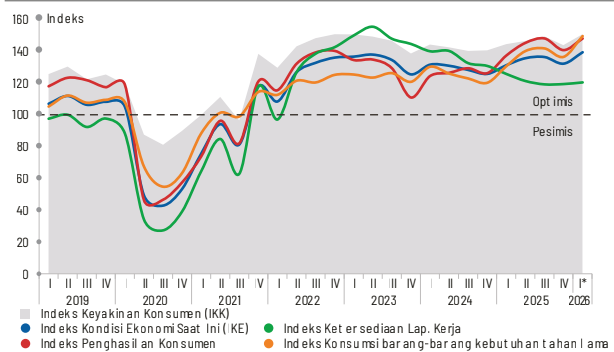
Grafik 2.66 Perkembangan Penjualan Mobil Jakarta (Triwulan I 2026)

### Komponen Lapangan Usaha (Penawaran)

Pada Triwulan I 2026, **LU Perdagangan** diprakirakan akan mengalami peningkatan kinerja seiring meningkatnya konsumsi Rumah Tangga seiring periode HBKN Imlek-Rafi serta membaiknya kinerja ekspor. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini Jakarta pada Januari 2026 masing-masing tercatat sebesar 149,80 dan 138,50 masih dalam level optimis dan meningkat dari nilai di triwulan sebelumnya (142,90 dan 131,37) (Grafik 2.64). Hal tersebut menunjukkan optimisme konsumen terhadap kegiatan usaha ke depan di Jakarta. Selain itu, indeks penjualan eceran pada triwulan I 2026 juga mulai membaik walaupun tidak tumbuh positif atau tumbuh 0% (yoy), namun, angka tersebut lebih baik dari triwulan sebelumnya

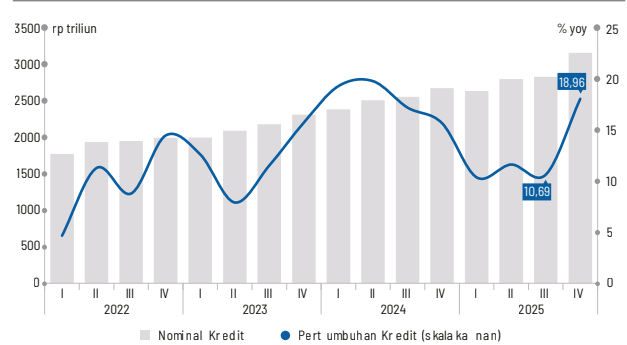
yang berkontraksi 12,42% (yoy) (Grafik 2.65). Selanjutnya, peningkatan juga didukung oleh meningkatnya penjualan mobil di Jakarta yang tumbuh 7,03% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (4,40% yoy).

Selanjutnya, **LU Jasa Keuangan** pada triwulan I 2026 diprakirakan mengalami pertumbuhan yang kuat. Pertumbuhan kinerja LU Jasa Keuangan terutama dipengaruhi oleh membaiknya penyaluran kredit kepada sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi, seiring dengan potensi peningkatan investasi di Jakarta. Kredit kepada sektor industri pengolahan sampai dengan Januari 2026, tumbuh 73,22% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 59,12% (yoy). Adapun kredit kepada sektor Konstruksi di Januari 2026 juga tumbuh meningkat 9,22% (yoy) dari sebelumnya 7,61% (yoy). Sementara dari



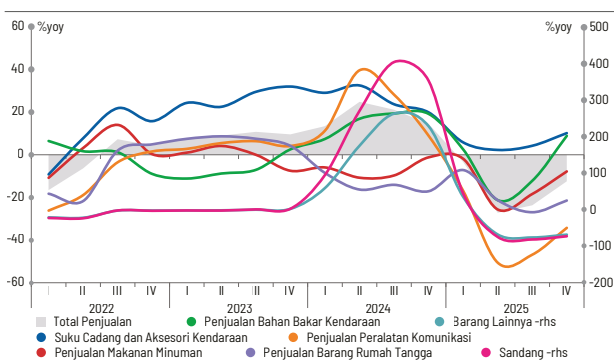
Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.64 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) DKI Jakarta (Triwulan I 2026)



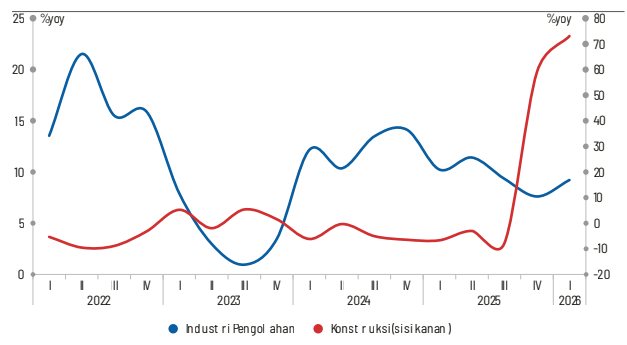
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.67 Perkembangan Penyaluran Kredit Jakarta (Triwulan I 2026)



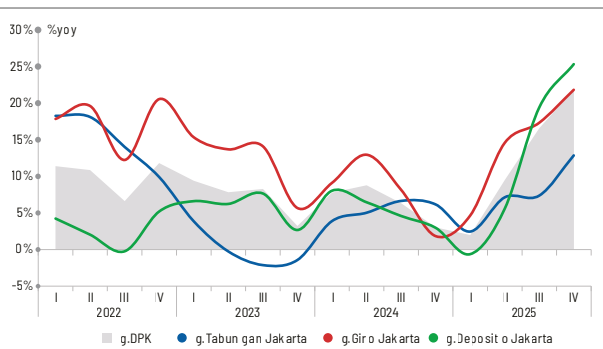
Sumber: Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia

Grafik 2.65 Perkembangan Indeks Penjualan Eceran DKI Jakarta (Triwulan I 2026)



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.68 Penyaluran Kredit Sektor Industri dan Konstruksi Jakarta (Triwulan I 2026)

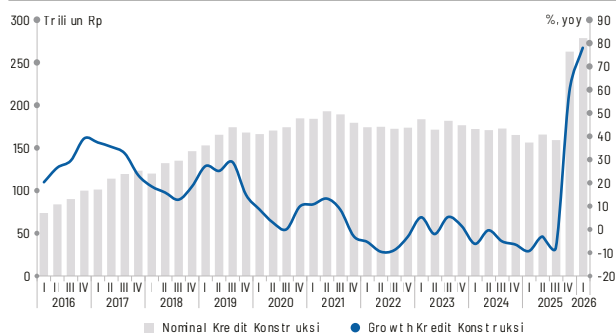


Sumber: BI, diolah

Grafik 2.69 Perkembangan DPK Jakarta (Triwulan I 2026)

sisi DPK perbankan juga tumbuh lebih kuat Hal ini didukung oleh kuatnya pertumbuhan DPK secara total yaitu per Januari 2026 tumbuh 21,06% (yoy), sedikit melambat dari triwulan laporan (21,90%; yoy). Dari sisi kepemilikan rekening, pertumbuhan DPK ditopang oleh rekening Pemerintah dan Korporasi. Pertumbuhan DPK Pemerintah dan DPK Korporasi per Januari 2026 masing-masing tetap tumbuh kuat sebesar 48,28% (yoy) dan 20,92% (yoy) (Grafik 2.69). Pertumbuhan DPK yang kuat ini mengindikasikan perbaikan likuiditas perbankan yang dapat membantu aktivitas jasa keuangan.

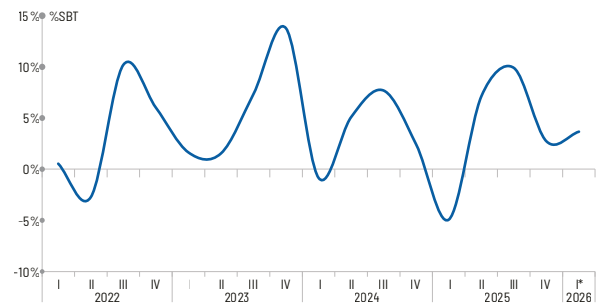
**LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan** diperkirakan mengalami peningkatan kinerja pada triwulan I 2026. Peningkatan LU Konstruksi tercermin dari peningkatan kredit konstruksi yang cukup signifikan pada triwulan I 2026, dengan jumlah Rp279,04 triliun dan tumbuh sebesar 78,15% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (59,12%; yoy) (Grafik 2.70). Selain itu, peningkatan kinerja sektor industri pengolahan diperkirakan meningkat seiring dengan membaiknya impor bahan baku pada akhir triwulan III (September) walaupun masih terkontraksi sebesar 2,60% (yoy), namun lebih baik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam 13,08% (yoy) (Grafik 2.71).



Sumber: BI, diolah

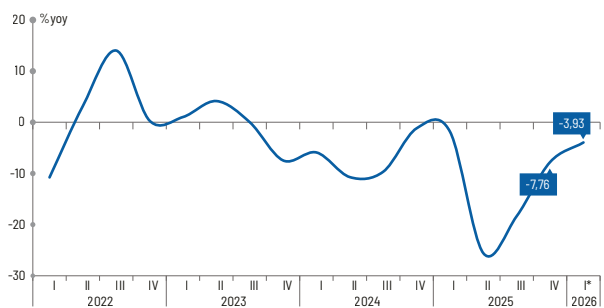
Grafik 2.70 Perkembangan Kredit LU Konstruksi DKI Jakarta (Triwulan I 2026)

Selanjutnya, **LU Infokom** diperkirakan akan mengalami peningkatan pada triwulan I 2026 seiring membaiknya aktivitas transaksi transportasi *online* seiring peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan aktivitas *e-commerce* pada periode HBKN Imlek-Rafi di akhir tahun. Nilai pertumbuhan indeks penjualan peralatan komunikasi di Jakarta membaik dari yang sebelumnya terkontraksi sedalam 18,33% (yoy), menjadi terkontraksi 7,76% (yoy) (Grafik 2.72).



Sumber: Gaikindo, diolah

Grafik 2.71 Perkiraan SKDU LU Industri Pengolahan DKI Jakarta (Triwulan I 2026)



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.72 Perkembangan Indeks Penjualan Peralatan Komunikasi di Jakarta (Triwulan I 2026)



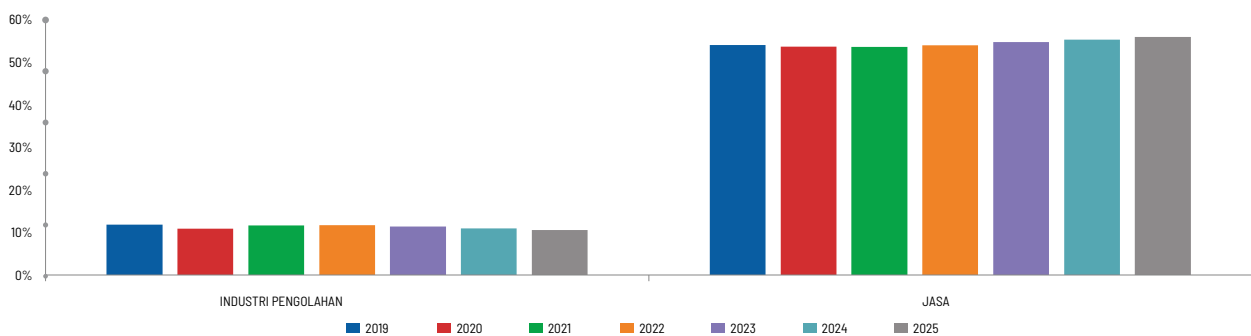


## BOKS 1

# Potensi Ekonomi Kreatif Jakarta Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Sebagai Kota Global, perekonomian DKI Jakarta terus bertransformasi dan semakin bergeser menuju sektor tersier berbasis jasa. Pergeseran ini tidak terlepas dari karakter Jakarta sebagai episentrum perekonomian nasional, serta dinamika struktural kota besar seperti keterbatasan lahan, tingginya urbanisasi, penguatan interkoneksi kawasan aglomerasi, dan perubahan pola aktivitas ekonomi yang semakin bertumpu pada layanan bernilai tambah (Grafik B1.1). Di sisi lain, ketidakpastian perekonomian dan keuangan global turut memengaruhi kinerja ekonomi Jakarta, sehingga menuntut penguatan ketahanan (*resilience*) sekaligus diversifikasi sumber pertumbuhan.

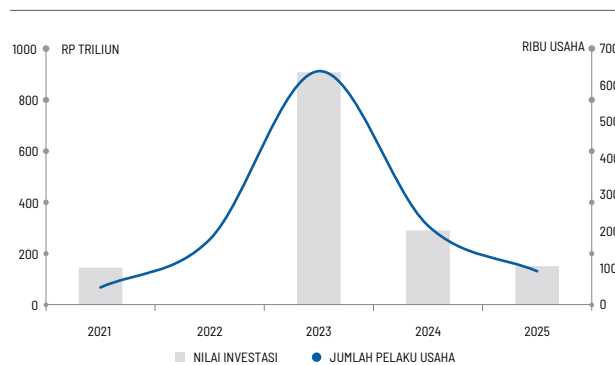
Dalam konteks tersebut, ekonomi kreatif menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru yang potensial karena bertumpu pada talenta, kreativitas, dan *intellectual property*, sehingga tidak bergantung pada sumber daya alam dan memiliki ruang ekspansi yang luas, terutama dengan dukungan digitalisasi dan basis masyarakat urban yang besar. Secara konseptual, hal ini selaras dengan konsep *creative class* yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi perkotaan modern semakin ditopang oleh kelompok pekerja yang menciptakan nilai tambah melalui ide, inovasi, dan pengetahuan (Florida, 2002).



Grafik B1.1 Pangsa Sektor Industri dan Jasa DKI Jakarta 2019 s.d 2025

Urgensi penguatan ekonomi kreatif juga dapat dilihat dari perspektif daya saing Jakarta sebagai kota global. Global Cities Index (GCI) yang dirilis Kearney mengevaluasi kota-kota global melalui lima dimensi, yaitu *Business Activity*, *Human Capital*, *Information Exchange*, *Cultural Experience*, dan *Political Engagement* (Kearney, 2025). Dalam komunikasi Pemprov DKI, peringkat Jakarta di GCI 2025 dilaporkan meningkat dari peringkat 74 menjadi 71 (Pemprov DKI Jakarta, 2025). Sejalan dengan itu, Global Power City Index (GPCI) yang disusun Mori Memorial Foundation menilai daya tarik kota berdasarkan enam fungsi (antara lain: ekonomi, R&D, interaksi budaya, *livability*, lingkungan, dan aksesibilitas). Dalam publikasi resmi terbaru yang tersedia terbuka, yaitu GPCI 2024, Jakarta berada pada peringkat 45 dari 48 kota (Mori Memorial Foundation, 2024). Capaian tersebut mengindikasikan bahwa ruang penguatan masih signifikan, khususnya pada dimensi yang berkaitan dengan kualitas SDM, pertukaran informasi, dan pengalaman budaya sejalan dengan fokus penguatan daya saing kota global.

Dalam konteks ini, pengembangan ekonomi kreatif menjadi strategi yang relevan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkecil kesenjangan pada dimensi daya saing kota global tersebut. Dari sisi *Human Capital*, ekonomi kreatif merupakan sektor berbasis talenta dan inovasi yang dapat memperkuat kompetensi generasi muda, memperluas keterampilan digital, serta mendorong terbentuknya ekosistem pembelajaran yang lebih selaras dengan kebutuhan industri. Secara ekosistem, indikator administratif menunjukkan basis pelaku usaha ekonomi kreatif yang besar. Data OSS-DPMPTSP mencatat total pelaku usaha ekonomi kreatif mencapai 46.624 (2021), meningkat menjadi 177.340 (2022) dan 637.179 (2023), sebelum tercatat 215.485 (2024) dan 91.003 (2025) (Disparekraf DKI Jakarta & LPEM FEB UI, 2025). Dari sisi investasi, nilai investasi usaha ekonomi kreatif (berbasis OSS-DPMPTSP) tercatat Rp144.250,24 miliar (2021) dan meningkat hingga Rp905.253,71 miliar (2023), sebelum tercatat Rp288.932,05 miliar (2024) dan Rp150.305,68 miliar (2025) (Disparekraf DKI Jakarta & LPEM FEB UI, 2025) (Grafik B1.2). Dinamika ini memperkuat indikasi bahwa ekonomi kreatif Jakarta memiliki basis usaha dan aktivitas investasi yang besar, yang berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan pada sektor jasa bernilai tambah tinggi. (Disparekraf DKI Jakarta & LPEM FEB UI, 2025).



Grafik B1.2 Perkembangan Nilai Investasi dan Jumlah Pelaku Usaha Sektor Ekonomi Kreatif DKI Jakarta

Dari sisi *Information Exchange*, ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan digitalisasi memperkuat arus pertukaran informasi, distribusi konten, serta eksposur Jakarta pada skala internasional. Ekosistem subsektor digital seperti aplikasi dan *game developer*, serta subsektor berbasis konten (film, musik, desain, dan konten digital) dapat memperluas visibilitas Jakarta melalui kanal distribusi lintas batas. Dalam kerangka penghitungan PDRB Parekraf, ekonomi kreatif di DKI Jakarta mencakup 17 subsektor yang tersebar luas pada berbagai KBLI dan lapangan usaha, sehingga penguatan ekonomi kreatif juga berpotensi memperdalam keterkaitan lintas sektor terutama dengan sektor Informasi dan Komunikasi serta Jasa Perusahaan (Disparekraf DKI Jakarta & LPEM FEB UI, 2025). Di saat yang sama, penguatan infrastruktur digital dan sistem pembayaran yang inklusif turut menopang ekosistem kreatif yang semakin terhubung dan adaptif.

Selanjutnya, dari sisi *Cultural Experience*, ekonomi kreatif berperan sentral dalam membangun identitas dan daya tarik budaya kota. Berbagai subsektor kreatif mulai dari seni pertunjukan, musik, film, hingga penyelenggaraan event memperkuat pengalaman budaya dan daya tarik kota, sekaligus mendorong *multiplier effect* melalui keterkaitan dengan sektor pendukung seperti transportasi, akomodasi, kuliner/UMKM, dan jasa profesional. Selain itu, ekonomi kreatif juga berkontribusi pada penguatan *city branding* Jakarta, yang pada gilirannya dapat mendukung daya tarik investasi dan pariwisata urban. Dengan demikian, penguatan ekonomi kreatif perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda transformasi dan inovasi berkelanjutan untuk memperkuat peran Jakarta ke depan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

Sebagai salah satu contoh, pada tahun 2025 tercatat 545 judul film layar lebar, terdiri atas 270 film nasional dan 275 film impor (LSF, 2025). Kondisi ini mencerminkan penguatan industri perfilman yang berpotensi meningkatkan kontribusi ekonomi DKI Jakarta melalui aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi film, sejalan dengan visi "Jakarta Kota Sinema". Dalam PDRB Parekraf 2025, subsektor Film-Animasi-Video berada pada Kuadran II dengan kontribusi relatif rendah (rata-rata 0,04%), namun mencatat pertumbuhan tinggi (rata-rata 5,16%) (Disparekraf DKI & LPEM FEB UI, 2025).

Secara nasional, output multiplier subsektor film tercatat sekitar 1,379 (BPS-Bekraf, 2014), konsisten dengan estimasi industri layar sebesar 1,38 (PwC Indonesia & LPEM FEB UI, 2023). Secara ilustratif, tambahan belanja atau investasi sebesar Rp20 miliar untuk satu proyek film/animasi/video di DKI Jakarta berpotensi menghasilkan total output sekitar Rp27,6 miliar. Dengan optimalisasi *local value capture*, subsektor perfilman berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan bagi DKI Jakarta.

## BAB 3

# KEUANGAN PEMERINTAH

Pada tahun 2025, kinerja Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mencapai 94,65% dari pagu, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 98,28% dari pagu. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi seluruh komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain PAD yang masing-masing tercatat sebesar 94,33%, 95,53%, dan 42,94% dari pagu APBD-P 2025, lebih rendah dari kinerja tahun sebelumnya. Dari sisi Belanja Daerah, realisasi pada tahun 2025 tercatat sebesar 88,45% dari pagu, lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 89,45% dari pagu. Capaian yang lebih rendah disebabkan oleh realisasi Belanja Modal dan Belanja Transfer yang masing-masing 86,23% dan 102,44% dari pagu, lebih rendah dari kinerja tahun sebelumnya sebesar 90,02% dan 120,64%.

Sementara itu, berdasarkan rilis data oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, kinerja Pendapatan APBN regional DKI Jakarta sampai dengan triwulan IV 2025 mencapai Rp1.816,88 triliun atau 93,89% dari target. Capaian tersebut terutama didukung oleh realisasi kinerja pajak yang meningkat ditopang oleh penerimaan Pajak Dalam Negeri. Dari sisi belanja K/L di Jakarta, secara kumulatif hingga triwulan IV 2025 tercatat realisasi sebesar Rp1.283,92 triliun atau sebesar 92,81% dari pagu.



**Realisasi  
Pendapatan Daerah (yoy)**



**-16,56%**

Triwulan III 2025

**-7,98%**

Triwulan IV 2025

**Realisasi Pendapatan  
Asli Daerah (yoy)**



**-30,34%**

Triwulan III 2025

**-7,80%**

Triwulan IV 2025

**Realisasi  
Belanja Daerah (yoy)**



**19,72%**

Triwulan III 2025

**23,17%**

Triwulan IV 2025

## A. GAMBARAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) PROVINSI DKI JAKARTA 2025

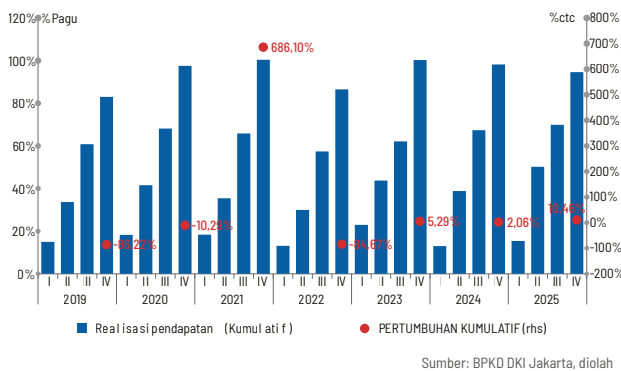
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. APBD-P tahun 2025 mengalami peningkatan dari APBD murni menjadi sekitar Rp91,86 triliun, atau lebih tinggi 10,81% dari APBD-P tahun sebelumnya (Tabel 3.1). Anggaran tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah Rp84,45 triliun dan Pembiayaan Daerah Rp7,40 triliun. Pembiayaan Daerah sebesar Rp7,40 triliun tersebut secara rinci terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan sebesar Rp4,43 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp2,97 triliun.

## B. REALISASI PENDAPATAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Pada tahun 2025, secara kumulatif realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mencapai 94,65% dari pagu APBD-P 2025, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 98,28% dari pagu APBD-P 2024 (Grafik 3.1). Capaian realisasi pendapatan yang lebih rendah pada periode laporan disebabkan oleh penurunan realisasi

seluruh komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain PAD yang masing-masing tercatat sebesar 94,33%, 95,53%, dan 42,94% dari pagu APBD-P 2025, melambat dari kinerja tahun sebelumnya dengan realisasi masing-masing sebesar 95,76%, 105,28%, dan 81,36% dari pagu APBD-P 2025 (Grafik 3.2).

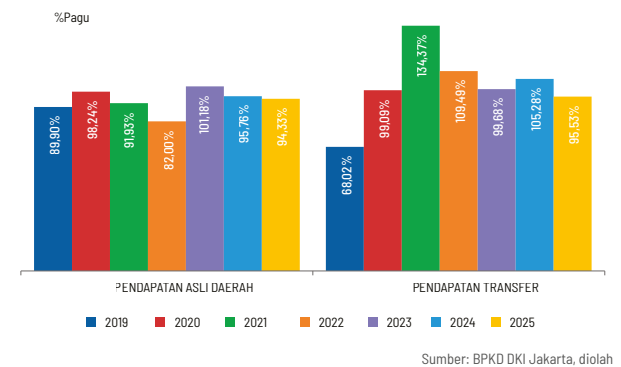
Kinerja Pendapatan Daerah di Provinsi DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 terkontraksi 7,98% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 16,56% (yoy), dengan nominal realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp20,89 triliun (Grafik 3.3). Peningkatan tersebut seiring peningkatan kinerja komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada triwulan IV 2025 yang terkontraksi 7,80% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 30,34% (yoy) dan triwulan sama tahun sebelumnya yang terkontraksi 12,99% (yoy) (Tabel 3.2). Kondisi ini dipengaruhi oleh kinerja Pajak Daerah yang membaik meskipun masih terkontraksi 11,19% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 36,46% (yoy) dan triwulan sama tahun sebelumnya yang terkontraksi 34,09% (yoy) (Grafik 3.4). Komponen Lain-Lain PAD terkontraksi 87,09% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 100% (yoy). Di sisi lain, Pendapatan Transfer pada triwulan IV 2025 terkontraksi 3,41% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 59,87% (yoy) (Grafik 3.5). Adapun, penurunan kinerja Pendapatan Transfer disebabkan oleh turunnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.



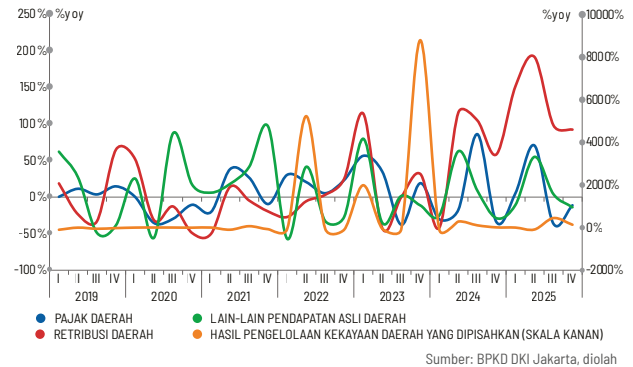
Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah  
Grafik 3.1 Realisasi Kumulatif Pendapatan Daerah



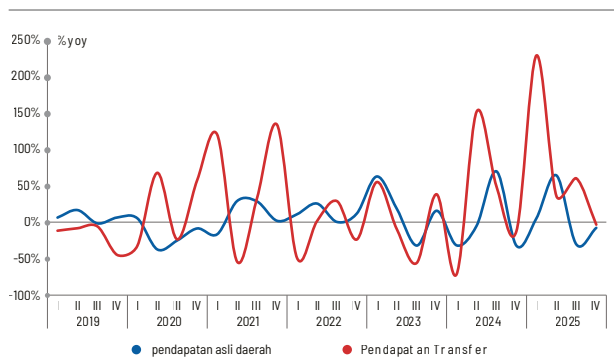
Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah  
Grafik 3.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah



Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah  
Grafik 3.2 Perkembangan Capaian PAD dan Transfer DKI Jakarta Tw IV 2025

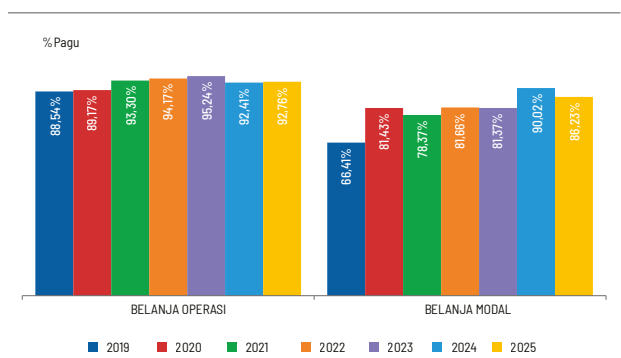


Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah  
Grafik 3.4 Pertumbuhan Komponen PAD



Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.5 Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Transfer



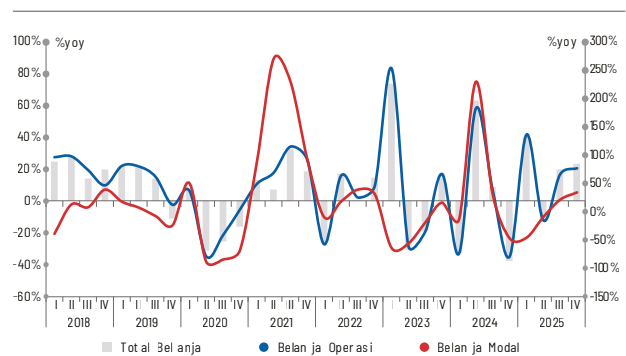
Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.7 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal

### C. BELANJA DAERAH APBD

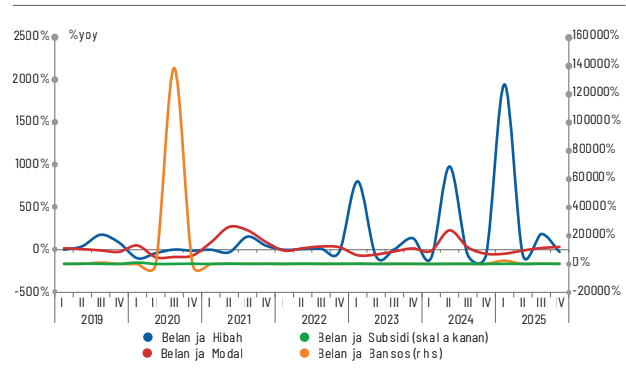
Dari sisi Belanja Daerah, secara kumulatif capaian realisasi pada tahun 2025 tercatat sebesar 88,45% dari pagu APBD-P 2025, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya sebesar 89,45% dari pagu APBD-P 2024 (Grafik 3.6). Realisasi capaian yang lebih rendah disebabkan oleh realisasi Belanja Modal dan Belanja Transfer yang masing-masing 86,23% dan 102,44% dari pagu, lebih rendah dari kinerja pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 90,02% dan 120,64% (Grafik 3.7).

Sebagai komponen utama Belanja Daerah di Provinsi DKI Jakarta, Belanja Operasi mencatatkan pertumbuhan sebesar 20,34% (yoy) pada triwulan IV 2025, meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,64% (yoy), serta lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sama tahun sebelumnya yang berkontraksi 20,37% (yoy) (Grafik 3.8). Peningkatan ini didukung oleh kinerja Belanja Pegawai yang masing tumbuh 20,72% (yoy) pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 13,05% (yoy). Selain itu, Belanja Barang dan Jasa juga tumbuh sebesar 40,10% (yoy), terakselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,83% (yoy), digunakan untuk membiayai belanja dalam rangka mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Selanjutnya, komponen Belanja Modal juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 33,74% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,95% (yoy) dan triwulan sama tahun sebelumnya yang tumbuh 6,77% (yoy) (Grafik 3.9).



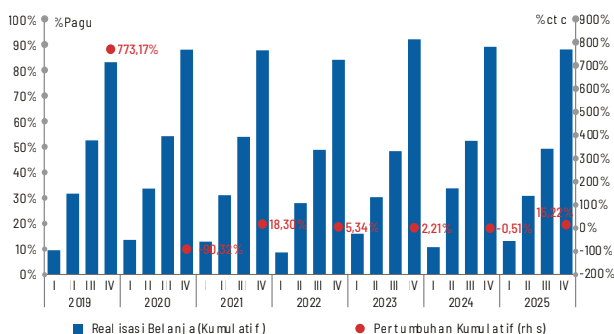
Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.8 Pertumbuhan Komponen Utama Belanja Daerah



Sumber: BPKD DKI Jakarta, BPS, diolah

Grafik 3.9 Pertumbuhan Belanja Hibah, Modal, Subsidi dan Bansos



Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

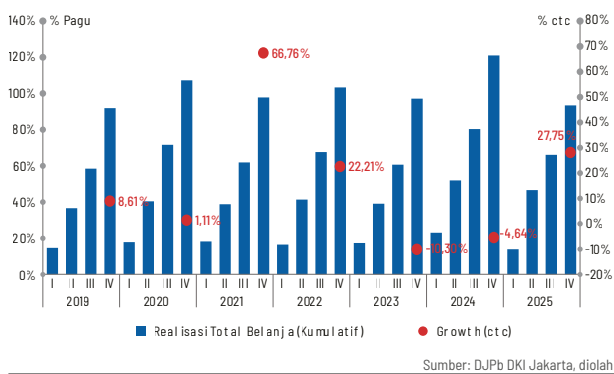
Grafik 3.6 Realisasi Kumulatif Belanja Daerah

### D. PEMBIAYAAN DAERAH APBD

Dari sisi Penerimaan Pembiayaan, Provinsi DKI Jakarta mencatatkan realisasi sebesar Rp7,28 triliun pada tahun 2025 atau 98,24% dari pagu. Realisasi ini terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp4,43 triliun, Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp2,84 triliun, serta Penerimaan Kembali Pembelian Pinjaman sebesar Rp68,05 miliar. Sementara itu, dari sisi realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2025, Provinsi DKI Jakarta mencatatkan realisasi sebesar Rp5,38 triliun atau sebesar 91,60% dari pagu. Realisasi ini terdiri atas Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp3,46 triliun dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp1,93 triliun.

## E. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA APBN DI DKI JAKARTA

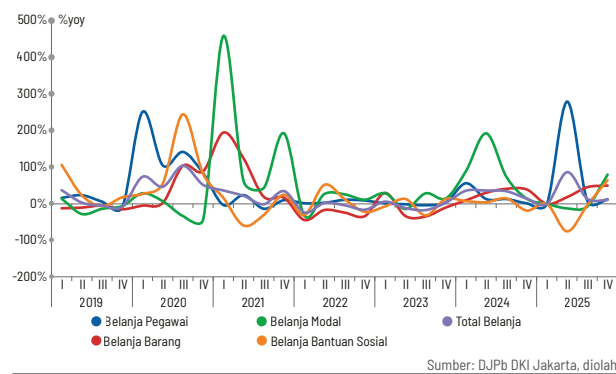
Berdasarkan rilis data oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta, kinerja Pendapatan APBN regional DKI Jakarta sampai dengan triwulan IV 2025 mencapai Rp1.816,88 triliun atau 93,89% dari target. Capaian tersebut terutama didukung oleh realisasi kinerja Pajak yang meningkat ditopang oleh Pajak Dalam Negeri. Pada tahun 2025, penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai Rp1.434,35 triliun atau 93,60% dari target, tumbuh 6,93% (yoy). Selanjutnya, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional tercatat Rp21,66 triliun atau 85,90% dari target. Kinerja Pajak Perdagangan Internasional terkontraksi 7,11% (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tumbuh 15,02% (yoy). Hal ini salah satunya disebabkan oleh masih berlangsungnya insentif Bea Masuk 0% untuk Importasi Kendaraan



Grafik 3.10 Realisasi Kumulatif Total Belanja APBN di DKI Jakarta

bermotor listrik s.d. Desember 2025. Lebih lanjut, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp355,35 triliun atau 94,27% dari target, tumbuh 6,61% (yoy), terakselerasi dari tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 45,47% (yoy).

Dari sisi Belanja APBN di Jakarta, pada tahun 2025 terdapat realisasi sebesar Rp1.884,82 triliun atau sebesar 76,99% dari pagu. Dilihat dari komponen belanja utama APBN, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, realisasi secara kumulatif mencapai Rp1.283,92 triliun atau 92,81% dari pagu keempat komponen tersebut (Grafik 3.10). Pada triwulan IV 2025, kinerja Belanja APBN mencatatkan pertumbuhan 27,17% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 19,43% (yoy). Peningkatan kinerja tersebut seiring akselerasi pertumbuhan seluruh komponen belanja APBN pada triwulan IV 2025 dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 3.11).



Grafik 3.11 Realisasi Total Belanja K/L di DKI Jakarta

**Tabel 3.1** Perkembangan Pagu APBD Provinsi DKI Jakarta 2025

URAIAN	APBD-P 2023		APBD-P 2024		APBD-P 2025	
	RP MILIAR	% YOY	RP MILIAR	% YOY	RP MILIAR	% YOY
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>70.662,94</b>	<b>-9,17%</b>	<b>73.636,07</b>	<b>4,21%</b>	<b>84.454,42</b>	<b>14,69%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>48.442,04</b>	<b>-12,97%</b>	<b>52.398,08</b>	<b>8,17%</b>	<b>54.199,20</b>	<b>3,44%</b>
Pajak Daerah	43.000,00	-5,91%	46.240,00	7,53%	48.000,00	3,81%
Retribusi Daerah	462,11	-42,73%	699,69	51,41%	1.396,30	99,56%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	545,87	-31,23%	823,00	50,77%	774,00	-5,95%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	4.434,07	-46,97%	4.635,39	4,54%	4.028,90	-13,08%
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>20.224,32</b>	<b>17,40%</b>	<b>20.515,70</b>	<b>1,44%</b>	<b>30.082,65</b>	<b>46,63%</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	20.224,32	17,40%	20.515,70	1,44%	30.082,65	46,63%
Dana Perimbangan	-	-100,00%	20.483,34	0,00%	-	-100,00%
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-100,00%	32,36	0,00%	-	-100,00%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.996,58</b>	<b>-59,31%</b>	<b>722,29</b>	<b>-63,82%</b>	<b>172,58</b>	<b>-76,11%</b>
Pendapatan Hibah	1.996,58	-59,31%	722,29	-63,82%	172,58	-76,11%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>72.144,89</b>	<b>-6,27%</b>	<b>73.790,69</b>	<b>2,28%</b>	<b>85.979,18</b>	<b>16,52%</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>60.383,69</b>	<b>2,39%</b>	<b>59.750,93</b>	<b>-1,05%</b>	<b>67.401,44</b>	<b>12,80%</b>
Belanja Pegawai	18.778,03	0,75%	20.059,08	6,82%	21.494,74	7,16%
Belanja Barang dan Jasa	27.281,51	8,82%	27.332,26	0,19%	31.382,42	14,82%
Belanja Bunga	258,00	-67,32%	256,00	-0,78%	143,00	-44,14%
Belanja Subsidi	5.908,31	-9,69%	5.603,71	-5,16%	7.011,14	25,12%
Belanja Hibah	3.707,37	31,71%	3.357,24	-9,44%	3.014,48	-10,21%
Belanja Bantuan Sosial	4.450,48	-13,00%	3.142,64	-29,39%	4.355,66	38,60%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.850,18</b>	<b>0,46%</b>	<b>11.554,91</b>	<b>6,50%</b>	<b>15.253,24</b>	<b>32,01%</b>
Belanja Modal Tanah	837,73	-56,02%	496,57	-40,72%	1.160,30	133,66%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.085,13	52,67%	2.215,62	-28,18%	3.792,58	71,17%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.556,81	24,45%	3.445,38	34,75%	4.322,66	25,46%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.222,74	-9,37%	5.145,68	21,86%	5.652,34	9,85%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	147,78	-8,48%	117,37	-20,57%	169,04	44,02%
Belanja Modal Aset Lainnya	-	0,00%	134,28	0,00%	-	-100,00%
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>554,56</b>	<b>-91,74%</b>	<b>2.166,54</b>	<b>290,67%</b>	<b>2.956,60</b>	<b>36,47%</b>
Belanja Tidak Terduga	554,56	-91,74%	2.166,54	290,67%	2.956,60	36,47%
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>356,45</b>	<b>-26,47%</b>	<b>318,31</b>	<b>-10,70%</b>	<b>367,90</b>	<b>15,58%</b>
Belanja Bantuan Keuangan	356,45	-26,47%	318,31	-10,70%	367,90	15,58%
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.481,95)</b>	<b>-279,74%</b>	<b>(154,61)</b>	<b>-89,57%</b>	<b>(1.524,75)</b>	<b>886,16%</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>8.895,32</b>	<b>77,37%</b>	<b>9.270,19</b>	<b>4,21%</b>	<b>7.408,47</b>	<b>-20,08%</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Saldo Kas Tahun Lalu)	8.600,10	113,09%	3.859,86	-55,12%	4.433,85	14,87%
Pencairan Dana Cadangan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Penerimaan Pinjaman Daerah	295,22	-69,85%	5.410,33	1732,64%	2.974,59	-45,02%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	0,00%	-	0,00%	0,03	0,00%
Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.413,37</b>	<b>26,95%</b>	<b>9.115,58</b>	<b>22,96%</b>	<b>5.883,71</b>	<b>-35,45%</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Penyertaan Modal Daerah	5.434,68	15,08%	7.253,91	33,47%	3.902,04	-46,21%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.802,67	74,24%	1.861,67	3,27%	1.981,67	6,45%
Pemberian Pinjaman Daerah	176,02	113,87%	-	-100,00%	-	0,00%
Pengeluaran Pembiayaan BLUD	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>79.558,25</b>	<b>-3,93%</b>	<b>82.906,26</b>	<b>4,21%</b>	<b>91.862,89</b>	<b>10,80%</b>
<b>BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>79.558,25</b>	<b>-3,93%</b>	<b>82.906,26</b>	<b>4,21%</b>	<b>91.862,89</b>	<b>10,80%</b>
<b>SILPA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

**Tabel 3.2** Rincian Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV 2025

URAIAN	REALISASI TRIWULAN IV 2024			REALISASI TRIWULAN III 2025			REALISASI TRIWULAN IV 2025		
	Rp Miliar	% APBD-P	%yoy	Rp Miliar	% APBD	%yoy	Rp Miliar	% APBD	%yoy
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>22.707,99</b>	<b>98,28%</b>	<b>-16,00%</b>	<b>17.975,15</b>	<b>69,91%</b>	<b>-16,56%</b>	<b>20.894,86</b>	<b>94,65%</b>	<b>-7,98%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>12.720,94</b>	<b>95,76%</b>	<b>-12,99%</b>	<b>12.696,82</b>	<b>72,69%</b>	<b>-30,34%</b>	<b>11.728,84</b>	<b>94,33%</b>	<b>-7,80%</b>
Pajak Daerah	10.987,60	96,00%	-13,60%	10.668,13	71,30%	-36,46%	9.758,53	91,63%	-11,19%
Retribusi Daerah	275,48	98,49%	90,78%	410,21	70,01%	98,30%	530,06	107,97%	92,41%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	125,07	76,72%	8,48%	416,91	58,84%	446,12%	291,37	96,49%	132,96%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	1.332,79	96,36%	-18,89%	1.201,56	92,82%	4,14%	1.148,88	121,34%	-13,80%
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>9.413,07</b>	<b>105,28%</b>	<b>-12,09%</b>	<b>5.278,34</b>	<b>65,31%</b>	<b>59,87%</b>	<b>9.091,90</b>	<b>95,53%</b>	<b>-3,41%</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.413,07	105,28%	-10,08%	5.278,34	65,31%	59,87%	9.091,90	95,53%	-3,41%
Dana Perimbangan	5.877,47	88,00%	0,00%	-	0,00%	-100,00%	-	0,00%	-100,00%
Dana Insentif Daerah (DID)	3.535,60	11044,58%	0,00%	-	0,00%	-100,00%	-	0,00%	-100,00%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>573,98</b>	<b>81,36%</b>	<b>-66,34%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00%</b>	<b>74,11</b>	<b>42,94%</b>	<b>-87,09%</b>
Pendapatan Hibah	573,98	81,36%	-66,34%	-	0,00%	-100,00%	74,11	42,94%	-87,09%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>27.241,36</b>	<b>89,45%</b>	<b>-13,66%</b>	<b>16.970,40</b>	<b>49,43%</b>	<b>19,72%</b>	<b>33.553,91</b>	<b>88,45%</b>	<b>23,17%</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>19.516,23</b>	<b>92,41%</b>	<b>-20,37%</b>	<b>14.504,64</b>	<b>57,92%</b>	<b>16,64%</b>	<b>23.485,57</b>	<b>92,76%</b>	<b>20,34%</b>
Belanja Pegawai	4.657,61	95,58%	-15,96%	3.773,90	63,65%	-13,05%	5.622,77	89,81%	20,72%
Belanja Barang dan Jasa	8.348,60	86,31%	-26,27%	6.513,18	56,49%	10,83%	11.696,27	93,76%	40,10%
Belanja Bunga	38,09	70,60%	-40,97%	36,20	76,98%	-22,12%	25,22	94,61%	-33,78%
Belanja Subsidi	4.044,32	104,86%	15,50%	1.632,86	29,01%	22,83%	4.366,52	91,29%	7,97%
Belanja Hibah	815,21	86,42%	-54,93%	1.465,43	77,70%	185,47%	614,19	98,08%	-24,66%
Belanja Bantuan Sosial	1.612,39	111,26%	-28,91%	1.083,07	72,08%	228,98%	1.160,60	98,72%	-28,02%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.517,79</b>	<b>90,02%</b>	<b>6,77%</b>	<b>2.103,11</b>	<b>20,31%</b>	<b>20,95%</b>	<b>10.054,09</b>	<b>86,23%</b>	<b>33,74%</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>207,35</b>	<b>120,64%</b>	<b>0,00%</b>	<b>362,64</b>	<b>98,57%</b>	<b>0,00%</b>	<b>14,25</b>	<b>102,44%</b>	<b>-93,13%</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(4.533,37)</b>		<b>-4,26%</b>	<b>1.004,76</b>		<b>-86,36%</b>	<b>(9.268,42)</b>		<b>104,45%</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>9.481,98</b>	<b>102,28%</b>	<b>6,63%</b>	<b>657,29</b>	<b>68,72%</b>	<b>-89,95%</b>	<b>2.187,22</b>	<b>98,24%</b>	<b>-76,93%</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Saldo Kas Tahun Lalu)	-	169,50%	-100,00%	(0,03)	100,00%	0,00%	-	100,00%	0,00%
Pencairan Dana Cadangan	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Penerimaan Pinjaman Daerah	2.939,56	54,33%	906,70%	657,27	22,10%	0,00%	2.187,20	95,63%	-25,59%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	0,00%	0,00%	0,05	173,98%	0,00%	0,02	240,88%	0,00%
Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.576,19</b>	<b>60,36%</b>	<b>-8,51%</b>	<b>900,47</b>	<b>23,29%</b>	<b>250,53%</b>	<b>4.019,64</b>	<b>91,60%</b>	<b>-12,16%</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Penyertaan Modal Daerah	3.502,77	51,23%	-18,04%	657,27	16,84%	4703,48%	2.805,04	88,73%	-19,92%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.073,42	95,92%	47,50%	243,20	35,97%	0,00%	1.214,60	97,26%	13,15%
Pemberian Pinjaman Daerah	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Pengeluaran Pembiayaan BLUD	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
<b>PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25.647,56</b>	<b>98,72%</b>	<b>-6,14%</b>	<b>18.632,44</b>	<b>69,82%</b>	<b>-13,51%</b>	<b>23.082,07</b>	<b>94,94%</b>	<b>-10,00%</b>
<b>BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>31.817,55</b>	<b>86,25%</b>	<b>-13,47%</b>	<b>17.870,87</b>	<b>47,75%</b>	<b>23,83%</b>	<b>37.573,55</b>	<b>88,65%</b>	<b>18,09%</b>
<b>SILPA</b>	<b>(6.169,99)</b>			<b>761,57</b>			<b>(14.491,48)</b>		

**Tabel 3.3** Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta

KOMPONEN BELANJA	PAGU 2023		PAGU 2024		PAGU 2025	
	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy
Belanja Pegawai	264.318	3,97%	292.352	10,61%	321.846	10,09%
Belanja Barang	218.137	-21,38%	257.413	18,00%	493.107	91,56%
Belanja Modal	105.892	-17,72%	135.358	27,83%	380.778	181,31%
Belanja Bantuan Sosial	142.601	-1,13%	151.459	6,21%	187.602	23,86%
<b>Total</b>	<b>730.949</b>	<b>-9,15%</b>	<b>836.582</b>	<b>14,45%</b>	<b>1.383.333</b>	<b>65,36%</b>

Sumber: DJPb, BI, diolah

**Tabel 3.4** Rincian Realisasi APBN di DKI Jakarta Triwulan IV 2025

KOMPONEN BELANJA	REALISASI TW IV 2024			REALISASI TW III 2025			REALISASI TW IV 2025		
	Rp Miliar	% APBN	%yoy	Rp Miliar	% APBN	%yoy	Rp Miliar	% APBN	%yoy
Belanja Pegawai	53.896	20,37%	1,50%	68.040	21,14%	7,84%	60.390	18,76%	12,05%
Belanja Barang	133.677	59,85%	39,34%	106.194	21,54%	45,61%	200.527	40,67%	50,01%
Belanja Modal	109.543	88,78%	14,48%	60.113	15,79%	-6,66%	197.217	51,79%	80,04%
Belanja Bantuan Sosial	42.015	29,12%	-17,92%	34.453	18,37%	-2,91%	69.416	37,00%	65,22%
<b>Total</b>	<b>339.131</b>	<b>44,89%</b>	<b>14,61%</b>	<b>268.800</b>	<b>19,43%</b>	<b>13,94%</b>	<b>527.549</b>	<b>38,14%</b>	<b>10,82%</b>

Sumber: DJPb, BI, diolah

## BAB 4

# INFLASI

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,63% (yoy) dan tetap berada dalam rentang sasaran, meskipun meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,40% (yoy). Capaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional. Terkendalnya inflasi Jakarta mencerminkan sinergi dan kolaborasi pengendalian inflasi dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan IV 2025 antara lain emas perhiasan, tarif air minum PAM, daging ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit. Memasuki triwulan I 2026, inflasi Jakarta pada Januari 2026 meningkat menjadi 3,96% (yoy). Kenaikan ini terutama dipengaruhi faktor *base effect* dari rendahnya inflasi Januari 2025 seiring pemberlakuan diskon tarif listrik sebesar 50%. Ke depan, inflasi IHK Jakarta diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% pada tahun 2026.



**Inflasi IHK  
DKI Jakarta (yoy)**



**2,40%**  
Triwulan III 2025

**2,63%**  
Triwulan IV 2025

**0,33%**

Desember 2025, mtm

**Rata-rata  
Inflasi IHK (yoy)**

**2,13%**

Rerata inflasi Triwulan IV 2023-2025, yoy

**Inflasi IHK  
DKI Jakarta (ytd)**

**2,63%**

Desember 2025, ytd

## A. KINERJA INFLASI PROVINSI TRIWULAN IV 2025

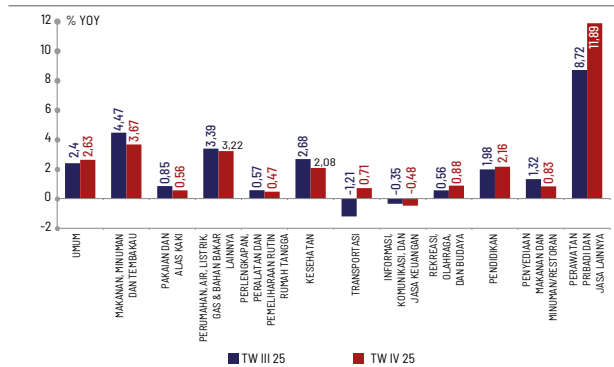
**Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan IV 2025 tetap terkendali di rentang sasaran 2,5% ± 1%.** Inflasi IHK Jakarta tercatat sebesar 2,63% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya (2,40%, yoy). Upaya pengendalian inflasi terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga sekaligus mengantisipasi potensi rambatan kenaikan harga komoditas global terhadap tekanan harga domestik. Dalam hal ini, TPID Jakarta memperkuat sinergi melalui strategi 4K—keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—antara lain melalui pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Inflasi yang lebih tinggi pada triwulan IV 2025 terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran, kecuali kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yang mengalami deflasi (Grafik 4.1). Berdasarkan kontribusinya, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya memberikan sumbangan inflasi yang paling besar, disusul oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga (Grafik 4.2). Berdasarkan komoditasnya, inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, tarif air minum PAM, daging ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit. Namun demikian, tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh penurunan harga

telepon seluler, tomat, tarif transportasi yakni kereta api dan angkutan udara, serta bayam.

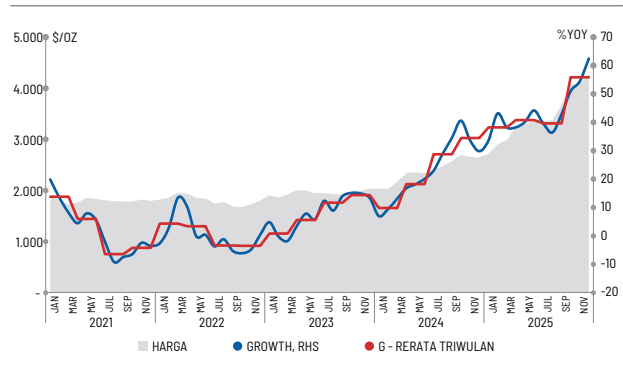
**Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya** menjadi kontributor utama inflasi IHK Jakarta pada triwulan IV 2025. Kelompok ini mencatat andil tahunan sebesar 0,82%, dengan inflasi yang meningkat dari 8,72% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 11,89% (yoy). Tekanan inflasi masih dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan yang secara persisten menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Jakarta sepanjang satu tahun terakhir. Pada triwulan IV 2025, emas perhiasan mencatat inflasi 53,06% (yoy), meningkat dari 36,96% (yoy) pada triwulan sebelumnya, dengan andil tahunan mencapai 0,72%.

Kenaikan tersebut masih sejalan dengan tren harga emas global yang terus meningkat akibat masih tingginya ketidakpastian situasi global yang mendorong tingginya permintaan emas sebagai *safe-haven asset*. Harga emas global terpantau tercatat meningkat 63,30% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 42,63% (yoy) (Grafik 4.3). Kondisi ini turut mendorong kenaikan harga domestik, tercermin pada rata-rata harga emas perhiasan yang mencapai Rp1.883.128 per gram atau meningkat 56,79% (yoy) (Grafik 4.4). Selain emas, komoditas *personal care*, seperti deodoran, pasta gigi, parfum, sampo, dan sabun mandi juga berkontribusi terhadap inflasi tahunan kelompok ini, masing-masing dengan andil sekitar 0,01%.



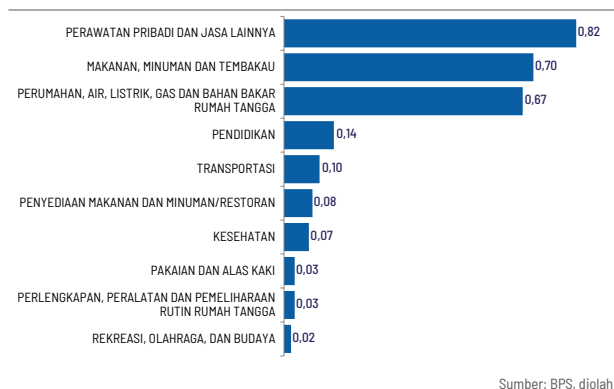
Sumber: BPS, diolah

Grafik 4.1 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran



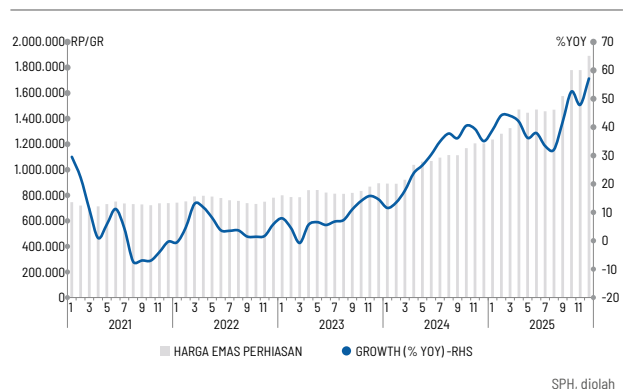
Bloomberg, diolah

Grafik 4.3 Perkembangan Harga Emas Global



Sumber: BPS, diolah

Grafik 4.2 Sumbangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran



SPH, diolah

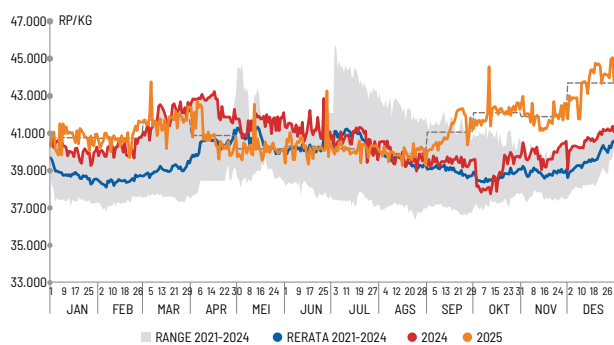
Grafik 4.4 Perkembangan Harga Emas Perhiasan Jakarta

**Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau** menjadi penyumbang terbesar kedua inflasi IHK Jakarta pada triwulan IV 2025. Dengan andil tahunan sebesar 0,70%, kelompok ini mencatat inflasi 3,67% (yoy), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,47% (yoy). Kontribusi inflasi terbesar berasal dari komoditas daging ayam ras dengan andil 0,17%, diikuti cabai merah sebesar 0,10%, serta cabai rawit, bawang merah, dan beras yang masing-masing sebesar 0,06%.

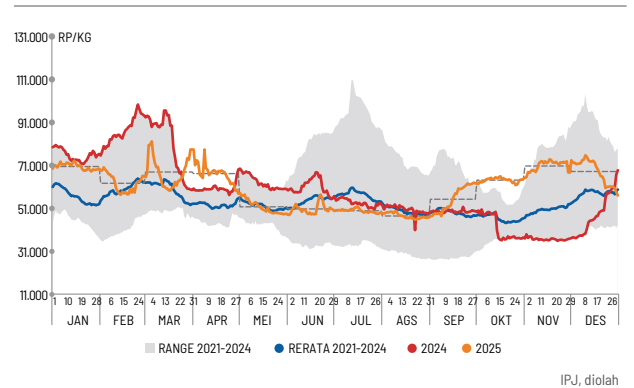
Kenaikan harga daging ayam ras masih menjadi salah satu sumber utama tekanan inflasi pada periode ini. Hasil pemantauan Informasi Pangan Jakarta (IPJ) menunjukkan rata-rata harga daging ayam ras sebesar Rp42.530/kg (Grafik 4.5). Secara tahunan, harga tersebut meningkat 6,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 0,95% (yoy), dipengaruhi oleh kenaikan biaya input pakan, khususnya harga jagung pakan ternak, serta peningkatan permintaan pada periode Natal dan Tahun Baru.

Komoditas hortikultura yang meliputi cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah juga mengalami kenaikan harga, seiring gangguan cuaca yang menghambat proses panen, distribusi, dan menurunkan kualitas hasil panen. Berdasarkan data IPJ, rata-rata harga cabai merah meningkat dari Rp50.781/kg pada triwulan sebelumnya menjadi Rp67.565/kg atau naik 59,69% (yoy) (Grafik 4.6). Harga cabai rawit naik dari Rp51.784/kg menjadi Rp56.204/kg atau meningkat 19,21% (yoy) (Grafik 4.7). Secara tahunan, peningkatan harga aneka cabai pada triwulan ini terpantau sangat signifikan setelah keduanya tercatat turun masing-masing sebesar 0,77% dan 16,46% pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, rata-rata harga bawang merah tercatat Rp49.595/kg, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp52.148/kg (Grafik 4.8), namun secara tahunan masih meningkat 25,84% (yoy), meskipun tidak setinggi kenaikan pada triwulan sebelumnya.

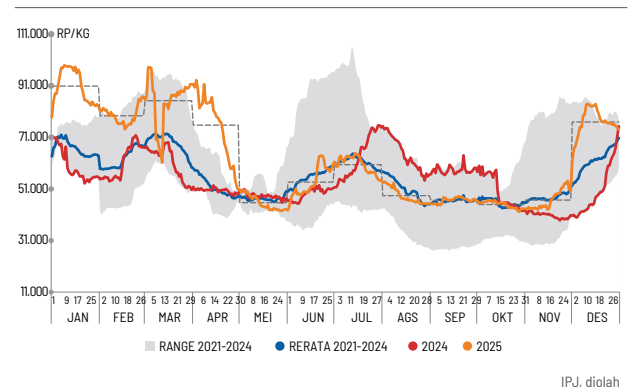
Adapun komoditas beras mengalami kenaikan harga yang relatif terbatas. Rata-rata harga beras tercatat Rp15.166/kg, sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar Rp15.066/kg (Grafik 4.9). Secara tahunan, kenaikan harga beras sebesar 2,03% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 2,60% (yoy). Dari sisi pasokan, ketersediaan beras Jakarta tetap terjaga dengan rata-rata stok sebesar 222.454 ton pada triwulan IV 2025.



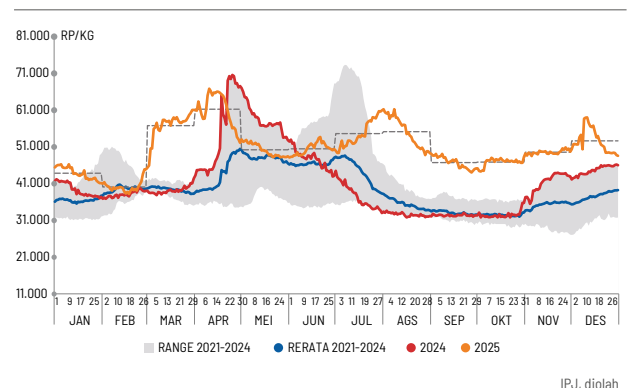
Grafik 4.5 Perkembangan Harga Daging Ayam Ras



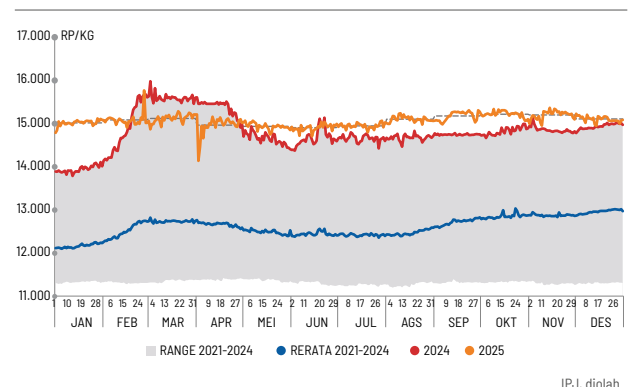
Grafik 4.6 Perkembangan Harga Cabai Merah



Grafik 4.7 Perkembangan Harga Cabai Rawit



Grafik 4.8 Perkembangan Harga Bawang Merah



Grafik 4.9 Perkembangan Harga Beras

**Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga** turut berkontribusi pada inflasi IHK Jakarta pada triwulan IV 2025. Kelompok ini mencatat inflasi 3,22% (yoy), sedikit melandai dari triwulan sebelumnya yang sebesar 3,39% (yoy). Tekanan inflasi terutama dipengaruhi penyesuaian tarif air minum PAM pada awal 2025 dengan andil tahunan sebesar 0,62%. Selain itu, sewa rumah turut memberikan kontribusi sebesar 0,04% seiring dengan penyesuaian harga dari tahun sebelumnya.

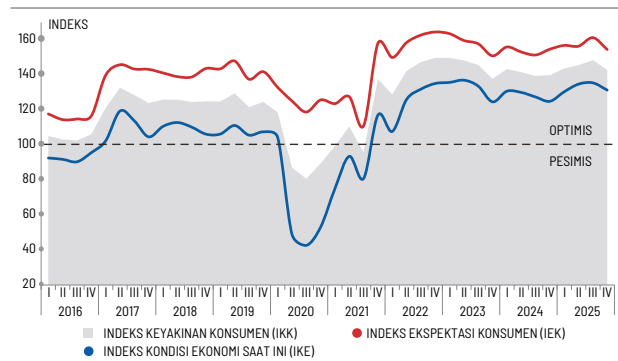
**Kelompok Pendidikan** mencatatkan inflasi 2,16% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,98% (yoy), dengan sumbangan inflasi tahunan sebesar 0,14%. Tekanan inflasi terutama bersumber dari kenaikan biaya pendidikan, antara lain Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Dasar (SD), akademi/ perguruan tinggi, serta biaya bimbingan belajar yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,05%, 0,04%, 0,03%, dan 0,01%.

**Kelompok Transportasi** menyumbang inflasi dengan andil tahunan sebesar 0,10%. Kelompok ini mencatat inflasi 0,71% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi 1,21% (yoy). Kenaikan terutama dipicu oleh kenaikan harga bensin dan tarif transportasi, termasuk tarif kendaraan daring roda dua dan roda empat, angkutan antarkota, dan tarif parkir.

**Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran** mencatat andil 0,08% dengan inflasi 0,83% (yoy), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,32% (yoy). Tekanan inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga makanan siap saji, seperti sop, soto, martabak, ayam goreng, hamburger, ketoprak, dan pizza yang masing-masing memberikan andil tahunan sekitar 0,01%. Sementara itu, **Kelompok Kesehatan** menyumbang inflasi sebesar 0,07% dengan inflasi 2,08% (yoy), melandai dari 2,68% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi terutama bersumber dari kenaikan tarif rumah sakit serta harga berbagai produk kesehatan, antara lain vitamin, obat gosok, obat resep, masker, obat flu, dan tarif pemeriksaan kesehatan (*check up*).

**Kelompok Pakaian dan Alas Kaki** mengalami inflasi sebesar 0,56% (yoy), melandai dari 0,85% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, **Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga** mencatat andil inflasi tahunan sebesar 0,03% dengan inflasi 0,47% (yoy), menurun dari 0,57% (yoy) pada triwulan sebelumnya, yang terutama dipengaruhi oleh kenaikan upah asisten rumah tangga. Adapun **Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya** juga turut menyumbang inflasi pada tahun 2025 dengan inflasi sebesar 0,88% (yoy), meningkat dari 0,56% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi terutama dipicu oleh kenaikan tarif bioskop.

Di sisi lain, **Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan** menahan laju inflasi dengan mencatat deflasi sebesar 0,48% (yoy) dan andil tahunan sebesar -0,03%, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang deflasi 0,35% (yoy). Deflasi terutama didorong oleh



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia  
Grafik 4.10 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Kondisi Ekonomi (IKE)

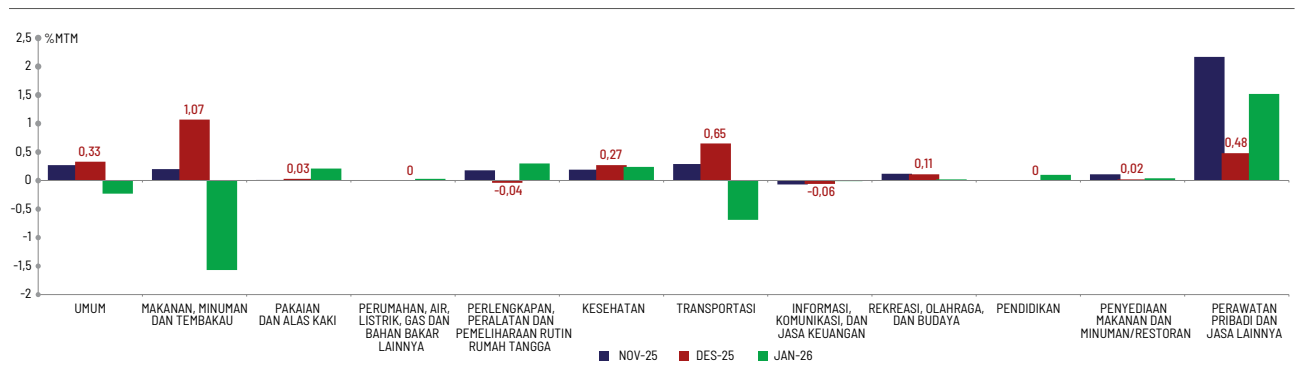
penurunan harga telepon seluler dan laptop/notebook yang masing-masing memberikan andil deflasi tahunan sebesar 0,03% dan 0,01%.

Inflasi yang tetap terkendali pada triwulan IV 2025 pada periode permintaan yang tinggi di saat perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan tahun baru, turut mendukung optimisme masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta. Hal ini tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) pada triwulan IV 2025 yang menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) seluruhnya berada pada level optimis (berada di atas 100) sebagaimana Grafik 4.10.

## B. TRACKING INFLASI TRIWULAN I 2026

Pada awal triwulan I 2026, Jakarta mengalami deflasi seiring dengan normalisasi permintaan pasca Nataru dan lebih terkendalinya beberapa harga komoditas pangan yang telah memasuki masa panen. IHK Jakarta pada Januari 2026 tercatat deflasi 0,23% (mtm), setelah pada akhir tahun 2025 mencatat inflasi 0,33% (mtm). Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang utama deflasi seiring dengan tingginya pasokan hortikultura, seperti cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit seiring memasuki masa panen. Selain itu, penurunan harga BBM non-subsidi per 1 Januari 2026 turut mendorong deflasi pada kelompok Transportasi. Di sisi lain, harga emas perhiasan masih mengalami kenaikan sejalan dengan tren global sehingga tetap mendorong inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, meskipun sempat mengalami koreksi pada akhir Januari 2026 (Grafik 4.11).

Kelompok **Makanan, Minuman, dan Tembakau** menjadi penyumbang utama deflasi Jakarta pada Januari 2026. Dengan andil deflasi bulanan sebesar 0,31%, kelompok ini mencatat deflasi sebesar 1,57% (mtm), setelah bulan sebelumnya mencatat inflasi 1,07% (mtm). Deflasi terutama dipicu penurunan harga komoditas hortikultura, yakni cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit yang masing-masing memberikan andil penurunan 0,09%; 0,06%; dan 0,04% terhadap deflasi bulanan DKI Jakarta.



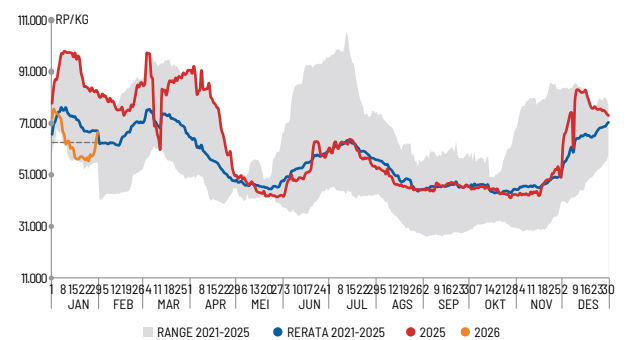
Sumber: BPS, diolah

Grafik 4.11 Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Pengeluaran November 2025 – Januari 2026

Berdasarkan pemantauan Informasi Pangan Jakarta (IPJ), rata-rata harga cabai merah pada Januari 2026 tercatat Rp48.827/kg, turun 26,50% dari bulan sebelumnya sebesar Rp66.423/kg (Grafik 4.12). Harga bawang merah tercatat Rp47.265/kg, turun 10,04% dari Rp52.542/kg, sementara harga cabai rawit sebesar Rp63.379/kg atau turun 16,88% (Grafik 4.13–4.14). Penurunan harga tersebut didorong meningkatnya pasokan dari daerah sentra yang memasuki masa panen pada awal tahun 2026.

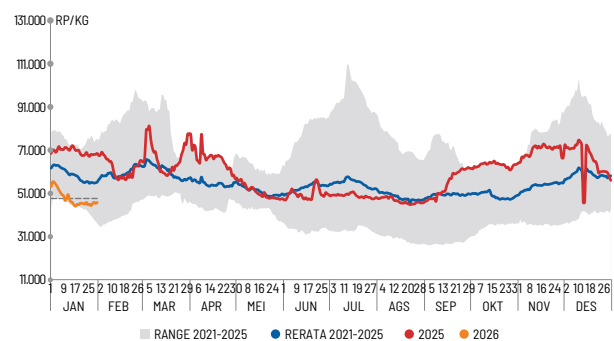
Kondisi ini juga tercermin dari peningkatan rata-rata stok cabai merah dan cabai rawit pada Januari 2026 yang masing-masing mencapai 29,54 ton/minggu dan 24,68 ton/minggu, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 25,27 ton/minggu dan 24,13 ton/minggu (Grafik 4.15–4.16). Sementara itu, rata-rata stok bawang merah tercatat

96,93 ton/minggu, sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 110,10 ton/minggu (Grafik 4.17).



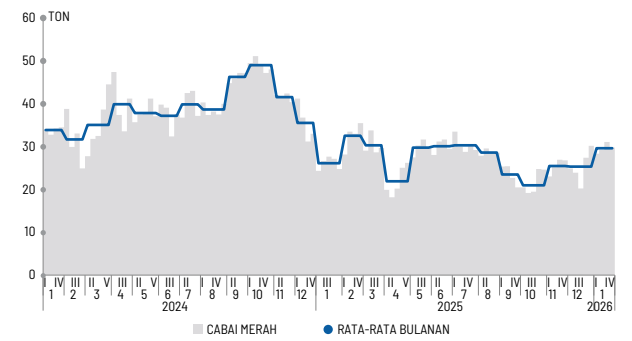
Sumber: IPJ, diolah

Grafik 4.14 Perkembangan Harga Cabai Rawit



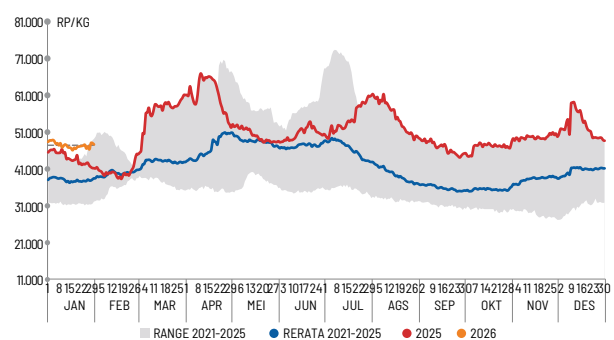
Sumber: IPJ, diolah

Grafik 4.12 Perkembangan Harga Cabai Merah



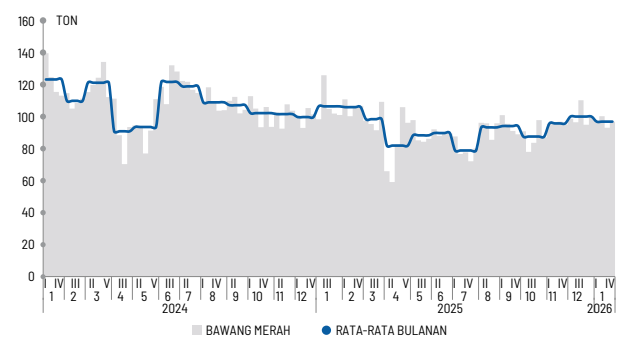
Sumber: PIKJ, diolah

Grafik 4.15 Perkembangan Stok Cabai Merah



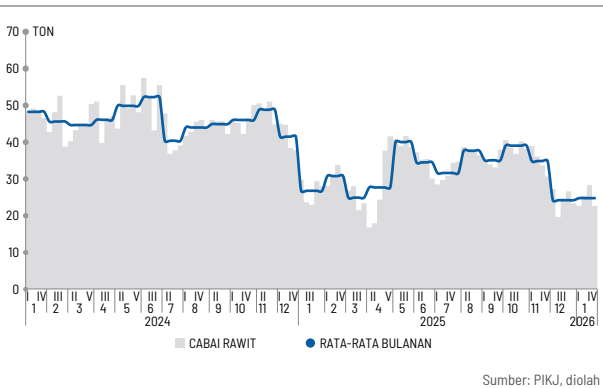
Sumber: IPJ, diolah

Grafik 4.13 Perkembangan Harga Bawang Merah



Sumber: PIKJ, diolah

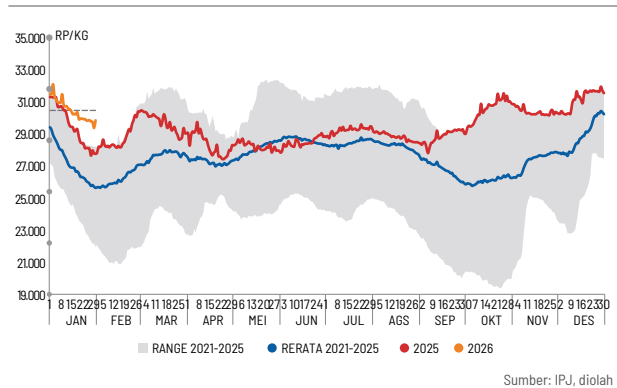
Grafik 4.16 Perkembangan Stok Bawang Merah



Sumber: PIKJ, diolah

Grafik 4.17 Perkembangan Stok Cabai Rawit

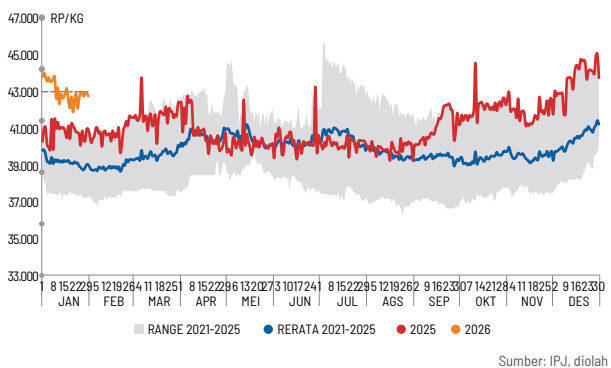
Penurunan harga daging ayam ras turut memberikan andil deflasi sebesar 0,07%. Berdasarkan pemantauan Informasi Pangan Jakarta (IPJ), rata-rata harga daging ayam ras pada periode ini tercatat Rp42.960/kg, turun 1,57% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp43.646/kg (Grafik 4.18). Penurunan harga tersebut sejalan dengan turunnya harga *live bird* di tingkat produsen serta meningkatnya produksi di sejumlah daerah pemasok utama, seperti Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kondisi ini tercermin pada peningkatan rata-rata stok daging ayam ras pada Januari 2026 menjadi 385 ton/minggu, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 295 ton/minggu (Grafik 4.19).



Sumber: IPJ, diolah

Grafik 4.20 Perkembangan Harga Telur Ayam Ras

Kondisi serupa juga terjadi pada telur ayam ras yang turut memberikan andil deflasi sebesar 0,02% pada Januari 2026. Berdasarkan pemantauan Informasi Pangan Jakarta (IPJ), rata-rata harga telur ayam ras tercatat Rp30.530/kg, turun 1,87% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp31.111/kg (Grafik 4.20). Penurunan harga ini sejalan dengan turunnya harga di tingkat produsen serta meningkatnya produksi peternak di daerah pemasok, seperti Serang, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Selain itu, komoditas wortel, kentang, dan jeruk juga menyumbang deflasi masing-masing sekitar 0,01%. Penurunan harga dipengaruhi meningkatnya produksi wortel di Jawa Barat, kentang di Dieng, serta pasokan jeruk dari Medan, yang didukung kelancaran distribusi dan pasokan impor.



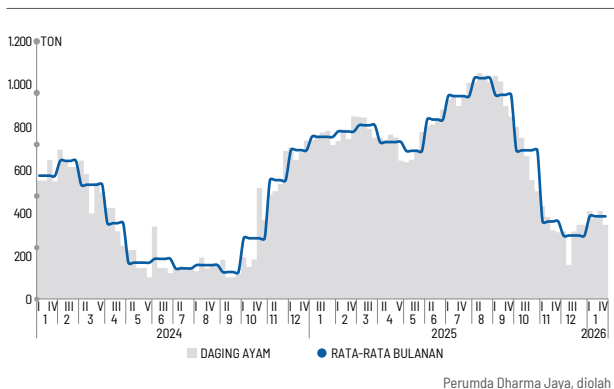
Sumber: IPJ, diolah

Grafik 4.18 Perkembangan Harga Daging Ayam Ras

Deflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tertahan oleh kenaikan harga sayuran hijau seperti kangkung, bayam, dan tomat yang masing-masing memberikan andil inflasi sekitar 0,01%. Kenaikan harga dipicu gangguan pasokan akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung. Seiring perkembangan tersebut, inflasi tahunan kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada Januari 2026 tercatat 0,21% (yoy), melandai dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,67% (yoy).

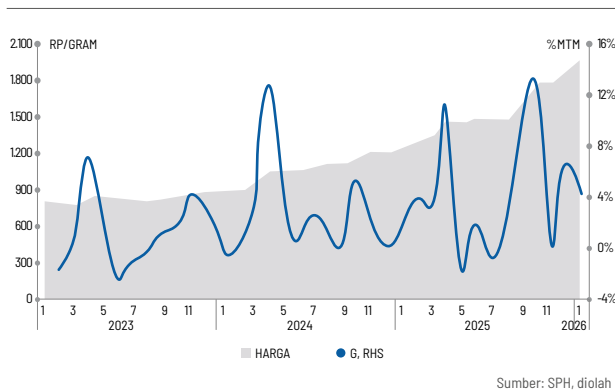
Kelompok Transportasi turut menyumbang deflasi sebesar 0,09% terhadap IHK Jakarta pada Januari 2026. Kelompok ini mencatat deflasi 0,69% (mtm) setelah pada bulan sebelumnya mengalami inflasi 0,65% (mtm). Deflasi terutama disebabkan penurunan harga BBM non-subsidi per 1 Januari 2026, antara lain Pertamina Turbo, Pertamina Green, Pertamina Dex, dan Dexcelite, serta normalisasi mobilitas masyarakat pasca Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru yang mendorong penurunan tarif angkutan udara dan angkutan antarkota. Secara tahunan, kelompok ini mencatat inflasi 0,25% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,71% (yoy).

Di sisi lain, deflasi IHK Jakarta pada Januari 2026 tertahan oleh inflasi pada kelompok **Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya**, yang mencatat inflasi sebesar 1,52% (mtm) dengan andil sebesar 0,11% terhadap inflasi bulanan. Tekanan inflasi masih bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan. Berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH), rata-rata harga emas perhiasan di DKI Jakarta pada Januari 2026 tercatat

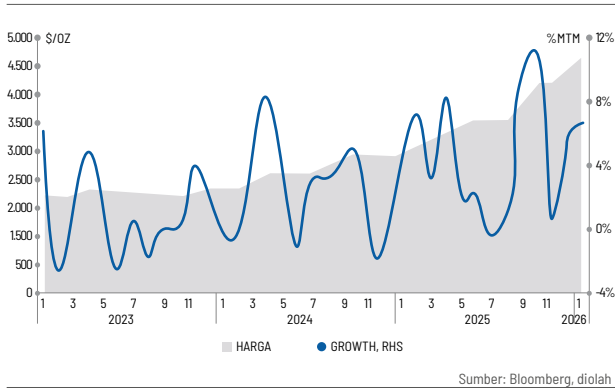


Perumda Dharma Jaya, diolah

Grafik 4.19 Perkembangan Stok Daging Ayam Ras



Sumber: SPH, diolah  
Grafik 4.21 Perkembangan Harga Emas Perhiasan DKI Jakarta (%; mtm)



Sumber: Bloomberg, diolah  
Grafik 4.22 Perkembangan Harga Emas Global

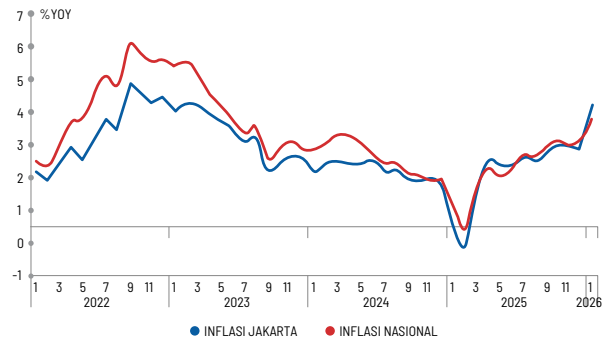
Rp1.959.745/gram, meningkat 4,07% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp1.883.128/gram (Grafik 4.21). Pergerakan ini sejalan dengan tren harga emas global yang masih meningkat, dengan rata-rata harga pada Januari 2026 mencapai USD 4.586/oz, naik 6,42% dari bulan sebelumnya sebesar USD 4.309/oz (Grafik 4.22). Sejalan dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan kelompok ini tercatat 12,80% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 11,89% (yoy).

Deflasi yang lebih dalam juga tertahan oleh inflasi pada kelompok **Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga** yang mencatat inflasi sebesar 0,30% (mtm) dengan andil 0,02%. Komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini masing-masing memberikan andil relatif kecil (<0,01%). Kelompok **Kesehatan, Pakaian dan Alas Kaki, dan Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan**

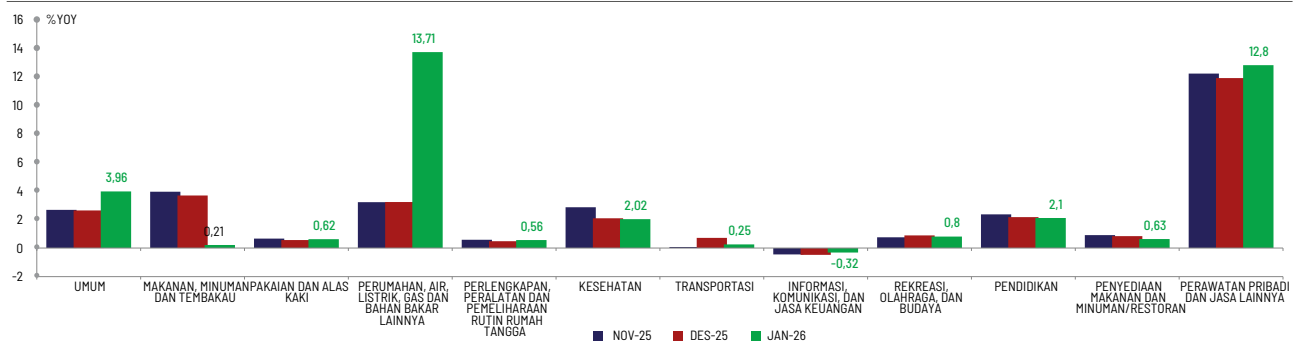
**Bakar Rumah Tangga** juga tercatat memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01% pada periode ini, dengan kontribusi komoditas yang terbatas. Sementara itu, kelompok **Pendidikan** mengalami inflasi sebesar 0,10% (mtm) dengan andil 0,01%, terutama dipengaruhi oleh kenaikan biaya kursus bahasa asing. Di sisi lain, kelompok **Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya, serta kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran** tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap inflasi bulanan Jakarta pada Januari 2026.

Secara tahunan, inflasi IHK Jakarta pada Januari 2026 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi Jakarta pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,96%, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,55% (yoy) (Grafik 4.23). Inflasi Januari 2026 yang berada di atas rentang sasaran inflasi, lebih dipengaruhi oleh faktor *base effect* inflasi Januari 2025 yang tercatat rendah seiring implementasi diskon tarif listrik sebesar 50%. Dengan mengecualikan komponen tarif listrik, laju inflasi tahunan DKI Jakarta tetap berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Dampak *low base effect* bersifat temporer pada periode triwulan I 2026 dan diperkirakan kembali normal memasuki triwulan II 2026.

Tekanan inflasi tahunan terutama berasal dari **kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga** dengan andil 2,64% dan inflasi 13,71% (yoy). **Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya** dan **kelompok Pendidikan** juga turut menjadi penyumbang utama dengan andil masing-masing sebesar 0,90% dan 0,14% dengan inflasi sebesar 12,80% (yoy) dan 2,10% (yoy) (Grafik 4.24). Dari sisi



Sumber: BPS, diolah  
Grafik 4.23 Inflasi Jakarta dan Nasional



Sumber: BPS, diolah  
Grafik 4.24 Inflasi Tahunan Kelompok Pengeluaran November 2025 – Januari 2026

komoditas, penyumbang utama inflasi tahunan berasal dari *base effect* diskon tarif listrik serta penyesuaian tarif air minum PAM pada tahun 2025 yang masing-masing berkontribusi 1,98% dan 0,63%, dengan inflasi mencapai 44,77% (yoy) dan 32,06% (yoy). Selain itu, masih berlangsungnya tren kenaikan harga emas perhiasan pada awal triwulan I 2026 turut menyumbang inflasi sebesar 0,84% dengan inflasi 59,65% (yoy).

### C. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI TRIWULAN IV 2025

Terkendalinya inflasi di Jakarta dalam rentang sasaran tidak terlepas dari dukungan berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta. Program pengendalian inflasi TPID di Provinsi DKI Jakarta mengacu pada kerangka 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya pengendalian dilakukan dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan komoditas strategis agar tetap tersedia, mudah dijangkau, dan terjangkau harganya, terutama di tengah kenaikan permintaan masyarakat, risiko gangguan produksi pangan, serta peningkatan harga komoditas global.

Sebagai upaya merespon dinamika inflasi pangan, TPID DKI Jakarta memperkuat implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Kegiatan ini mencakup di antaranya perluasan Kerjasama Antar Daerah, program digitalisasi data, penguatan kelembagaan, kegiatan *capacity building* TPID, komitmen penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, Fasilitas Distribusi Pangan, hilirisasi pangan maupun implementasi gerakan *urban farming* dan *digital farming*.

#### Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, TPID Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa upaya di antaranya:

##### 1. Program pangan bersubsidi.

Pangan bersubsidi berlangsung di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta sepanjang triwulan IV 2025 dengan penerima program yaitu masyarakat yang tergolong dalam kategori penerima manfaat pangan subsidi. Program ini merupakan kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta, BUMD Pangan DKI Jakarta bersama para *stakeholder* yang terlibat. Adapun lokasi pengambilan pangan subsidi telah ditentukan oleh Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, yaitu diantaranya RPTRA, gerai kelurahan, kecamatan, serta seluruh gerai milik Perumda Pasar Jaya, Pasar Induk Beras Cipinang, dan gerai milik Perumda Dharma Jaya.

##### 2. Program Pasar Murah.

Penyelenggaraan pasar murah rutin oleh BUMD pangan (PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya) menggunakan truk keliling pada Oktober-Desember

2025, serta bazar pangan murah termasuk program *BULOG Goes to Rusun*. Komoditas yang disediakan meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, cabai, bawang, dan aneka daging.

##### 3. Penguatan distribusi dan akses pangan.

Pelaksanaan pasar murah serta pengiriman komoditas pangan dengan subsidi ongkos angkut ke wilayah Kepulauan Seribu, serta penyelenggaraan Pasar Tumbuh berbasis produk *urban farming* UMKM untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan terjangkau.

##### 4. Stabilisasi harga komoditas strategis.

Penyediaan cabai merah asal Aceh dengan harga terjangkau selama periode Nataru serta pelaksanaan Program Aksi Hadirkan Cabai Harga Petani bekerja sama dengan Kementerian Pertanian.

##### 5. Pengawasan harga dan mutu.

Pemantauan dan inspeksi harga serta mutu beras secara rutin oleh Satuan Tugas (Satgas) Pemantauan Harga Beras guna menjaga stabilitas harga dan kualitas komoditas di pasar.

#### Ketersediaan Pasokan

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan, di antaranya:

##### 1. Program penguatan *urban farming*.

- Festival *Urban Farming*, Sosialisasi, Edukasi, Promosi, dan Pendampingan Penguatan *urban farming* melalui penanaman jagung serentak di 181 lokasi wilayah Jakarta Timur.
- Pemanfaatan *rooftop* untuk budidaya hidroponik serta pelaksanaan *roadshow* mobil klinik tanaman.
- Panen raya *urban farming* di Jakarta Selatan dengan total produksi sebesar 5,40 ton dari 117 lokasi tanam.
- Pelatihan pengolahan cabai dan bawang bagi 100 UMKM binaan hasil kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
- Bimbingan teknis budidaya cabai dan program tanam serentak untuk meningkatkan produksi dan ketahanan pangan lokal.

##### 2. Pembinaan dan pengawasan mutu pangan segar.

Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) serta monitoring stabilitas harga dan stok pangan melalui peninjauan pasar induk, pasar tradisional, dan ritel modern.

##### 3. Penguatan pasokan komoditas peternakan.

- Monitoring dan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak.
- Pembinaan dan penyaluran bantuan peternakan di Pulau Lancang dan Pulau Untung Jawa, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

## Kelancaran Distribusi

Upaya untuk mendorong kelancaran distribusi di antaranya adalah:

### 1. Pelaksanaan pasar murah keliling.

Kegiatan pasar murah menjangkau seluruh wilayah DKI Jakarta, mulai dari tingkat kelurahan hingga rumah susun, melalui penjualan rutin oleh BUMD pangan menggunakan truk keliling selama periode Oktober–Desember 2025.

### 2. Dukungan distribusi pangan Kepulauan Seribu.

Penyediaan dan penguatan fasilitas distribusi pangan untuk mendukung kelancaran pasokan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

## Komunikasi Efektif

Dalam hal komunikasi efektif, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TPID Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan koordinasi serta membangun persepsi positif masyarakat, di antaranya:

### 1. Koordinasi dan rapat pengendalian inflasi.

Pelaksanaan rapat rutin “Kamis” Tim Teknis sebagai forum pemantauan harga dan stok pangan strategis serta perumusan tindak lanjut, termasuk Rapat *Pra-High Level Meeting* (HLM) dan *High Level Meeting* (HLM) dalam rangka penguatan sinergi dan kesiapan pasokan menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru.

### 2. Penguatan kapasitas dan evaluasi kelembagaan.

Pelaksanaan *capacity building* dan evaluasi program kerja tahun 2025, termasuk pelatihan enumerator Informasi Pangan Jakarta (IPJ) bersama Perumda Pasar Jaya serta kunjungan kerja dan studi banding dari berbagai daerah.

### 3. Edukasi publik dan komunikasi kebijakan.

Sosialisasi belanja bijak melalui iklan layanan masyarakat (ILM) di berbagai kanal media serta edukasi masyarakat melalui kampanye transaksi “CEMUMUAH” (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Andal).

### 4. Promosi UMKM pangan olahan.

Penyelenggaraan pameran UMKM pangan olahan dalam rangka Jakarta Economic Forum 2025.



**BOKS 2**

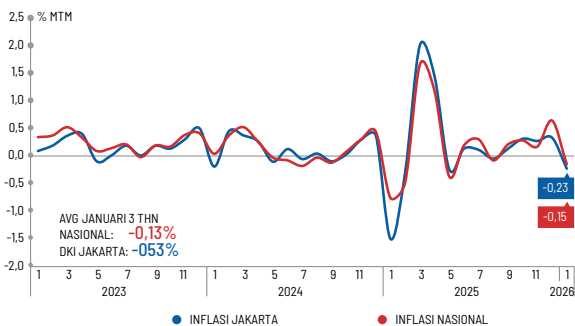
# Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Jelang Ramadan dan Idulfitri 2026

Inflasi DKI Jakarta pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,63% (yoy), merupakan yang terendah di antara provinsi di Pulau Jawa dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,92% (yoy). Capaian tersebut menjadi modal awal bagi stabilitas harga pada tahun 2026, khususnya dalam menghadapi peningkatan permintaan musiman pada awal tahun.

Pada Januari 2026, DKI Jakarta mengalami deflasi sebesar 0,23% (mtm), lebih dalam dibandingkan nasional sebesar 0,15% (mtm)(Gambar B21). Deflasi terutama dipengaruhi penurunan harga komoditas hortikultura, seperti cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit, dan sejalan dengan pola historis Januari dalam tiga tahun terakhir yang

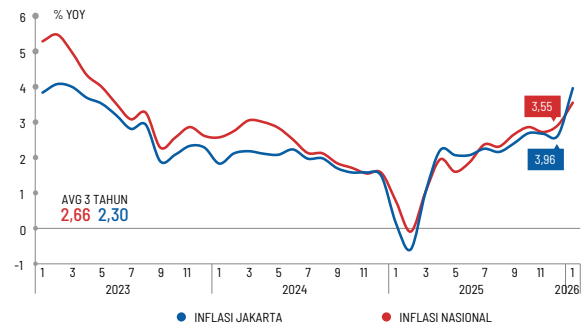
mencatat rata-rata deflasi sebesar 0,53% (mtm). Secara tahunan, inflasi DKI Jakarta pada Januari 2026 tercatat 3,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 3,55% (yoy)(Gambar B22). Inflasi tahunan yang berada di atas rentang sasaran terutama dipengaruhi faktor *base effect*, mengingat inflasi Januari 2025 tercatat rendah akibat implementasi diskon tarif listrik. Dampak tersebut diperkirakan bersifat sementara pada Januari-Maret dan akan kembali normal mulai April.

Deflasi pada awal tahun menjadi bantalan yang menahan tekanan inflasi Triwulan I 2026, terutama menjelang rangkaian hari besar keagamaan nasional (HBKN) Imlek, Nyepi, dan Ramadan-Idulfitri. Secara historis,



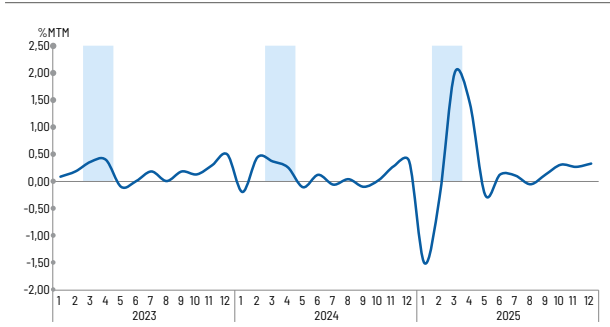
Sumber : BPS, diolah

Grafik B2.1 Perkembangan Inflasi Bulanan Provinsi DKI Jakarta 2026



Sumber : BPS, diolah

Grafik B2.2 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi DKI Jakarta 2026



Sumber : BPS, diolah

Grafik B2.3 Rata-rata inflasi bulanan Ramadan dan Idulfitri dalam rentang waktu 3(tiga) tahun terakhir

Table B2.1 Komoditas yang mengalami kenaikan harga pada HBKN Ramadan Idulfitri

NO	KOMODITAS	FREKUENSI*
1	EMAS PERHIASAN (CI)	5
2	ANGKUTAN UDARA (AP)	4
3	DAGING AYA, RAS (VF)	4
4	ANGKUTAN ANTAR KOTA (AP)	3
5	TELUR AYAM RAS (VF)	3
6	TOMAT (VF)	3
7	BAWANG MERAH (VF)	2
8	BAWANG PUTIH (VF)	2
9	BENSIN (AP)	2
10	BERAS (VF)	2
11	CABAI RAWIT (VF)	2
12	CABAI MERAH (VF)	1
13	DAGING SAPI (VF)	1

Komoditas	Tw 1-25 (ribu ton)	Tw 4-25 (ribu ton)	Tw 1-26 (ribu ton)	Growth (qtq)	Growth (yoy)
	412	322	378	+17,39%	-8,25%
	427	343	473	+37,90%	+10,77%
	563	423	526	+24,34%	-6,57%

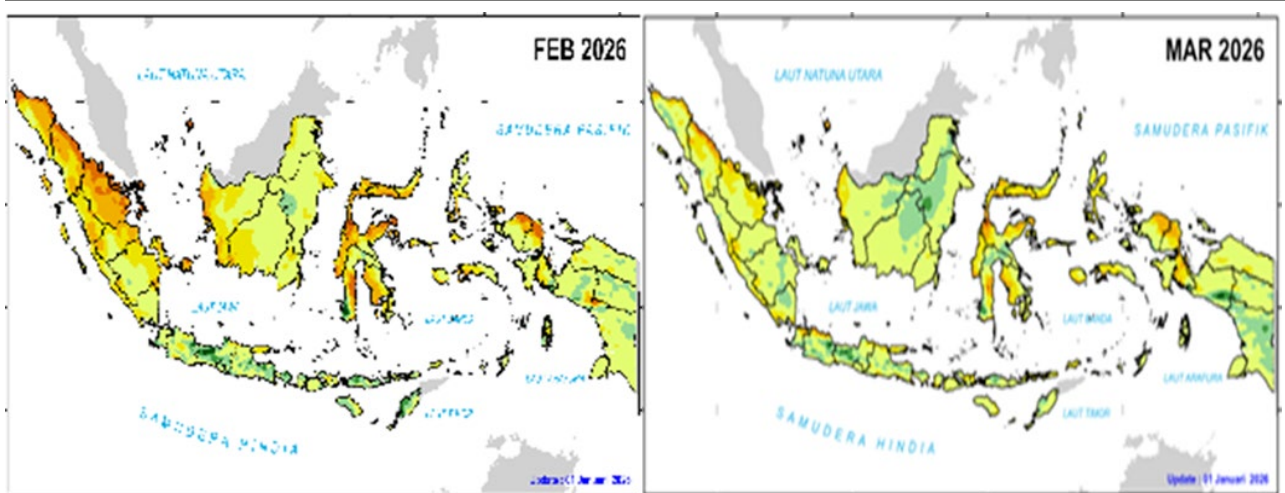
Sumber : Kementan, diolah

Gambar B2.1 Prognosa produksi cabai merah dan bawang merah tahun 2025 dan prakiraan prognosa TW I 2026

rata-rata inflasi bulanan selama periode Ramadan-Idulfitri dalam tiga tahun terakhir tercatat moderat, sekitar 0,30% (mtm). Tekanan inflasi pada periode HBKN terutama berpotensi berasal dari kelompok *volatile food*. Secara historis, komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras tercatat 4-5 kali menjadi penyumbang utama inflasi selama periode RAFI dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, komoditas hortikultura seperti tomat, bawang merah, bawang putih, dan aneka cabai juga relatif sering mengalami kenaikan harga.

Memasuki RAFI 2026, risiko inflasi diperkirakan berasal dari cabai merah dan bawang merah seiring penurunan produksi masing-masing sebesar 8,25% (yoy) dan 6,57% (yoy) pada Triwulan I 2026. Di sisi lain, produksi cabai rawit diperkirakan meningkat sebesar 10,77% (yoy). Namun demikian, curah hujan kategori menengah hingga tinggi pada Februari-Maret 2026 berpotensi mengganggu proses tanam, panen, dan distribusi antar daerah, sehingga meningkatkan volatilitas harga pangan hingga awal Triwulan II 2026.

Untuk meredakan tekanan tersebut, stabilisasi harga ditempuh melalui penguatan pasokan dan distribusi pangan strategis, antara lain melalui penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penguatan Cadangan Beras Pemerintah, bantuan pangan, serta dukungan



Sumber : BMKG

Gambar B2.2 Perkembangan cuaca awal tahun 2026 periode Februari-Maret 2026

peningkatan produksi domestik. Kebijakan diskon tarif transportasi pada periode HBKN juga diharapkan menurunkan biaya mobilitas dan distribusi barang.

Upaya tersebut diperkuat melalui koordinasi pengendalian inflasi dalam kerangka 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Beberapa upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN Rafi dan Imlek adalah sebagai berikut:

**A. K1 (Keterjangkauan Harga)**

- Kegiatan Pasar Murah sepanjang periode HBKN RAFI 2026 bersinergi dengan BUMD Pangan.
- Program Pangan Bersubsidi.
- Kegiatan Pasar Murah di Kepulauan Seribu.

**B. K2 (Ketersediaan Pasokan)**

- Penguatan Kerja Sama Antar Daerah untuk memenuhi pasokan.
- Penguatan Program SPHP BULOG Kantor Wilayah Jakarta dan Banten.
- Pemenuhan kebutuhan pasokan melalui program *urban farming* termasuk Gerakan Tanam Serentak.
- Pengadaan daging sapi impor untuk pemenuhan stok di DKI Jakarta.

- Optimalisasi penggunaan *cold storage* yang dimiliki oleh BUMD Pangan.
- Program Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk ternak Sapi.

**C. K3 (Kelancaran Distribusi)**

- Penguatan armada logistik yang dialokasikan untuk pendistribusian pasokan oleh BUMD Pangan.
- Penguatan distribusi pangan hingga ke Kepulauan Seribu.
- Prioritas angkutan komoditas barang pokok dan penting selama periode HBKN.

**D. K4 (Komunikasi Efektif)**

- Kegiatan *High Level Meeting* TPID Provinsi DKI Jakarta.
- Rapat koordinasi rutin TPID Provinsi DKI Jakarta secara mingguan untuk monitoring pasokan dan harga pangan.
- Program komunikasi belanja bijak.
- Monitoring pasokan dan harga pangan secara langsung di pasar.

Dengan dukungan pasokan yang terjaga dan langkah stabilisasi yang diperkuat, inflasi pada periode Ramadan-Idulfitri dan imlek maupun sepanjang tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% (yoy), meskipun risiko volatilitas pangan akibat faktor cuaca masih perlu diwaspadai.



## BAB 5

# PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 yang meningkat, laju intermediasi perbankan di DKI Jakarta turut menguat dengan profil risiko yang tetap terjaga rendah. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit didukung oleh kondisi likuiditas perbankan yang memadai, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang solid serta permodalan bank yang kuat. Ruang ekspansi kredit juga didorong oleh kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang tetap akomodatif guna mendukung pembiayaan sektor riil dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ketahanan perbankan tetap terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah yang rendah dan berada jauh di bawah *threshold* 5%, serta rasio permodalan yang tetap kuat.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit pada triwulan laporan terutama ditopang oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan sektor korporasi seiring ekspansi usaha dan perbaikan kinerja penjualan. Profitabilitas korporasi non-keuangan meningkat sejalan dengan penguatan aktivitas ekonomi, sehingga mendorong peningkatan permintaan kredit investasi dan modal kerja. Kemampuan bayar korporasi juga tetap kuat, tercermin dari rasio likuiditas yang terjaga dan tingkat *Non-Performing Loans* (NPL) korporasi yang rendah.

Sejalan dengan penguatan sektor korporasi, kinerja sektor rumah tangga juga menunjukkan perbaikan. yang lebih kuat. Hal ini tercermin dari meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen yang berada pada level optimis serta pertumbuhan kredit rumah tangga yang semakin solid. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan kredit konsumsi, termasuk kredit Multiguna, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), seiring meningkatnya daya beli dan mobilitas masyarakat. Risiko kredit rumah tangga tetap terjaga di bawah 3% meskipun perlu terus dimonitor seiring akselerasi pertumbuhan kredit. Kredit sektor UMKM juga tumbuh lebih tinggi tetap tumbuh positif di tengah kuatnya penyaluran kredit bank umum, didukung oleh peningkatan aktivitas usaha dan berbagai program penguatan kapasitas yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong produktivitas dan daya saing UMKM.



**Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (yoy)**



**16,62%**  
Triwulan III 2025  
**21,90%**  
Triwulan IV 2025

**Pertumbuhan Kredit (Lokasi Proyek), yoy**



**10,69%**  
Triwulan III 2025  
**18,16%**  
Triwulan IV 2025

**Pertumbuhan Kredit UMKM, yoy**



**3,35%**  
Triwulan III 2025  
**2,16%**  
Triwulan IV 2025

**Loan-to-deposit Ratio (Lokasi Proyek), yoy**



**54,20%**  
Triwulan III 2025  
**56,73%**  
Triwulan IV 2025

**Non-Performing Loan (Lokasi Proyek), yoy**



**1,13%**  
Triwulan III 2025  
**0,98%**  
Triwulan IV 2025

## A. PERKEMBANGAN KINERJA BANK UMUM

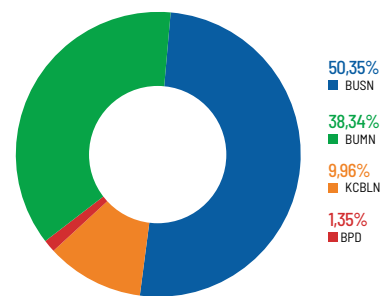
Pada triwulan IV 2025, intermediasi bank umum di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kinerja yang positif dengan profil risiko yang tetap terjaga. Penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di DKI Jakarta masih tumbuh tinggi sebesar 18,16% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (10,69%, yoy). Peningkatan laju pertumbuhan kredit utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya kredit modal kerja dan investasi, seiring meningkatnya kinerja investasi pada triwulan IV 2025. Peningkatan kredit tersebut ditopang oleh likuiditas perbankan yang memadai, ditandai dengan dana pihak ketiga (DPK) bank umum yang tumbuh sebesar 21,90% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 16,62% (yoy). Dari sisi ketahanan, rasio kredit bermasalah tetap terjaga pada tingkat yang rendah yaitu sebesar 0,98%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,08% (Tabel 1).

Dalam upaya meningkatkan kinerja bank umum menopang pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia konsisten melakukan inovasi dan sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia sebagai bauran kebijakan nasional. Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) melalui kebijakan moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) melalui kebijakan makroprudensial longgar. Kedua kebijakan ini didukung oleh kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, dan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, serta berbagai kebijakan struktural yang memperkuat fondasi ekonomi dan sistem keuangan.

Bauran berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga kapasitas perbankan untuk tetap berperan positif dalam pembiayaan perekonomian domestik di tengah masih tingginya ketidakpastian di

pasar keuangan global. Kapasitas perbankan yang terjaga baik, antara lain dapat dilihat dari kondisi kecukupan likuiditas perbankan dengan diiringi risiko kredit yang terjaga rendah jauh dibawah *threshold* 5%. Kondisi likuiditas bank yang memadai serta ditopang kebijakan insentif likuiditas dapat meringankan bank dalam hal *cost of fund*. Dengan *cost of fund* yang lebih ringan, bank berpeluang memberikan kredit/pembiayaan dengan suku bunga yang lebih rendah sehingga memacu pertumbuhan kredit.

Seiring dengan kinerja intermediasi dan ketahanan bank yang tetap kuat, total aset bank umum meningkat menjadi sebesar Rp8.949 triliun dengan pertumbuhan sebesar 11,95% (yoy) meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,86% (yoy). Jika dilihat berdasarkan kelompok bank, pangsa aset terbesar berada pada kelompok Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) yaitu 50,35%, diikuti oleh kelompok Bank Umum Milik Negara (BUMN) 38,34%, Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN) 9,96%, dan Bank Pemerintah Daerah (BPD) 1,35% (Grafik 5.1).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.1 Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank

Tabel 5.1 Perkembangan Kinerja Bank Umum di Provinsi DKI Jakarta

NO	KOMPONEN BELANJA	2022				2023				2024				2025			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Total Aset	6.589	6.652	6.797	7.298	7.203	7.201	7.283	7.661	7.721	7.810	7.817	7.994	8.246	8.313	8.587	8.949
2	Dana Pihak Ketiga (DPK)	3.849	3.887	3.910	4.321	4.211	4.192	4.235	4.461	4.539	4.560	4.505	4.596	4.742	4.994	5.253	5.602
3	Kredit																
	- Lokasi Bank (LB)	2.713	2.941	2.991	3.065	3.073	3.202	3.305	3.493	3.580	3.729	3.746	3.915	3.981	4.081	4.108	4.468
	- Lokasi Proyek (LP)	1.784	1.949	1.965	2.006	2.011	2.104	2.193	2.324	2.401	2.522	2.572	2.690	2.717	2.817	2.847	3.178
4	Pertumbuhan :																
	- g_Aset (% , yoy)	11,01	9,83	7,31	9,89	9,32	8,25	7,16	4,96	7,20	8,46	7,32	4,35	6,80	6,44	9,86	11,95
	- g_DPK (% , yoy)	11,43	10,89	6,65	11,83	9,42	7,85	8,31	3,23	7,78	8,80	6,36	3,03	4,48	9,52	16,62	21,90
	- g_Kredit Lokasi Bank (% , yoy)	6,85	12,78	13,34	14,11	13,26	8,89	10,52	13,98	16,51	16,48	13,32	12,06	11,20	9,43	9,67	14,14
	- g_Kredit Lokasi Proyek (% , yoy)	4,69	11,35	8,84	14,55	12,69	7,96	11,60	15,83	19,41	19,90	17,30	15,76	13,16	11,69	10,69	18,16
5	Intermediasi (tanpa SB)																
	-Lokasi Bank	70,48	75,66	76,48	70,92	72,96	76,39	78,04	78,31	78,87	81,78	83,15	85,18	83,95	81,72	78,19	79,75
	-Lokasi Proyek	46,36	50,13	50,25	46,42	47,75	50,18	51,78	52,09	52,90	55,31	57,10	58,52	57,30	56,41	54,20	56,73
6	Non performing loan (NPL)																
	- Lokasi Bank	2,86	2,57	2,48	2,13	2,13	2,14	2,08	1,81	1,83	1,86	1,78	1,69	1,65	1,55	1,57	1,39
	- Lokasi Proyek	1,94	1,70	1,62	1,42	1,37	1,41	1,45	1,33	1,34	1,22	1,20	1,14	1,14	1,08	1,13	0,98

Sumber: Bank Indonesia, diolah

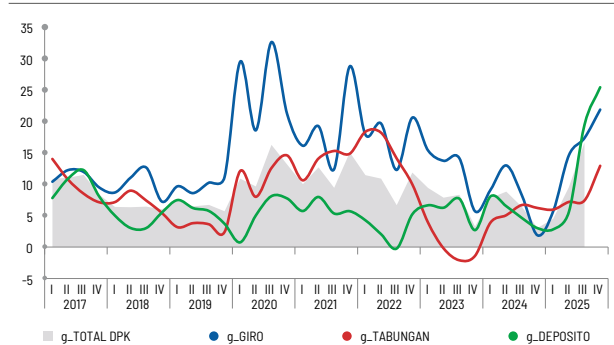
### Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum

Pada triwulan IV 2025, kegiatan penghimpunan DPK tercatat tumbuh sebesar 21,90% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 16,62% (yoy) (Grafik 5.2). Peningkatan pertumbuhan DPK, terutama ditopang oleh pertumbuhan Deposito dan Giro. Berdasarkan pangsa, DPK di DKI Jakarta didominasi oleh Deposito dengan pangsa sebesar 43,61%, diikuti oleh Giro dengan pangsa 41,27% dan Tabungan dengan pangsa 15,12% (Grafik 5.3).

Berdasarkan kepemilikan, pertumbuhan DPK ditopang oleh DPK milik Korporasi dan Pemerintah. DPK korporasi tumbuh positif sebesar 19,10% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 16,26% (yoy). Pertumbuhan yang tinggi diiringi dengan pangasanya yang besar, mencapai 55,74% dari total DPK sehingga menjadikan DPK Korporasi tetap menjadi penopang utama pertumbuhan. Meningkatnya pertumbuhan DPK Korporasi diperkirakan terkait dengan sikap *wait and see* terhadap implementasi kebijakan pemerintah serta antisipasi atas ketidakpastian situasi ekonomi global. DPK Pemerintah juga tumbuh tinggi sebesar 61,93% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya 49,78% (yoy). Kenaikan ini dipicu oleh akselerasi realisasi pendapatan daerah di penghujung tahun, terutama dari optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor lainnya adalah masifnya penyaluran Dana

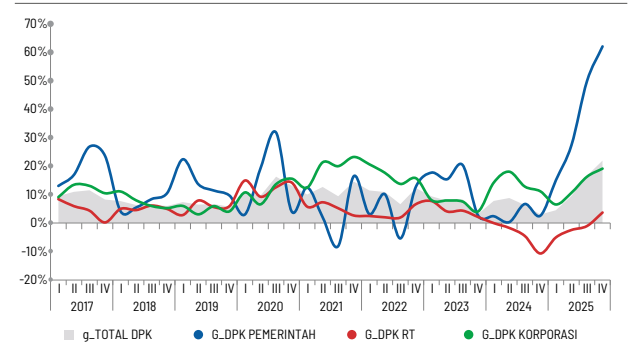
Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang sering kali dicairkan dalam jumlah besar menjelang penutupan tahun anggaran. Selain itu, kebijakan penempatan dana SAL pemerintah pada akhir triwulan III dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan signifikan tersebut. Sementara itu, pertumbuhan DPK Rumah Tangga juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,00% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 1,00% (yoy). Pertumbuhan DPK milik rumah tangga dipengaruhi oleh membaiknya arus pendapatan masyarakat di penghujung tahun, yang disinyalir didorong oleh pemberian bonus tahunan serta peningkatan aktivitas ekonomi di sektor jasa dan perdagangan selama periode libur akhir tahun. Pemulihan dari fase kontraksi pada triwulan sebelumnya mengindikasikan adanya pergeseran perilaku masyarakat yang mulai kembali menyeimbangkan antara konsumsi dan tabungan (*precautionary saving*) di tengah tingkat suku bunga simpanan yang relatif stabil (Grafik 5.4).

Secara spasial, DPK di seluruh wilayah Jakarta mencatatkan pertumbuhan positif, utamanya Jakarta Timur yang tumbuh sebesar 57,01% (yoy). Berdasarkan kontribusinya, pertumbuhan DPK Jakarta pada triwulan IV 2025 ditopang oleh Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, seiring besarnya pangsa DPK di kedua wilayah tersebut, mengingat peran keduanya sebagai kota pusat bisnis utama di Jakarta (Grafik 5.5).



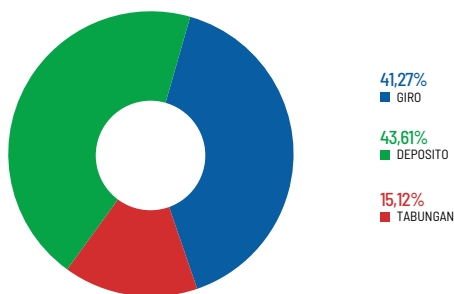
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.2 Pertumbuhan DPK Jakarta



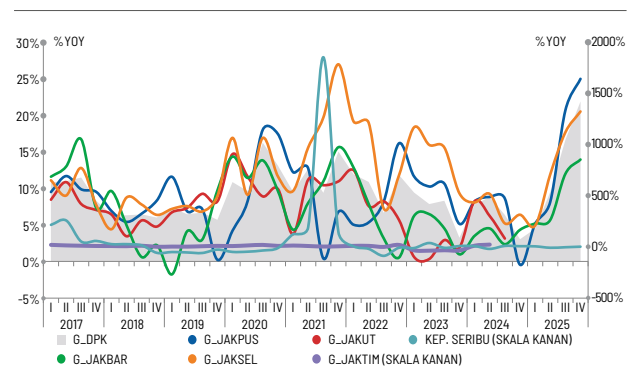
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.4 Komposisi Pemilik DPK Jakarta



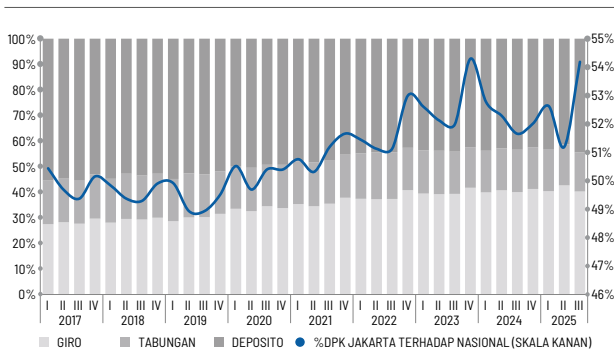
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.3 Komposisi DPK Jakarta



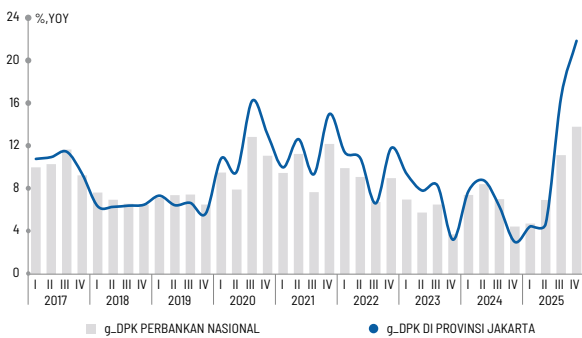
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5 Perkembangan DPK Spasial Jakarta



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.6 Kontribusi DPK Jakarta terhadap DPK Nasional



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.7 Pertumbuhan DPK Jakarta dan Nasional

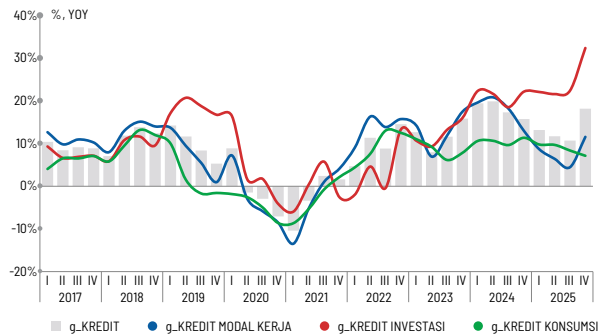
Kenaikan DPK Jakarta mendorong tetap dominannya pangsa DPK DKI Jakarta terhadap Nasional. Dengan kedudukannya sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis, pangsa DPK DKI Jakarta mencapai lebih dari 50% DPK perbankan nasional (Grafik 5.6). Hal tersebut menjadikan DKI Jakarta tetap sebagai tumpuan penghimpunan dana perbankan secara nasional, terutama Deposito. Besarnya sumber dana di DKI Jakarta menyebabkan banyak bank yang membuka kantor pusat ataupun kantor cabang di Jakarta. Pertumbuhan DPK DKI Jakarta sangat dominan memengaruhi pertumbuhan DPK di nasional. Pertumbuhan DPK DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 adalah sebesar 21,90% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK Nasional yang sebesar 13,84% (yoy) (Grafik 5.7).

### Perkembangan Kredit Bank Umum

Sejalan dengan DPK, pada triwulan IV 2025, kredit bank umum di DKI Jakarta juga mencatatkan pertumbuhan yang solid, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi proyek tercatat tumbuh sebesar 18,16% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,69% (yoy). Kredit berdasarkan lokasi bank juga mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 14,07% (yoy), meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 9,71% (yoy). Pertumbuhan kredit terutama didorong oleh kredit produktif yaitu Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK). Kredit KI tumbuh relatif tinggi sebesar 32,37% (yoy),

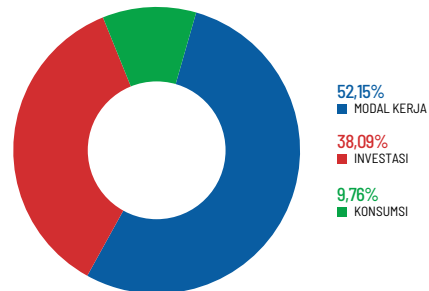
meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 22,39% (yoy). Kredit KMK juga tumbuh positif sebesar 11,56% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,46% (yoy). Pertumbuhan pada kelompok kredit produktif ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat (Grafik 5.8). Sementara kredit konsumsi (KK) tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 8,36% (yoy) menjadi sebesar 7,14% (yoy) pada triwulan IV 2025. Berdasarkan pangasanya, KMK memiliki pangsa terbesar terhadap total kredit Provinsi DKI Jakarta yaitu 52,15%, diikuti oleh Kredit Investasi dan Konsumsi yaitu masing-masing sebesar 38,09% dan 9,76% (Grafik 5.9).

Pertumbuhan kredit yang tetap tinggi terutama dipengaruhi oleh permintaan kredit dari dunia usaha sejalan dengan dukungan kapasitas pembiayaan dari perbankan yang memadai sebagai dampak penerapan bauran kebijakan Bank Indonesia. Pelonggaran dan penerapan kebijakan akomodatif terhadap berbagai instrumen kebijakan makroprudensial seperti rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan penguatan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), serta kebijakan insentif Likuiditas Makroprudensial yang terus diperkuat dan inovatif mampu membantu perbankan dalam mengendalikan risiko sehingga penyaluran kredit tetap optimal.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.8 Pertumbuhan Kredit Jakarta



Sumber: Bank Indonesia

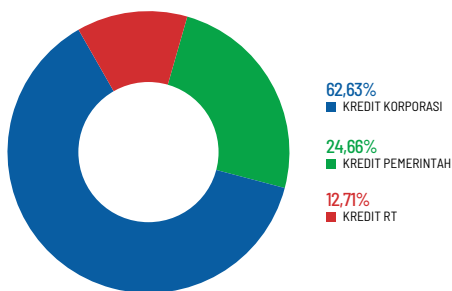
Grafik 5.9 Komposisi Kredit Jakarta Berdasarkan Penggunaan

Fungsi intermediasi bank yang tetap terjaga, juga didukung oleh koordinasi dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah maupun otoritas keuangan, baik di lingkup global maupun domestik. Berlanjutnya penurunan suku bunga acuan BI rate seiring perkiraan tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam kisaran sasaran  $2,5\pm 1\%$ , serta terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah diharapkan dapat meningkatkan kinerja intermediasi perbankan.

Kondisi pertumbuhan kredit yang ekspansif ini terkonfirmasi oleh Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang pada triwulan IV 2025 tetap menunjukkan tren positif di zona optimis (di atas ambang batas 50). Optimisme ini mencerminkan ekspektasi perbankan terhadap keberlanjutan perbaikan kinerja intermediasi dan ketahanan sektor keuangan yang semakin solid dalam menyongsong tahun anggaran berikutnya.

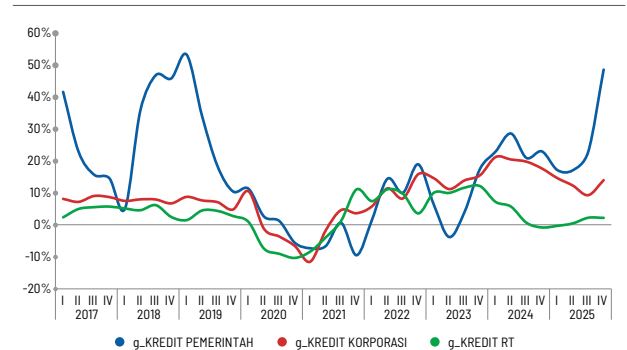
Berdasarkan kelompok debitur, pada triwulan IV 2025, penyaluran kredit kepada sektor korporasi masih mendominasi dengan pangsa mencapai 62,63% dari total kredit bank umum di DKI Jakarta, diikuti oleh kredit kepada sektor pemerintah sebesar 24,66% dan rumah tangga sebesar 12,71% (Grafik 5.10). Dilihat dari pertumbuhannya, kredit kelompok Pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 48,52% (yoy), diikuti oleh kredit korporasi 13,91% (yoy). Kredit kelompok Pemerintah dan kredit Korporasi menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun kredit kelompok Rumah Tangga pada triwulan IV 2025 juga mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 2,18% (yoy), namun sedikit melambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (Grafik 5.11).

Ditinjau berdasarkan sektornya, semua sektor utama masih mencatat laju pertumbuhan kredit yang positif, kecuali sektor industri pengolahan dan sektor transportasi dan pergudangan (transgud). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor konstruksi, diikuti perdagangan, transgud, jasa perusahaan & real estate, industri pengolahan, dan perantara keuangan. Peningkatan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor utama tersebut secara umum sejalan dengan membaiknya kinerja pada masing-masing sektor usaha (Grafik 5.12).



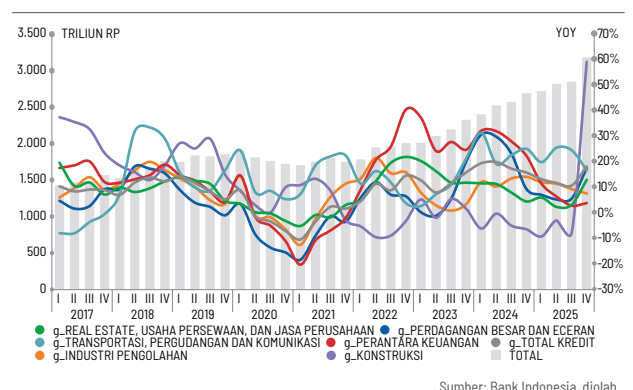
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.10 Komposisi Kredit Berdasarkan Kepemilikan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

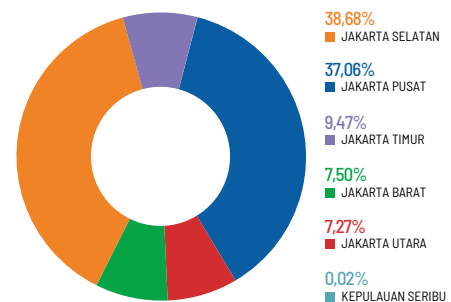
Grafik 5.11 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kepemilikan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.12 Pertumbuhan Kredit Sektoral

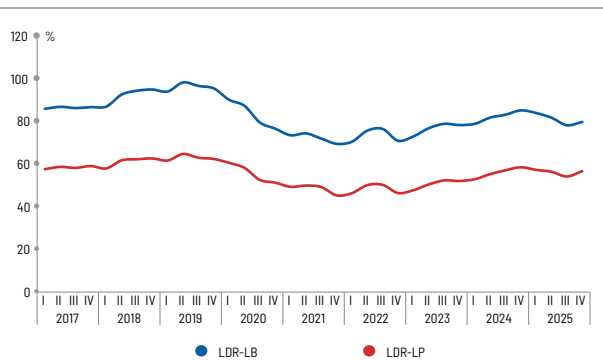
Secara spasial, penyaluran kredit perbankan terutama ditujukan ke Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sebagai sentra perekonomian dan niaga, sejalan dengan tingginya pertumbuhan DPK pada kedua wilayah tersebut. Pada triwulan IV 2025, porsi kredit yang disalurkan kepada kedua daerah tersebut melebihi 50% dari total kredit bank umum DKI Jakarta, yaitu masing-masing dengan pangsa sebesar 37,06% dan 38,68% (Grafik 5.13).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.13 Sebaran Kredit di Provinsi DKI Jakarta

Dengan melihat perkembangan laju pertumbuhan kredit triwulan laporan yang diatas triwulan sebelumnya, mengindikasikan meningkatnya rasio intermediasi perbankan. Pada triwulan IV 2025, rasio intermediasi berdasarkan lokasi proyek dan lokasi bank masing-masing sebesar 56,73% dan 79,75%. Rasio ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 54,20% dan 78,19% sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan kredit di tengah kenaikan pertumbuhan DPK (Grafik 5.14). Angka rasio intermediasi perbankan berdasarkan lokasi proyek yang relatif rendah mencerminkan bahwa DKI Jakarta cenderung sebagai daerah penghimpun dana. Namun demikian, dana yang terhimpun tidak diimbangi dengan jumlah kredit yang disalurkan karena sebagian kredit juga disalurkan ke luar DKI Jakarta termasuk BodeTABEK. Hal ini menjadi salah satu indikator eratnya hubungan ekonomi dan keuangan antara Jakarta dengan daerah sekitar Jakarta sebagai satu kawasan aglomerasi.

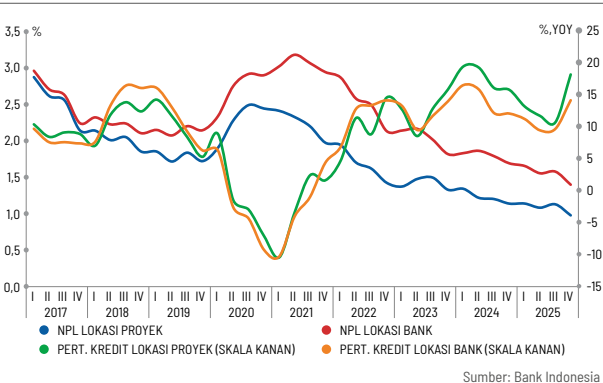


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.14 Perkembangan LDR Berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek

### Risiko Kredit Bank Umum

Sementara itu, tingkat ketahanan perbankan pada triwulan laporan masih tetap terjaga dengan baik. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh tetap rendahnya rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Pada triwulan IV 2025, rasio NPL kredit berdasarkan lokasi proyek (LP) adalah sebesar 0,98%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,13%. Rasio NPL pada kredit berdasarkan lokasi bank (LB) juga tetap rendah sebesar 1,39%, menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,57% (Grafik 5.15). Begitu juga dengan rasio kredit kolektibilitas 2 non restrukturisasi menurun dari 1,76% menjadi 1,46% (Grafik 5.16).



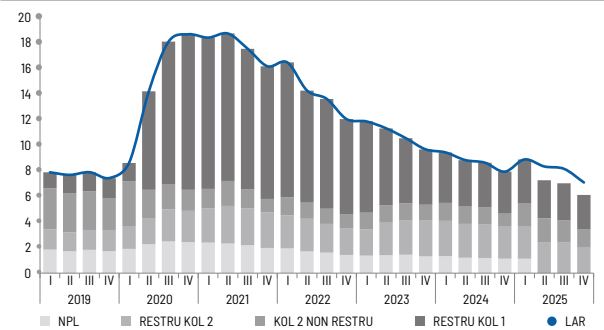
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.15 Perkembangan NPL DKI Jakarta

Berdasarkan jenis penggunaan, rasio NPL yang menurun dipengaruhi oleh menurunnya rasio NPL pada semua jenis kredit penggunaan (Grafik 5.17). Jika dibandingkan dengan nasional, rasio NPL di DKI Jakarta baik berdasarkan lokasi proyek ataupun lokasi bank, masih tercatat lebih rendah (Grafik 5.18).

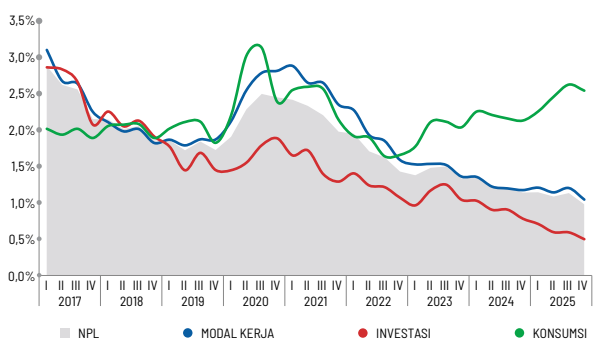
Tetap terjaganya rasio NPL perbankan DKI Jakarta di bawah *threshold* 5% tidak lepas dari upaya dan strategi perbankan dalam mengantisipasi potensi kenaikan risiko kredit baik yang dipengaruhi faktor global terkait dampak kebijakan perang tarif AS maupun faktor domestik seiring kebijakan efisiensi keuangan pemerintah.

Perbankan terutama bank-bank besar telah menyiapkan strategi dan penguatan manajemen risiko untuk menghadapi kenaikan risiko kredit.



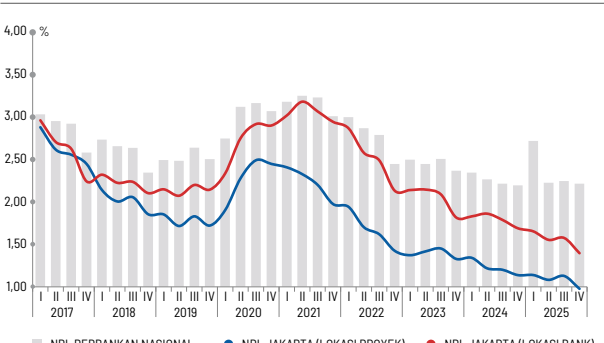
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.16 Perkembangan LaR DKI Jakarta



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.17 NPL di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.18 Perbandingan NPL di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional

Beberapa langkah yang dilakukan antara lain diversifikasi aset dan mengembangkan berbagai *credit risk tools* seperti penguatan aspek *credit risk scoring* dan *early warning signal* untuk mendeteksi debitur yang berpotensi mengalami pemburukan kualitas kredit. Ke depan, risiko kredit perbankan diperkirakan akan tetap terjaga rendah namun perlu diwaspadai dampak lebih lanjut risiko makroekonomi terhadap penurunan kemampuan membayar korporasi dan rumah tangga. Dari sisi korporasi, risiko makroekonomi antara lain potensi pelemahan permintaan ekspor sejalan meluasnya implementasi tarif resiprokal AS, risiko nilai tukar di tengah tetap tingginya ketidakpastian di pasar global, serta terus berlanjutnya konsolidasi fiskal, diperkirakan dapat menahan laju pemulihan kinerja korporasi sehingga memengaruhi pendapatan dan kemampuan membayar korporasi. Adapun di sisi rumah tangga, potensi tertahannya pemulihan korporasi lebih lanjut dapat memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja sehingga menekan kinerja rumah tangga dan memengaruhi kemampuan membayar rumah tangga.

## B. PERKEMBANGAN KINERJA SEKTOR KORPORASI

### Sumber Kerentanan dan Risiko Sektor Korporasi

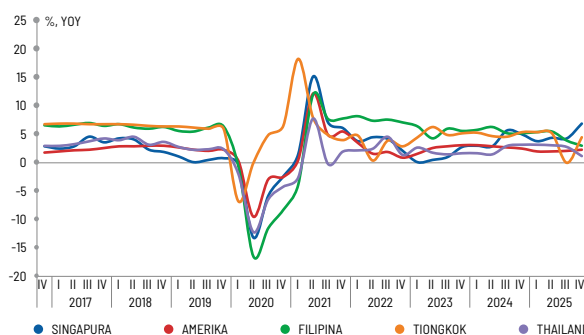
Pada triwulan IV 2025, ketidakpastian ekonomi global seiring berlanjutnya tensi geopolitik serta implementasi tarif dagang oleh AS, masih menjadi faktor utama yang dapat memengaruhi kinerja korporasi, terutama yang berorientasi ekspor. Hal tersebut diikuti dengan potensi gangguan rantai pasok dan volatilitas harga komoditas global yang terdampak eskalasi geopolitik, yang dapat memengaruhi kinerja korporasi, terutama yang memiliki ketergantungan pada bahan baku impor. Keketatan likuiditas di pasar global seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, juga memengaruhi kinerja korporasi, terutama untuk korporasi-korporasi yang memiliki utang luar negeri dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap pendanaan dari luar negeri. Sementara itu di sisi domestik, kinerja korporasi dipengaruhi oleh perkembangan inflasi serta konsolidasi fiskal seiring berbagai kebijakan pemerintah baru, baik di tingkat pusat maupun daerah.

#### 1. Risiko perlambatan ekonomi global, ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi serta tensi geopolitik yang terus berlanjut

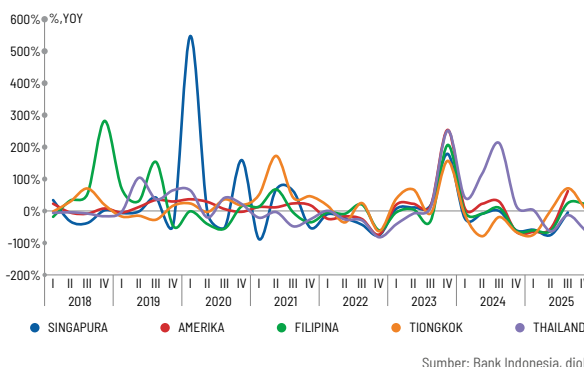
Pada triwulan IV 2025, hampir semua negara mitra dagang utama Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali Amerika Serikat dan Singapura (Grafik 5.19). Hal ini sejalan dengan prakiraan pertumbuhan ekonomi global yang pada 2025 berpotensi tumbuh lebih rendah dari prakiraan sebelumnya sekitar 3,0% (yoy). Kendati demikian, kinerja ekspor kepada negara mitra dagang utama meningkat. Kondisi ini disinyalir diakibatkan efek *seasonal* pada triwulan III dan IV dimana permintaan terhadap komoditas ekspor Indonesia meningkat cukup signifikan (Grafik 5.20).

Ke depan, risiko pelemahan ekonomi global diperkirakan tetap tinggi di tengah masih berlanjutnya ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan. Kecenderungan pertumbuhan yang lebih rendah dan menurunnya inflasi mendorong sebagian besar bank sentral menempuh kebijakan moneter akomodatif. Perkembangan ini mendorong semakin kuatnya ekspektasi penurunan Fed Fund Rate (FFR). Namun demikian, kondisi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi menyebabkan tingginya volatilitas aliran modal global yang lebih lanjut berdampak terhadap perekonomian global.

Dari sisi *financial channel*, kondisi tersebut berpotensi melemahkan nilai tukar berbagai negara. Kondisi ini perlu diantisipasi karena pelemahan Rupiah akan mengakibatkan peningkatan harga barang impor yang akan berdampak pula pada penurunan kinerja sektor perdagangan di Indonesia maupun DKI Jakarta. Dari sisi *commodity channel*, volatilitas harga komoditas dapat menambah tekanan inflasi di dalam negeri yang pada gilirannya juga akan memengaruhi kinerja usaha korporasi. Dari sisi *trade channel*, terdapat potensi meningkatkan ekspor ke AS, menggantikan produk Tiongkok dan produk negara lain yang tarif resiprokalnya lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Namun demikian, di saat bersamaan terdapat potensi membanjirnya produk Tiongkok ke negara non-AS, termasuk Indonesia yang dapat memengaruhi kinerja net ekspor.



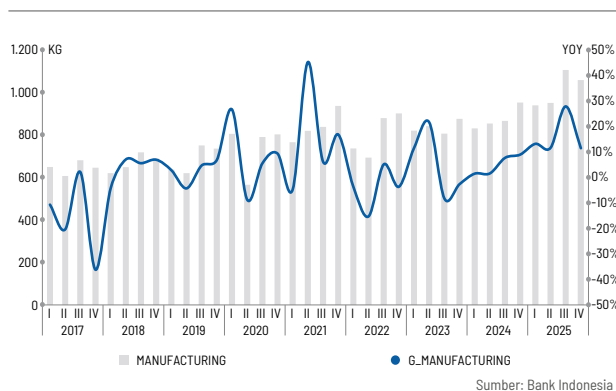
Grafik 5.19 Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama



Grafik 5.20 Pertumbuhan Volume Ekspor ke Negara Tujuan Utama DKI Jakarta

## 2. Volume Ekspor Manufaktur sebagai industri utama Jakarta tumbuh positif namun belum cukup kuat

Ekspor produk manufaktur Jakarta pada triwulan IV 2025 menunjukkan perlambatan. Ekspor produk otomotif sebagai ekspor utama produk manufaktur Jakarta yang sempat tertekan pada akhir 2024 karena permasalahan pemenuhan standar uji keselamatan, secara bertahap sudah menunjukkan pemulihan, walaupun kembali melambat (Grafik 5.21). Ke depan, tekanan fragmentasi perdagangan dan tensi geopolitik global yang berpotensi meningkat, dapat memengaruhi pola dan volume perdagangan global. Untuk itu, penguatan kebijakan hilirisasi industri menjadi faktor kunci kemandirian dan kemajuan ekonomi nasional guna peningkatan nilai tambah sumber daya, mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor dan dapat memperkuat volume ekspor korporasi pada industri manufaktur. Selain itu, diversifikasi ekspor ke negara-negara non-tradisional menjadi kunci untuk menjaga kinerja ekspor manufaktur khususnya otomotif.



Grafik 5.21 Pertumbuhan Volume Ekspor Industri DKI Jakarta

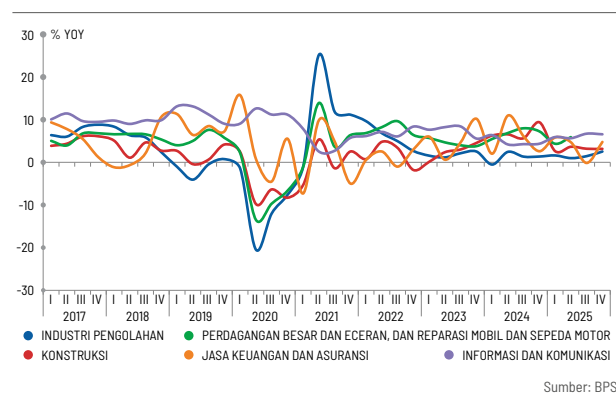
## 3. Kegiatan investasi melanjutkan pertumbuhan yang positif dan perlu terus didukung

Realisasi kumulatif investasi di DKI Jakarta s.d. triwulan IV 2025 mengalami peningkatan. Nilai realisasi PMA dan PMDN DKI Jakarta s.d. triwulan IV 2025 mencapai Rp270,96 triliun, atau tumbuh 10,55% dari total realisasi investasi pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama ditopang kenaikan realisasi investasi pada sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi, sektor Jasa Lainnya, sektor Perdagangan, serta sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran.

Kinerja investasi yang positif didukung oleh berlanjutnya pelaksanaan proyek-proyek strategis pemerintah dan swasta yang bersifat multitaluh. Selain itu, kondisi makroekonomi dan stabilitas keuangan yang terjaga dengan tingkat inflasi yang terkendali, juga mendorong peningkatan kepercayaan investor untuk menjadikan Jakarta sebagai salah satu pilihan investasi utama mereka. Ke depan, kepastian hukum, sinergi kebijakan pusat dan daerah, serta simplifikasi dan kejelasan proses perizinan perlu diperkuat untuk menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

## Kinerja Korporasi - Umum

Di tengah berbagai tantangan, baik dari sisi eksternal maupun domestik, perekonomian DKI Jakarta tetap resilien dengan pertumbuhan di atas 5%. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 didukung oleh pertumbuhan yang tinggi pada berbagai komponen lapangan usaha, utamanya perdagangan (Grafik 5.22). Perkembangan kegiatan usaha berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengonfirmasi fenomena tersebut di DKI Jakarta. Pada triwulan IV 2025, nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) dari hasil survei meningkat menjadi 50,34% dari triwulan sebelumnya yang sebesar 35,84%. Perkembangan kegiatan usaha tersebut diperkirakan berdampak pada stabilnya penghasilan sehingga turut menopang konsumsi RT.



Grafik 5.22 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Unggulan DKI Jakarta

## Kinerja Korporasi Nonkeuangan

Berdasarkan data terkini (data triwulan II 2025), kinerja korporasi non-keuangan DKI Jakarta yang terdaftar di bursa (selanjutnya disebut korporasi) tetap baik, relatif stabil terhadap kinerja triwulan I 2025. Kondisi ini ditunjukkan oleh kemampuan membayar korporasi meningkat dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga stabil terutama pada sektor-sektor utama Jakarta seperti Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, dan Industri (Tabel 5.2).

Kinerja penjualan korporasi tetap solid meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2025, kinerja penjualan korporasi tumbuh positif sebesar 4,11% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 3,56% (yoy) (Grafik 5.23). Pertumbuhan penjualan yang positif tersebut ditopang oleh tingginya permintaan domestik seiring periode perayaan HBKN Imlek, Ramadan dan Idulfitri, serta dampak berbagai aktivitas MICE yang ada di Jakarta.

Kinerja penjualan yang masih tetap solid berdampak positif terhadap profitabilitas tahunan korporasi yang tercermin dari rasio *return on asset* (ROA) korporasi yang tetap berada pada level di atas 5%. Pemilik modal dan investor juga masih menerima tingkat imbal hasil yang memadai sebagaimana tercermin dari nilai *return on equity* (ROE) yang relatif stabil pada level 10,47% (Grafik 5.24).

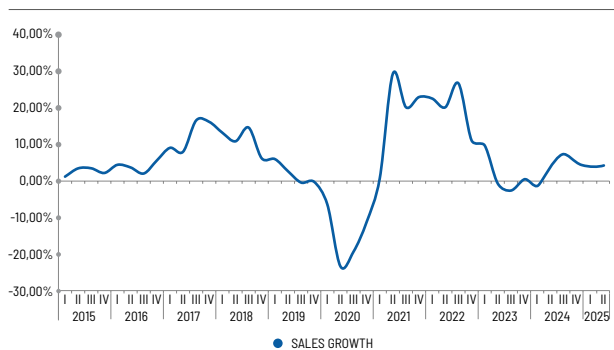
**Tabel 5.2** Tabel Rasio Keuangan Korporasi Nonkeuangan

NO	SEKTOR	SALES GROWTH		ROA		ROE		CURRENT RATIO	
		TW I'2025	TW II'2025	TW I'2025	TW II'2025	TW I'2025	TW II'2025	TW I'2025	TW II'2025
1	Pertanian	19,10%	21,31%	2,93%	4,01%	5,78%	7,88%	1,67	1,49
2	Pertambangan	65,18%	48,97%	10,54%	8,83%	15,39%	13,08%	2,21	1,95
3	Industri	0,68%	-0,45%	5,81%	5,99%	10,80%	11,33%	1,57	1,51
4	Listrik, Gas, dan Air	6,70%	11,13%	4,28%	4,75%	7,66%	8,68%	1,89	1,59
5	Konstruksi	-10,16%	-14,88%	3,12%	0,55%	7,51%	1,30%	1,45	1,49
6	Perdagangan	3,76%	5,15%	6,90%	7,00%	14,57%	14,51%	1,34	1,33
7	Pengangkutan	2,31%	0,18%	4,12%	3,67%	12,04%	11,43%	0,62	0,56
8	Jasa dunia Usaha	-37,38%	26,05%	1,99%	4,88%	2,93%	7,05%	1,35	1,35
9	Jasa Sosial	6,25%	4,58%	5,09%	6,06%	7,48%	8,91%	1,92	2,12
<b>Agregat</b>		<b>3,56%</b>	<b>4,11%</b>	<b>5,11%</b>	<b>4,62%</b>	<b>10,47%</b>	<b>9,60%</b>	<b>1,36</b>	<b>1,31</b>

NO	SEKTOR	DER		ICR		ASSET TO		INVENTORY TO	
		TW I'2025	TW II'2025	TW I'2025	TW II'2025	TW I'2025	TW II'2025	TW I'2025	TW II'2025
1	Pertanian	0,78	0,72	2,88	5,01	1,60	1,65	7,80	8,06
2	Pertambangan	0,21	0,23	6,03	5,32	0,76	0,84	17,54	19,99
3	Industri	0,48	0,48	2,70	2,12	0,84	0,84	5,91	5,93
4	Listrik, Gas, dan Air	0,36	0,37	6,27	5,01	0,57	0,62	50,02	39,22
5	Konstruksi	0,76	0,79	1,11	2,00	0,22	0,21	1,46	1,43
6	Perdagangan	0,39	0,42	1,80	3,03	1,29	1,35	6,59	7,12
7	Pengangkutan	1,22	1,41	2,33	2,25	0,44	0,43	89,64	96,93
8	Jasa dunia Usaha	0,18	0,17	3,46	2,47	0,54	0,56	7,68	7,51
9	Jasa Sosial	0,27	0,26	1,35	1,60	0,32	0,32	4,98	5,02
<b>Agregat</b>		<b>0,58</b>	<b>0,61</b>	<b>2,10</b>	<b>2,45</b>	<b>0,65</b>	<b>0,66</b>	<b>6,02</b>	<b>6,18</b>

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

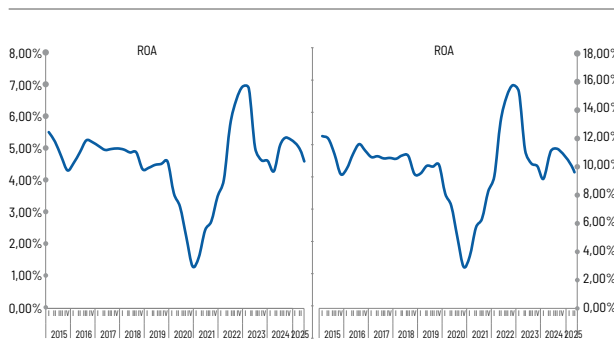


Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

**Grafik 5.23** Penjualan Korporasi DKI Jakarta

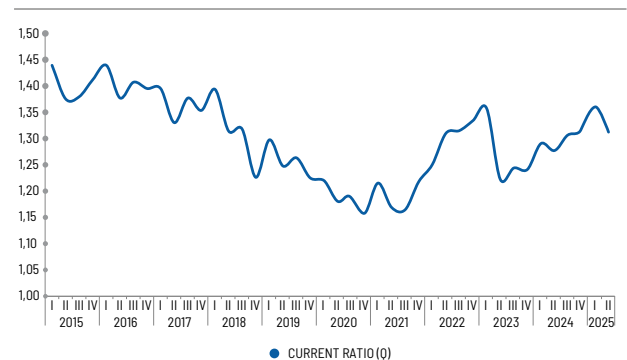
Kinerja likuiditas korporasi juga terjaga baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *current ratio* yang meningkat dari 1,36 pada triwulan I 2025 menjadi 1,31 pada triwulan II 2025. Nilai rasio yang semakin tinggi diatas 1 menunjukkan bahwa korporasi non-keuangan DKI Jakarta memiliki kondisi likuiditas yang cukup kuat dan sehat (Grafik 5.25).

Sejalan dengan pertumbuhan penjualan yang sedikit melambat, rasio *inventory turnover* korporasi meningkat dari 6,02 pada triwulan I 2025 menjadi sebesar 6,18 pada triwulan II 2025. Mencerminkan korporasi masih cukup efisien dan mampu mengoptimalkan penjualan korporasi dari total aset yang dimiliki sehingga rasio *Asset turnover* (ATO) stabil pada level 0,66 (Grafik 5.26).



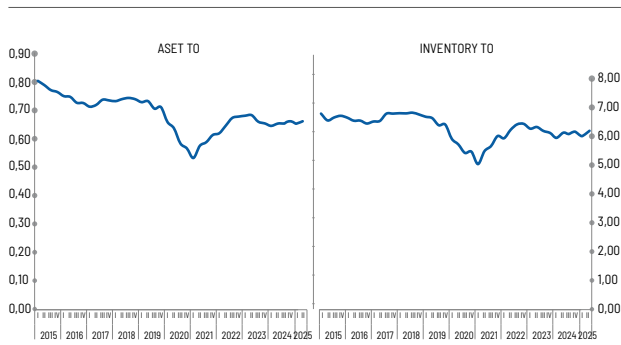
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

**Grafik 5.24** Profitabilitas Korporasi DKI Jakarta



Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

**Grafik 5.25** Likuiditas Korporasi DKI Jakarta



Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

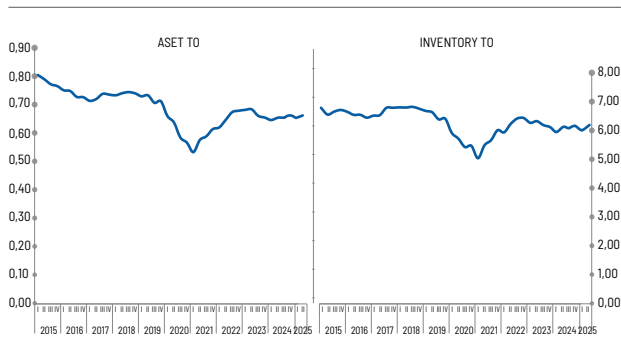
Grafik 5.26 Produktivitas Korporasi DKI Jakarta

Penawaran kredit yang cukup kuat dari perbankan dengan didukung perluasan kebijakan makprudensial longgar Bank Indonesia mampu menjaga minat sektor korporasi untuk menarik kredit dari perbankan sebagaimana tercermin dari rasio *leverage* yang relatif stabil sebesar 0,61 pada triwulan II 2025. Sejalan dengan kondisi likuiditas yang masih memadai serta didukung berbagai upaya efisiensi, sektor korporasi terindikasi mempunyai tingkat kelayakan kredit yang cukup baik (*creditworthiness*). Hal ini tercermin dari rasio median *Interest Coverage Ratio* (ICR) korporasi secara agregat yang sebesar 2,45 kali



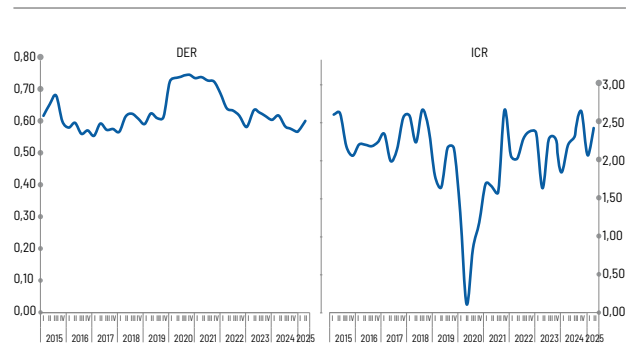
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 5.25 Likuiditas Korporasi DKI Jakarta



Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 5.26 Produktivitas Korporasi DKI Jakarta



Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

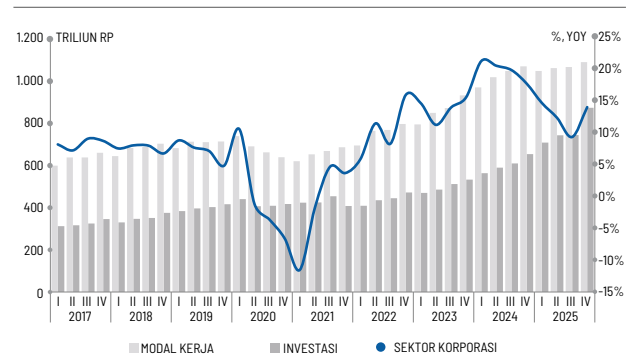
Grafik 5.27 Kemampuan Membayar Korporasi DKI Jakarta

pada triwulan II 2025 (Grafik 5.27). Nilai rasio ICR di atas 1 menunjukkan bahwa korporasi memiliki kondisi keuangan yang cukup sehat.

### Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi Perkreditan

Kredit korporasi di DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 tercatat tetap tumbuh tinggi sebesar 13,91% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 9,24% (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kredit investasi korporasi yang tumbuh sebesar 33,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 21,98% (yoy) (Grafik 5.28). Secara sektoral, kredit korporasi pada sektor-sektor utama Jakarta mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Konstruksi, Transportasi Pergudangan, dan Perdagangan sejalan dengan tetap kuatnya kinerja usaha pada sektor-sektor tersebut (Tabel 5.3 dan Grafik 5.29).

Dari sisi kualitas kredit, *Non-Performing Loan* (NPL) kredit korporasi terjaga di level rendah sebesar 0,98%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,14% (Grafik 5.30). Kondisi ini dipengaruhi oleh tetap baiknya kemampuan membayar korporasi dan terjaganya kondisi likuiditas korporasi.



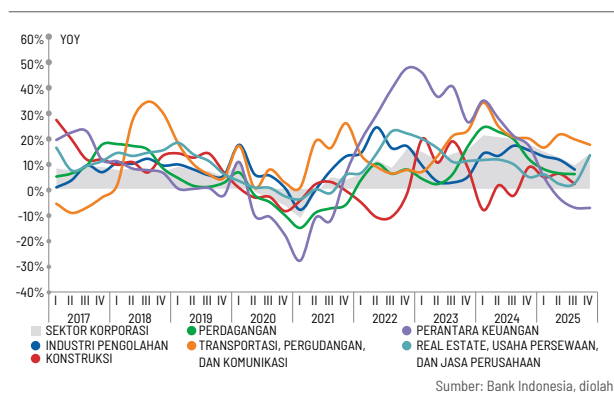
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.28 Pertumbuhan kredit Korporasi

**Tabel 5.3** Kredit Korporasi menurut sektor ekonomi

NO	SEKTOR EKONOMI	Sep-24			Dec-24			Sep-25			Dec-25		
		BAKI DEBET (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (%.yoy)	BAKI DEBET (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (%.yoy)	BAKI DEBET (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (%.yoy)	BAKI DEBET (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (%.yoy)
1	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	247,41	15,06%	19,51%	253,06	14,81%	11,63%	261,70	14,58%	5,78%	276,56	14,21%	9,29%
2	INDUSTRI PENGOLAHAN	331,84	20,20%	16,98%	340,79	19,95%	15,15%	356,91	19,89%	7,55%	376,26	19,33%	10,41%
3	PERANTARA KEUANGAN	302,55	18,41%	20,83%	307,59	18,00%	16,92%	280,00	15,60%	-7,45%	284,29	14,61%	-7,57%
4	REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	205,90	12,53%	9,62%	204,87	11,99%	4,61%	210,38	11,72%	2,18%	231,96	11,92%	13,23%
5	TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	201,32	12,25%	20,36%	215,97	12,64%	19,81%	240,55	13,40%	19,49%	253,49	13,03%	17,38%
6	KONSTRUKSI	87,57	5,33%	-2,73%	91,70	5,37%	8,57%	89,23	4,97%	1,90%	150,52	7,73%	64,15%
7	PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	59,45	3,62%	27,48%	62,87	3,68%	16,31%	88,47	4,93%	48,80%	94,92	4,88%	50,99%
8	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	102,18	6,22%	140,52%	121,37	7,10%	130,39%	133,53	7,44%	30,68%	130,75	6,72%	7,73%
9	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	26,82	1,63%	-5,11%	27,40	1,60%	-3,76%	26,27	1,46%	-2,07%	23,97	1,23%	-12,53%
10	LISTRIK, GAS DAN AIR	33,28	2,03%	-0,94%	34,04	1,99%	3,49%	45,89	2,56%	37,89%	60,47	3,11%	77,63%
11	LAIN-LAIN	44,64	2,72%	26,40%	48,74	2,85%	26,52%	61,81	3,44%	38,46%	62,86	3,23%	28,96%
<b>Total</b>		<b>1642,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,70%</b>	<b>1708,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,58%</b>	<b>1794,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,24%</b>	<b>1946,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,91%</b>

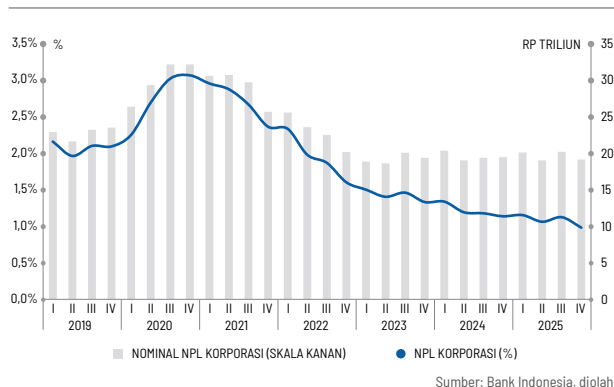
Sumber: Bank Indonesia



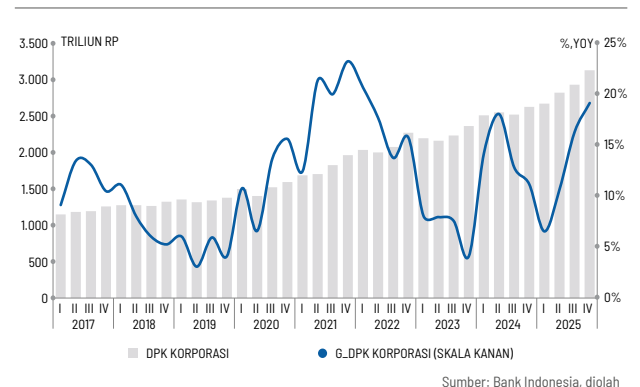
**Grafik 5.29** Penyaluran Kredit pada Sektor Utama Korporasi

### Dana Pihak Ketiga

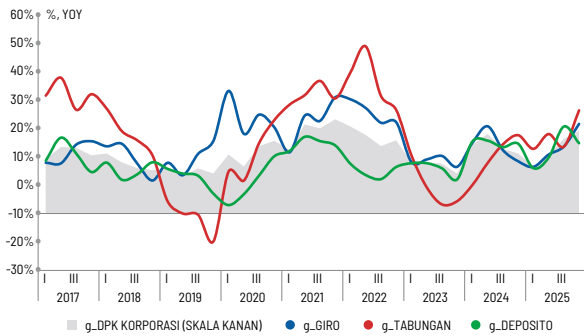
Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) korporasi tumbuh meningkat sejalan dengan meningkatnya DPK bank umum. Pada triwulan IV 2025, DPK Korporasi tumbuh sebesar 19,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 16,26% (yoy) (Grafik 5.31). Peningkatan pertumbuhan terjadi pada semua jenis DPK Korporasi kecuali DPK Deposito, dengan kontributor utama pertumbuhan adalah Tabungan Korporasi diikuti oleh Giro Korporasi (Grafik 5.32). Laju pertumbuhan komponen Giro pada triwulan IV 2025 mencapai 21,49% (yoy) dan menjadi kontributor utama pertumbuhan, mengingat pangsa yang dominan sebesar 57,24% terhadap keseluruhan DPK korporasi.(Grafik 5.33).



**Grafik 5.30** NPL pada Sektor Korporasi

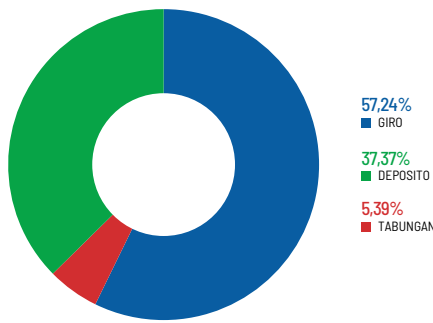


**Grafik 5.31** Perkembangan DPK Korporasi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.32 Pertumbuhan Komponen DPK Korporasi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

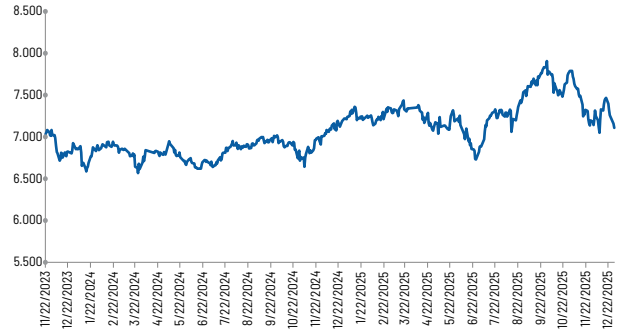
Grafik 5.33 Komposisi DPK Korporasi

### Eksposur Pasar Modal pada Sektor Korporasi

Pembiayaan korporasi dapat bersumber dari dana internal dan eksternal. Sumber dana eksternal korporasi antara lain dari perbankan dan sumber-sumber eksternal lainnya seperti pasar modal berupa penerbitan obligasi, *Initial Public Offering* (IPO) dan *Right Issue*.

Di tengah sentimen terhadap dinamika tensi perdagangan dan geopolitik global, kinerja pasar modal Indonesia pada triwulan IV 2025 menunjukkan perkembangan yang membaik periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan IV 2025, indeks pasar saham domestik mencapai level 8.646,94 meningkat secara ytd sebesar 22,13%, serta Penghimpunan dana di pasar modal sepanjang tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat solid dan berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hingga penghujung triwulan IV 2025, total nilai penawaran umum tercatat mencapai Rp268,14 triliun, angka ini melampaui target tahunan OJK yang dipatok sebesar Rp220 triliun. Dari total tersebut, sebesar Rp18,1 triliun merupakan kontribusi dari fundraising 26 emiten baru yang melakukan penawaran umum perdana saham (IPO)<sup>1</sup>.

Ke depan, kinerja pasar saham dan obligasi Indonesia berpotensi melanjutkan penguatan. Potensi tersebut ditopang beberapa faktor. Pertama, sentimen positif terhadap fundamental makroekonomi yang solid, inflasi yang terkendali dan prakiraan pertumbuhan



Sumber: ihsg-idx.com

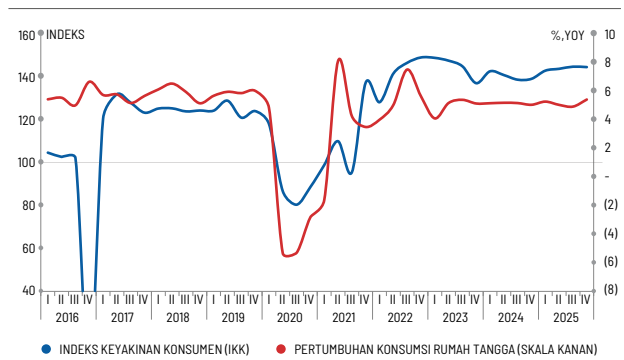
Grafik 5.34 Indeks Harga Saham Gabungan BEI

ekonomi Indonesia yang tetap kuat. Kedua, berlanjutnya reformasi sektor keuangan Indonesia seiring dengan disahkannya Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang diperkirakan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan perlindungan investor serta konsumen, mendorong efisiensi di sektor keuangan, serta semakin bervariasi instrumen keuangan. Ketiga, didukung sentimen positif tren pelanggaran kebijakan moneter bank sentral utama dunia.

## C. PERKEMBANGAN KINERJA SEKTOR RUMAH TANGGA

### Sumber Kerentanan dan Risiko Sektor Rumah Tangga

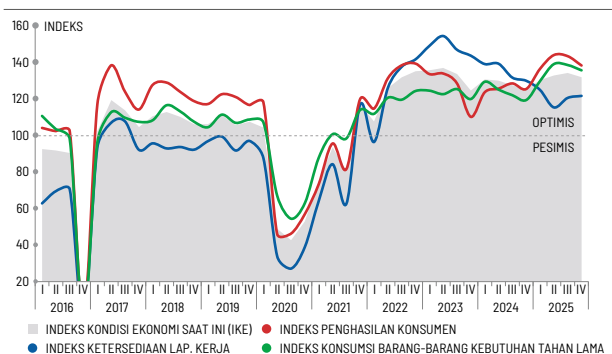
Sejalan dengan perkembangan kinerja korporasi, kinerja rumah tangga pada triwulan IV 2025 secara umum masih kuat. Kinerja rumah tangga yang berdaya tahan tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang pada triwulan IV 2025 terjaga tinggi pada level optimis sebesar 145,3; sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 145,5 (Grafik 5.35). Optimisme tersebut diperkuat dengan tingginya Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE), walaupun menurun dari 134,20 pada triwulan III 2025 menjadi 131,90 pada triwulan IV 2025. Tetap kuatnya indeks IKE didukung oleh tingginya indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dan Indeks Konsumsi barang-barang kebutuhan tahan lama. Adapun indeks Penghasilan Konsumen mengalami penurunan namun masih tetap terjaga pada zona optimis (Grafik 5.36).



BPS dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.35 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen dan Konsumsi RT

1 Laporan Realisasi Penghimpunan Dana Pasar Modal 2025



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.36 Perkembangan Indeks Ketersediaan Lap.Kerja, Penghasilan Konsumen, dan Konsumsi Barang Tahan Lama

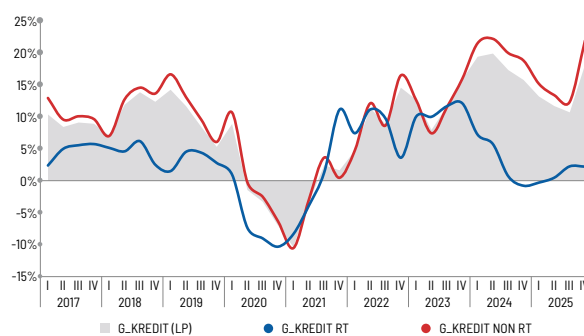
Namun demikian, apabila dilihat lebih dalam lagi berdasarkan tingkat pendapatannya, terjadi potensi peningkatan risiko pada rumah tangga seiring pelemahan daya beli rumah tangga khususnya pada kelas menengah ke bawah seiring penurunan nilai pada tingkat upah riil-nya.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi peningkatan konsumsi rumah tangga DKI Jakarta yaitu: (i) Perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang tercermin dari meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor jasa, perdagangan, dan transportasi seiring normalisasi aktivitas ekonomi pascapandemi serta meningkatnya mobilitas masyarakat; (ii) Kenaikan upah minimum dan penyesuaian gaji pada sejumlah sektor formal yang mendorong peningkatan pendapatan disposabel rumah tangga, khususnya pada kelompok pekerja tetap; (iii) Meningkatnya aktivitas sosial dan penyelenggaraan berbagai event berskala nasional maupun internasional di Jakarta yang mendorong belanja masyarakat pada sektor makanan-minuman, rekreasi, perhotelan, dan ritel; (iv) Penyaluran bantuan sosial serta berbagai stimulus fiskal dan program perlindungan sosial Pemerintah yang membantu menjaga daya beli, khususnya pada kelompok menengah bawah; serta (v) Tetap terjaganya optimisme konsumen di tengah stabilitas inflasi dan ekspektasi ekonomi yang membaik, sehingga mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi, termasuk belanja non-esensial dan durable goods.

Peningkatan potensi *spillover* risiko Rumah Tangga terhadap perbankan tercermin dari peningkatan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) Rumah Tangga meskipun masih di bawah *threshold* 5%. Ke depan, perlu diwaspadai beberapa faktor risiko yang berpotensi dapat semakin menekan daya beli dan mengurangi kemampuan membayar sektor Rumah Tangga. Pertama, kenaikan inflasi yang berpotensi meningkatkan alokasi pendapatan debitur untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari, seperti biaya makanan dan transportasi, sehingga mengurangi alokasi pendapatannya untuk pembayaran cicilan. Kedua, risiko kenaikan suku bunga yang dapat meningkatkan beban bunga debitur terutama debitur dengan kredit suku bunga mengambang. Ketiga, potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang dapat memengaruhi kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga.

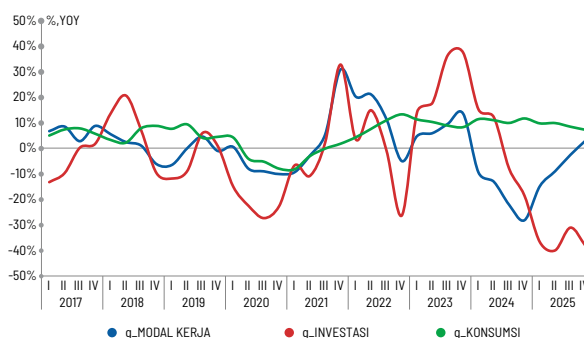
## Eksposur Perbankan pada Sektor Rumah Tangga Perkreditan

Berbeda dengan total kredit dan kredit korporasi, kredit pada sektor rumah tangga menunjukkan perlambatan pada triwulan IV 2025 meskipun tetap tumbuh positif Kredit rumah tangga tercatat tumbuh sebesar 2,18% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,23% (yoy) (Grafik 5.37). Berdasarkan jenisnya, perbaikan kredit rumah tangga dipengaruhi oleh penurunan kredit konsumsi yang tumbuh sebesar 7,12% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,36% (yoy). Kinerja kredit konsumsi rumah tangga tersebut menahan penurunan total kredit rumah tangga lebih lanjut di tengah kontraksi pertumbuhan pada kredit modal kerja dan kredit investasi (Grafik 5.38). Hal ini dikarenakan kredit konsumsi rumah tangga mendominasi total kredit rumah tangga dengan pangsa mencapai 77,92% (5.39).



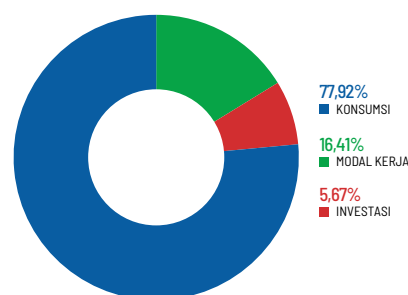
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.37 Perkembangan Kredit Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.38 Perkembangan Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.39 Komposisi Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga

Kinerja kredit konsumsi rumah tangga yang relatif stabil tersebut dipengaruhi oleh tetap terjaganya daya beli masyarakat seiring meningkatnya optimisme masyarakat yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Perkembangan tersebut juga didukung oleh kondisi ekonomi moneter yang kondusif sejalan dengan tren penurunan suku bunga kredit merespons penurunan BI rate, serta pelonggaran standar penyaluran kredit oleh bank, terutama pada aspek agunan, sehingga mempermudah masyarakat mengakses kredit konsumsi.

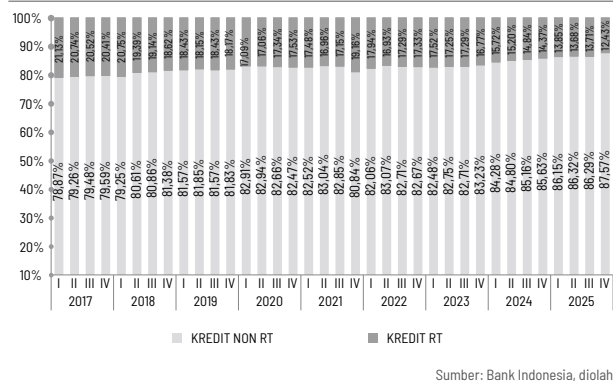
Meskipun menunjukkan peningkatan, namun kenaikan nominal kredit rumah tangga tidak setinggi kenaikan nominal kredit non-rumah tangga sehingga pada triwulan IV 2025 pangsa kredit rumah tangga masih melanjutkan tren penurunan menjadi 12,43% (Grafik 5.39).

Dari sisi kualitas kredit, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) Rumah Tangga masih relatif rendah yaitu sebesar 2,92%, cukup jauh di bawah *threshold* 5%. Rasio NPL pada triwulan IV 2025 ini lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,99%. Penurunan NPL RT terutama didorong penurunan NPL pada kredit modal kerja rumah tangga (Grafik 5.41).

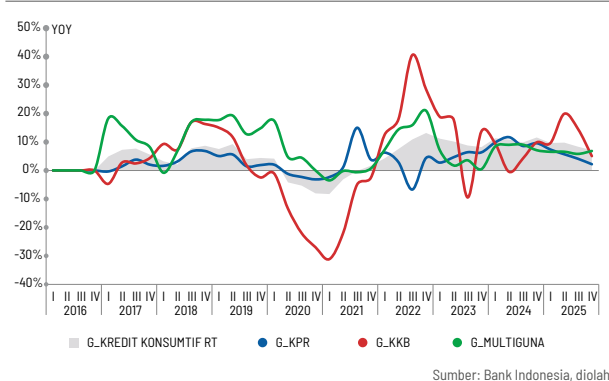
Berdasarkan tujuan penyalurannya, perlambatan kredit konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2025 terutama didorong oleh penurunan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor

(KKB). Kendati demikian, Kredit Multiguna mengalami peningkatan pertumbuhan. Selain itu, penurunan tersebut tidak signifikan dan tetap relatif tinggi, khususnya KPR dan kredit Multiguna yang memiliki pangsa lebih dari 50% total penyaluran kredit konsumsi RT DKI Jakarta (Grafik 5.42 dan 5.43).

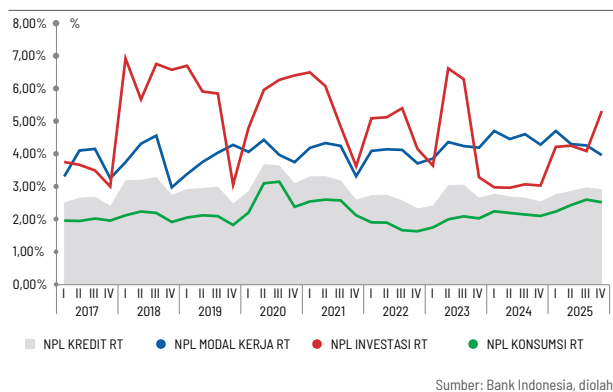
Tumbuhnya kredit multiguna didorong oleh tingginya permintaan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga seperti renovasi rumah, biaya pendidikan, pengobatan, serta pembelian barang-barang. Fleksibilitas kredit multiguna menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk berbagai tujuan, terutama saat kebutuhan mendesak atau prioritas lainnya. Adapun peningkatan kredit KPR didukung kebijakan pemerintah memberikan insentif PPN DTP pembelian rumah tapak dan rumah. Selain itu, untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah menambah alokasi KPR subsidi sebanyak 34.000 unit melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi MBR diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Biaya Administrasi (BBA), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan bantuan Rumah Sederhana Terpadu (RST). Sementara itu, peningkatan kredit KKB didukung oleh kebijakan Bank Indonesia untuk memperpanjang insentif uang muka kredit (DP) 0% untuk kendaraan bermotor baru hingga Desember 2025.



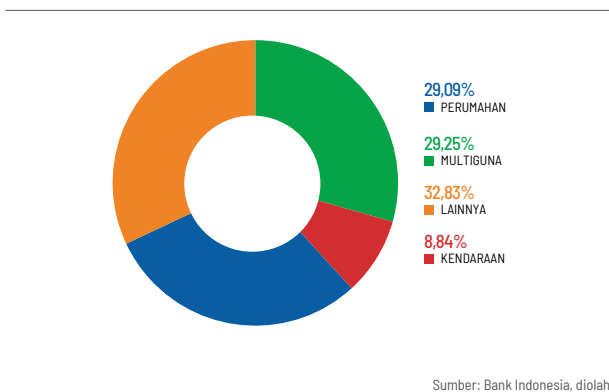
Grafik 5.40 Komposisi Kredit RT dan Non-RT



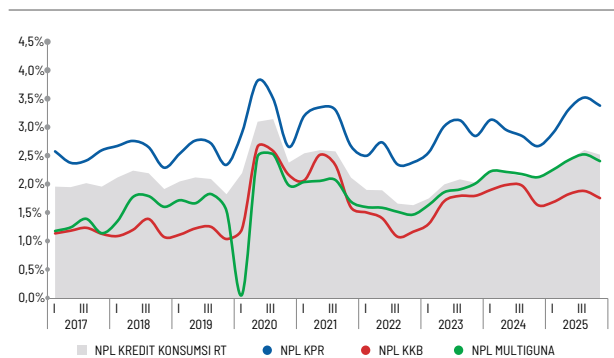
Grafik 5.42 Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga



Grafik 5.41 NPL Kredit Rumah Tangga



Grafik 5.43 Komposisi Kredit Konsumsi Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia, diolah

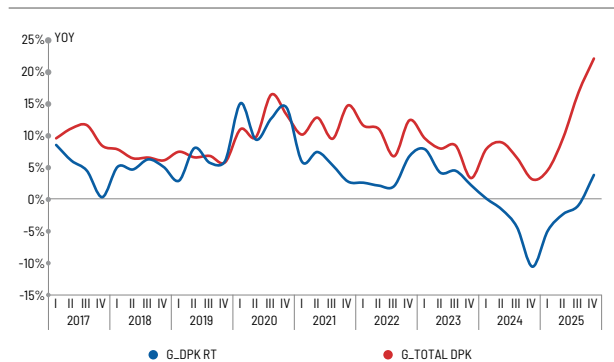
Grafik 5.44 NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga

Dari sisi risiko kredit, sejalan dengan kenaikan NPL kredit konsumsi rumah tangga, kenaikan NPL juga terjadi pada semua jenis kredit konsumsi rumah tangga. Kenaikan NPL terbesar terjadi pada kredit KPR diikuti Multiguna dan KKB (Grafik 5.44).

### Dana Pihak Ketiga (DPK)

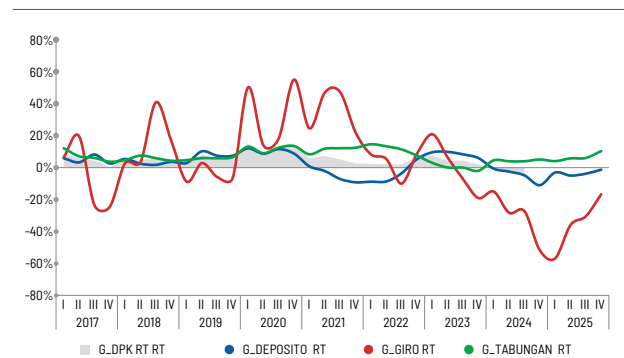
DPK rumah tangga di DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 mencatat pertumbuhan yang positif, dan membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. DPK rumah tangga mencatat pertumbuhan 3,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi 1,00% (yoy) (Grafik 5.45). Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK rumah tangga disebabkan oleh peningkatan pada komponen Tabungan, dan perbaikan kontraksi pada komponen Giro dan Deposito. Giro rumah tangga pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi 16,68% (yoy), namun lebih baik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 30,43% (yoy). Adapun Deposito rumah tangga juga mencatat kontraksi 1,25% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 3,80% (yoy). Sementara itu, Tabungan rumah tangga masih meningkat dengan pertumbuhan yang positif sebesar 10,38% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,05% (yoy) (Grafik 5.46).

Jika dilihat dari komposisinya, porsi DPK rumah tangga terhadap total DPK di DKI Jakarta cenderung menurun (Grafik 5.47). Sementara



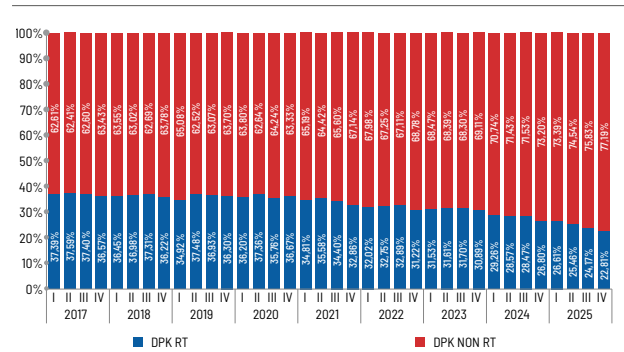
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.45 Pertumbuhan DPK Rumah Tangga



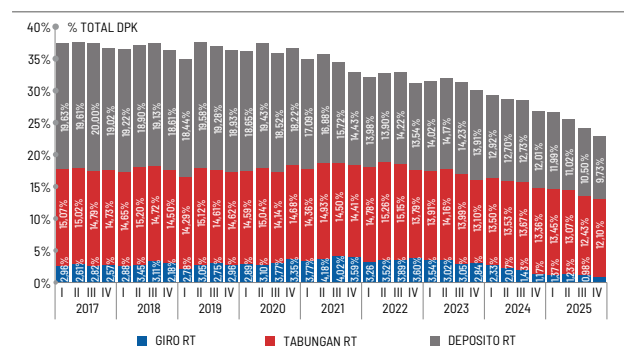
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.46 Pertumbuhan DPK per jenis Simpanan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.47 Komposisi DPK



Sumber: Bank Indonesia, diolah

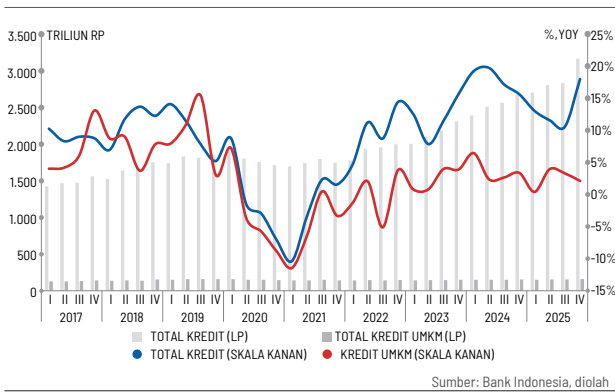
Grafik 5.48 Komposisi DPK Rumah Tangga

itu, pangsa DPK rumah tangga terhadap total DPK didominasi oleh tabungan sebesar 12,10%, diikuti oleh deposito dan giro masing-masing sebesar 9,73% dan 0,98% (Grafik 5.48).

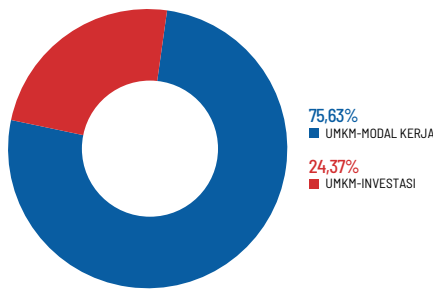
## D. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

### Akses Keuangan kepada UMKM

Penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menunjukkan pertumbuhan positif sejalan dengan kuatnya penyaluran kredit bank umum. Pada triwulan IV 2025, kredit UMKM tumbuh sebesar



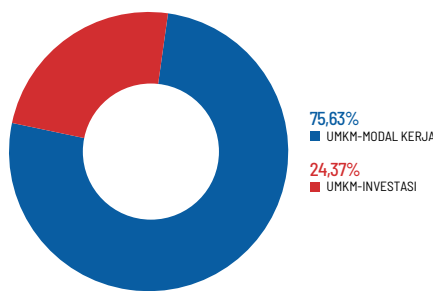
Grafik 5.49 Pertumbuhan Kredit UMKM di Jakarta



Grafik 5.50 Porsi Kredit UMKM di Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan

2,16% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,35% (yoy) (Grafik 5.49). Dilihat dari jenis penggunaannya, kredit UMKM terutama diberikan untuk kredit modal kerja dengan pangsa sebesar 75,63% dan diikuti kredit investasi sebesar 24,37% (Grafik 5.50).

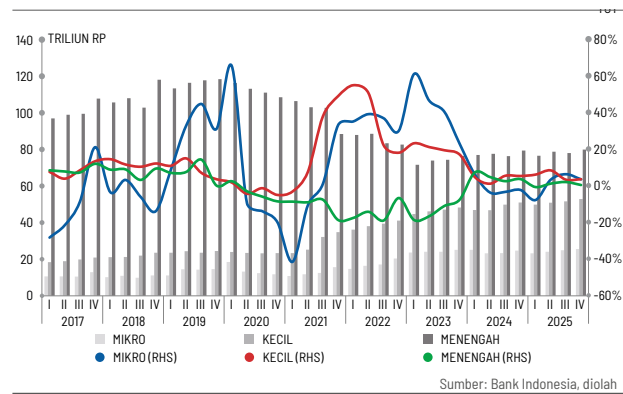
Berdasarkan skala usahanya, kenaikan kredit UMKM ditopang oleh pertumbuhan kredit skala mikro. Pada triwulan IV 2025, kredit UMKM skala kecil tumbuh sebesar 3,85% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,57% (yoy). Kendati demikian, pertumbuhan kredit skala menengah dan mikro masing-masing melambat dari 2,23% (yoy) dan 3,57% (yoy) menjadi 0,59% (yoy) dan 3,73% (yoy) (Grafik 5.51).



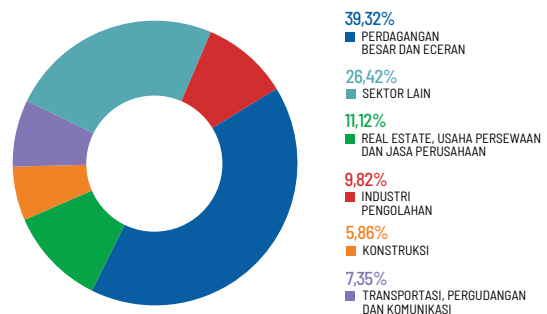
Grafik 5.50 Porsi Kredit UMKM di Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan

Secara keseluruhan, pangsa kredit UMKM di Jakarta masih cukup rendah yaitu sekitar 5,0% dari total kredit perbankan. Kondisi ini antara lain dipengaruhi karakteristik sektor usaha di Jakarta yang lebih didominasi oleh sektor korporasi. Karakter Jakarta sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis menyebabkan harga lahan dan upah tenaga kerja di Jakarta menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya. Berbagai faktor tersebut menyebabkan pertumbuhan kredit UMKM berdasarkan lokasi proyek di Jakarta cenderung terbatas. Secara umum, pelaku UMKM cenderung hanya memanfaatkan wilayah DKI Jakarta sebagai tempat penjualan/transaksi. Sedangkan untuk pengolahan maupun lokasi usaha lebih banyak berada di daerah penyangga ibukota, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok.

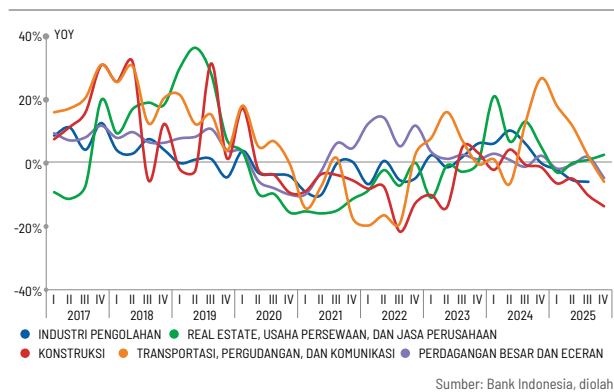
Berdasarkan lapangan usaha, penyaluran kredit UMKM lebih diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi utama di Jakarta. Sektor-sektor ekonomi yang banyak menerima pembiayaan UMKM yaitu sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa 39,32%, diikuti sektor *real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan (11,22%), industri pengolahan (9,82%), sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (7,35%) dan sektor konstruksi (5,86%) (Grafik 5.52). Dilihat dari pertumbuhannya, peningkatan kredit UMKM terutama terjadi pada sektor Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan (Grafik 5.53).



Grafik 5.51 UMKM Berdasarkan Skala Usaha



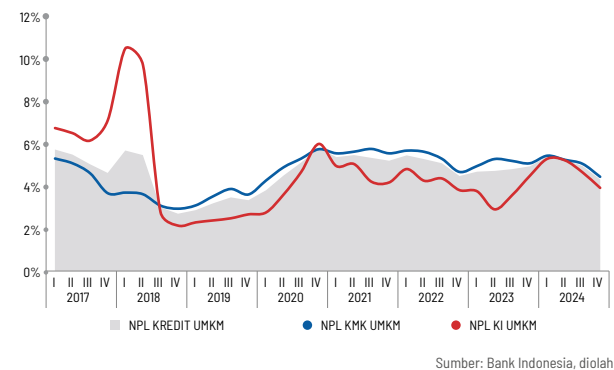
Grafik 5.52 Porsi Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi



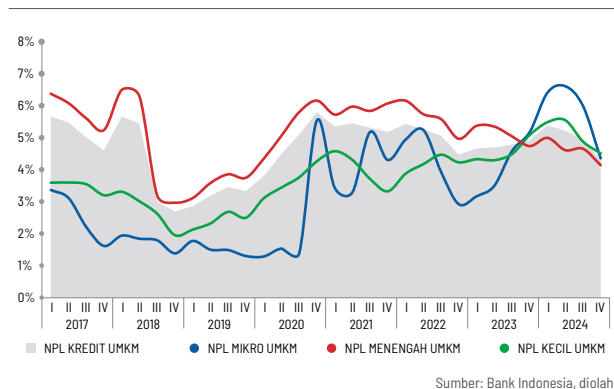
Grafik 5.53 Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Utama

Pertumbuhan kredit yang positif ini mengindikasikan perbankan masih mempunyai minat untuk membiayai kredit kepada UMKM dengan tetap menjaga kehati-hatian. Hal ini seiring dengan risiko kredit UMKM yang masih cukup tinggi meskipun mulai menunjukkan penurunan, baik jenis kredit Modal Kerja maupun Investasi (Grafik 5.54). Berdasarkan kelompok debiturnya, penurunan risiko kredit UMKM terjadi pada kelompok menengah (Grafik 5.55).

Kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) No.47 tahun 2024 perihal Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sudah diimplementasi secara bertahap sejak Januari 2025<sup>2</sup>



Grafik 5.54 NPL Kredit UMKM



Grafik 5.55 NPL Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha

berpotensi memberi ruang kepada UMKM yang sudah ada untuk bangkit dan kembali mendapatkan akses pembiayaan. Kebijakan ini bertujuan untuk membersihkan catatan kredit macet, sehingga UMKM yang sebelumnya masuk daftar hitam dapat kembali mendapatkan akses permodalan, yang

pada akhirnya diharapkan mendukung terus berlanjutnya peningkatan penyaluran kredit baru di masa mendatang. Dari sisi perbankan, kebijakan penghapusan piutang macet UMKM diperkirakan tidak memengaruhi kinerja keuangan perbankan mengingat kredit yg dihapus tagih merupakan kredit yang sudah dihapus buku sehingga bank sudah membukukan beban kerugian (CKPN 100%) dan mengeluarkan pencatatan kredit macet tersebut dari neraca bank.

### Pengembangan UMKM

Pelaksanaan program pengembangan UMKM di Bank Indonesia dilakukan berdasarkan 3 pilar kebijakan yakni korporatisasi, pengembangan kapasitas dan akses pembiayaan. Program pengembangan UMKM oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 (Oktober - Desember 2025) terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: i) program Jagoan Wirausaha Jakarta (Jawara), ii) Jakarta Batik Creation, iii) peningkatan kelas kelompok subsisten, iv) pemetaan UMKM potensial dibiayai, v) promosi dan fasilitasi perdagangan, serta vi) pengembangan kapasitas pondok pesantren.

#### Program Jagoan Wirausaha Jakarta (Jawara)

Program JAWARA merupakan wujud nyata komitmen KPwBI Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global. Tidak hanya berfokus pada penguatan aspek manajemen bisnis, program ini juga bertujuan membentuk pola pikir kewirausahaan yang adaptif dan siap bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Antusiasme pengusaha UMKM terhadap program ini terus meningkat. Pada 2025, terdapat 960 pengusaha UMKM yang berminat, meningkat 2 kali lipat dibandingkan 2024. Dari jumlah tersebut, terpilih 40 pengusaha UMKM yang berhak mengikuti seluruh rangkaian program hingga tahap akhir. Peserta terpilih mendapatkan pendampingan intensif mencakup mindset kewirausahaan, keuangan, pemasaran, hingga ekspor dan sertifikasi, serta sesi coaching dan mentoring berbasis praktik bisnis.

Pelaksanaan JAWARA 2025 menghadirkan sejumlah inovasi dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya adalah perluasan kolaborasi dengan berbagai narasumber eksternal dari instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Hukum RI, lembaga perbankan, serta UMKM binaan Bank Indonesia yang telah sukses menembus pasar ekspor. Selain itu, peserta JAWARA 2025 juga difasilitasi untuk terlibat dalam kegiatan business matching bersama perbankan dan calon pembeli potensial. Salah satu keberhasilan nyata dari fasilitasi ini adalah terjalannya kolaborasi antara UMKM JAWARA 2025 dengan salah satu pelaku usaha ritel besar dan agregator eskpor.

2 [Pemerintah upayakan perkuat akses pembiayaan UMKM lewat hapus piutang - ANTARA News](#)

Program ini mencatat hasil menggembirakan. Rata-rata omzet peserta JAWARA 2025 meningkat 77,58% (yoy), tenaga kerja tumbuh 56,62% (yoy), dan aset naik 99,75% (yoy). Sebanyak 48% peserta telah ekspor ke berbagai negara, seluruhnya telah memanfaatkan platform digital, dan sebagian besar telah berinovasi dengan produk serta memperluas pasar baru.

Sebagai apresiasi terhadap peserta JAWARA 2025 serta untuk memperluas jejaring bisnis dan ekspansi pasar, KPwBI Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi seluruh UMKM peserta JAWARA 2025 untuk mengikuti "Pameran Semasa" yang diselenggarakan oleh IdeaFest di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 31 Oktober hingga 2 November 2025.

Ke depan, KPwBI Provinsi DKI Jakarta akan terus memperkuat ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif melalui sinergi lintas pihak dan kolaborasi berkelanjutan, guna melahirkan lebih banyak UMKM Champion yang inovatif, tangguh, dan berdaya saing global.

### Jakarta Batik Creation

Program Jakarta Batik Creation merupakan inisiatif pelatihan dan kompetisi desain batik bagi UMKM di DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh KPwBI Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Yayasan Pendidikan Desain Indonesia. Program ini bertujuan memperkuat daya saing subsektor fesyen, khususnya batik, sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah produk berbasis budaya lokal.

Program ini diikuti oleh lebih dari 60 UMKM batik, yang kemudian diseleksi menjadi 15 besar untuk mengikuti tahap penjurian intensif, hingga akhirnya ditetapkan 3 pemenang utama. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh belum adanya identitas batik khas Jakarta yang dikenal luas, meskipun Jakarta memiliki kekayaan ikon budaya Betawi serta simbol modernitas kota yang potensial dikembangkan menjadi motif batik yang unik dan kompetitif. Melalui program ini, lahir berbagai kreasi Batik Khas Jakarta yang mulai dipasarkan oleh UMKM peserta, sehingga memperkuat positioning Jakarta dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional serta membuka peluang perluasan pasar, termasuk potensi ekspor.

### Peningkatan Kelas Kelompok Subsisten

KPwBI Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengembangan terhadap 3 (tiga) kelompok subsisten yang berhasil naik kelas menjadi unit usaha yang lebih mandiri. Ketiga kelompok tersebut adalah: i) Kelompok Usaha Bersama Kuliner Pasar Rebo (UBER), ii) Kelompok Usaha Maju Sejahtera, dan iii) Kelompok Tani Grape Garden 09. Upaya pengembangan ini mencakup berbagai aspek strategis yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas usaha kelompok. Salah satu langkah utama yang telah dilakukan adalah pendampingan intensif, yang

meliputi pelatihan dalam pengelolaan keuangan keluarga dan usaha, peningkatan keterampilan dalam pengelolaan bisnis, serta penguatan kelembagaan kelompok dengan mendorong pembentukan koperasi sebagai wadah untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan, modal usaha, serta jaringan pemasaran yang lebih luas.

Secara umum, pelaksanaan program telah memberikan dampak nyata pada peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial anggota kelompok, baik secara individual maupun kelembagaan. Dampak utama antara lain: i) peningkatan inklusi dan literasi keuangan, ii) peningkatan produktivitas dan daya saing usaha, iii) penguatan kelembagaan dan kepemimpinan lokal, dan iv) memperkuat peran perempuan dalam ekonomi keluarga dan komunitas.

Dengan semangat kolaborasi dan keberlanjutan, program ini diharapkan menjadi model pemberdayaan ekonomi inklusif berbasis kelompok yang mampu mendorong masyarakat menuju kemandirian ekonomi, memperkuat ketahanan sosial, serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan di Indonesia.

### Pemetaan UMKM Potensial Dibiayai

Pemetaan UMKM potensial untuk mendapatkan pembiayaan dilakukan melalui survei BISAID. Survei ini bertujuan untuk membangun database profil UMKM potensial yang memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan, sehingga dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit atau pendanaan kepada sektor UMKM yang produktif dan berkelanjutan.

UMKM yang menjadi responden survei BISAID adalah UMKM yang usahanya telah berjalan minimal selama 3 (tiga) tahun, tidak sedang menggunakan fasilitas pembiayaan dari bank dan lembaga jasa keuangan non-bank, serta membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan kapasitas usaha. Pada tahun 2025, KPwBI Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengkinian database terhadap 20 (dua puluh) UMKM potensial dibiayai di wilayah DKI Jakarta, dimana sebanyak 2 (dua) UMKM yang masih aktif menjalankan usaha dan telah memperoleh pembiayaan dengan total nominal pembiayaan sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu, KPwBI Provinsi DKI Jakarta juga mengumpulkan data 70 UMKM baru yang potensial dibiayai untuk didaftarkan ke dalam platform database BISAID.

Sebagai tindak lanjut, UMKM yang telah terdaftar dalam database BISAID akan dihubungkan dengan lembaga keuangan melalui mekanisme business matching. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat daya saing UMKM, serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta secara berkelanjutan.

### Promosi dan Fasilitasi Perdagangan

Dalam upaya memperluas akses pasar bagi UMKM, promosi produk-produk unggulan terus diakselerasi melalui berbagai platform dan strategic event. Pada Triwulan IV 2025, sejumlah UMKM binaan dan mitra KPwBI Provinsi DKI Jakarta telah mengikuti kegiatan promosi perdagangan melalui strategic event yang diselenggarakan baik oleh Bank Indonesia maupun instansi lainnya, yaitu dalam kegiatan:

Indonesia Sharia Economic Festival (8-12 Oktober 2025) di Jakarta. Kegiatan showcasing pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 diikuti oleh 14 UMKM binaan dan mitra KPwBI DKI Jakarta yang terdiri dari 6 UMKM wastra dan ready-to-wear (Fenny Saptalia, Batik Chic, Roemah Kebaya Vielga, Batikeun, Rineereo, KAYO by Fey Kayo) serta 8 UMKM F&B (Minang Kakao, Emazing, Kultiva, Sambal Hellyeah, Suwe Ora Jamu, Mozass Healthy Laboratory, Ing Pawon, Warasa, Mbrebek Mili). Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan kegiatan business matching yang menghasilkan Letter of Intent bersama buyer dari Hongkong dan Australia.

Trade Expo Indonesia (15-19 Oktober 2025) di Jakarta. Kegiatan showcasing pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 diikuti oleh 9 UMKM binaan dan mitra KPwBI DKI Jakarta yang terdiri dari 3 UMKM wastra dan ready-to-wear (Dcraft Indonesia, Ghawean Dewe, Craftote) serta 6 UMKM F&B (Alfee Coffee, Casa Grata, Mbrebek Mili, Minang Kakao, Kultiva, dan Sambal Kawani). Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan kegiatan business matching yang menghasilkan Letter of Intent bersama buyer dari Belanda, Pakistan, Bangladesh, dan Korea.

Ke depan, sinergi kegiatan/program dengan berbagai pihak terkait dalam memfasilitasi partisipasi UMKM pada ajang promosi perdagangan, baik di dalam maupun luar negeri, akan terus diperkuat. Upaya ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan untuk membuka akses pasar yang lebih luas, memperluas peluang ekspor, serta diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM di tingkat nasional dan global.

### Pengembangan Kapasitas Pondok Pesantren

Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan capacity building ke tiga pesantren unggulan Jawa Timur (Nurul Jadid, Sidogiri, dan Sunan Drajat) pada 11-13 November 2025 yang diikuti 29 pondok pesantren. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi pesantren melalui pengembangan unit usaha, tata kelola profesional, serta pemanfaatan digitalisasi dalam ekosistem bisnis.

Pembelajaran utama mencakup integrasi kewirausahaan dan pengelolaan lingkungan, praktik pengelolaan BMT (pembiayaan) berbasis pesantren yang profesional, serta pemanfaatan platform digital PESANTARA.ID sebagai virtual market. Sebagai tindak lanjut, HEBITREN DKI Jakarta akan mendorong penguatan koperasi dan BMT, optimalisasi unit usaha pesantren, serta perluasan jejaring pemasaran berbasis digital guna mempercepat transformasi pesantren perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan.

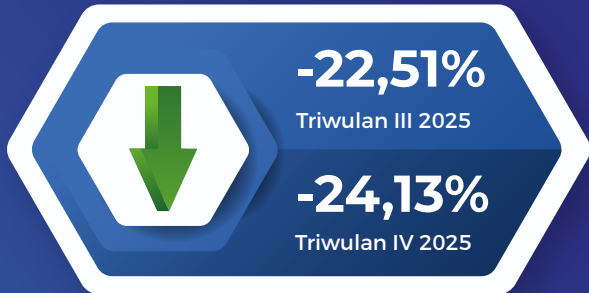
## BAB 6

# SISTEM PEMBAYARAN

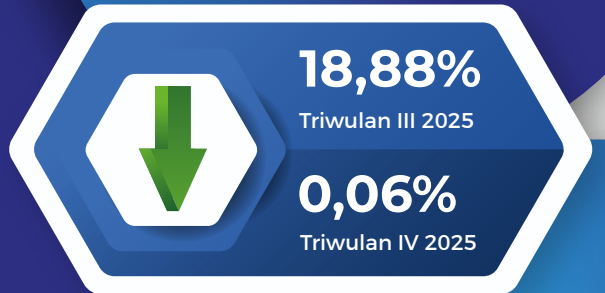
Pada triwulan IV 2025, peredaran uang kartal di DKI Jakarta tercatat mengalami *net outflow*, sementara transaksi pembayaran nontunai tetap tumbuh kuat, sejalan dengan akselerasi perekonomian DKI Jakarta. Dari sisi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), nilai transaksi jual dan beli valuta asing (dalam Rupiah) mengalami pertumbuhan sebesar 26,61% (yoy) pada Triwulan IV 2025, melanjutkan tren pertumbuhan positif triwulan sebelumnya sebesar 13,19% (yoy). Dari sisi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR), tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 21,40% (yoy) meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 42,20% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan pertumbuhan nilai transaksi *incoming* (dari luar ke dalam negeri) yang mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara, transaksi *outgoing* (dari dalam ke luar negeri) dan domestik (di dalam negeri) tercatat tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.



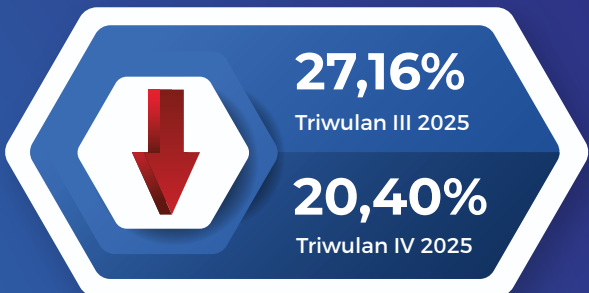
**Pertumbuhan *Inflow*  
Transaksi Uang Kartal (yoy)**



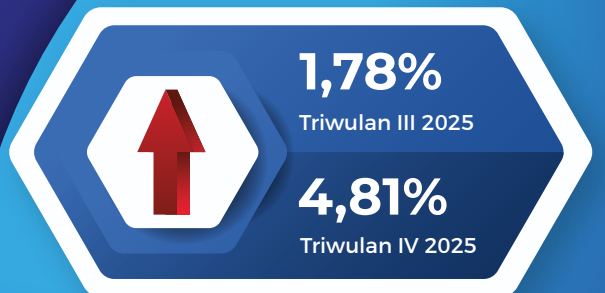
**Pertumbuhan *Outflow*  
Transaksi Uang Kartal (yoy)**



**Pertumbuhan Nilai  
Transaksi BI-RTGS (yoy)**



**Pertumbuhan Nilai  
Transaksi SKN-BI (yoy)**



## A. KONDISI UMUM

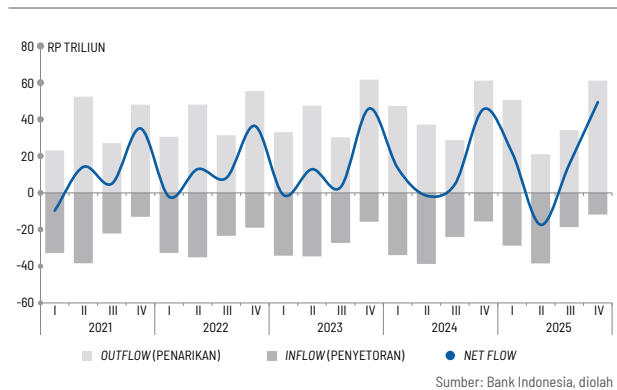
Pada triwulan IV 2025, arus kas di DKI Jakarta tercatat pada posisi *net outflow* sebesar Rp49,65 triliun, sejalan dengan peningkatan permintaan uang kartal masyarakat menjelang periode Natal dan Tahun Baru. Transaksi pada sistem pembayaran nontunai tetap tumbuh kuat yang mendukung akselerasi perekonomian DKI Jakarta. Aktivitas transaksi nontunai yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)* dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mengalami peningkatan pada akhir tahun 2025. Sementara itu, transaksi ritel dengan kartu kredit dan uang elektronik tetap tumbuh di tengah pergeseran preferensi masyarakat menuju pembayaran digital, terutama QRIS. Akseptasi QRIS terus meningkat yang tercermin dari akselerasi pertumbuhan volume transaksi QRIS pada triwulan IV 2025, dengan pangsa DKI Jakarta terhadap nasional sebesar 36,75%.

## B. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNAI

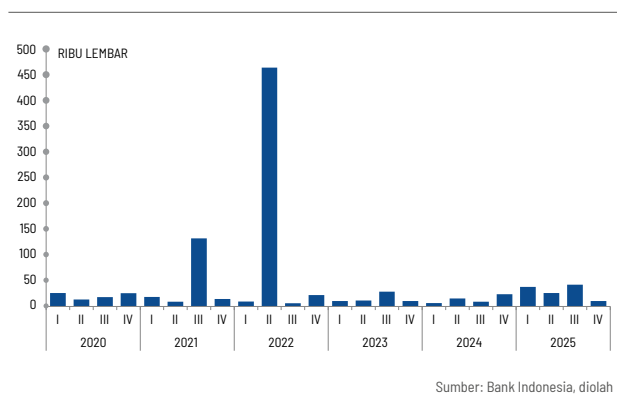
**Peredaran uang kartal di DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 mengalami *net outflow* sebesar Rp49,65 triliun.** Hal ini menunjukkan jumlah uang kartal yang keluar dari Bank Indonesia (*cash outflow*) lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia (*cash inflow*). Kondisi *net outflow* pada triwulan IV 2025 mencerminkan peningkatan kebutuhan transaksi tunai masyarakat seiring dengan momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru. *Net outflow* DKI Jakarta juga tercatat tumbuh 8,30% (yoy), sejalan dengan akselerasi ekonomi DKI Jakarta pada triwulan IV 2025.

Secara rinci, *cash outflow* dan *cash inflow* DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 masing-masing tercatat sebesar Rp61,50 triliun dan Rp11,85 triliun. *Cash outflow* menunjukkan pertumbuhan yang moderat yakni 0,06% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025 sebesar Rp34,34 triliun. Di sisi lain, pertumbuhan *cash inflow* terkontraksi 24,13% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2025 sebesar Rp18,67 triliun.

**Sementara itu, jumlah temuan uang yang diragukan keasliannya di DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 tercatat sebanyak 10.646 lembar.** Jumlah temuan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang mencapai 42.716 lembar. Sebagai tindak lanjut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat pelaksanaan kampanye Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah (CBP) sebagai upaya menjaga kualitas dan keaslian uang Rupiah yang beredar di masyarakat. Penguatan kampanye dilakukan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan *awareness* masyarakat dalam mengenali ciri keaslian uang Rupiah melalui 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) serta menjaga kualitas uang Rupiah agar tetap layak edar melalui prinsip 5J (Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, dan Jangan Dibasahi).



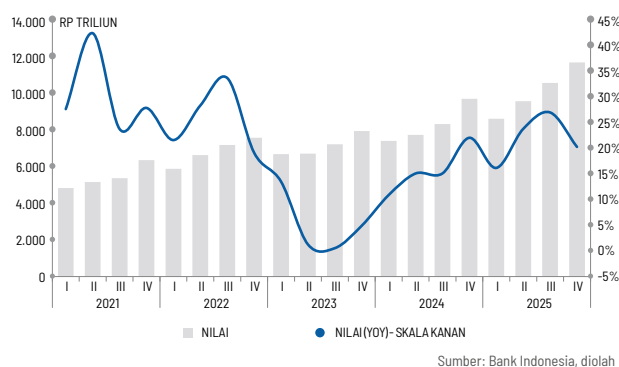
Grafik 6.1 Perkembangan *Inflow* dan *Outflow* Uang Kartal



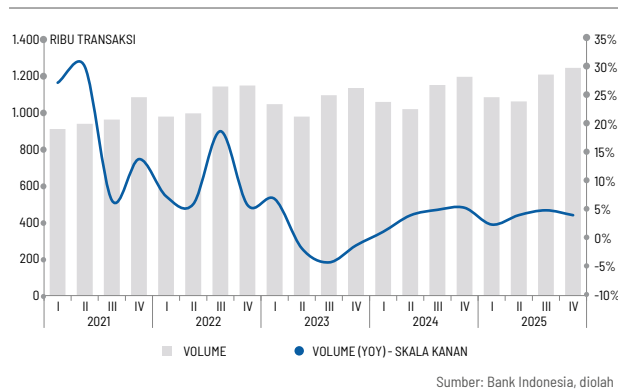
Grafik 6.2 Perkembangan Temuan Uang yang Diragukan Keasliannya

### Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS)

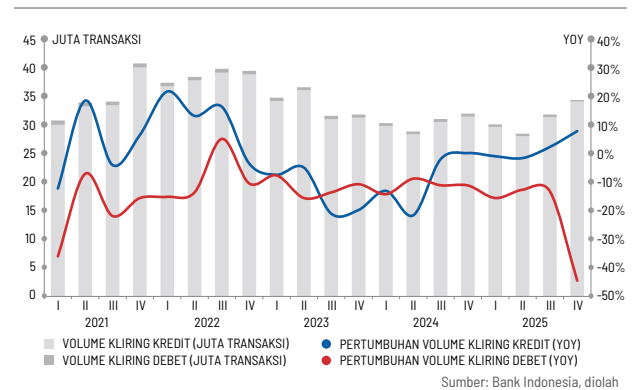
**Pada triwulan IV 2025, transaksi BI RTGS di DKI Jakarta tercatat mengalami pertumbuhan baik dari sisi nilai maupun volume.** Nilai transaksi BI-RTGS mencapai Rp11.747 triliun atau tumbuh 20,40% (yoy). Sementara itu, volume transaksi BI-RTGS tercatat 1,24 juta transaksi atau tumbuh 4,11% (yoy). Pertumbuhan transaksi BI-RTGS pada triwulan IV 2025 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2025, yaitu dari sisi nilai transaksi sebesar 27,16% (yoy) dan dari sisi volume transaksi sebesar 4,97% (yoy). Hal ini sejalan dengan pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2025 sebesar 8,60% (yoy) yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2025 sebesar 20,06% (yoy).



Grafik 6.3 Perkembangan Nilai Transaksi BI-RTGS



Grafik 6.4 Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS



Grafik 6.6 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI

### Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

**Kinerja transaksi kliring di DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.** Secara total, nilai transaksi melalui SKNBI di DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 mencapai Rp1.085,06 triliun dengan volume sebesar 34,70 juta warkat. Pertumbuhan nilai transaksi SKNBI pada triwulan IV 2025 tercatat 4,81% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,78% (yoy). Sementara itu, volume transaksi SKNBI tumbuh 7,54% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,53% (yoy).

Nilai transaksi SKNBI di DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 didominasi oleh kliring kredit dengan pangsa 97,29%. Nilai transaksi kliring kredit mencapai Rp1.055,62 triliun dengan volume sebesar 34,42 juta warkat. Secara tahunan, nilai dan volume transaksi kliring kredit tersebut tumbuh masing-masing 5,38% (yoy) dan 8,38% (yoy). Pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025 dimana nilai transaksi tumbuh 2,21% (yoy) dan volume transaksi tumbuh 2,79% (yoy).

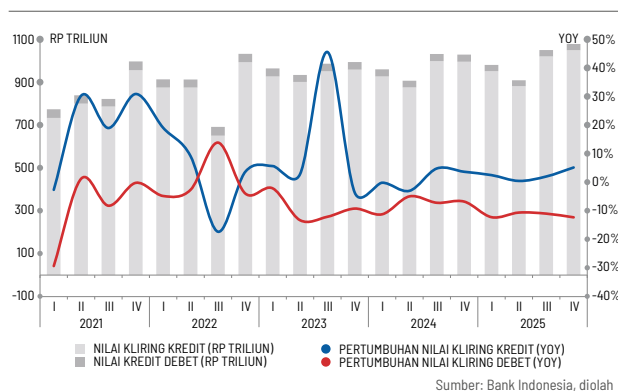
Di sisi lain, pertumbuhan transaksi kliring debit tercatat mengalami penurunan baik dari sisi nilai maupun volume. Pada triwulan IV 2025, nilai transaksi kliring debit mencapai Rp29,44 triliun dengan volume sebanyak 285.354 warkat. Nilai dan volume tersebut masing-masing

mengalami kontraksi 12,17% (yoy) dan 44,46% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 10,87% (yoy) dan 12,87% (yoy). Penurunan transaksi kliring debit tersebut menunjukkan pergeseran preferensi masyarakat dan pelaku usaha ke BI-FAST atau kanal *mobile banking* lainnya.

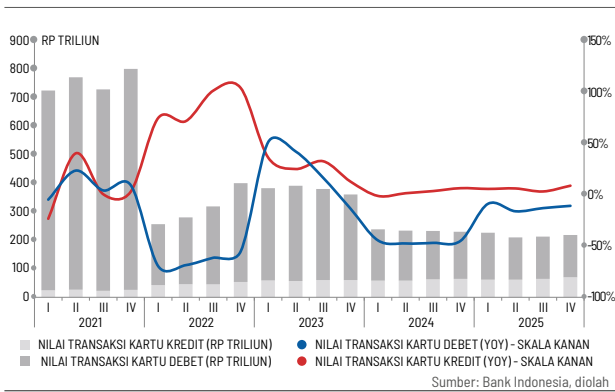
### Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

**Pada triwulan IV 2025, kinerja transaksi kartu kredit mengalami pertumbuhan positif baik dari sisi nilai maupun volume.** Nilai transaksi kartu kredit tercatat Rp70,63 triliun atau tumbuh 8,99% (yoy). Pertumbuhan nilai transaksi kartu kredit meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2025 sebesar 3,36% (yoy). Sementara itu, volume transaksi kartu kredit mencapai 78,49 juta yang didominasi oleh transaksi belanja dengan pangsa 94,72%. Volume transaksi kartu kredit pada triwulan IV 2025 tumbuh 9,43% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2025 sebesar 11,96% (yoy). Jumlah kartu kredit pada triwulan IV 2025 di DKI Jakarta tercatat sebesar 5,77 juta kartu. Pertumbuhan jumlah kartu kredit melambat dari 0,20% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi terkontraksi 2,50% (yoy).

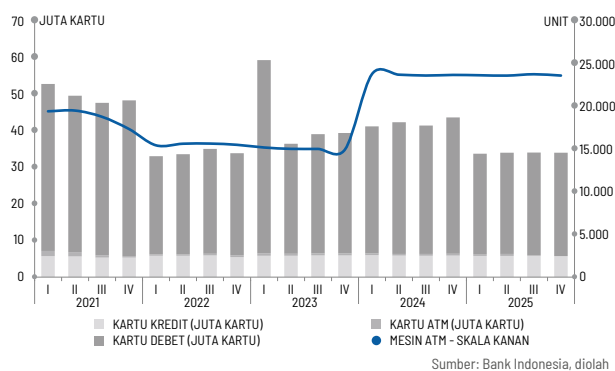
**Di sisi lain, transaksi keuangan menggunakan kartu ATM/ debit pada triwulan IV 2025 terkontraksi baik dari sisi nilai maupun volume.** Nilai transaksi kartu ATM/ debit tercatat sebesar Rp148,39 triliun dengan volume sebanyak 176,76 juta transaksi. Nilai dan volume transaksi kartu ATM/ debit terkontraksi masing-masing 10,61% (yoy) dan 14,90% (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 12,84% (yoy) untuk nilai transaksi dan 17,52% (yoy) untuk volume transaksi. Berdasarkan jenis transaksinya, volume kartu ATM/ debit terdiri dari transaksi tunai (56,18%), transaksi belanja (29,23%), dan interbank (8,99%). Adapun jumlah kartu ATM dan kartu debit masing-masing tercatat sebesar 607.938 kartu dan 28,37 juta kartu. Kartu ATM tumbuh 23,29% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2025 sebesar 10,79% (yoy). Sementara itu, kartu debit mengalami kontraksi 24,22% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang terkontraksi 19,65% (yoy). Mesin ATM sebagai infrastruktur pendukung juga tercatat kontraksi 0,32% (yoy) menjadi 23.719 unit.



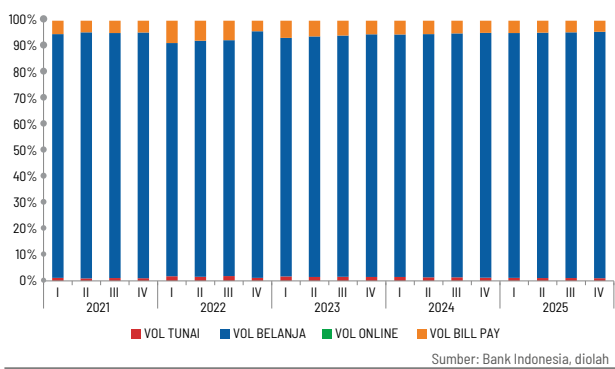
Grafik 6.5 Perkembangan Nilai Transaksi SKNBI



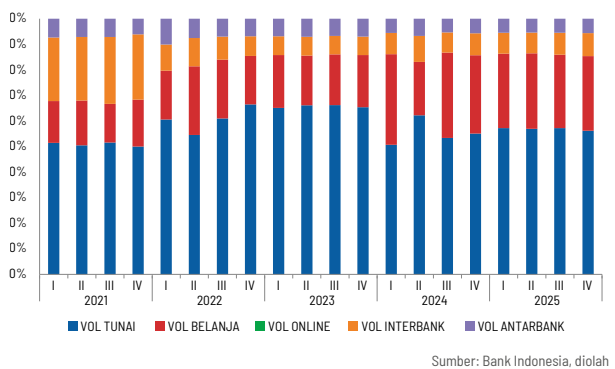
Grafik 6.7 Perkembangan Nilai Transaksi Kartu Kredit dan Debit



Grafik 6.8 Perkembangan Jumlah Kartu Kredit, Debit, ATM dan Mesin ATM



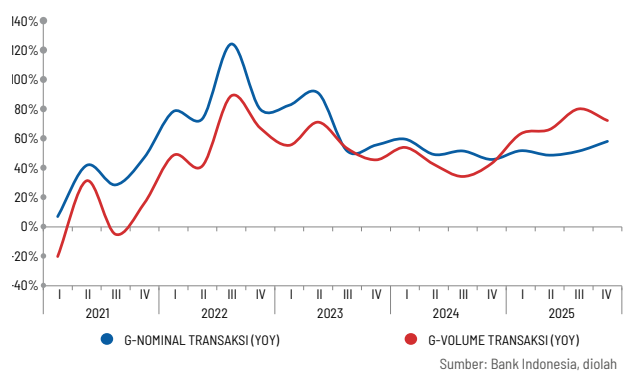
Grafik 6.9 Pangsa Volume Transaksi Kartu Kredit Berdasarkan Jenis Transaksi



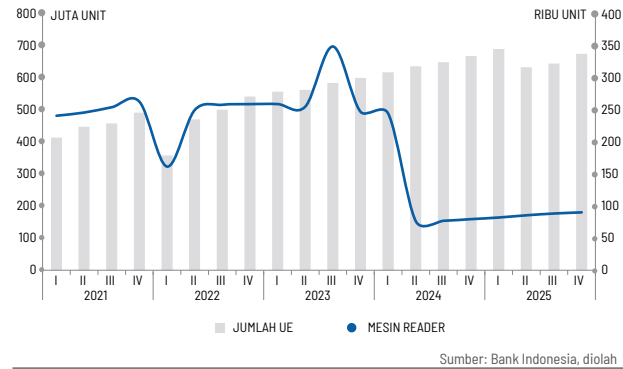
Grafik 6.10 Pangsa Volume Transaksi Kartu ATM/ Debit Berdasarkan Jenis Transaksi

## Uang Elektronik

Transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik baik yang berbasis *server* maupun berbasis *chip* pada triwulan IV 2025 tetap tumbuh. Nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp348,58 juta dengan volume 5,71 miliar transaksi. Pertumbuhan nilai transaksi uang elektronik meningkat dari 51,53% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 58,21% (yoy) pada triwulan IV 2025. Di sisi lain, volume transaksi uang elektronik tumbuh 72,39% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 80,30% (yoy). Volume transaksi uang elektronik didominasi oleh transaksi belanja (79,25%) dan transfer (20,70%). Sementara itu, jumlah uang elektronik pada triwulan IV 2025 tercatat 676,64 juta dengan jumlah mesin *reader* 90.446 unit.



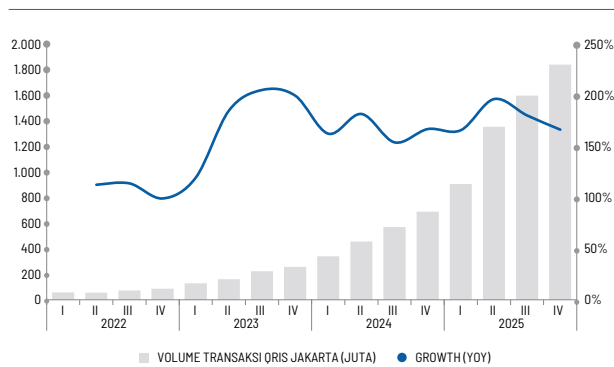
Grafik 6.11 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik



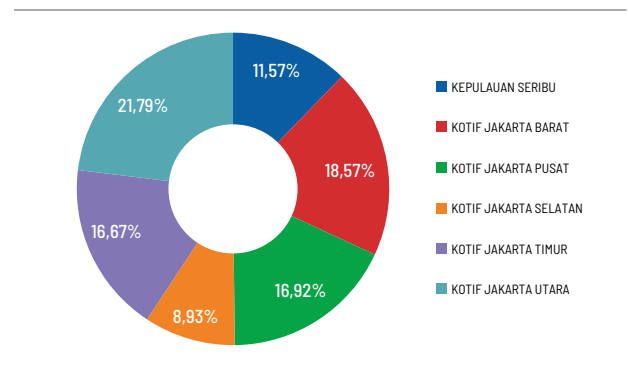
Grafik 6.12 Perkembangan Instrumen dan Mesin Reader Uang Elektronik

## Quick Responde Code Indonesian Standard (QRIS)

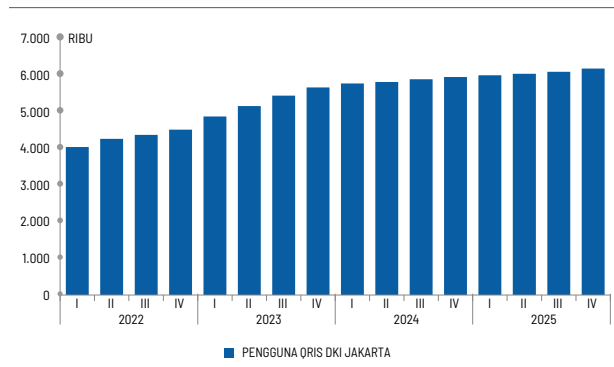
Adopsi QRIS di DKI Jakarta terus meluas didukung pelaksanaan edukasi dan sosialisasi QRIS, pendalaman *user experience* pada pusat perbelanjaan dan transportasi serta sinergi penyelenggaraan berbagai *event* strategis dengan *stakeholder*. Hal ini tercermin dari volume transaksi QRIS di DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 yang mengalami akselerasi pertumbuhan sebesar 166,49% (yoy) atau tercatat 1,84 miliar transaksi. Adapun jumlah pengguna QRIS di DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 meningkat 3,87% (yoy) atau bertambah 230.027 pengguna dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga secara total menjadi 6,18 juta pengguna QRIS. Sementara itu, jumlah



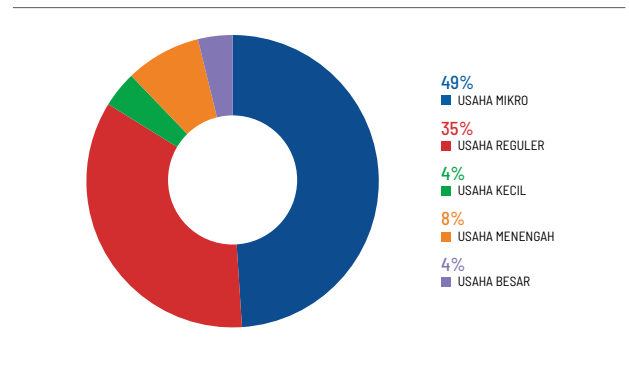
Grafik 6.13 Perkembangan Volume transaksi QRIS di DKI Jakarta



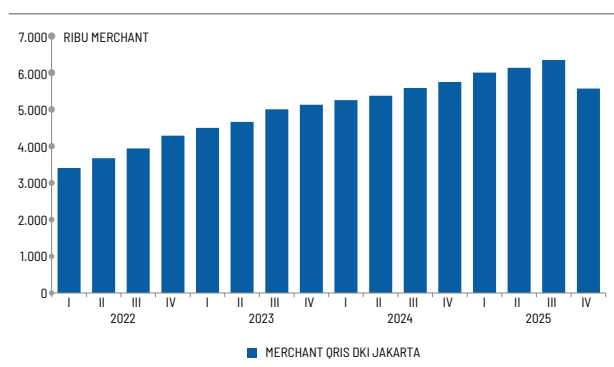
Grafik 6.16 Pangsa Merchant QRIS per Wilayah



Grafik 6.14 Perkembangan Pengguna QRIS di DKI Jakarta



Grafik 6.17 Pangsa Merchant QRIS per Jenis Usaha



Grafik 6.15 Perkembangan Merchant QRIS di DKI Jakarta

merchant QRIS di DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 mencapai 5,60 juta merchant. Jumlah ini menurun 179.122 merchant dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau terkontraksi 3,10% (yoy) seiring dengan write off rekening tidak aktif yang dilaksanakan oleh perbankan dalam rangka memperkuat tata kelola penyelenggaraan QRIS.

**Transaksi QRIS mendukung inklusivitas perekonomian DKI Jakarta.**

Hal ini tercermin dari jenis usaha merchant QRIS yang didominasi oleh usaha mikro dengan share 48,98% dan usaha reguler dengan share 34,84%. Adapun sebaran merchant QRIS cenderung merata di kota administratif DKI Jakarta dengan pangsa terbesar adalah Jakarta Utara dengan share 21,79%. Selanjutnya, pangsa merchant QRIS

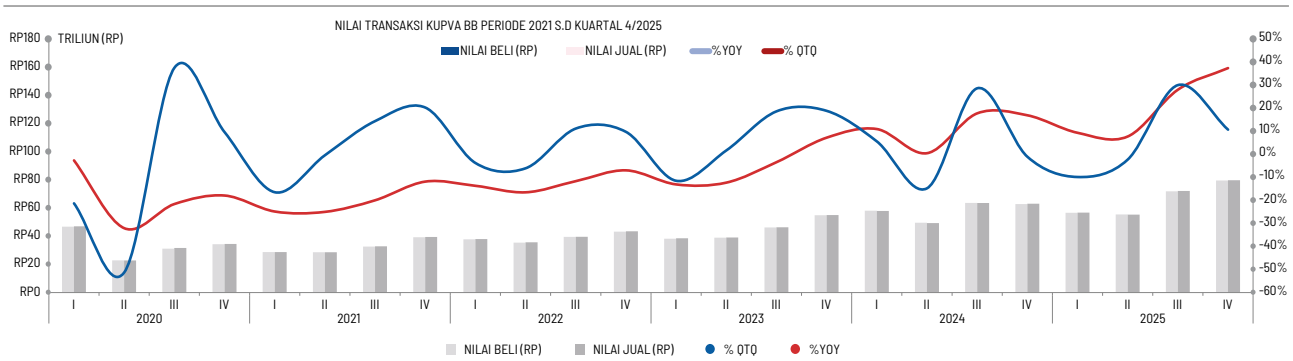
terbesar juga dicapai oleh Jakarta Barat (18,57%) dan Jakarta Pusat (16,92%). Merchant QRIS di Kepulauan Seribu tercatat memiliki pangsa terkecil yakni 8,93%.

**C. UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN**

**Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)**

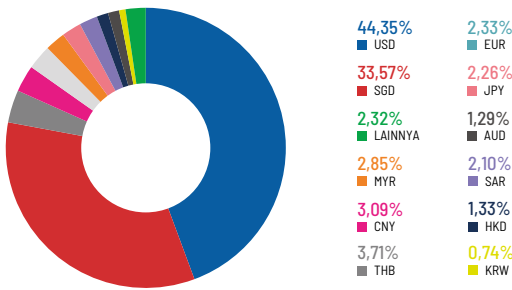
Pada triwulan IV 2025, nilai transaksi Penyelenggara KUPVA BB tercatat tumbuh sebesar **26,61% (yoy)** dengan nominal sebesar Rp159,29 triliun, tumbuh **meningkat** dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,19% (yoy) dengan nilai transaksi sebesar Rp143,94 triliun. Secara kuartalan, nilai transaksi meningkat **sebesar 10,70% (qtq)** dari triwulan sebelumnya (Grafik 6.18). Berlanjutnya tren peningkatan tersebut mengindikasikan adanya pemulihan permintaan terhadap valuta asing.

Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya kembali aktivitas perjalanan luar negeri serta kebutuhan transaksi valas masyarakat untuk kepentingan haji/umroh dan liburan akhir tahun. Namun, ketidakpastian ekonomi global dan pergeseran preferensi terhadap instrumen pembayaran digital tetap menjadi faktor yang membatasi pertumbuhan transaksi fisik valuta asing oleh Penyelenggara KUPVA BB. Pada triwulan IV 2025, terdapat 317 (Kantor Pusat) dan 188 (Kantor



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.18 Perkembangan Transaksi KUPVA BB



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.19 Market Share Valuta Asing

Tabel 6.1 Persebaran KUPVA BB

NO	WILAYAH	KP	KC	JUMLAH
1	DKI Jakarta	283	88	371
2	Bogor	8	8	16
3	Depok	8	3	11
4	Bekasi	15	6	21
5	Karawang	3	1	4
6	Tangerang	0	21	21
7	Pulau Jawa (Lainnya)		37	37
8	Pulau Bali		11	11
9	Pulau Sulawesi		2	2
10	Pulau Sumatera		11	11
<b>TOTAL</b>		<b>317</b>	<b>188</b>	<b>505</b>

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Cabang Penyelenggara KUPVA BB yang telah diberikan izin operasional dan diawasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta (Tabel 6.1). Industri KUPVA BB saat ini banyak beroperasi di wilayah Jakarta Selatan (24,75%) dan Jakarta Pusat (19,80%). Adapun *market share* valuta asing yang ditransaksikan di wilayah pengawasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh mata uang USD dan SGD dengan persentase masing-masing sebesar 44,35% dan 33,57% (Grafik 6.19).

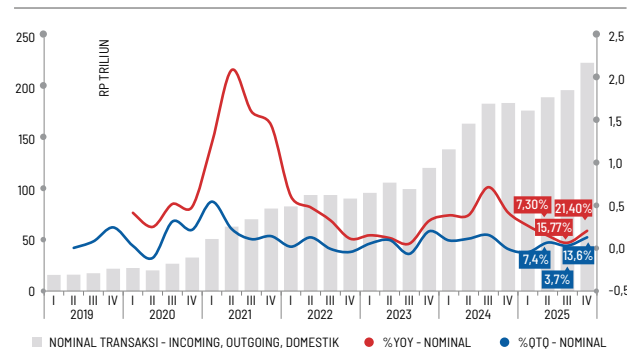
### Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR)

Berdasarkan data Laporan Transfer Dana Bukan Bank, perkembangan nilai transaksi transfer dana yang diselenggarakan oleh PJP LR pada triwulan IV 2025 menunjukkan pergerakan yang beragam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai transaksi *outgoing* dan domestik masih tercatat mengalami pertumbuhan positif meskipun lebih rendah dari triwulan sebelumnya, sementara transaksi *incoming* mengalami perbaikan pertumbuhan meskipun tetap mengalami kontraksi pertumbuhan. Rincian pergerakan transaksi adalah sebagai berikut:

- Nilai transaksi *outgoing* di wilayah kerja KPwBI DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh sebesar 20,77% (yoy) dengan nilai nominal sebesar Rp17,32 triliun, tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,32% (yoy) dengan nominal sebesar Rp15,65 triliun. Sementara itu, frekuensi transaksi *outgoing* tercatat tumbuh meningkat sebesar 37,23% (yoy) atau sebanyak 698.424 transaksi, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 32,22% (yoy) dengan frekuensi sebanyak 666.697 transaksi.
- Nilai transaksi *incoming* di wilayah kerja KPwBI DKI Jakarta pada triwulan IV 2025 tercatat terkontraksi sebesar 22,99% (yoy) dengan nominal sebesar Rp25,32 triliun, mengalami perbaikan pertumbuhan setelah triwulan sebelumnya terkontraksi lebih dalam sebesar 28,35% (yoy) dengan nominal sebesar Rp22,58 triliun. Sejalan dengan nilai transaksi, volume transaksi *incoming* turut mengalami kontraksi sebesar 23,87% (yoy) dengan frekuensi sebesar 3,98 juta transaksi. Pertumbuhan tersebut mengalami perbaikan setelah triwulan sebelumnya terkontraksi lebih dalam sebesar 37,11% (yoy) dengan frekuensi sebesar 3,15 juta transaksi.
- Nilai transaksi domestik pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh sebesar 32,02% (yoy) dengan nominal sebesar Rp182,45 triliun, tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 14,77% (yoy) dengan nominal sebesar Rp159,93 triliun. Sementara itu, pertumbuhan volume transaksi tercatat terkontraksi 7,65% (yoy) dengan frekuensi sebesar 84,22

juta transaksi, berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 5,54% (yoy) dengan frekuensi sebanyak 81,72 juta transaksi.

Secara keseluruhan tahun 2025, nilai dan frekuensi total transaksi *outgoing, incoming*, dan domestik transfer dana yang diselenggarakan oleh PJP LR mencatat pertumbuhan positif. Total nilai transaksi tercatat sebesar Rp225,09 triliun atau tumbuh 21,40% (yoy), sementara total frekuensi transaksi mencapai 88,90 juta transaksi atau tumbuh 13,6% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (Grafik 6.20). Hal ini sejalan dengan tingginya aktivitas konsumsi di DKI Jakarta terutama menjelang momen HBKN Natal 2025, Tahun Baru 2026, dan periode liburan.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.20 Perkembangan Transaksi PJP LR

**Tabel 6.2** Perkembangan Transaksi PJP LR

PERIODE	OUTGOING		INCOMING		DOMESTIK		TOTAL		
	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	
TW I 2020	Jan-20	19.244	876.029.558.924	2.790.747	2.448.962.056.681	2.318.460	3.652.836.612.761	5.128.451	6.977.828.228.366
	Feb-20	17.820	705.196.274.574	464.055	2.541.422.928.345	3.207.777	4.268.574.298.242	3.689.652	7.515.193.501.161
	Mar-20	14.973	786.786.445.415	513.070	3.249.878.679.624	3.187.842	4.291.224.204.144	3.715.895	8.327.889.329.183
	<b>Total</b>	<b>52037</b>	<b>2.368.012.278.913</b>	<b>3.767.872</b>	<b>8.240.263.664.650</b>	<b>8.714.079</b>	<b>12.212.635.115.147</b>	<b>12.533.988</b>	<b>22.820.911.058.710</b>
TW II 2020	Apr-20	9.843	451.330.534.267	518.556	3.109.213.840.919	1.835.884	3.035.059.526.763	2.364.283	6.595.603.901.949
	May-20	11.646	317.617.797.609	638.902	3.272.985.284.693	2.190.258	3.100.375.671.350	2.840.806	6.690.978.753.652
	Jun-20	16.362	609.234.172.893	592.505	3.021.071.820.858	2.547.826	3.469.218.209.499	3.156.693	7.099.524.203.250
	<b>Total</b>	<b>37.851</b>	<b>1.378.182.504.769</b>	<b>1.749.963</b>	<b>9.403.270.946.470</b>	<b>6.573.968</b>	<b>9.604.653.407.612</b>	<b>8.361.782</b>	<b>20.386.106.858.851</b>
TW III 2020	Jul-20	17.307	776.735.132.076	625.951	3.578.380.589.317	3.196.653	4.498.767.441.505	3.839.911	8.853.883.162.898
	Aug-20	16.536	682.778.854.093	562.361	3.331.395.275.865	3.745.893	4.536.278.891.917	4.324.790	8.550.453.021.875
	Sep-20	17.272	872.519.689.320	570.496	3.371.000.771.677	4.273.546	5.311.898.312.574	4.861.314	9.555.418.773.571
	<b>Total</b>	<b>51.115</b>	<b>2.332.033.675.489</b>	<b>1.758.808</b>	<b>10.280.776.636.859</b>	<b>11.216.092</b>	<b>14.346.944.645.996</b>	<b>13.026.015</b>	<b>26.959.754.958.344</b>
TW IV 2020	Oct-20	17.695	970.727.059.198	593.571	3.281.780.541.285	4.997.412	6.184.066.710.486	5.608.678	10.436.574.310.969
	Nov-20	20.811	1.382.025.507.414	531.845	2.885.258.608.907	5.429.305	7.050.762.370.538	5.981.961	11.318.046.486.859
	Dec-20	23.083	1.275.443.128.213	598.304	3.018.815.956.838	5.639.375	6.988.830.657.280	6.260.762	11.283.089.742.331
	<b>Total</b>	<b>61.589</b>	<b>3.628.195.694.825</b>	<b>1.723.720</b>	<b>9.185.855.107.030</b>	<b>16.066.092</b>	<b>20.223.659.738.304</b>	<b>17.851.401</b>	<b>33.037.710.540.159</b>
TW I 2021	Jan-21	21.726	1.741.457.787.387	602.773	2.991.156.931.488	6.924.581	11.536.770.574.232	7.459.080	16.269.385.293.107
	Feb-21	20.941	1.721.643.886.343	636.155	3.206.717.228.676	7.181.263	11.198.616.289.229	7.838.359	16.126.977.404.248
	Mar-21	24.788	1.800.355.972.601	748.668	4.200.335.445.525	8.056.932	13.050.057.206.091	8.830.388	19.005.618.624.217
	<b>Total</b>	<b>67.455</b>	<b>5.263.457.646.331</b>	<b>1.987.596</b>	<b>10.398.209.605.689</b>	<b>22.162.776</b>	<b>35.785.444.069.552</b>	<b>24.217.827</b>	<b>51.447.111.321.572</b>
TW II 2021	Apr-21	23.526	1.910.947.591.495	782.361	4.380.193.932.569	8.443.134	14.649.820.451.794	9.249.021	20.940.961.975.858
	May-21	25.291	2.129.640.509.196	801.262	4.023.213.606.203	8.859.710	15.498.808.588.234	9.686.263	21.651.662.703.633
	Jun-21	27.811	1.597.292.074.810	689.981	3.858.043.970.924	9.572.630	15.464.282.991.151	10.290.422	20.919.619.036.885
	<b>Total</b>	<b>76.628</b>	<b>5.637.880.175.501</b>	<b>2.273.604</b>	<b>12.261.451.509.696</b>	<b>26.875.474</b>	<b>45.612.912.031.179</b>	<b>29.225.706</b>	<b>63.512.243.716.376</b>
TW III 2021	Jul-21	27.544	1.557.649.197.078	748.349	4.028.836.392.802	10.946.079	17.343.385.085.306	11.721.972	22.929.870.675.186
	Aug-21	32.709	1.882.464.840.771	732.673	3.673.710.587.218	11.546.029	18.240.033.185.328	12.311.411	23.796.208.613.317
	Sep-21	37.379	2.395.543.528.447	695.051	3.792.521.359.819	10.721.645	17.863.854.189.666	11.454.075	24.051.919.077.932
	<b>Total</b>	<b>97.632</b>	<b>5.835.657.566.296</b>	<b>2.176.073</b>	<b>11.495.068.339.839</b>	<b>33.213.753</b>	<b>53.447.272.460.300</b>	<b>35.487.458</b>	<b>70.777.998.366.435</b>
TW IV 2021	Oct-21	44.692	1.665.458.149.146	865.278	4.678.048.147.998	11.901.324	19.718.417.463.247	12.811.294	26.061.923.760.391
	Nov-21	47.330	2.280.183.890.703	860.062	4.337.538.438.064	12.296.639	19.772.832.790.543	13.204.031	26.390.554.919.310
	Dec-21	51.347	2.354.809.539.298	899.734	4.562.790.327.433	13.864.975	21.998.721.000.286	14.816.056	28.916.320.867.017
	<b>Total</b>	<b>143.369</b>	<b>6.300.451.379.147</b>	<b>2.625.074</b>	<b>13.578.376.913.495</b>	<b>38.062.938</b>	<b>61.489.971.254.076</b>	<b>40.831.381</b>	<b>81.368.799.546.718</b>
TW I 2022	Jan-22	51.628	2.701.112.895.750	856.897	4.449.009.613.453	13.945.338	21.276.650.265.317	14.853.863	28.426.772.774.520
	Feb-22	50.467	2.174.429.338.961	763.251	3.913.050.656.759	13.261.702	18.698.420.551.277	14.075.420	24.785.900.546.997
	Mar-22	61.305	2.498.231.799.915	864.253	4.510.919.780.009	15.911.984	23.232.489.225.313	16.837.542	30.241.640.805.237
	<b>Total</b>	<b>163.400</b>	<b>7.373.774.034.626</b>	<b>2.484.401</b>	<b>12.872.980.050.221</b>	<b>43.119.024</b>	<b>63.207.560.041.907</b>	<b>45.768.825</b>	<b>83.454.314.126.754</b>
TW II 2022	Apr-22	60.384	3.612.733.838.880	960.426	5.091.901.296.134	17.379.120	25.894.326.976.935	18.399.930	34.598.962.111.949
	May-22	103.895	2.910.275.109.260	960.208	3.568.568.025.155	14.786.905	22.095.641.826.505	15.851.008	28.574.484.960.920
	Jun-22	112.629	2.526.485.373.078	993.800	4.071.142.999.492	16.869.809	24.098.078.056.629	17.976.238	30.695.706.429.199
	<b>Total</b>	<b>276.908</b>	<b>9.049.494.321.218</b>	<b>2.914.434</b>	<b>12.731.876.320.781</b>	<b>49.035.834</b>	<b>72.088.046.860.069</b>	<b>52.227.176</b>	<b>93.869.153.502.068</b>
TW III 2022	Jul-22	337.911	3.273.993.931.950	1.045.343	4.674.318.696.750	18.116.128	25.518.115.462.080	19.499.382	33.466.428.090.780
	Aug-22	336.824	3.213.384.141.909	809.921	3.475.043.980.438	17.553.090	24.691.222.695.268	18.699.835	31.379.650.817.615
	Sep-22	358.458	3.476.017.082.373	821.254	3.610.053.172.188	16.916.743	22.772.172.389.235	18.096.455	29.858.242.643.796
	<b>Total</b>	<b>1.033.193</b>	<b>9.963.395.156.232</b>	<b>2.676.518</b>	<b>11.759.415.849.376</b>	<b>52.585.961</b>	<b>72.981.510.546.583</b>	<b>56.295.672</b>	<b>94.704.321.552.191</b>
TW IV 2022	Oct-22	347.348	3.209.904.766.688	826.067	3.498.815.511.210	16.657.239	21.432.734.318.000	17.830.654	28.141.454.595.898
	Nov-22	349.029	3.270.207.410.868	1.030.146	4.660.248.534.081	16.617.865	21.771.323.623.705	17.997.040	29.701.779.568.654
	Dec-22	175.900	2.849.529.906.824	1.089.837	4.964.763.505.699	17.728.054	25.553.442.712.594	18.993.791	33.367.736.125.117
	<b>Total</b>	<b>872.277</b>	<b>9.329.642.084.380</b>	<b>2.946.050</b>	<b>13.123.827.550.990</b>	<b>51.003.158</b>	<b>68.757.500.654.299</b>	<b>54.821.485</b>	<b>91.210.970.289.669</b>
TW I 2023	Jan-23	206.853	3.031.663.147.712	1.060.915	4.172.178.454.812	17.166.451	23.422.773.401.867	18.434.219	30.626.615.004.391
	Feb-23	188.141	2.541.796.523.358	1.255.634	4.984.718.627.496	15.713.344	21.636.054.827.967	17.157.119	29.162.569.978.821
	Mar-23	206.014	6.271.350.309.317	1.370.890	5.632.361.765.112	17.986.604	26.324.340.424.361	19.563.508	38.228.052.498.790
	<b>Total</b>	<b>601.008</b>	<b>11.844.809.980.387</b>	<b>3.687.439</b>	<b>14.789.258.847.420</b>	<b>50.866.399</b>	<b>71.383.168.654.195</b>	<b>55.154.846</b>	<b>98.017.237.482.002</b>
TW II 2023	Apr-23	206.505	2.669.338.138.416	1.227.373	4.676.310.240.207	17.799.845	25.530.062.603.041	19.233.723	32.875.710.981.664
	May-23	245.253	3.156.441.613.325	1.324.557	5.389.577.591.989	17.560.216	24.951.878.726.113	19.130.026	33.497.897.931.427
	Jun-23	247.246	2.675.347.301.006	1.458.598	5.900.609.310.299	20.042.400	31.990.595.585.855	21.748.244	40.566.552.197.160
	<b>Total</b>	<b>699.004</b>	<b>8.501.127.052.747</b>	<b>4.010.528</b>	<b>15.966.497.142.495</b>	<b>55.402.461</b>	<b>82.472.536.915.009</b>	<b>60.111.993</b>	<b>106.940.161.110.251</b>
TW III 2023	Jul-23	245.468	2.672.778.528.424	1.234.758	5.567.750.963.697	18.217.682	25.701.541.146.742	19.697.908	33.942.070.638.863
	Aug-23	272.700	2.986.632.796.251	1.208.366	5.387.603.973.108	18.961.370	24.235.934.246.395	20.442.436	32.610.171.015.754
	Sep-23	281.232	2.964.115.516.896	1.181.297	5.265.620.629.852	18.037.861	25.875.297.213.086	19.500.390	34.105.033.359.834
	<b>Total</b>	<b>799.400</b>	<b>8.623.526.841.571</b>	<b>3.624.421</b>	<b>16.220.975.566.657</b>	<b>55.216.913</b>	<b>75.812.772.606.223</b>	<b>59.640.734</b>	<b>100.657.275.014.451</b>
TW IV 2023	Oct-23	297.665	3.341.174.508.381	1.344.927	6.122.309.658.991	23.441.197	30.412.963.804.944	25.083.789	39.876.447.971.416
	Nov-23	158.796	3.113.258.356.874	1.076.976	5.502.165.624.171	20.364.548	30.652.789.833.843	21.600.320	39.268.213.814.888
	Dec-23	158.421	3.299.192.281.008	1.208.815	6.152.900.385.938	20.906.792	32.960.977.317.490	22.274.028	42.413.069.984.436
	<b>Total</b>	<b>614.882</b>	<b>9.753.625.146.263</b>	<b>3.630.718</b>	<b>17.777.375.668.200</b>	<b>64.712.537</b>	<b>94.026.730.956.277</b>	<b>68.958.137</b>	<b>121.557.731.770.740</b>
TW I 2024	Jan-24	164.853	3.542.320.689.096	1.149.198	6.546.289.317.870	20.134.309	33.308.830.591.428	21.448.360	43.397.440.598.394
	Feb-24	146.838	3.155.098.647.512	1.122.486	7.069.174.073.388	19.490.424	33.262.462.144.272	20.759.748	43.486.734.865.182
	Mar-24	151.913	3.347.482.549.622	1.319.088	8.068.088.794.892	22.434.290	35.324.096.189.978	23.	

PERIODE	OUTGOING		INCOMING		DOMESTIK		TOTAL		
	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	
TW II 2024	Apr-24	152.595	3.116.325.807.983	1.513.702	8.963.120.524.159	21.991.219	34.707.823.244.702	23.657.516	46.787.269.576.844
	May-24	159.208	3.684.703.251.154	1.360.498	8.267.486.900.714	24.025.918	38.363.701.519.121	25.545.624	50.315.891.670.989
	Jun-24	152.825	3.677.435.279.743	1.311.905	7.913.112.578.674	24.564.070	40.997.949.584.626	26.028.800	52.588.497.443.043
	<b>Total</b>	<b>464.628</b>	<b>10.478.464.338.880</b>	<b>4.186.105</b>	<b>25.143.720.003.547</b>	<b>70.581.207</b>	<b>114.069.474.348.449</b>	<b>75.231.940</b>	<b>149.691.658.690.876</b>
TW III 2024	Jul-24	170.844	4.286.252.310.689	1.254.388	7.253.837.600.268	23.608.049	47.785.360.191.808	25.033.281	59.325.450.102.765
	Aug-24	165.438	4.769.314.105.747	1.249.523	7.540.207.796.939	24.627.251	45.731.778.010.778	26.042.212	58.041.299.913.464
	Sep-24	167.964	4.755.459.387.757	1.027.373	6.156.438.717.382	29.202.399	45.840.712.560.218	30.397.736	56.752.610.665.357
	<b>Total</b>	<b>504.246</b>	<b>13.811.025.804.193</b>	<b>3.531.284</b>	<b>20.950.484.114.589</b>	<b>77.437.699</b>	<b>139.357.850.762.804</b>	<b>81.473.229</b>	<b>174.119.360.681.586</b>
TW IV 2024	Oct-24	156.281	4.406.153.123.565	1.136.260	6.970.586.639.211	31.126.073	45.334.021.099.509	32.418.614	56.710.760.862.285
	Nov-24	170.656	4.617.925.897.335	1.092.969	6.713.456.411.351	26.491.850	40.682.410.626.798	27.755.475	52.013.792.935.484
	Dec-24	181.990	5.316.793.381.989	1.234.435	7.527.339.722.595	33.585.398	52.178.026.458.269	35.001.823	65.022.159.562.853
	<b>Total</b>	<b>508.927</b>	<b>14.340.872.402.889</b>	<b>3.463.664</b>	<b>21.211.382.773.157</b>	<b>91.203.321</b>	<b>138.194.458.184.576</b>	<b>95.175.912</b>	<b>173.746.713.360.622</b>
TW I 2025	Jan-25	177.878	4.842.827.046.010	1.191.286	7.459.985.998.064	11.107.408	18.153.606.119.248	12.476.572	30.456.419.163.322
	Feb-25	164.374	4.799.437.496.484	1.273.485	7.874.464.076.194	33.299.993	41.890.550.432.665	34.737.852	54.564.452.005.343
	Mar-25	184.244	4.655.793.930.793	1.664.259	10.110.398.671.016	31.676.346	48.078.446.498.877	33.524.849	62.844.639.100.686
	<b>Total</b>	<b>526.496</b>	<b>14.298.058.473.287</b>	<b>4.129.030</b>	<b>25.444.848.745.274</b>	<b>76.083.747</b>	<b>108.122.603.050.790</b>	<b>80.739.273</b>	<b>147.865.510.269.351</b>
TW II 2025	Apr-25	184.176	5.169.460.395.115	1.241.857	7.783.997.649.627	26.538.783	45.865.543.463.830	27.964.816	58.819.001.508.572
	May-25	207.449	11.714.605.422.440	1.286.246	8.316.406.201.392	29.642.291	45.940.199.453.098	31.135.986	65.971.211.076.930
	Jun-25	200.219	4.897.355.799.238	1.013.970	7.440.197.023.456	27.857.548	54.009.398.363.060	29.071.737	66.346.951.185.754
	<b>Total</b>	<b>591.844</b>	<b>21.781.421.616.793</b>	<b>3.542.073</b>	<b>23.540.600.874.475</b>	<b>84.038.622</b>	<b>145.815.141.279.988</b>	<b>88.172.539</b>	<b>191.137.163.771.256</b>
TW III 2025	Jul-25	223.431	5.308.166.493.760	1.037.551	7.551.937.505.375	28.114.667	54.602.217.919.182	29.375.649	67.462.321.918.317
	Aug-25	226.009	5.592.132.487.108	1.132.175	7.935.151.829.562	28.382.556	55.315.588.699.999	29.740.740	68.842.873.016.669
	Sep-25	217.257	4.750.599.974.475	984.898	7.092.132.952.613	25.228.716	50.016.783.355.135	26.430.871	61.859.516.282.223
	<b>Total</b>	<b>666.697</b>	<b>15.650.898.955.343</b>	<b>3.154.624</b>	<b>22.579.222.287.550</b>	<b>81.725.939</b>	<b>159.934.589.974.316</b>	<b>85.547.260</b>	<b>198.164.711.217.209</b>
TW IV 2025	Oct-25	230.854	6.504.569.084.792	1.442.079	8.636.886.742.162	26.747.591	55.331.073.909.601	28.420.524	70.472.529.736.555
	Nov-25	225.553	5.333.663.836.420	1.241.572	7.531.618.871.268	27.343.455	64.319.484.062.492	28.810.580	77.184.766.770.180
	Dec-25	242.017	5.481.824.490.007	1.301.293	9.149.082.529.289	30.131.478	62.804.855.517.284	31.674.788	77.435.762.536.580
	<b>Total</b>	<b>698.424</b>	<b>17.320.057.411.219</b>	<b>3.984.944</b>	<b>25.317.588.142.719</b>	<b>84.222.524</b>	<b>182.455.413.489.377</b>	<b>88.905.892</b>	<b>225.093.059.043.315</b>
<b>Grand Total</b>	<b>9.983.385</b>	<b>221.271.373.222.476</b>	<b>74.984.502</b>	<b>416.019.627.092.460</b>	<b>1.218.815.314</b>	<b>1.947.516.179.263.230</b>	<b>1.286.646.357</b>	<b>2.450.623.848.253.680</b>	

Sumber: Bank Indonesia, diolah



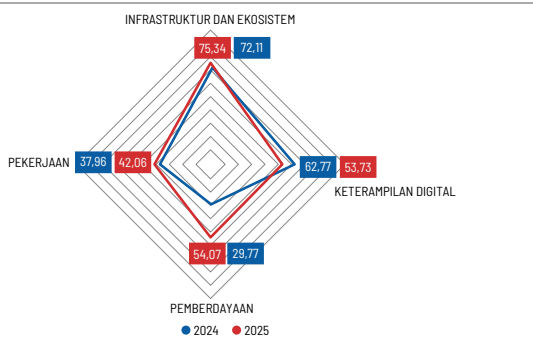
**BOKS 3**

# Sinergi Perluasan Ekosistem Digital dan Elektronifikasi Transaksi Pemda Perkuat Daya Saing Digital Jakarta Kota Global

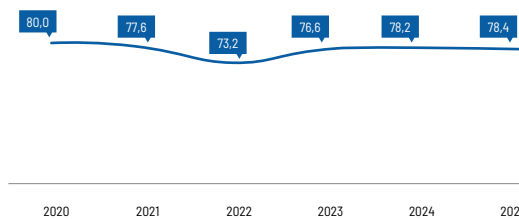
Dalam upaya memperkuat daya saing digital DKI Jakarta Kota Global, Kantor Perwakilan Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah Provinsi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam perluasan ekosistem digital dan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda. Dalam konteks ini, strategi mendorong pengembangan digitalisasi DKI Jakarta dinilai berdasarkan indikator kesiapan digital yang masih memiliki ruang untuk pengembangan antara lain:

- a. Kesiapan Pemerintah Daerah dan masyarakat DKI Jakarta terhadap digitalisasi yang diukur melalui *Digital Competitiveness Index* (DCI) dan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang sudah menjadi tertinggi se-nasional dengan masing-masing skor mencapai 78,4 (skala 100) dan 56,97 atau tinggi.
- b. Ekosistem digitalisasi pada Pemda DKI Jakarta terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sampai dengan Semester-II 2025, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) telah mencapai tahap digital (skor 98,30%). Walau demikian, IETPD DKI Jakarta masih memiliki ruang peningkatan untuk mencapai skor 100%.

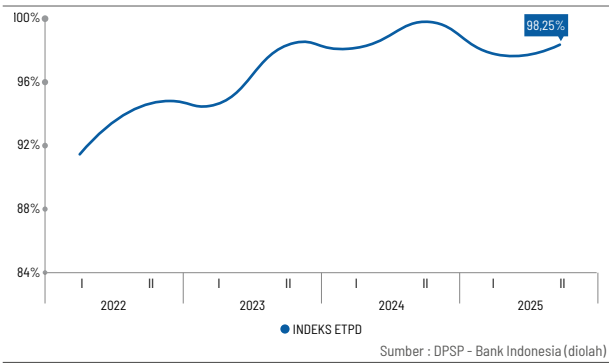
Lebih detail, indeks ETPD DKI Jakarta semester-II 2025 telah optimal pada aspek implementasi dan lingkungan strategis. Kondisi ini mencerminkan seluruh penerimaan pajak dan retribusi DKI Jakarta telah terelektronifikasi melalui seluruh kanal pembayaran non tunai, yang disertai dengan penyediaan infrastruktur pendukung digital yang memadai. Lebih lanjut, aspek realisasi IETPD DKI Jakarta saat



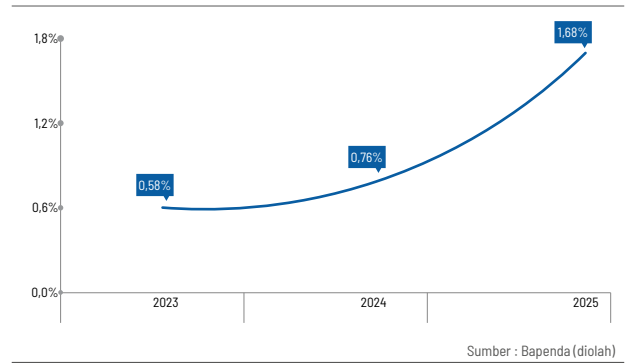
Gambar B3.1 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)



Gambar B3.2 Digital Competitiveness Index



Gambar B3.3 Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah



Gambar B3.6 Rasio QRIS terhadap Penerimaan PDRD Jakarta

ini mencapai 82,50%, hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk peningkatan penerimaan pajak dan retribusi melalui kanal QRIS masih dapat dioptimalkan. Sampai dengan Semester-II 2025, proporsi penerimaan pajak dan retribusi didominasi melalui kanal digital (internet/SMS/mobile banking, QRIS dan e-commerce) yang mencapai 59%, disusul kanal tunai (teller dan agen bank) dan semi digital (ATM, EDC dan Uang Elektronik) masing-masing sebesar 29% dan 12%. Adapun rasio QRIS terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah naik signifikan mencapai 1,68% atau senilai Rp763,42 miliar.

Berbagai program telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 yang mendorong perluasan ekosistem digital melalui implementasi QRIS dan penyediaan infrastruktur pendukung digital, antara lain: i) Sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, OJK Jabodetabek, BUMD Pasar Jaya, dan industri perbankan melalui penyelenggaraan kegiatan

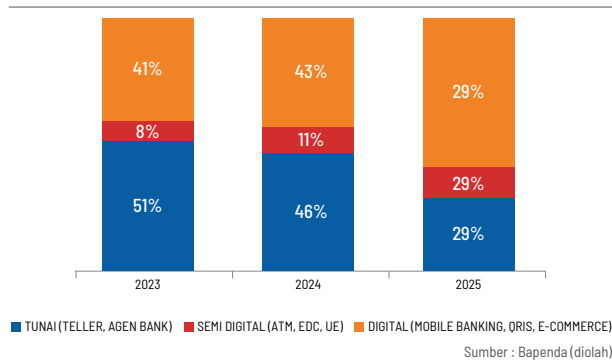
Digitalisasi Pasar Tahap 1 dan 2, sebagai upaya memperluas akseptasi QRIS di 40 pasar tradisional yang dikelola oleh BUMD Pasar Jaya di wilayah Jakarta.; dan ii) Sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, OJK Jabodetabek, Asosiasi melalui penyelenggaraan Jakarta Festive Wonders yang diikuti 81 peserta dari sektor mal, hotel, dan ritel wilayah Jakarta dengan tujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi dan akselerasi digitalisasi transaksi, khususnya implementasi QRIS Tap dan QRIS Antarnegara. Kedua kegiatan tersebut menunjukkan hasil positif dalam memperkuat ekosistem pembayaran dan keuangan digital di DKI Jakarta melalui literasi, penyediaan infrastruktur pendukung digital, akuisisi merchant QRIS baru dan peningkatan volume transaksi QRIS.

Selanjutnya, dalam upaya memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan telah dilaksanakan juga kegiatan *High Level Meeting (HLM) TP2DD* Provinsi DKI Jakarta pada 4 Desember 2025, dengan penguatan arah kebijakan percepatan perluasan digitalisasi daerah Jakarta ke depan, yakni antara lain: i) implementasi pembayaran melalui *virtual account (VA)* pada pembayaran uang jaminan atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan atas penyelenggaraan hiburan insidental; ii) Percepatan dan penyederhanaan izin Tanda Daftar Pertunjukkan Temporer melalui *JakEvo*; iii) Penyediaan *Mobile Point of Sale (MPOS)* untuk mendukung penerapan QRIS Dinamis dan QRIS Tap pada layanan loket pembayaran SAMSAT DKI Jakarta; dan iv) Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Aspek	2025	
	I	II
Implementasi	99%	100%
Realisasi	82,50%	82,50%
Listra	100%	100%

Sumber : DPSP - Bank Indonesia (diolah)

Gambar B3.4 IETPD berdasarkan aspek



Gambar B3.5 Proporsi Penerimaan Pajak dan Retribusi (PDRD) Jakarta



Gambar B3.7 Closing Ceremony Digitalisasi Pasar Tahap 1

**BOKS 3**

Sinergi Perluasan Ekosistem Digital dan Elektronifikasi Transaksi Pemda Perkuat Daya Saing Digital Jakarta Kota Global



Gambar B3.8 Closing Ceremony Jakarta Festive Wonders



Gambar B3.9 High Level Meeting TP2DD Provinsi DKI Jakarta





## BOKS 4

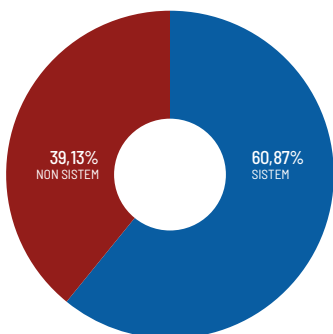
# Strategi Pengawasan Sistem Pembayaran di DKI Jakarta dalam Menghadapi Kompleksitas Industri Digital

Perkembangan industri Sistem Pembayaran (SP) di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta menunjukkan peningkatan kompleksitas yang signifikan seiring akselerasi digitalisasi dan interkoneksi antarpelenggara. Hingga akhir 2025, sebanyak 60,87% penyedia jasa pembayaran layanan remitansi (PJP LR) di DKI Jakarta telah memanfaatkan sistem dalam penyelenggaraan layanannya. Kelompok penyelenggara tersebut mendominasi aktivitas industri remitansi di Jakarta dengan pangsa transaksi mencapai 98,35%, mencerminkan tingginya tingkat digitalisasi dan otomatisasi proses bisnis di sektor remitansi. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pemrosesan transaksi, tetapi juga memperluas integrasi dan pola kerja sama dalam ekosistem pembayaran.

Sejalan dengan itu, dinamika pengembangan usaha juga menunjukkan peningkatan signifikan. Sepanjang 2025, KPwBI Provinsi DKI Jakarta menerima 73 permohonan, meningkat 73% dibandingkan tahun

sebelumnya sebanyak 42 permohonan. Permohonan tersebut mencakup kerja sama usaha, pengembangan produk dan sistem, aksi korporasi, serta perubahan struktur kepemilikan. Lonjakan ini menegaskan semakin aktif dan adaptifnya pelaku industri dalam merespons peluang pasar serta percepatan transformasi digital.

Di sisi lain, peningkatan kompleksitas dan interkoneksi turut memperluas spektrum risiko. Otomatisasi sistem dan skema kerja sama berjenjang meningkatkan eksposur terhadap risiko fraud, risiko operasional dan keamanan siber, risiko pelindungan data pribadi, serta risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme (APU PPT). Berdasarkan siaran pers Otoritas Jasa Keuangan tahun 2025, tercatat 225.281 kasus fraud dengan nilai kerugian mencapai Rp4,6 triliun pada industri SP secara nasional. Angka tersebut menegaskan urgensi adanya strategi pengawasan yang dapat merespon tantangan pada percepatan digitalisasi industri.



Sumber : BPS, diolah

Grafik B4.1 Pertumbuhan ekonomi dan Konsumsi RT di Jakarta



Sumber : Kemnaker, data s.d Oktober 2025

Grafik B4.2 Jumlah Tenaga Kerja Ter-PHK di Jakarta



Gambar B4.1 Kerja Sama antar Kementerian dan Lembaga

Sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional, DKI Jakarta memerlukan strategi pengawasan terhadap industri SP yang semakin adaptif, terkoordinasi, dan berbasis risiko. Untuk menjaga integritas dan stabilitas industri, KPwBI DKI Jakarta memiliki strategi pengawasan melalui pendekatan komprehensif dan kolaboratif. Langkah tersebut mencakup pelaksanaan *joint audit* bersama PPAK untuk memperdalam pemeriksaan atas kepatuhan dan efektivitas penerapan prinsip APU PPT, forum koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga guna memperkuat pertukaran informasi antarotoritas, serta forum evaluasi tahunan pengawasan SP sebagai mekanisme pembelajaran kolektif untuk mendorong peningkatan kepatuhan dan meminimalkan temuan berulang. Peningkatan kualitas para pengawas dilengkapi pula dengan *capacity building* dan *coaching clinic* sistem pelaporan yang diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola, konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian, serta peningkatan kematangan industri (*industry maturity*).

Strategi pengawasan di daerah tersebut selaras dengan penyempurnaan kerangka pengaturan industri SP secara nasional melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Infrastruktur dan Sistem Pembayaran serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran pada akhir 2025, yang mulai diimplementasikan pada Triwulan I 2026. Penyempurnaan regulasi ini bertujuan menata industri SP dalam struktur yang lebih konsolidatif dan berdaya tahan, sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Ketentuan tersebut memperkenalkan penilaian pemenuhan kriteria Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur teknologi informasi (TIKMI) sebagai dasar penerapan prinsip *same activities, same risk, and same regulation*. Penilaian TIKMI menjadi acuan dalam proses perizinan, persetujuan, dan pengawasan, serta mensyaratkan pemenuhan ambang batas minimum oleh setiap penyelenggara. Selain itu, kewajiban penyampaian Rencana Bisnis Sistem Pembayaran (RBSP) secara tahunan dan *Strategic Business Plan* (SBP) secara tiga tahunan memperkuat disiplin perencanaan usaha dan memastikan keselarasan antara ekspansi bisnis dengan kapasitas manajemen risiko serta infrastruktur yang dimiliki. Evaluasi atas realisasi rencana tersebut menjadi bagian dari siklus pengawasan pada periode berikutnya.

Dengan meningkatnya kompleksitas dan interkoneksi industri SP, strategi pengawasan yang sejalan dengan kerangka regulasi nasional menjadi pondasi penting dalam memastikan pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan. Pengawasan yang efektif dan penyempurnaan regulasi nasional diharapkan mampu memperkuat ketahanan industri, menjaga kepercayaan publik, serta mendukung stabilitas sistem pembayaran dan sistem keuangan secara keseluruhan.

## BAB 7

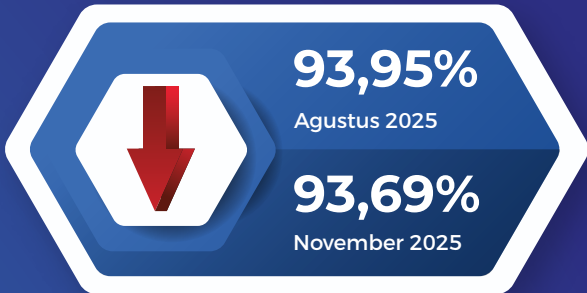
# KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN

Sejalan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja di DKI Jakarta periode November 2025 relatif stabil pada level 93,69% meskipun sedikit menurun dibandingkan Agustus 2025 sebesar 93,95%. Berdasarkan status pekerjaan utama, sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Dari sisi LU, peningkatan serapan tenaga kerja terutama terjadi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran. Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, LU Jasa Lainnya.

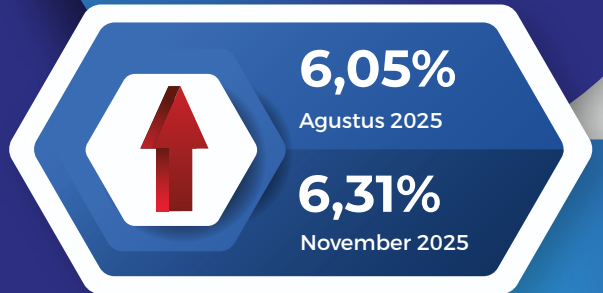
Sementara itu, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga mengalami penurunan menjadi 4,03% pada September 2025, dibandingkan September 2024 yang sebesar 4,14%. Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada September 2025 berada pada level 8,25%. Menurunnya tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial antara lain melalui program pemberian subsidi pangan dan transportasi serta pemberian bantuan sosial bagi warga penerima manfaat.



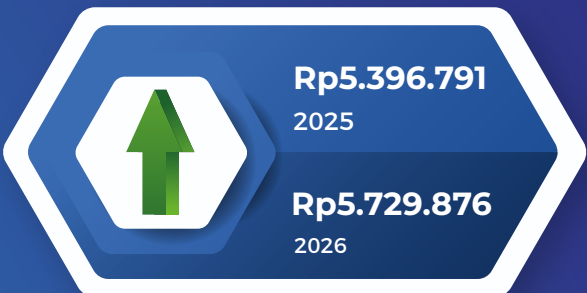
### Tingkat Kesempatan Kerja



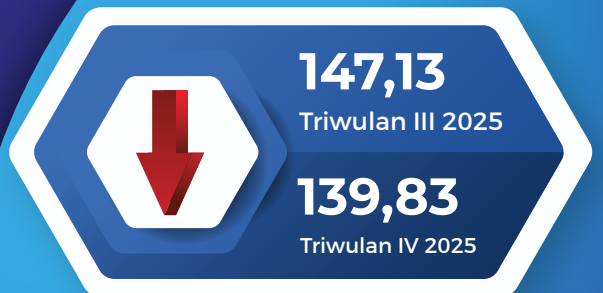
### Tingkat Pengangguran Terbuka



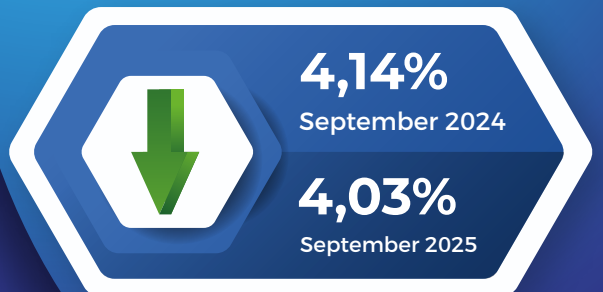
### Upah Minimum Provinsi (UMP)



### Indeks Penghasilan Konsumen



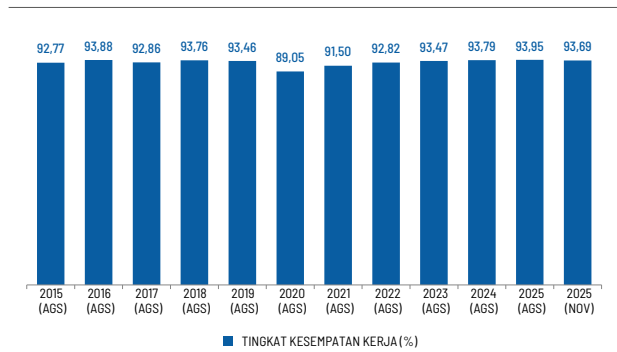
### Presentase Penduduk Miskin



## A. KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan per November 2025, jumlah angkatan kerja di DKI Jakarta tercatat sebanyak 5,53 juta, meningkat dibandingkan Agustus 2025 yang sebanyak 5,46 juta. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah angkatan kerja yang bekerja di DKI Jakarta pada November 2025 sebanyak 5,18 juta orang, lebih tinggi dibandingkan periode Agustus 2025 yang sebesar 5,13 juta orang (Grafik 7.1 dan Tabel 7.1). Dengan demikian, rasio serapan tenaga kerja relatif stabil di sekitar 93,69% meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan periode Agustus 2025 yang sebesar 93,95% (Grafik 7.2). Kondisi ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja sudah cukup baik namun masih dapat dioptimalkan.

Kondisi pekerja di Jakarta didominasi oleh pekerja penuh yaitu penduduk yang bekerja dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu dengan pangsa sebesar 81,47%. Sementara itu, sisanya merupakan pekerja tidak penuh yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu), dengan pangsa sebesar 18,53%. Dibandingkan Agustus 2025, presentase pekerja penuh mengalami penurunan sebesar 1,97 persen poin.



Sumber: BPS, diolah

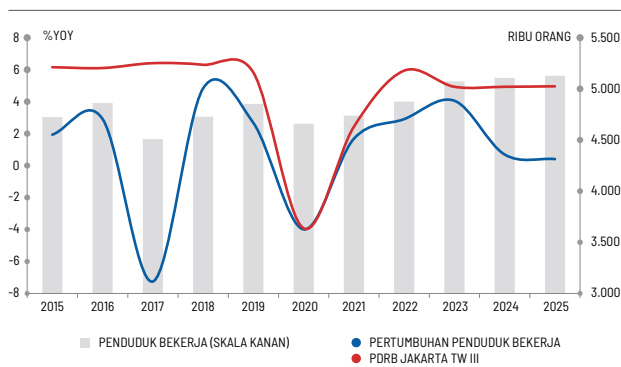
Grafik 7.2 Persentase Penyerapan Suplai Tenaga Kerja

Di sisi lain, sektor formal juga masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta yakni sebanyak 63,43% dari total pekerja dan sisanya sebanyak 36,57% bekerja pada sektor informal. Jumlah pekerja sektor formal pada November 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,04% dibandingkan periode Agustus 2025. Peningkatan ini juga tercermin dari kenaikan pangsa pekerja formal sebesar 0,06 persen poin dibandingkan Agustus 2025 (Grafik 7.4). Sementara itu, jumlah pekerja sektor informal tumbuh sebesar 0,79%, melambat dibandingkan pertumbuhan pada periode Agustus 2025.

Tabel 7.1 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan

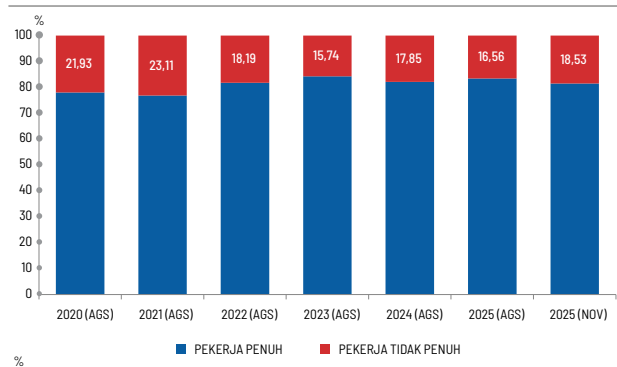
KEADAAN KETENAGAKERJAAN	2023		2024		2025		
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	NOVEMBER
Penduduk Usia Kerja (ribu orang)	8.332,26	8.322,91	8.339,08	8.364,83	8.373,46	8.430,62	8.440,62
Angkatan Kerja (ribu orang)	5.255,24	5.427,23	5.434,37	5.445,77	5.476,00	5.458,80	5.526,10
Bekerja (ribu orang)	4.857,62	5.072,74	5.106,78	5.107,78	5.137,60	5.128,46	5.177,13
Pengangguran (ribu orang)	397,62	354,49	327,59	337,99	338,39	330,34	348,97
Bukan Angkatan Kerja (ribu orang)	3.077,02	2.895,68	2.904,71	2.919,06	2.897,46	2.971,82	2.914,52
Pekerja Sektor Formal (ribu orang)	3.167,99	3.234,64	3.265,17	3.253,39	3.187,79	3.249,98	3.283,77
Pekerja Sektor Informal (ribu orang)	1.689,63	1.838,10	1.841,61	1.854,39	1.949,81	1.878,48	1.893,36
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63,07	65,21	65,17	65,10	65,40	64,75	65,47
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	92,43	93,47	93,97	93,79	93,82	93,95	93,69
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,57	6,53	6,03	6,21	6,18	6,05	6,31

Sumber: BPS, diolah



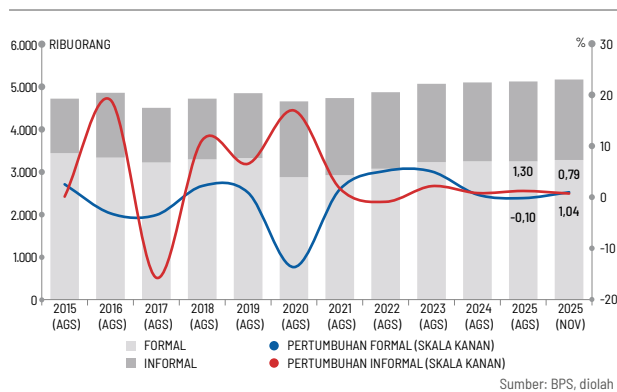
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.1 Pertumbuhan Jumlah Orang Bekerja dan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta



Sumber: BPS, diolah

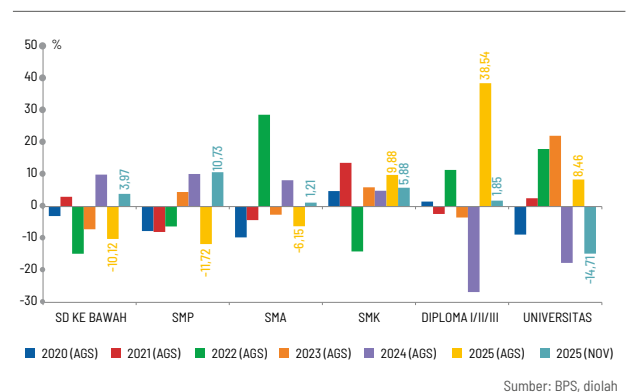
Grafik 7.3 Proporsi Penduduk Bekerja Berdasarkan Jam Kerja



Grafik 7.4 Proporsi dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Ditinjau dari status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yang termasuk dalam kategori pekerja sektor formal, masih mendominasi total penduduk bekerja di DKI Jakarta, yakni lebih dari 3,11 juta orang. Status berusaha sendiri yang termasuk dalam kategori pekerja sektor informal menempati urutan kedua, yakni lebih dari 1,2 juta orang (Tabel 7.2).

Berdasarkan tingkat pendidikan, penyerapan tenaga kerja dari lulusan SMA mendominasi penduduk bekerja pada periode laporan. Jumlah tenaga kerja yang menamatkan pendidikan hingga tamat SMA memiliki



Grafik 7.6 Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan

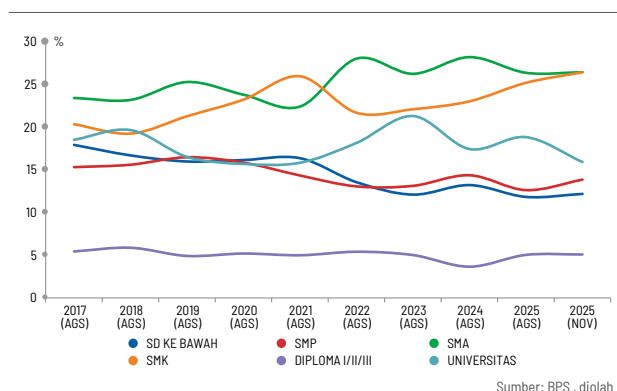
pangsa sebesar 26,46% terhadap total penduduk bekerja, meningkat 1,21% dari periode Agustus 2025. Peringkat kedua diduduki oleh tenaga kerja yang merupakan lulusan SMK dengan pangsa sebesar 26,45%.

Dibandingkan Agustus 2025, pangsa tenaga kerja lulusan SMK meningkat 2,17 persen poin, lulusan universitas meningkat 1,40 persen poin, dan lulusan Diploma I/II/III meningkat 1,39 persen poin. Sementara itu, pangsa tenaga kerja lulusan SMA, SMP, dan SD ke bawah masing-masing turun sebesar 1,84 persen poin, 1,74 persen poin, dan 1,39 persen poin.

Tabel 7.2 Perkembangan Status Pekerjaan Utama

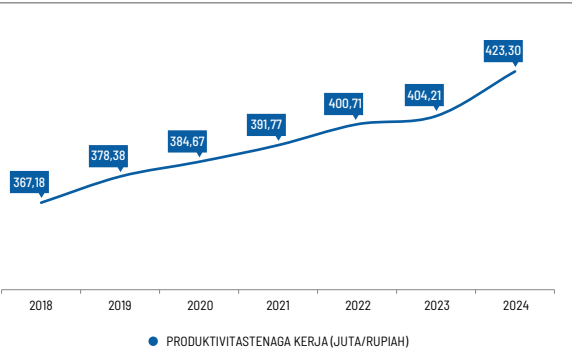
STATUS PEKERJAAN UTAMA (ribu orang)	2023		2024		2025		
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	NOVEMBER
Pekerja Sektor Formal	3.167,99	3.234,64	3.265,17	3.253,39	3.187,79	3.249,98	3.283,77
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	269,38	186,11	306,94	193,65	192,65	166,87	170,38
Buruh/karyawan/pegawai	2.898,61	3.048,53	2.958,23	3.059,74	2.995,14	3.083,12	3.113,39
Pekerja Sektor Informal	1.689,63	1.838,10	1.841,61	1.854,39	1.949,81	1.878,48	1.893,36
Berusaha sendiri	1.084,94	1.162,88	1.115,36	1.173,98	1.200,29	1.211,85	1.229,45
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	253,32	248,45	343,32	267,78	337,16	300,82	302,22
Pekerja bebas pertanian	-	1,55	-	1,49	-	0,78	-
Pekerja bebas non pertanian	90,72	140,26	121,92	127,23	123,51	114,42	114,94
Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga	260,65	284,95	261,01	283,91	288,85	250,62	246,75

Sumber: BPS, diolah



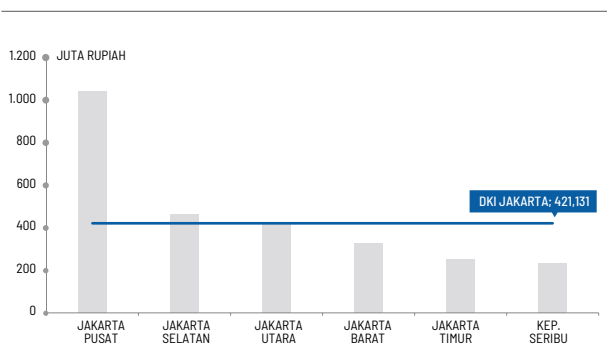
Grafik 7.5 Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Lebih lanjut, tingkat pendidikan tenaga kerja yang membaik tersebut turut mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja di DKI Jakarta. Pada tahun 2024, produktivitas tenaga kerja DKI Jakarta tercatat sebesar Rp421,13 juta rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp404,21 juta rupiah (Grafik 7.7). Produktivitas tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan perbedaan antarwilayah. Tercatat tiga kota dengan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. (Grafik 7.8).



Sumber: Disnakertrans DKI Jakarta

Grafik 7.7 Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta (Juta Rupiah)

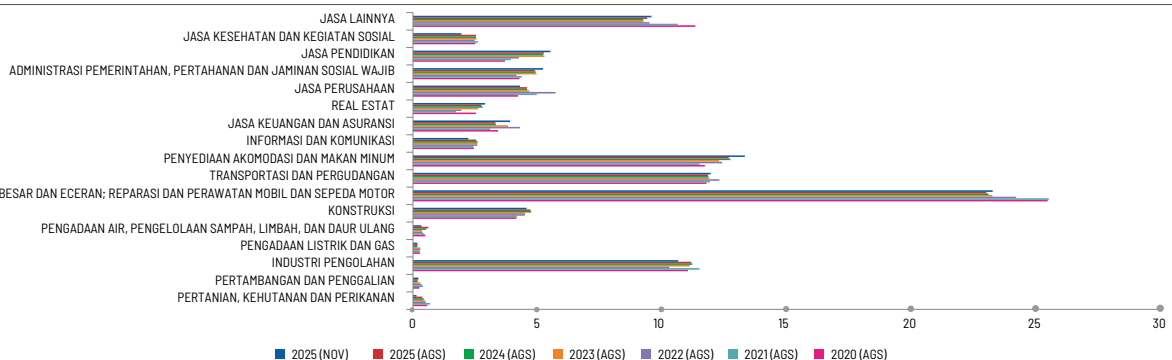


Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.8 Produktivitas TK menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2024 (Juta Rupiah)

Dari sisi lapangan usaha (LU), penyerapan tenaga kerja terbesar terdapat pada LU Perdagangan Besar dan Eceran sejalan dengan pertumbuhan positif sektor tersebut. Pangsa serapan tenaga kerja pada LU Perdagangan Besar dan Eceran mencapai 23,22% terhadap total penduduk bekerja Agustus 2025. Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum (13,29%), LU Transportasi dan Pergudangan (11,92%), LU Industri Pengolahan (10,63%), LU Jasa Lainnya (9,55%) (Grafik 7.9).

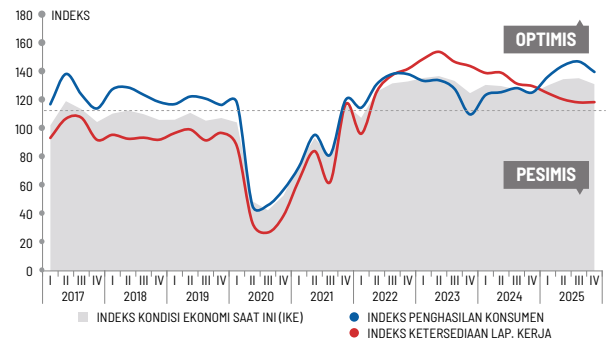
Sejalan dengan sedikit menurunnya Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), rasio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode November 2025 tercatat sebesar 6,31%, meningkat dibandingkan periode Agustus 2025 yang sebesar 6,05%. Artinya dari 100 orang yang bekerja terdapat sekitar 6 orang yang menganggur atau belum memperoleh pekerjaan. Meskipun demikian, masyarakat optimis terhadap



Sumber: BPS, diolah

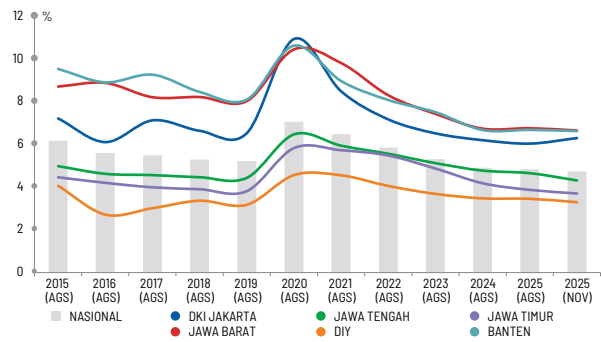
Grafik 7.9 Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha

perbaiki kondisi ekonomi pada akhir tahun 2025 sebagaimana tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa indeks ketersediaan lapangan kerja pada triwulan IV 2025 sebesar 118,67, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 118,47. Adapun indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan indeks penghasilan konsumen tetap baik, di atas batas level optimis (100) pada triwulan IV 2025 (Grafik 7.10). Level TPT di DKI Jakarta masih lebih tinggi dibandingkan Nasional dan berada di posisi ketiga tertinggi di wilayah Jawa setelah Banten dan Jawa Barat (Grafik 7.11).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 7.10 Indeks Kondisi Ekonomi, Penghasilan, dan Ketersediaan Lapangan Kerja



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta

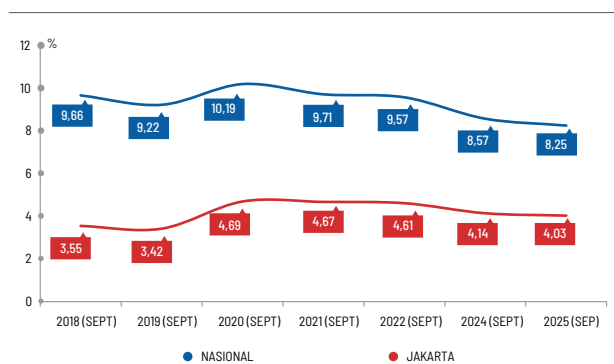
## B. KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta mengalami penurunan. Berdasarkan data September 2025, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta tercatat sebesar 4,03%, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 4,14% (Tabel 7.3). Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat lebih

rendah dibandingkan Nasional yang pada September 2025 berada pada level 8,25% (Grafik 7.12). Tingkat kemiskinan sempat meningkat pada awal pandemi dan mencapai 10,19% secara nasional serta 4,69% di DKI Jakarta pada September 2020, sebelum kemudian menurun secara bertahap hingga September 2025. Capaian September 2025 merupakan tingkat kemiskinan terendah sejak periode pandemi COVID -19, meskipun masih sedikit lebih tinggi dibandingkan level prapandemi. Menurunnya tingkat kemiskinan pada September 2025 sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian DKI Jakarta pada triwulan III 2025 yang tumbuh 4,96% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2024 sebesar 4,93% (yoy) (Grafik 7.13). Program bantuan dari Pemerintah Pusat meliputi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP),

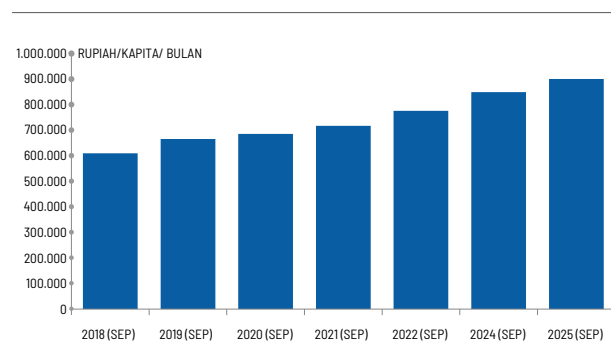
dan berbagai program lainnya. Di tingkat daerah, penurunan tingkat kemiskinan ini menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial antara lain Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Jamkesda, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), serta Program Bantuan Pangan, dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD). Selain itu, Pemprov DKI memberikan insentif bagi pelaku UMKM, membebaskan biaya sewa bagi penghuni rusunawa, serta menyediakan pelatihan kerja gratis melalui Balai Latihan Kerja.

Angka Garis Kemiskinan (GK) terus mengalami kenaikan. Angka Garis Kemiskinan (GK) Provinsi DKI Jakarta pada September 2025 tercatat



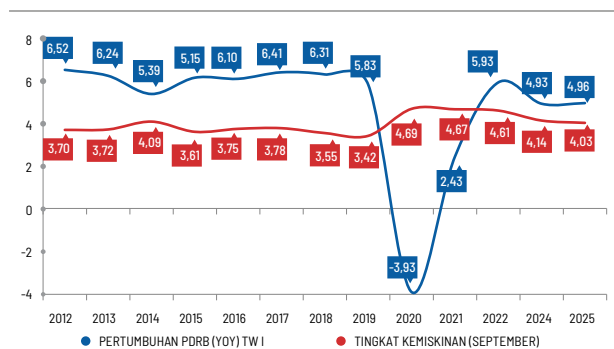
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.12 Tingkat Kemiskinan Jakarta dan Nasional



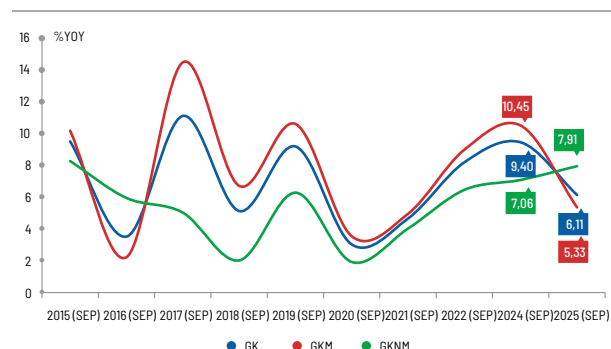
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.14 Garis Kemiskinan DKI Jakarta



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.13 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.15 Pertumbuhan Garis Kemiskinan, Garis Kemiskinan Makanan, dan Garis Kemiskinan Non Makanan

Tabel 7.3 Profil Kemiskinan DKI Jakarta

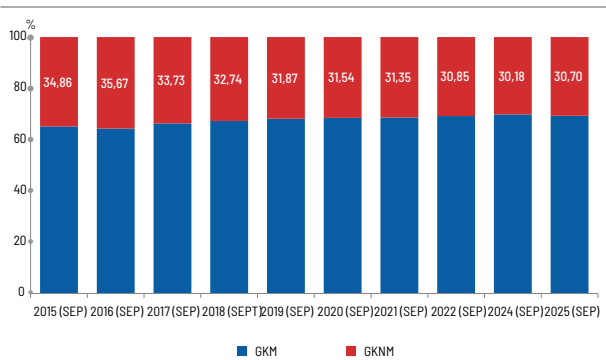
PROFIL KEMISKINAN DKI JAKARTA	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	MARET	SEPTEMBER	MARET	SEPTEMBER	MARET	SEPTEMBER	MARET	MARET	SEPTEMBER	MARET	SEPTEMBER	
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	480,86	496,84	501,92	498,29	502,04	494,93	477,83	464,93	449,07	464,87	439,12	
Presentase Penduduk Miskin (%)	4,53	4,69	4,72	4,67	4,69	4,61	4,44	4,30	4,14	4,28	4,03	
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	680.401	683.339	697.638	715.052	738.955	773.370	792.515	825.288	846.085	852.768	897.768	
Makanan	466.156	467.847	479.332	490.918	508.239	534.819	548.628	571.647	590.704	591.933	622.175	
Non Makanan	214.245	215.491	218.306	224.134	230.716	238.551	243.887	253.641	255.381	260.835	275.593	
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,59	0,67	0,64	0,75	0,77	0,68	0,70	0,65	0,55	0,57	0,49	
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,11	0,15	0,14	0,18	0,19	0,16	0,18	0,13	0,11	0,11	0,10	

Sumber: BPS, diolah

sebesar Rp897.768 per kapita per bulan atau mengalami peningkatan sebesar 6,11% (yoy) dari angka GK September 2024 yang tercatat Rp846.085 per kapita per bulan (Grafik 7.14 dan Grafik 7.15).

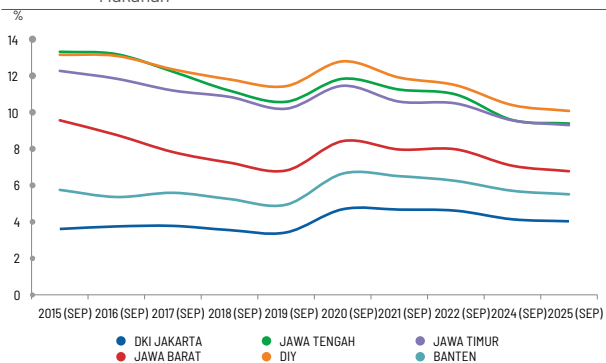
Dari sisi komoditas, peningkatan GK DKI Jakarta lebih dipengaruhi oleh komoditas makanan dibandingkan peranan komoditas non makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2025 sebesar 69,30% sedangkan sumbangan GKNM terhadap GK sebesar 30,70% (Grafik 7.16).

Tingkat kemiskinan di semua provinsi di Jawa tercatat menurun pada periode September 2025. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling rendah di pulau Jawa yang kemudian diikuti oleh Provinsi Banten dan Jawa Barat (Grafik 7.17).



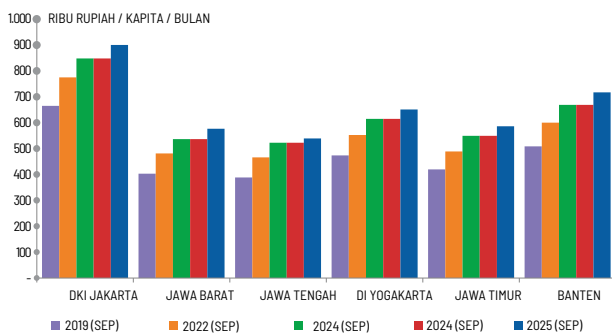
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.16 Porsi Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan



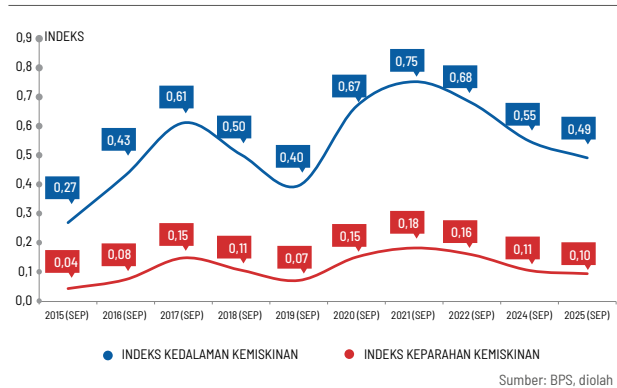
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.17 Tingkat Kemiskinan Provinsi di Jawa



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.18 Garis Kemiskinan Provinsi di Jawa



Sumber: BPS, diolah

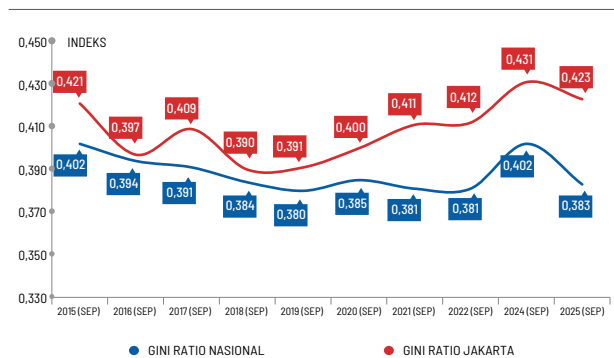
Grafik 7.19 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Garis kemiskinan di Jakarta tercatat tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, sementara Jawa Tengah merupakan provinsi di Jawa dengan level garis kemiskinan terendah pada September 2025 (Grafik 7.18).

Di tengah penurunan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan DKI Jakarta periode September 2025 juga mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan DKI Jakarta periode September 2025 masing-masing sebesar 0,49 dan 0,10 lebih rendah dibandingkan September 2024 yang masing-masing sebesar 0,55 dan 0,11 (Grafik 7.19). Kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengalami penurunan, tercermin dari indeks kedalaman kemiskinan yang menurun. Sementara itu, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin mengalami penurunan, tercermin dari indeks keparahan kemiskinan.

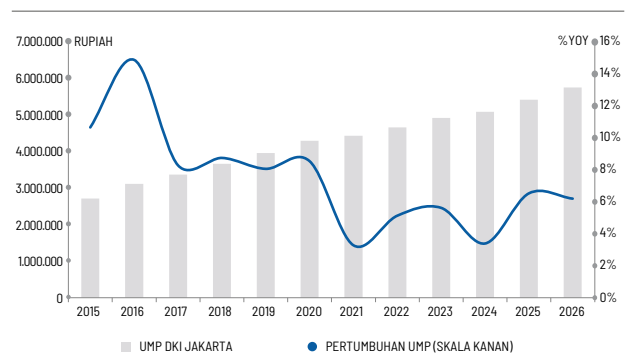
Meskipun tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada September 2025 menurun, namun ketimpangan masih tinggi seiring kenaikan rasio gini. *Gap* antara pengeluaran penduduk pada kelas bawah dan kelas atas semakin tinggi, menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan penduduk. Indeks Rasio Gini DKI Jakarta tercatat 0,423. Indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,431 (Grafik 7.20). Indeks rasio gini tersebut juga di atas capaian nasional yang sebesar 0,383. Dari sisi nilai indeks, ketimpangan di DKI Jakarta termasuk dalam kategori sedang, melihat nilainya berada pada rentang 0,4-0,5.

Ketimpangan pendapatan antara kelompok pendapatan terendah dan kelompok pendapatan tertinggi masih cukup besar sebagaimana tercermin dari ketimpangan pengeluaran penduduk. Proporsi pengeluaran penduduk pada kelompok 40% terendah terhadap total pengeluaran seluruh penduduk, yakni sebesar 16,97% pada September 2025 (Grafik 7.21). Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan September 2024 yakni sebesar 16,15%. Sementara itu, kontribusi pengeluaran kelompok 20 persen teratas mengalami penurunan dari 51,14% menjadi 51,10%. Apabila fokus penanganan kemiskinan dapat lebih ditujukan untuk mendorong peningkatan alokasi kepada 40% masyarakat dengan pengeluaran terendah, maka perbaikan kondisi ketimpangan perlahan dapat membaik.



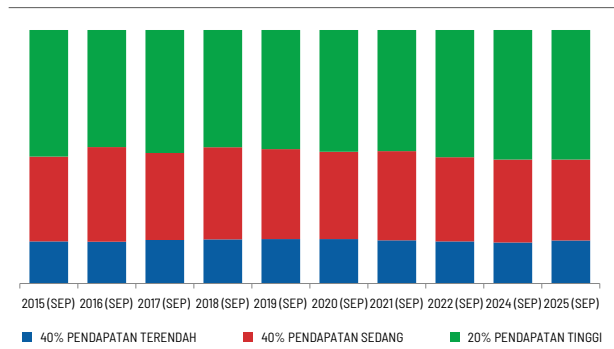
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.20 Rasio Gini Jakarta dan Nasional



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.22 Perkembangan UMP DKI Jakarta



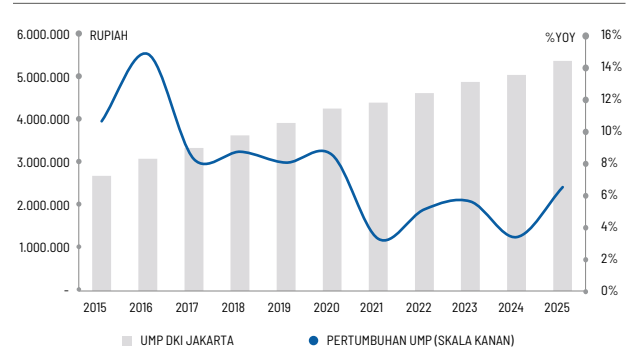
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.21 Distribusi Pendapatan DKI Jakarta

## D. UPAH TENAGA KERJA

Pada tahun 2025, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta kembali mengalami kenaikan. UMP DKI Jakarta telah ditetapkan sebesar Rp5.396.761, meningkat 6,5% dibandingkan tahun 2024 (Rp5.067.381) (Grafik 7.24). Ketetapan tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta 829/2024 tentang UMP Jakarta 2024 tanggal 10 Desember 2024.

UMP DKI Jakarta untuk tahun 2025 menduduki peringkat tertinggi di Indonesia, kenaikan UMP yang cukup besar ini mencerminkan tekad Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat dukungan terhadap kesejahteraan pekerja dalam menghadapi tantangan ekonomi.



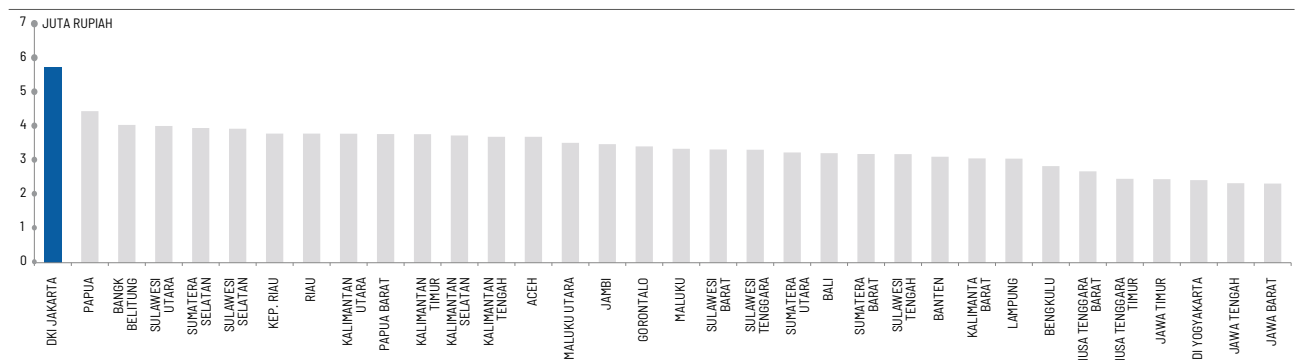
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.24 Perkembangan UMP DKI Jakarta

## C. UPAH TENAGA KERJA

Pada tahun 2026, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta kembali mengalami kenaikan. UMP DKI Jakarta telah ditetapkan sebesar Rp5.729.876, meningkat 6,2% dibandingkan tahun 2025 (Rp5.396.761) (Grafik 7.22). Ketetapan tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta 1142/2025 tentang UMP Jakarta 2026 tanggal 23 Desember 2025.

UMP DKI Jakarta untuk tahun 2025 menduduki peringkat tertinggi di Indonesia, kenaikan UMP yang cukup besar ini mencerminkan tekad Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat dukungan terhadap kesejahteraan pekerja dalam menghadapi tantangan ekonomi.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.23 UMP Provinsi di Indonesia

## BAB 8

# PROSPEK PEREKONOMIAN

Pada 2026, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan tetap tumbuh kuat pada kisaran 4,9–5,7% (yoy), meskipun terdapat risiko penurunan seiring dinamika global dan meningkatnya ketidakpastian. Dari sisi pengeluaran, penguatan ekonomi Jakarta terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan menguat seiring membaiknya daya beli masyarakat, antara lain didukung kenaikan UMP, serta keberlanjutan dukungan kebijakan Pemerintah melalui berbagai stimulus dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli, khususnya pada kelompok rentan. Selain itu, momentum musiman dan meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode tertentu juga berpotensi mendorong konsumsi jasa perkotaan seperti perdagangan, transportasi, serta akomodasi dan makan minum. Meningkatnya investasi sejalan dengan berlanjutnya realisasi proyek strategis pemerintah yang bersifat multitalun seperti MRT Fase 2A, LRT Fase 1B, dan dimulainya pembebasan lahan MRT East West Line. Di samping itu, komitmen realisasi investasi swasta tetap terjaga, khususnya pada lapangan usaha properti, transportasi, dan jasa perkotaan, meskipun pelaku usaha masih mencermati dinamika ekonomi global. Konsumsi Pemerintah pada 2026 juga diperkirakan tetap tumbuh positif dan cenderung meningkat, didukung oleh keberlanjutan belanja APBD yang difokuskan pada layanan publik/pembangunan meski disertai efisiensi belanja rutin. Selain itu, belanja APBN di DKI diperkirakan lebih akseleratif dan periodisasinya lebih merata sepanjang tahun, sehingga turut memperkuat konsumsi pemerintah. Ekspor diperkirakan tetap tumbuh positif meski diperkirakan tidak setinggi tahun sebelumnya seiring moderasi permintaan global, perlambatan mitra dagang utama, meningkatnya tensi dan perang di kawasan Timur Tengah, serta ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional (termasuk dinamika tarif resiprokal AS).

Dari sisi lapangan usaha (LU) perekonomian DKI Jakarta pada 2026 masih akan ditopang oleh pertumbuhan positif 5 (lima) lapangan usaha ekonomi utama yaitu perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, jasa perusahaan, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Namun demikian, beberapa risiko yang perlu dicermati yang dapat menahan perbaikan lebih lanjut utamanya yaitu dinamika ekonomi global, berlanjutnya ketegangan tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah, fragmentasi perdagangan serta dinamika kebijakan AS.

Dari sisi harga, inflasi DKI Jakarta pada 2026 diperkirakan akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi  $2,5 \pm 1\%$  (yoy). Prakiraan tersebut terutama didukung oleh implementasi berbagai kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, serta penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).



**Proyeksi Ekonomi Global  
WEO IMF (yoy)**



**3,3%**

Tahun 2026, yoy

**3,1%**

Tahun 2025, yoy

**Proyeksi Pertumbuhan Volume  
Perdagangan Dunia WEO IMF (yoy)**



**2,6%**

Tahun 2026, yoy

**2,3%**

Tahun 2025, yoy

**Proyeksi Pertumbuhan  
Ekonomi DKI Jakarta (yoy)**

**4,9% - 5,7%**

Tahun 2026, yoy

**Proyeksi Inflasi IHK  
DKI Jakarta**

**2,5% ± 1%**

Tahun 2026, yoy

## A. PROSPEK PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

### Prospek Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diperkirakan masih dibayangi ketidakpastian dan cenderung melambat dibandingkan proyeksi sebelumnya. Pelemahan prospek tersebut turut dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik pada awal 2026, khususnya di Kawasan Timur Tengah (tabel 8.1). IMF memproyeksikan pertumbuhan global bertahan di 3,3% pada 2026, sejalan dengan capaian 2025, dengan sumber pertumbuhan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang relatif terbatas seperti investasi teknologi/*Artificial Intelligence* (AI). Namun, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah memberikan risiko perlambatan melalui potensi gangguan rantai pasok dan tekanan harga energi yang dapat menekan daya beli serta menahan aktivitas investasi. Sejalan dengan itu, World Bank dan OECD menekankan bahwa prospek global tetap *subdued* dan *highly uncertain*.

Dari sisi perdagangan, hambatan utama prospek global masih berasal dari tarif, *trade barriers*, dan ketidakpastian kebijakan perdagangan. IMF menegaskan *baseline* proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tetap berbasis *trade policy* yang berlaku saat ini dan mengasumsikan *economic policy uncertainty* tetap tinggi hingga 2026, sejalan itu World Bank memperkirakan perlambatan 2026 didorong dampak tertunda dari hambatan perdagangan yang melemahkan permintaan barang *tradable* dan menahan konsumsi serta investasi. OECD juga menekankan bahwa kenaikan *trade policy uncertainty* dapat menghambat perdagangan dan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, meski ketegangan dagang sempat mereda, prospek global masih rentan terhadap *flare-up* kebijakan tarif dan retaliasi yang dapat menambah friksi rantai pasok dan meningkatkan sentimen negatif.

Perekonomian AS diperkirakan melambat dibanding 2024, namun relatif solid pada 2026 seiring dukungan kebijakan fiskal dan pelonggaran suku bunga. IMF memproyeksikan pertumbuhan AS 2,4% pada 2026, ditopang stimulus fiskal dan penurunan *policy rate*, sementara dampak *trade barriers* secara bertahap mereda. Meski demikian, pertumbuhan AS tetap rentan karena sumber pertumbuhan relatif terkonsentrasi pada sektor tertentu (terutama investasi teknologi/*Artificial Intelligence*), sehingga perubahan sentimen atau koreksi pasar pada sektor tersebut berpotensi menular ke konsumsi dan investasi. Dukungan fiskal menjadi salah satu bantalan aktivitas ekonomi AS, termasuk insentif pajak bagi investasi korporasi sebagaimana disebut IMF. Di sisi lain, *government shutdown* yang terjadi pada akhir 2025 menjadi pengingat bahwa dinamika politik domestik dapat meningkatkan *uncertainty* dan memengaruhi ritme permintaan domestik, meski dampaknya pada *baseline* 2026 diperkirakan terbatas. Dari sisi inflasi, tekanan harga global diperkirakan menurun, IMF menilai penurunan inflasi di AS relatif lebih gradual dibanding ekonomi besar lainnya, sejalan dengan *pass-through* tarif yang berpotensi *materialize* bertahap. Dengan kondisi tersebut, ruang penurunan suku bunga kebijakan di AS cenderung dilakukan lebih berhati-hati dan tetap data dependen, sehingga berpotensi menjaga *yield* tetap tinggi dan memengaruhi arus modal global.

Di Kawasan Euro, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap lemah namun stabil, mencerminkan pemulihan yang berjalan tetapi masih dibayangi hambatan struktural. IMF memproyeksikan pertumbuhan Kawasan Euro sekitar 1,3% pada 2026, sedikit lebih rendah dari 1,4% pada 2025, dengan dukungan peningkatan belanja publik (khususnya Jerman) dan performa yang lebih baik di beberapa negara. Namun, manfaat dorongan investasi teknologi relatif lebih kecil dibanding AS, sementara tekanan dari dampak kenaikan energi dan ketidakpastian perdagangan masih menahan sektor manufaktur dan ekspor barang.

Tabel 8.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen (yoy))

	REALISASI	ESTIMASI	WEO IMF		WORLD BANK		OECD		PROYEKSI BI
	2024	2025	OCT-25	JAN-26	JUN-25	JAN-26	JUN-25	JAN-26	2025
			2026	2026	2026	2026	2026	2026	
Dunia	3,3	3,3	3,1	△ 3,3	2,4	△ 2,6	2,9	△ 2,9	3,3
Negara Maju	1,8	1,7	1,6	△ 1,8	1,4	△ 1,6			1,7
Amerika Serikat	2,8	2,1	2,1	△ 2,4	1,6	△ 2,2	1,5	△ 1,7	2,1
Kawasan Euro	0,9	1,4	1,1	△ 1,3	0,8	△ 0,9	1,2	△ 1,2	1,3
Jepang	0,1	1,1	0,6	△ 0,7	0,8	0,8	0,4	△ 0,9	1,1
Negara Berkembang	4,3	4,4	4,0	△ 4,2	3,8	△ 4,0			4,3
Tiongkok	5,0	5,0	4,2	4,5	4,0	4,4	4,3	△ 4,4	5,0
India	6,5	7,3	6,2	△ 6,4	6,5	△ 6,5	6,4	△ 6,2	7,4
Volume Perdagangan Dunia	3,6	4,1	2,3	△ 2,6	2,4	△ 2,2	2,2	△ 2,3	
Harga Minyak (USD)	-1,8	-14,2	-4,5	▽ -8,5	61	▽ 60			

Sumber: World Economic Outlook (WEO) IMF, World Bank, OECD

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan termoderasi pada 2026. IMF memproyeksikan pertumbuhan Jepang turun dari sekitar 1,1% pada 2025 menjadi 0,7% pada 2026, meski terdapat potensi revisi kecil ke atas karena adanya paket stimulus fiskal oleh pemerintah baru. Ke depan, kinerja Jepang tetap dipengaruhi kombinasi pemulihan permintaan domestik dan sensitivitas tinggi terhadap permintaan eksternal serta ketidakpastian perdagangan global.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2026 diperkirakan melambat, terutama karena lemahnya permintaan domestik, khususnya sektor perumahan meski ekspor masih cukup resilien. Perlambatan juga dipengaruhi oleh semakin tingginya ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat serta tertahannya pertumbuhan konsumsi RT. IMF merevisi proyeksi Tiongkok menjadi 5,0% pada 2025 dan 4,5% pada 2026, dengan ditopang stimulus dan tambahan pembiayaan kebijakan untuk investasi, namun perlambatan mencerminkan hambatan struktural yang tetap kuat

Perekonomian India diperkirakan tetap tumbuh tinggi dan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan global. IMF memproyeksikan pertumbuhan India moderasi ke 6,4% pada 2026-2027 seiring mudarnya faktor siklikal/temporer, selain itu juga terdapat perbaikan konsumsi domestik dan ekspansi manufaktur, meskipun belanja fiskal cenderung menurun seiring konsolidasi fiskal, namun tetap berada pada level yang kuat secara global.

### Prospek Perekonomian Nasional

Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan berada pada kisaran 4,9-5,7% (yoy) (Tabel 8.2), meskipun terdapat risiko bias bawah seiring dinamika global dan meningkatnya ketidakpastian. Prospek ini terutama dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi global terkini serta dengan mencermati kinerja ekonomi domestik yang tetap solid pada 2025. Pertumbuhan 2026 terutama ditopang oleh permintaan domestik, dengan investasi tetap berperan penting didorong investasi Pemerintah khususnya agenda hilirisasi serta didukung perbaikan keyakinan dunia usaha. Konsumsi rumah tangga diperkirakan menguat secara bertahap seiring membaiknya ekspektasi dan momentum musiman HBKN (Imlek-Nyepi-Idulfitri) di awal tahun yang mendorong belanja masyarakat. Selain itu, insentif fiskal dan bantuan sosial yang tetap dipertahankan pada 2026 diperkirakan membantu menjaga daya beli dibandingkan tahun sebelumnya. Konsumsi pemerintah juga berpotensi menjadi penopang tambahan apabila realisasi belanja program prioritas berjalan lebih merata dan tepat sasaran, sehingga memperkuat permintaan domestik.

Dari sisi investasi, kinerja pada 2026 diperkirakan tetap positif dan kuat, terutama melalui investasi Pemerintah yang mendorong peningkatan kapasitas produksi termasuk hilirisasi serta proyek-proyek prioritas yang masih berjalan. Perbaikan keyakinan dunia

usaha diperkirakan menopang keputusan ekspansi, sehingga investasi swasta tetap terjaga. Sejalan dengan itu, kebutuhan barang modal dan aktivitas produksi diperkirakan meningkat bertahap, selaras dengan penguatan permintaan domestik dan berlanjutnya kegiatan investasi. Secara spasial, dorongan investasi diperkirakan lebih kuat di wilayah dengan konsentrasi kawasan industri/KEK, terutama Jawa-Bali, sementara wilayah lain mengikuti dinamika sektor unggulan masing-masing.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan terus menguat, namun kualitas penguatannya perlu tetap dicermati. Momentum musiman HBKN memberi dorongan jangka pendek melalui peningkatan mobilitas dan belanja, sementara kebijakan Pemerintah melalui insentif dan bantuan sosial membantu menjaga daya beli, khususnya kelompok rentan. Meski demikian, penguatan konsumsi belum sepenuhnya merata karena sebagian rumah tangga masih sensitif terhadap dinamika pendapatan dan kondisi pasar kerja. Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli menjadi kunci agar konsumsi dapat menopang pertumbuhan.

Dari sisi fiskal, dukungan Pemerintah pada 2026 diperkirakan tetap berperan sebagai penopang pertumbuhan melalui pelaksanaan program prioritas dan upaya menjaga periodisasi belanja agar lebih merata. Pendorong tidak hanya pada besaran belanja, tetapi pada kualitas belanja yang lebih tepat sasaran, berorientasi layanan publik, dan ber-*multiplier* tinggi sehingga mampu memperkuat permintaan domestik tanpa menambah kerentanan. Dengan realisasi yang konsisten sepanjang tahun, program prioritas seperti MBG dan agenda pembangunan lainnya berpotensi memperkuat konsumsi pemerintah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di sektor-sektor terkait.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi nasional 2026 diperkirakan tetap ditopang sektor-sektor utama seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, Konstruksi, dan Pertanian. Industri Pengolahan dan Konstruksi diperkirakan menguat sejalan agenda hilirisasi, investasi, dan kelanjutan proyek, sementara perdagangan bergerak sejalan mengikuti konsumsi rumah tangga dan aktivitas musiman. Pertanian tetap berperan penting sebagai penyangga pasokan pangan dan stabilitas harga, terutama di tengah fokus ketahanan pangan yang masih menjadi perhatian.

Dari sisi eksternal, ekspor diperkirakan tetap tumbuh namun lebih moderat di tengah ketidakpastian global dan permintaan mitra dagang yang cenderung melambat, sehingga penguatan daya saing dan diversifikasi pasar/produk tetap relevan untuk menjaga ketahanan ekspor. Di sisi lain, impor diperkirakan meningkat seiring kebutuhan bahan baku industri dan barang modal untuk mendukung investasi dan produksi. Dengan kecenderungan tersebut, dinamika net ekspor perlu dicermati: ketika investasi dan produksi menguat, impor berpotensi meningkat lebih cepat, sehingga kontribusi sektor eksternal terhadap pertumbuhan dapat menjadi lebih netral tergantung ketahanan kinerja ekspor.

**Tabel 8.2** Proyeksi PDB Nasional

	SATUAN	2024				2024	2025				2025	2026*
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	5,05	4,95	5,02	5,03	4,87	5,12	5,04	5,39	5,11	4,9-5,7
Inflasi IHK	%	3,05	2,51	1,84	1,57	1,57	1,03	1,87	2,85	2,92	2,5±1	2,5±1
Kredit Perbankan	%	12,40	12,36	10,85	10,39	10,36	9,16	7,77	7,70	9,69	8-11	8-12

Sumber : BPS dan Proyeksi Bank Indonesia

Dari sisi harga, inflasi nasional pada tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1%. Perkembangan tersebut seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih memadai, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi pangan juga diperkirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional. Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2025 terkendali dalam sasaran 2,5±1%, dengan tetap mendukung upaya turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

## B. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI JAKARTA

Pada 2026, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diperkirakan tetap tumbuh kuat pada kisaran 4,9-5,7% (yoy) (Grafik 8.1). Prospek tersebut mencermati perekonomian domestik dan aktivitas ekonomi Jakarta yang diperkirakan tetap terjaga, namun terdapat risiko penurunan seiring dinamika global yang masih dibayangi ketidakpastian di tengah tingginya tensi perang di Kawasan Timur Tengah. Dengan karakter Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan jasa nasional, pertumbuhan 2026 diperkirakan ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik dan kelanjutan agenda investasi/proyek strategis, sambil tetap mewaspadai risiko eksternal yang dapat memengaruhi sentimen usaha dan kinerja perdagangan.

Dari sisi pengeluaran, meningkatnya perekonomian Jakarta pada 2026 terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan menguat bertahap seiring membaiknya daya beli masyarakat, antara lain didukung kenaikan UMP 6,17% yang meningkatkan pendapatan pekerja formal. Penguatan konsumsi juga diperkirakan terjadi pada periode-periode musiman, terutama rangkaian HBKN (Imlek-Nyepi-Ramadan/Idulfetri) yang disertai dengan peningkatan mobilitas, kunjungan keluarga, serta belanja kebutuhan pangan dan sandang. Selain itu, keberadaan rangkaian hari libur sepanjang tahun, termasuk momentum Natal dan Tahun Baru, juga diperkirakan mendorong konsumsi jasa perkotaan seperti akomodasi, makanan-minuman, rekreasi, serta transportasi. Dari sisi kebijakan, keberlanjutan program dukungan Pemerintah (stimulus/insentif dan bantuan sosial) diperkirakan tetap membantu

menjaga daya beli, terutama bagi kelompok rentan, sehingga konsumsi rumah tangga dapat tetap menjadi jangkar pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi.

Sejalan dengan itu, investasi diperkirakan tetap tumbuh positif pada 2026. Pendorong utama investasi masih berasal dari investasi bangunan seiring berlanjutnya realisasi proyek strategis pemerintah yang bersifat multitaluh, khususnya proyek transportasi massal perkotaan dan pengembangan kawasan. Pada 2026, investasi didukung oleh kelanjutan pembangunan MRT Fase 2A, proyek LRT Jakarta Fase 1B (menuju penyelesaian), pengembangan kawasan TOD yang memperkuat keterhubungan ekonomi perkotaan, serta dimulainya tahapan pembebasan lahan MRT *East-West Line*. Proyek-proyek ini tidak hanya mendorong investasi secara langsung, tetapi juga menimbulkan efek turunan melalui peningkatan permintaan bahan konstruksi, jasa penunjang, serta serapan tenaga kerja. Di samping itu, komitmen realisasi investasi swasta diperkirakan tetap terjaga, terutama pada sektor properti, transportasi, dan jasa perkotaan, meskipun pelaku usaha masih mencermati perkembangan eksternal.

Selain konsumsi rumah tangga dan investasi, konsumsi Pemerintah pada 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif dan cenderung meningkat, sehingga menjadi penopang tambahan permintaan domestik. Dari sisi APBD, Pemerintah Daerah tetap menekankan efisiensi belanja operasional rutin, namun menjaga alokasi belanja yang berdampak langsung pada layanan publik dan pembangunan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program sosial. Dari sisi APBN, belanja K/L di DKI diperkirakan lebih akseleratif dan periodisasinya lebih merata sepanjang tahun, sejalan dengan strategi peningkatan kualitas belanja (*spending better*) dan akselerasi belanja barang serta belanja modal. Keberlanjutan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan layanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, dan agenda pembangunan lainnya berpotensi memperkuat belanja pemerintah sepanjang tahun. Meski demikian, realisasi belanja tetap perlu dicermati karena dapat dipengaruhi oleh ruang fiskal, penyesuaian kebijakan, serta risiko administratif/pengadaan.

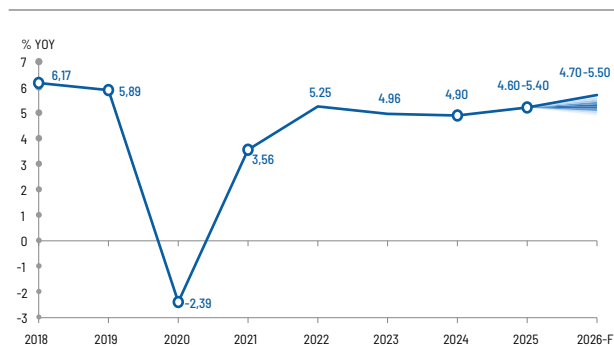
Dari sisi eksternal, ekspor DKI Jakarta pada 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif, namun cenderung lebih moderat dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi moderasi permintaan global, perlambatan mitra dagang utama, serta ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional, termasuk dinamika tarif resiprosal AS yang dapat meningkatkan volatilitas sentimen pasar. Dengan struktur ekspor Jakarta yang didominasi komoditas bernilai tinggi seperti logam mulia/perhiasan serta produk manufaktur yang berorientasi re-ekspor, kinerja ekspor relatif sensitif terhadap fluktuasi harga global dan perubahan sentimen risiko. Meski demikian, penguatan ekspor bernilai tambah dan diversifikasi pasar tujuan diperkirakan tetap menopang ekspor secara keseluruhan. Di sisi jasa, ekspor jasa diperkirakan tetap tumbuh seiring berlanjutnya aktivitas ekonomi

perkotaan, termasuk perjalanan bisnis dan penyelenggaraan MICE/event, meskipun perkembangannya dapat lebih selektif mengikuti dinamika global.

Sejalan dengan itu, impor DKI Jakarta diperkirakan tetap tumbuh dan berpotensi meningkat seiring menguatnya aktivitas investasi dan produksi. Peningkatan impor terutama bersumber dari kebutuhan barang modal dan bahan baku untuk mendukung proyek-proyek strategis, aktivitas konstruksi, serta kebutuhan sektor industri dan jasa perkotaan. Dengan kecenderungan ekspor yang lebih moderat dan impor yang meningkat karena dorongan investasi, kontribusi sektor eksternal terhadap pertumbuhan berpotensi menjadi lebih netral, sehingga pendorong utama pertumbuhan Jakarta pada 2026 tetap bertumpu pada kekuatan permintaan domestik.

Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2026 diperkirakan tetap ditopang oleh sektor-sektor utama yang mencerminkan dominasi aktivitas jasa dan perdagangan. Pertumbuhan diperkirakan terutama didorong oleh LU Perdagangan, LU Informasi dan Komunikasi, LU Jasa Perusahaan, LU Jasa Keuangan, serta LU Konstruksi, dengan dukungan dari LU Akomodasi dan Makan Minum serta LU Transportasi dan Pergudangan.

LU Perdagangan diperkirakan tetap tumbuh seiring penguatan konsumsi rumah tangga dan meningkatnya aktivitas masyarakat pada periode HBKN dan libur panjang, serta dukungan kegiatan MICE/event yang menjaga perputaran ekonomi ritel. LU Informasi dan Komunikasi diperkirakan tetap solid didorong peningkatan transaksi digital, kebutuhan layanan data yang stabil, serta transformasi digital lintas sektor (perdagangan, transportasi, keuangan, dan layanan publik). LU Jasa Perusahaan diperkirakan tumbuh kuat sejalan terjaganya aktivitas dunia usaha dan permintaan layanan profesional/korporasi, sedangkan LU Jasa Keuangan tetap kuat ditopang peningkatan intermediasi yang selaras dengan kebutuhan pembiayaan dunia usaha maupun rumah tangga. Adapun LU Konstruksi diperkirakan tetap tumbuh sejalan kelanjutan proyek transportasi massal dan pengembangan kawasan, yang pada gilirannya memperkuat keterkaitan dengan sektor perdagangan dan jasa penunjang.



Sumber: BPS, Proyeksi BI

Grafik 8.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2026

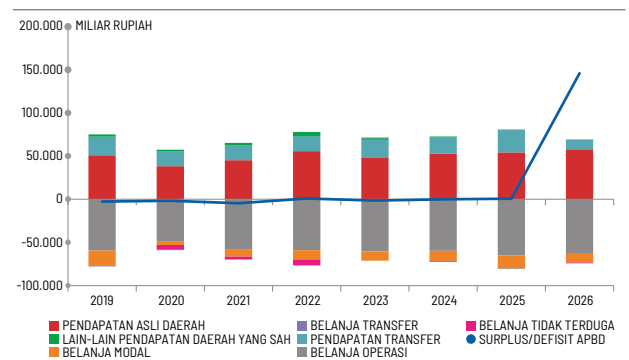
### Prospek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Belanja Kementerian Negara / Lembaga (K/L) di Provinsi DKI Jakarta 2026

Pada 2026, pagu anggaran APBD DKI Jakarta mengalami kontraksi sebesar 10,96% dari Rp91,34 triliun menjadi Rp81,32 triliun (Grafik 8.2). Dari sisi pendapatan, pagu RAPBD DKI Jakarta 2026 mengalami kontraksi sebesar 12,58% dibandingkan APBD 2025, yaitu dari Rp81,73 triliun menjadi Rp71,45 triliun. Penurunan pagu RAPBD DKI Jakarta 2026 dari sisi pendapatan terutama bersumber dari pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang mengalami kontraksi 57,29% dibandingkan APBD 2025, yaitu dari Rp26,13 triliun menjadi Rp11,15 triliun.

Dari sisi belanja, pagu APBD DKI Jakarta 2026 mengalami kontraksi sebesar 10,13% dibandingkan APBD 2025 dari Rp82,67 triliun menjadi Rp74,28 triliun. Berdasarkan komponennya, penurunan pagu belanja RAPBD DKI Jakarta 2026 terutama bersumber dari komponen belanja modal (kontraksi 33,48%) dan belanja operasional (kontraksi 2,68%).

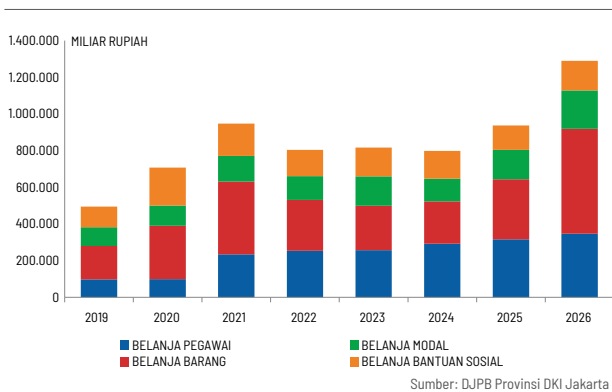
Dari sisi APBN di DKI Jakarta, alokasi anggaran tahun 2026 menunjukkan skala fiskal yang cukup kuat. Postur APBN yang dialokasikan di DKI Jakarta mencakup Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.852,55 triliun (sekitar 67,19% dari nasional) dan Belanja Negara sebesar Rp2.291,53 triliun (sekitar 51,31% dari nasional) (Grafik 8.3). Peran DKI sebagai pusat aktivitas ekonomi dan administrasi negara menjadikan dinamika APBN di wilayah ini penting dalam membentuk prospek permintaan domestik, terutama melalui belanja K/L dan belanja barang/jasa.

Ke depan, outlook kinerja APBN 2026 diperkirakan tetap kuat. Pendapatan diperkirakan akan ditopang oleh penurunan restitusi, membaiknya sektor utama perpajakan, serta optimalisasi kinerja program prioritas Pemerintah. Sementara itu, belanja diperkirakan didorong oleh realisasi belanja K/L seiring akselerasi belanja barang dan belanja modal. Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang dapat memengaruhi pencapaian realisasi pendapatan dan belanja, antara lain perang dagang dan kondisi geopolitik global yang berpotensi menekan PNB SDA mineral dan batubara, pemanfaatan FTA seperti



Sumber: BPKD DKI Jakarta

Grafik 8.2 Perkembangan Pagu APBD DKI Jakarta 2026



Grafik 8.3 Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta 2026

ACFTA dan RCEP yang dapat menahan penerimaan bea masuk, serta kapasitas ruang fiskal yang menyempit. Dalam rangka menjaga kualitas belanja dan efektivitas program, Pemerintah juga melakukan inovasi *spending better* melalui *reallocative budgeting* dengan mekanisme RO Khusus, yaitu dana untuk pemenuhan prioritas direktif Presiden yang hanya dapat digunakan setelah ditetapkan melalui Keputusan Menteri/ Pimpinan Lembaga dan dikonfirmasi kepada Mensesneg.

### Prospek Inflasi Jakarta

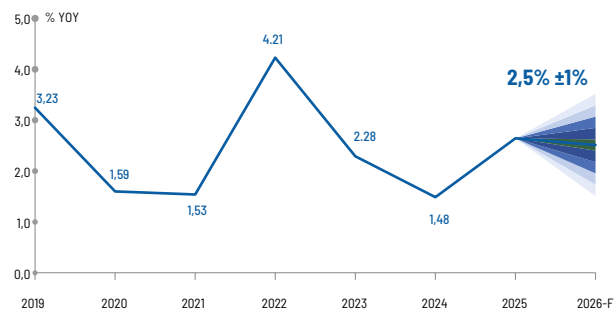
Pada 2026, inflasi Jakarta diperkirakan masih akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi yang rendah dan stabil pada kisaran  $2,5 \pm 1\%$  (yoy) (Grafik 8.4). Secara umum, kondisi ini ditopang oleh berlanjutnya berbagai kebijakan Pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan, serta penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Selain itu, konsistensi koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah turut menjaga keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan ekspektasi inflasi masyarakat. Meski demikian, tekanan inflasi pada beberapa periode tertentu tetap perlu dicermati, terutama pada fase meningkatnya permintaan musiman (HBKN) dan saat terdapat gangguan pasokan/distribusi.

Adapun risiko yang berpotensi mendorong inflasi DKI Jakarta pada 2026 antara lain:

1. **Ketegangan geopolitik** yang dapat meningkatkan volatilitas harga energi dan pangan global serta berdampak pada biaya distribusi dan harga barang tertentu.
2. **Fragmentasi perdagangan** dan ketidakpastian kebijakan global (termasuk dinamika tarif) yang berpotensi memengaruhi harga impor, biaya input, serta sentimen pelaku usaha.
3. **Risiko pasokan pangan** akibat faktor cuaca (misalnya hujan ekstrem/banjir) yang dapat mengganggu distribusi dan menekan pasokan hortikultura pada periode tertentu.
4. **Kenaikan harga pangan tertentu** seiring penyesuaian kebijakan (misalnya HPP/aturan tata niaga) dan dinamika pasokan antarwilayah.

5. **Tarif layanan publik/komponen harga yang diatur** yang berpotensi menambah tekanan inflasi pada periode penyesuaian.
6. **Persistensi harga beras/gabah** pada level relatif tinggi apabila distribusi pasokan tidak merata atau terjadi gangguan produksi.
7. **Peningkatan harga emas global** yang dapat mendorong inflasi kelompok komoditas logam mulia dan emas perhiasan.

Terkendalnya inflasi DKI Jakarta pada 2026 tetap membutuhkan penguatan peran TPID melalui strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Implementasi kebijakan dapat terus diperkuat melalui operasi pasar/pasar murah dan program pangan bersubsidi bersama BUMD Pangan, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga pasokan, penguatan komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi, serta *capacity building* TPID. Sejalan dengan itu, pelaksanaan GNPIP perlu dilanjutkan secara konsisten melalui penguatan produksi (alsintan/saprodi), fasilitasi distribusi, hilirisasi dan diversifikasi pangan, penguatan infrastruktur dan digitalisasi informasi pangan, serta koordinasi intensif melalui High Level Meeting TPID, khususnya menjelang HBKN/RAFI dan pada periode rawan gangguan pasokan.



Grafik 8.4 Proyeksi Inflasi DKI Jakarta 2026

### Faktor Risiko Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Berbagai risiko pada 2026 terutama bersumber dari ketidakpastian global yang masih tinggi, termasuk moderasi pertumbuhan ekonomi dunia, berlanjutnya tensi geopolitik, serta fragmentasi perdagangan yang dipengaruhi dinamika kebijakan dan arah tarif di Amerika Serikat. Kondisi tersebut berpotensi menahan kinerja sektor eksternal (ekspor dan sentimen investasi) dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan, sehingga dapat memengaruhi keputusan dunia usaha serta keyakinan konsumen di DKI Jakarta. Selain itu, risiko domestik juga perlu dicermati, baik yang bersifat struktural maupun siklikal. Tantangan struktural tetap bersumber dari daya dukung Jakarta, seperti keterbatasan lahan, tekanan biaya (termasuk upah), ketersediaan air, serta isu perkotaan lain seperti kemacetan, ketimpangan sosial, dan polusi udara. Sementara itu, tantangan siklikal utamanya terkait dinamika permintaan domestik, antara lain sensitivitas daya beli sebagian kelompok masyarakat, risiko PHK/penyesuaian tenaga

kerja di beberapa sektor, serta perubahan perilaku konsumsi yang cenderung lebih selektif (*value for money*) dan menahan belanja non-primer.

Sehubungan dengan itu, untuk memperkuat daya tahan perekonomian Jakarta di tengah tantangan eksternal dan domestik, sekaligus meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota global, diperlukan penguatan sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara lain melalui:

1. Menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi agar tetap berada dalam sasaran  $2,5\% \pm 1\%$ , termasuk penguatan sinergi TPID dan implementasi GNPIP untuk menjaga stabilitas pangan dan kelancaran distribusi.
2. Mendorong MICE dan event (musik, olahraga, dan kegiatan lainnya) serta penguatan *urban tourism* untuk menjaga perputaran ekonomi sektor jasa perkotaan (perdagangan, transportasi, akomodasi-mamin, dan jasa perusahaan).
3. Mendorong sumber pertumbuhan baru melalui pengembangan sektor potensial: perdagangan (*hub e-commerce*), infokom (ekosistem digital dan startup), jasa keuangan (penguatan peran Jakarta sebagai pusat layanan keuangan), pariwisata dan ekonomi kreatif (MICE dan urban), jasa pendidikan, serta jasa kesehatan; termasuk penguatan UMKM *go digital* dan *go ekspor*.
4. Memperkuat koordinasi kawasan aglomerasi Jabodetabek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, terutama terkait mobilitas, logistik, pasokan pangan, dan integrasi layanan publik.
5. Menjaga kesinambungan investasi melalui percepatan pelaksanaan proyek strategis sesuai rencana, perbaikan iklim investasi, optimalisasi sektor prioritas, serta promosi investasi termasuk penguatan kepastian dan efisiensi perizinan.
6. Mendorong digitalisasi UMKM dalam sistem pembayaran dan akses pembiayaan untuk memperluas inklusi ekonomi, memperkuat produktivitas, dan meningkatkan ketahanan usaha.
7. Mendorong digitalisasi Pemda dan masyarakat, melalui:
  - a. Penguatan inklusi dan resiliensi sistem pembayaran nontunai (terutama **QRIS**) pada sektor potensial (pariwisata, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan pasar);
  - b. Peningkatan literasi digital melalui edukasi publik dan kampanye QRIS (mis. Jakarta Kreatif Festival, Jakarta Economic Forum, QRIS Jelajah Indonesia); serta
  - c. Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) untuk mempertahankan status Pemda Digital dan meningkatkan Indeks ETPD, antara lain melalui perluasan penerimaan pajak/retribusi via QRIS, akselerasi implementasi KKPD, serta penguatan sinergi dan kolaborasi TP2DD.

Adapun tantangan pengendalian inflasi pada 2026 masih terkait dengan berbagai permasalahan struktural di Jakarta. Sebagai kota

dengan populasi yang dinamis termasuk pertambahan arus komuter dari wilayah aglomerasi (Bodetabek) pada siang hari permintaan komoditas pangan dan jasa cenderung tinggi dan fluktuatif, terutama pada periode HBKN. Di sisi pasokan, Jakarta bukan wilayah sentra produksi sehingga sebagian besar pemenuhan komoditas pangan bersumber dari daerah penghasil. Kondisi tersebut membuat inflasi Jakarta relatif sensitif terhadap gangguan pasokan, hambatan distribusi, dan volatilitas harga di daerah produsen. Selain itu, risiko cuaca ekstrem (hujan lebat/banjir) juga perlu dicermati karena dapat mengganggu distribusi dan menekan pasokan hortikultura pada periode tertentu.

Untuk itu, diperlukan strategi khusus pengendalian inflasi daerah non-produsen melalui penguatan strategi 4K, terutama pada kelompok pangan, sebagai berikut:

1. Ketersediaan pasokan: memperkuat pasokan melalui peningkatan produktivitas (mis. urban farming yang terarah pada komoditas hortikultura tertentu), perluasan dan pendalaman Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan daerah produsen yang surplus, serta penguatan koordinasi dengan TPID Bodetabek yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan Jakarta. Pada 2026, penguatan KAD perlu lebih menekankan kepastian volume, jadwal pasokan, dan mekanisme *buffer stock* menjelang HBKN.
2. Keterjangkauan harga: memperkuat stabilisasi harga melalui operasi pasar/pasar murah yang lebih terukur pada komoditas bergejolak (beras, cabai, bawang, gula, minyak goreng) bekerja sama dengan Bulog dan BUMD Pangan, disertai pemantauan harga berbasis wilayah agar intervensi lebih tepat sasaran.
3. Kelancaran distribusi: memperkuat distribusi dan logistik pangan melalui optimalisasi kanal distribusi TPID-BUMD Pangan, penguatan konektivitas pasokan dari wilayah aglomerasi, serta antisipasi hambatan distribusi pada periode cuaca ekstrem dan puncak permintaan (HBKN).
4. Komunikasi efektif: memperkuat koordinasi dan komunikasi pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi masyarakat, termasuk penyampaian informasi pasokan, harga acuan, dan jadwal intervensi pasar secara konsisten agar tidak memicu *panic buying*.

Di samping itu, pada 2026 penguatan ekosistem digital perlu semakin diarahkan sebagai instrumen pendukung stabilitas harga, bukan hanya untuk transaksi Pemda. Digitalisasi perlu diperluas pada sektor ekonomi potensial pariwisata, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pasar melalui perluasan pembayaran nontunai (QRIS), pencatatan transaksi yang lebih rapi, dan integrasi data yang mendukung pemantauan harga serta efektivitas penyaluran bantuan sosial. Penguatan digitalisasi juga relevan untuk memperbaiki tata niaga dan menekan biaya transaksi, sehingga membantu menjaga keterjangkauan harga, khususnya pada rantai pasok UMKM dan perdagangan ritel.

Pengembangan UMKM pada 2026 juga perlu diakselerasi, tidak hanya sebagai motor pertumbuhan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi. UMKM dapat diarahkan menjadi pemasok yang lebih kuat bagi sektor produktif (pariwisata, industri pengolahan, jasa perkotaan) melalui penguatan kapasitas, standarisasi produk, dan akses pembiayaan. Dalam konteks stabilisasi harga pangan, UMKM juga dapat dikembangkan untuk mendukung KAD misalnya melalui penguatan agregator, *packaging*, *cold chain* sederhana, serta distribusi *last-mile* sehingga pasokan lebih stabil dan losses menurun. Sejalan dengan itu, inovasi program UMKM digital dan UMKM ekspor tetap diperlukan untuk memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas, sekaligus memperkuat ketahanan pelaku usaha menghadapi volatilitas harga dan permintaan.

Lebih lanjut, inovasi kebijakan dan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta ekonomi hijau tetap relevan pada 2026 untuk mendorong pertumbuhan Jakarta yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memperluas sumber pembiayaan dan memperkuat daya saing, penguatan dua agenda tersebut juga dapat mendukung efisiensi rantai pasok, mendorong praktik usaha yang lebih produktif, dan pada akhirnya membantu menjaga stabilitas harga secara lebih berkelanjutan.

**Tabel 8.3** Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta 2026

JENIS RISIKO	JALUR TRANSMISI	PROBABILITAS
Pembangunan proyek strategis Pemerintah yang mundur dari timeline	Menahan kinerja investasi dan konsumsi Pemerintah	Moderat
Perlambatan ekonomi yang lebih dalam pada negara tujuan ekspor dan impor	Menahan kinerja konsumsi RT, ekspor dan investasi	Moderat
Wait and see investor sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian ekonomi	Menahan kinerja investasi	High
Daya beli yang masih tertahan serta perubahan perilaku konsumsi masyarakat	Menahan kinerja konsumsi RT	High
Fragmentasi perdagangan & eskalasi tensi geopolitik (termasuk dinamika tarif resiprokal)	Menahan kinerja ekspor	High
Gangguan logistik/produksi akibat cuaca ekstrem/banjir (periode tertentu)	Menahan distribusi barang	Moderat
Berlanjutnya harga emas global tinggi (safe haven + ketidakpastian global)	Kenaikan inflasi inti	Moderat
Kenaikan tarif layanan publik tertentu atau penyesuaian tarif yang tertunda	Kenaikan inflasi kelompok barang yang harganya diatur	Moderat
Kenaikan harga minyak dunia akibat tensi geopolitik yang berlanjut	Kenaikan inflasi kelompok barang yang harganya diatur	Moderat
Kenaikan harga beras (dipengaruhi harga gabah dan dinamika pasokan antarwilayah)	Kenaikan inflasi pangan strategis	High
Curah hujan tinggi/banjir yang mengganggu pasokan hortikultura dan distribusi pangan	Kenaikan inflasi pangan strategis	High



# Tim Penyusun

## PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB

Iwan Setiawan

## KOORDINATOR PENYUSUN

Sakti Arif Wicaksono

## TIM PENULIS

Reska Prasetya

Muhammad Iqbal Baihaqi

Haris Fatori Aldila

Dea Ananda Nabila

Gia Amadea

Fathya Annasya Yuzrin

Dhia Atika Anggraini

Reza Kianendra

Muhammad Zaydan Musyaffa

Fikri Mauli Utomo

Nur Anisa Junus

Chendy Dea Andriany

Olivia Citra Octaviani

## KONTRIBUTOR

Divisi Implementasi KEKDA Provinsi

Divisi Perizinan dan Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran

Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran

## KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 42 – Jakarta – 10410

No. Telp. 62-21-35110321



Halaman ini sengaja dikosongkan



 MANDARIN ORIENTAL



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 42  
Jakarta - 10410